BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, pemberitaan Koran Tempo pada konflik Papua lebih banyak mengarah kepada jurnalisme perang pada semua unit analisis kecuali unit analisis bahasa. *Kedua*, pemberitaan Kompas pada konflik Papua juga lebih mengarah kepada jurnalisme perang kecuali pada unit analisis tujuan pemberitaan dan unit analisis kecenderungan berita. *Ketiga*, tidak ada beda yang signifikan antara pemberitaan Koran Tempo dan Kompas, kecuali pada unit analisis kecenderungan berita. *Keempat*, secara garis besar, berdasarkan frekuensi pemberitaan SKH Kompas dalam konflik Papua lebih mengarah kepada jurnalisme damai di dua unit analisis, sedangkan Koran Tempo tidak ada unit analisis yang mengarah kepada jurnalisme damai. *Kelima*, SKH Kompas lebih menerapkan jurnalisme damai daripada Koran Tempo dalam pemberitaan konflik Papua, hal itu ditunjukkan dengan 3 unit analisis pada SKH Kompas yang mengarah kepada jurnalisme damai sedangkan Koran Tempo tidak ada. *Keenam*, Koran Tempo lebih menerapkan jurnalisme perang daripada SKH Kompas, hal itu ditunjukkan dengan 4 unit analisis pada Koran Tempo yang mengarah kepada jurnalisme perang sedangkan SKH Kompas hanya 2 unit analisis.

B. SARAN

Penelitian Jurnalisme Damai tidak cukup bila menggunakan analisis isi kuantitatif. Pasalnya, peliputan konflik merupakan peliputan yang kompleks,

mencakup tantangan jurnalis di daerah konflik juga kesejahteraan jurnalis di daerah konflik. Motif jurnalis untuk mengangkat sebuah peristiwa dalam konflik juga patut dipertimbangkan untuk memperkaya penelitian Jurnalisme Damai. Contohlah dalam kasus Konflik Papua, timbul pertanyaan mengapa Koran Tempo justru mengekspos dugaan aliran dana dari PT. Freeport ke TNI / Polri daripada mengekspos proses rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintah melalui UP4B. Pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab bila pendekatan Jurnalisme Damai tidak sebatas pada penelitian analisis isi kuantitatif, tetapi kepada analisis isi kualitatif.

Selain itu pendekatan Johan Galtung soal jurnalisme damai merupakan pendekatan yang dikemukakan di era 1970an, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi tertentu di masyarakat, yakni damai. Hanya saja peliputan jurnalisme damai tak luput dari kritikan soal nilai-nilai jurnalisme khususnya soal keberpihakan. Jurnalisme Damai mengisyaratkan agar media fokus kepada pihak lemah dalam konflik. Padahal di sisi lain, media juga berperan sebagai penyalur informasi. Di sini dibutuhkan sebuah pendekatan yang tidak memilah apakah pemberitaan damai atau perang, tetapi pendekatan yang mampu mengukur kualitas pemberitaan berdasarkan nilai-nilai jurnalisme, yakni melalui pendekatan Jurnalisme Sensitif Konflik. Pendekatan ini memilah antara *Old Method* (Jurnalisme Tradisional) dengan *New Method* (Jurnalisme Sensitif Konflik). Dimana, pendekatan jurnalisme sensitif konflik juga melihat perspektif jurnalis saat meliput konflik untuk menjawab tantangan yang dihadapi jurnalis khususnya soal tekanan pasar dan persaingan internal media yang kemudian dibandingkan dengan pemberitaan yang dihasilkan jurnalis. Dengan demikian, peneliti dapat

menemukan korelasi antara pemberitaan di media dengan perspektif jurnalis saat meliput konflik sehingga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan pendekatan jurnalisme sensitif konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Allan, Kenneth. 2007. *The Social Lens: An Invitation to Social and Sociology Theory*. Thousand Oaks: Sage Publication.

Buchanan, Cate (Ed). 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia*. Geneva: Centre for Humanitarian Dialoque.

Coppel, Charles A. 2006. *Violent and The State*. Dalam bunga rampai *Violent Conflict in Indonesia.* New York:Routledge.

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana.

Harsono, Andreas dan Budi Setiyono (Ed). 2008. *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*. Jakarta: KPG.

Ishak, Otto Syamsuddin, dkk. 2012. *Oase Gagasan Papua Damai*. Jakarta: Imparsial.

Keller, Anett. 2009. *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional*. Jakarta: FES Indonesia Office.

Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers

Mc. Goldrick, Annabel dan Lynch J. 2001. *Jurnalisme damai: Bagaimana melakukannya?* Jakarta: LSPP dan British Council.

Neuman, William Lawrence. 2000. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches,4th,Ed*. Melbourne: Longman.

Salim, Agus. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Setriati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan: Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Setyarso, Budi. 2011. *Cerita di Balik Dapur Tempo 1971-2011*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Sirait, P. Hasudungan. 2007. *Jurnalisme Sadar Konflik: Meliput Konflik dengan Perspektif Damai*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Stanley. 2006. *The Media As A Control And As A Spur For Acts Of Violence*. Dalam bunga rampai *Violent Conflict in Indonesia*. New York: Routledge.

Sularto, St. 2011. *Syukur Tiada Akhir: Jejak Langkah Jakob Oetama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sularto, St (Ed). 2001. *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Sujito, Arie. 2009. *Meretas Perdamaian di Tanah Papua*. Yogyakarta: IRE.

Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalisme Damai: Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Yogyakarta: P_Idea

Wimmer, R.D. dan Dominick, J.R. 2000. *Mass Media Research: An Introduction*. Belmont,CA: Wadsworth Publishing Company

Paper dan Makalah

Dharmawan, Arya Hadi. 2006. *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya*. Dalam makalah seminar PERAGI di Pontianak.

Koop, Antonia. 2012. *Teknik dan Penggunaan Jurnalisme Sensitif Konflik untuk Memperkuat Nilai Tradisional Jurnalisme*. Makassar: PECOJON (The Peace And Conflict Journalism Network) dan GIZ (International Institut for Journalism). Dalam makalah diskusi PECOJON.

Marzuki, Suparman. 2008. *Konflik Tanah di Indonesia*. Dalam makalah workshop hasil penelitian di tiga wilayah di Lombok.

Morris, Pamela dan Suman Lee. 2005. *Culture and Advertising: An Empirical Study of Cultural Dimensions on The Characteristic of Advertisements*. Paper untuk International Communication Association.

Jurnal

Lee, Seow Ting dan Crispin c. Maslog. 2005. *War or Peace Journalism? Asian Newspaper Coverage of Conflict*. Journal of Communication Edisi Juni.

Macnamara, Jim. 2005. *Media Content Analysis: Its Uses, Benefits and Best Practice Methodology*. Dalam *Asia Pacific Public Relation Journal* edisi 6 (1)

Nughoro dalam Eka Nada Shofa Alkhajar, Anastasia Lilin Yuliantina, Bagus Sandi Tratama. 2011. *Komunikasi Politik Elit Nahdlatul Ulama Di Media*. Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. www.student-research.umm.ac.id/index.php/pkmi/article/view/7964/539

Penelitian

Adinugroho, Adrianus Satrio. 2011. *Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Masalah Klaim Malaysia atas Karya Seni Budaya Indonesia tahun 2009*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

De Regt, Ingrit. 2009. *Sensational News Reporting And Its Effect On Corporate Reputation: Harming The Innocent.* Skripsi: Universitas Twente

Dugis, Noveina Silviyani. 2008. *Pers dan Konflik Perang Suku di Timika*. Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Widjojo, Muridan S., Adriana Elisabeth, Amirudin, Cahyo Pamungkas, dan Rosita Dewi. 2008. *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present and Secure The Future.* Jakarta: The Indonesian Institut of Science (LIPI)

Wijayanti, Chory Angela. 2009. *Jurnalisme Damai dalam Berita Televisi: Analisis Isi Pemberitaan Konflik Israel-Palestina di Liputan 6 Petang SCTV*. Skripsi: Universitas Petra Surabaya

Artikel Online

Alimah. 2008. *Jurnalisme Damai Menciptakan Harmony di Tengah Konflik*. http://www.fahmina.or.id/index.php/artikel-a-berita/berita/452-jurnalisme-damai-menciptakan-harmoni-di-tengah-konflik.html Tanggal Akses: 11 Februari 2013

BBC edisi 26 Oktober 2011. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/10/111026_freeportshipment.shtml Tanggal akses: 14 September 2012

Budiono, M. Kabul. 2012. *Jurnalisme Damai dalam Konflik Sosial*. http://media.kompasiana.com/mainstream-

media/2012/11/01/jurnalisme-damai-dalam-konflik-sosial-505154.html Tanggal Akses: 11 Februari 2013

Fotaleno, Fino Fahmy. 2012. *Mengenal Pentingnya Peran Jurnalis Atas Konflik: Ada Juga 'Hiu' dan 'Macan'*. Artikel Online: http://finowitzki88.blogspot.com/2012/10/dari-pelatihan-jurnalis-sensitif.html?zx=b4383962353bb75f Tanggal Akses: 13 Maret 2013

Galtung, Johan. 2005. *The Missing On Conflict and Peace And The Middle East.* Dalam Database Artikel *Transcend*. https://www.transcend.org/files/article570.html Tanggal Akses: 16 September 2012

Jurnas edisi 31 Oktober 2011. http://www.jurnas.com/news/43675/Soal_Dana_Freeport,_Polri_Persilakan_KPK_Ikut_Periksa/1/Nasional/Keamanan Tanggal akses: 14 September 2012

Kompas edisi 11 Oktober 2011, http://nasional.kompas.com/read/2011/10/11/10582314/Amnesty.Internasional.Usut.Tuntas.Tewasnya.Buruh.Freeport?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign= Tanggal akses: 14 September 2012

Kompas edisi 19 Oktober 2011. http://nasional.kompas.com/read/2011/10/19/14395640/Aparat.Bubarkan.Kongres.Rakyat.Papua.3 Tanggal akses: 14 September 2012

Kompas edisi 1 November 2011. *Bangun Komunikasi Efektif dan Konstruktif*. Artikel Online: http://nasional.kompas.com/read/2011/11/01/01403422/twitter.com Tanggal Akses: 13 Maret 2013

MetroTV News edisi 13 Oktober 2011. http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/10/13/137721/Aksi-Mogok-Karyawan-PT-Freeport-Negara. Tanggal akses: 14 September 2012

Tempo edisi 21 Oktober 2011. http://www.tempo.co/read/news/2011/10/21/078362534/Presiden-Menilai-Kongres-Papua-Makar Tanggal akses 14 September 2012

Tempo edisi 15 November 2011. http://www.tempo.co/read/news/2011/11/15/180366660/Mahasiswa

-Papua-di-Yogyakarta-Mengaku-Diintimidasi Tanggal akses: 14 September 2012

Vivanews edisi 22 Oktober 2011. http://us.nasional.news.viva.co.id/news/read/257885-paman-roy-suryo-dimakamkan-siang-ini Tanggal akses: 14 September 2012

LAMPIRAN

UJI RELIABILITAS

1. Koran Tempo

a. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Tujuan Pemberitaan Koran Tempo

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Tujuan Pemberitaan

	N1	N2	M	N2	M
Berorientasi Perdamaian	3	2	2	4	3
Berorientasi Perang	9	10	9	8	8
TOTAL	12	12	11	12	11

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

$= \frac{2\,(11)}{12+12}$

$= \frac{22}{24}$

= 0,9167

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(11)}{12+12}$

$= \frac{22}{24}$

= 0,9167

b. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Penyajian Fakta Koran Tempo

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Penyajian Fakta

	N1	N2	M	N2	M
Berorientasi Kebenaran	4	4	3	5	3
Berorientasi Propaganda	8	8	7	7	6
TOTAL	12	12	10	12	9

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(10)}{12+12}$

$= \frac{20}{24}$

= 0,8333

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(9)}{12+12}$

$= \frac{18}{24}$

= 0,75

c. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Keberpihakan Koran Tempo

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Keberpihakan

	N1	N2	M	N2	M
Berorientasi Rakyat	7	4	3	6	5
Berorientasi Elit	5	8	8	6	4
TOTAL	12	12	11	12	9

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(11)}{\mathbf{12+12}}$

$= \frac{22}{24}$

= 0,9167

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(9)}{12+12}$

$= \frac{18}{24}$

= 0,75

d. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Kecenderungan Berita Koran Tempo

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Kecenderungan Berita

	N1	N2	M	N2	M
Berorientasi Solusi	3	1	1	4	3
Berorientasi Kemenangan	9	11	9	8	8
TOTAL	12	12	10	12	11

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(10)}{12+12}$

$= \frac{20}{24}$

= 0,8333

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(11)}{12+12}$

$= \frac{22}{24}$

= 0,9167

e. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Bahasa Koran Tempo

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Bahasa

	N1	N2	M	N2	M
Jurnalisme Damai	4	5	3	3	2
Jurnalisme Perang	8	7	6	9	7
TOTAL	12	12	9	12	9

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(9)}{12+12}$

$= \frac{18}{24}$

= 0,75

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(9)}{12+12}$

$= \frac{18}{24}$

= 0,75

2. Kompas

a. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Tujuan Pemberitaan Kompas

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Tujuan Pemberitaan

	N1	N2	M	N2	M
Berorientasi Perdamaian	3	3	2	4	3
Berorientasi Perang	8	8	7	7	7
TOTAL	11	11	9	11	10

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(9)}{11+11}$

$= \frac{18}{22}$

= 0,81

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(10)}{11+11}$

$= \frac{20}{22}$

= 0,909

b. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Penyajian Fakta Kompas

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Penyajian Fakta

	N1	N2	M	N2	M
Berorientasi Kebenaran	7	6	6	6	5
Berorientasi Propaganda	4	5	4	5	3
TOTAL	11	11	10	11	8

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(10)}{11+11}$

$= \frac{20}{22}$

= 0,909

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(8)}{11+11}$

$= \frac{16}{22}$

= 0,727

c. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Keberpihakan Kompas

Hasil *Coefisien Reabilty* Berdasarkan Keberpihakan

	N1	N2	M	N2	M
Berorientasi Rakyat	6	4	4	5	4
Berorientasi Elit	5	7	5	6	4
TOTAL	11	11	9	11	8

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(9)}{11+11}$

$= \frac{18}{22}$

= 0,81

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(8)}{11+11}$

$= \frac{16}{22}$

= 0,727

d. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Kecenderungan Berita Kompas

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Kecenderungan Berita

	N1	N2	M	N2	M
Berorientasi Solusi	5	3	3	5	4
Berorientasi Kemenangan	6	8	6	6	6
TOTAL	11	11	9	11	10

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(9)}{11+11}$

$= \frac{18}{22}$

= 0,81

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(10)}{11+11}$

$= \frac{20}{22}$

= 0,909

e. *Coefisien Reliability* Unit Analisis Bahasa Kompas

Hasil *Coefisien Reliability* Berdasarkan Bahasa

	N1	N2	M	N2	M
Jurnalisme Damai	3	4	2	5	3
Jurnalisme Perang	8	7	7	6	6
TOTAL	11	11	9	11	9

Sumber: Hasil Olah *Coefisien Reliability* Peneliti dengan *Encoder*

CR peneliti dengan pengkoding 1:

$= \frac{2\,(9)}{11+11}$

$= \frac{18}{22}$

= 0,81

CR peneliti dengan pengkoding 2:

$= \frac{2\,(9)}{11+11}$

$= \frac{18}{22}$

= 0,81

Koran Tempo

No.	Judul Berita	Unit analisis									
		Tujuan Pemberitaan		Penyajian Fakta		Keberpihakan		Kecenderungan Berita		Bahasa	
		Berorientasi Perdamaian / Jurnalisme Damai	Berorientasi Perang / Jurnalisme Perang	Berorientasi Kebenaran / Jurnalisme Damai	Berorientasi Propaganda / Jurnalisme Perang	Berorientasi Rakyat / Jurnalisme Damai	Berorientasi Elit / Jurnalisme Perang	Berorientasi Solusi / Jurnalisme Damai	Berorientasi Kemenangan / Jurnalisme Perang	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1	Ribuan Pekerja Mogok, Freeport Lumpuh	1			1		1		1	1	
2	Pemerintah Desak Freeport Renegosiasi Kontrak	1		1			1		1	1	
3	Freeport Tolak Kenaikan Upah 25 Persen		1		1		1		1	1	
4	Bentrok di Freeport Satu Orang Tewas Tertembak		1		1		1		1		1
5	Amnesty Internasional Minta Kasus Freeport Diusut		1		1		1		1		1
6	Walhi Minta Presiden Evaluasi Kepala Polri		1		1	1			1		1
7	Polisi Kirim Pasukan Tambahan ke Papua		1		1		1		1		1
8	Puncak Jaya Masih Siaga I		1	1			1		1		1
9	Amerika Dukung Solusi Adil di Freeport	1		1			1	1		1	
10	Freeport Sulit Penuhi Kontrak Jual-Beli		1		1		1		1		1
11	Dana Freeport Ancam Netralitas Aparat	1		1			1		1	1	
12	Polri Diminta Bertanggung Jawab Atas Dana Freeport	1			1		1	1		1	
13	Pekerja Freeport Enggan Berdialog Lagi	1		1			1	1			1
14	Pemerintah Mengevaluasi Uang Keamanan dari Freeport	1			1		1	1		1	
15	KPK Diminta Usut Duit Freeport ke Polri	1		1			1		1	1	
16	Sumber Dana Polri Hanya Dari Negara	1		1			1	1		1	
17	Buruh Freeport Tak Takut Ultimatum Polisi		1		1		1		1		1
18	Kepolisian Diminta Transparan Soal Dana Freeport		1	1			1		1	1	
19	Pembubaran Paksa Demo Freeport Bisa Picu Bentrokan Baru	1		1		1			1		1
20	Freeport Tawarkan Kenaikan Upah 30 Persen	1		1		1		1		1	
21	Freeport Mengaku Sukarela Kucurkan Uang Keamanan	1		1		1			1	1	
22	Kegiatan Produksi Freeport Menurun Drastis		1		1		1		1	1	
23	Polisi Kirim Tim Pengawas Usut Duit Freeport		1		1		1		1	1	
24	Renegosiasi Kontrak Freeport Setelah Konflik Gaji Selesai	1		1			1	1		1	
25	Polisi Siap diperiksa KPK Soal Duit Freeport		1		1		1		1	1	
26	Polisi Kesulitan Tangkap Pelaku di Hutan Papua		1		1		1		1		1
27	Polisi Tertembak di Area Freeport		1		1		1		1		1
28	Amnesty: Tindak Lanjuti Temuan Komnas di Papua		1	1			1	1			1
29	Presiden Kerahkan Menteri ke Papua	1		1			1	1		1	
30	Amerika Serikat Cermati Masalah HAM di Papua	1			1		1	1			1
31	Warga Jayapura Berdemo Tuntut Referendum	1		1		1		1		1	
32	30 Polisi Papua Diperiksa		1	1			1		1	1	
33	Mahasiswa Papua di Yogyakarta Diintimidasi		1	1		1		1			1
34	Sultan Minta Mahasiswa Papua Tak Pulang Kampung		1	1		1		1			1
35	KWI Desak Pemerintah Kurangi TNI Polisi di Papua	1		1		1		1			1
36	Kontrak Karya Freeport Bukan Lex-Specialist	1		1			1		1	1	
37	SBY Jamin Akuntabilitas Soal Papua	1			1		1		1	1	
38	Mantan Kapolresta Dikenai Sanksi		1	1			1		1	1	
39	Siapa Bilang Kami Takut	1			1		1		1	1	
40	Kami Ingin Perundingan Dilanjutkan	1			1		1		1	1	
41	Pemerintah Bantah Ada 70 Tentara Amerika di Freeport		1		1		1	1		1	
42	Sanksi untuk Polisi dalam Kasus Papua Dikritik		1	1			1	1		1	
43	Aktivis Mahasiswa Papua Diduga Tewas Diracun		1		1	1			1		1
44	OPM Berjanji Tak Bahayakan Warga Sipil		1		1		1		1	1	
45	Polisi Buru Kelompok Bersenjata di Puncak Jaya		1	1			1		1		1
46	Pemerintah Didesak Bebaskan Tahanan Papua	1			1	1		1			1
47	Pemerintah Evaluasi Otonomi Khusus Papua	1			1		1		1	1	
48	Lagi, Warga Papua demo Tuntut Referendum		1		1	1		1		1	
49	Istana Tolak Temuan Komnas HAM		1	1		1			1		1
50	Peserta Kongres Papua Disiksa dan Ditembak		1		1	1			1		1
51	Polisi Serbu OPM Puluhan Orang Tertembak		1		1		1		1	1	
52	Anggota Brimob Ditembak di Papua		1		1		1		1		1
53	Ulang Tahun Papua diwarnai Insiden penembakan		1		1		1		1		1
54	Stop Kekerasan di Papua	1		1		1		1		1	
55	Korban Penembakan dimakamkan di Abepura		1		1		1		1		1
56	Pekerja Freeport Tewas Tiga Polisi Terluka		1		1	1			1		1
57	Pasca Penembakan Warga Takut	1		1		1		1			1
58	Penembakan Terus Terjadi di Papua		1		1	1			1		1
59	Pengiriman Pasukan ke Papua Dikritik	1			1		1	1		1	
60	TNI dan Polisi Diduga Langgar HAM di Papua		1	1		1			1	1	
61	KPK Minta BPK Mengaudit Uang Pengaman Freeport	1		1			1	1		1	
62	Menanti Negosiasi Royalti	1			1		1	1		1	
63	OPM Berjanji Tak akan Kibarkan Bintang Kejora	1		1		1		1		1	
64	Ribuan Mahasiswa Papua Pulang Kampung	1		1		1		1			1
65	Diintimidasi Aktivis Solidaritas Papua Lapor ke LBH		1	1		1			1		1
66	Dua Lagi Anggota Brimob Tewas di Papua		1		1		1		1		1
67	Pekerja Bakal Tagih Janji-Janji Freeport	1		1		1			1		1
68	Kongres Rakyat Papua Digelar	1		1		1		1		1	
69	Kapolri: Penanganan Papua Sesuai Prosedur		1		1		1		1		1
70	Komnas HAM: 96 Warga Dianiaya Pasca Kongres Rakyat Papua		1		1	1			1		1
71	Pemerintah Didesak Perbaiki Papua	1			1		1	1			1
72	Heli Freeport ditembak Satu Terluka		1		1		1		1		1
73	Tersandung Upah Buruh	1		1			1		1		1
74	Separatis Papua Diajak Berdialog	1			1		1	1			1
	JUMLAH	35	39	34	40	24	50	28	46	37	37

SKH Kompas

No.	Judul Berita	Unit analisis									
		Tujuan Pemberitaan		Penyajian Fakta		Keberpihakan		Kecenderungan Berita		Bahasa	
		Berorientasi Perdamaian / Jurnalisme Damai	Berorientasi Perang / Jurnalisme Perang	Berorientasi Kebenaran / Jurnalisme Damai	Berorientasi Propaganda / Jurnalisme Perang	Berorientasi Rakyat / Jurnalisme Damai	Berorientasi Elit / Jurnalisme Perang	Berorientasi Solusi / Jurnalisme Damai	Berorientasi Kemenangan / Jurnalisme Perang	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1	Pekerja Freeport Mogok Kerja	1		1		1		1		1	
2	Pekerja Freeport Keluhkan Intimidasi	1		1		1		1			1
3	Menteri ESDM Minta Pekerja Kembali, Rugi 8,2Juta Dollar		1		1		1		1	1	
4	Aktifitas Kerja PT Freeport Masih Terbatas	1		1		1			1	1	
5	Produksi Freeport Stop	1		1		1		1		1	
6	Pekerja Konsolidasi	1		1		1		1		1	
7	Selesaikan Aksi Mogok Karyawan PT. Freeport		1		1		1	1		1	
8	Freeport Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penembakan		1		1		1		1		1
9	Freeport Pertimbangkan Hentikan Operasi		1		1		1		1		1
10	Cepat Tangani Kasus Penembakan di Freeport	1		1		1		1			1
11	Kapasitas Produksi Freeport 50 persen	1			1		1		1	1	
12	Lebih dari 200 Peserta Ditangkap Aparat		1	1			1		1		1
13	Tiga Orang Tewas Ditembak di Timika		1		1		1		1		1
14	Hentikan Kekerasan di Papua		1		1		1	1			1
15	Freeport “Force Majeure”	1			1		1		1	1	
16	SBY: Tak Ada Operasi Militer	1		1			1	1			1
17	Tak Terkait Separatisme		1	1			1	1			1
18	Australia Tak Mendukung Gerakan di Papua		1		1		1		1		1
19	Dialog di Tingkat Bawah	1		1			1	1			1
20	Bambang Dharmono Pimpin Unit Papua	1		1			1	1		1	
21	Berbagai Kekerasan Belum Akan Berhenti		1		1		1		1		1
22	Polisi Ultimatum Pekerja Freeport	1		1			1		1	1	
23	Bangun Komunikasi Efektif dan Konstruktif	1			1		1	1		1	
24	Perusakan Membuat Freeport Memburuk	1			1		1		1		1
25	Pemerintah Abaikan UU Otonomi Khusus	1		1		1		1		1	
26	Otonomi Khusus Tak Jawab Persoalan	1		1		1		1		1	
27	Jalan Kekerasan vs Jalan Damai		1		1	1		1			1
28	Dari Otsus terbitlah UP4B	1			1		1	1		1	
29	Berdialog Soal yang Substantial	1			1		1	1		1	
30	Terpasung Stigma		1	1		1			1		1
31	Presiden Harus Percepat Dialog Papua-Jakarta	1		1		1		1		1	
32	Upaya Pemerintah Tak Menjawab Kebutuhan	1		1		1		1			1
33	Libatkan Masyarakat: Implementasi dan Penerapan Otsus Tak Jelas	1		1		1		1		1	
34	Istana Sulit Atasi Masalah di Papua		1		1		1		1		1
35	Presiden Akui Otonomi Khusus Kurang Efektif	1			1	1		1		1	
36	Dorong Integrasi Sosial	1			1		1	1		1	
37	Gunakan Pendekatan Non-Kekerasan	1			1	1		1		1	
38	Mahasiswa Merasa Terancam dan Terintimidasi		1		1	1			1		1
39	Pekerja Kontraktor PT Freeport Tewas		1		1	1			1	1	
40	Pemerintah Mulai Berdialog	1		1			1	1		1	
41	Penembakan Terjadi Lagi di Kawasan Freeport		1		1		1		1		1
42	Satu Orang Lagi Tewas		1		1		1		1		1
43	Bangun Saling Percaya	1		1		1		1		1	
44	Hentikan Kekerasan di Tanah Papua	1		1			1	1		1	
45	Pipa Dijarah, Freeport Berhenti Produksi	1			1		1		1		1
46	Rakyat Papua Ingin Didengar		1	1		1		1			1
47	Pipa Masih Digergaji	1			1		1	1		1	
48	Kelam di Balik Kemilau Emas	1		1		1		1		1	
49	Angkat Budaya Papua	1		1		1		1		1	
50	Aparat Keamanan Diminta Proporsional	1			1	1		1		1	
51	Pemerintah Berikan Apresiasi	1			1		1	1		1	
52	Dua Anggota Brimob Tewas Tertembak		1		1		1		1		1
53	Libatkan Tokoh Warga		1		1	1		1			1
54	Amunisi Tak Berasal dari Polri dan TNI		1		1		1	1			1
55	Hari Ini Pemerintah Kembali Gelar Dialog	1		1		1		1			1
56	Mendagri: Hilangkan Pikiran tentang Referendum	1			1		1	1		1	
57	Aksi Mogok Berakhir	1		1		1		1		1	
58	Saat Menepati Janji-Janji	1		1		1		1		1	
59	Posko Brimob Ditembaki		1		1		1		1		1
60	Situasi di Papua Memanas		1	1			1	1			1
61	Pengejar Belum Menemukan Pelaku		1		1	1			1		1
62	Polisi Tetapkan Enam Tersangka		1		1		1		1		1
63	Kondisi Timika Berangsur Pulih	1		1		1			1	1	
64	Tiga Tewas Ditembak		1	1			1		1		1
65	Satu Tewas di Freeport		1	1			1	1			1
66	Reformasi Dibayangi Tindakan Kekerasan	1		1		1		1		1	
67	Belasan Warga Papua Mengaku Dianiaya Polisi		1		1	1			1		1
68	Penembakan Belum Terungkap		1		1		1	1			1
69	Hukum Harus Tegak	1			1		1	1			1
70	Presiden Harus Turun Tangan	1			1	1		1			1
71	Aparat Agar serius Lindungi Warga		1		1		1		1		1
72	Tak Ada Intervensi Asing		1		1		1		1		1
	JUMLAH	41	31	32	40	31	41	44	28	34	38

Coder hendra
Koran Tempo-Uji Realitabilitas

No	Judul Berita	Unit analisis									
		Tujuan Pemberitaan		Penyajian Fakta		Keberpihakan		Kecenderungan Berita		Bahasa	
		Berorientasi Perdamaian / Jurnalisme Damai	Berorientasi Perang / Jurnalisme Perang	Berorientasi Kebenaran / Jurnalisme Damai	Berorientasi Propaganda / Jurnalisme Perang	Berorientasi Rakyat / Jurnalisme Damai	Berorientasi Elit / Jurnalisme Perang	Berorientasi Solusi / Jurnalisme Damai	Berorientasi Kemenangan / Jurnalisme Perang	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1	Istana Tolak Temuan Komnas HAM		1	1		1			1		1
2	Peserta Kongres Papua Disiksa dan Ditembak		1		1	1			1		1
3	Polisi Serbu OPM Puluhan Orang Tertembak		1		1		1		1	1	
4	Anggota Brimob Ditembak di Papua		1		1		1		1		1
5	Ulang Tahun Papua diwarnai Insiden penembakan		1		1		1		1		1
6	Stop Kekerasan di Papua	1		1		1		1		1	
7	Korban Penembakan dimakamkan di Abepura		1		1		1		1		1
8	Pekerja Freeport Tewas Tiga Polisi Terluka		1		1	1			1		1
9	Pasca Penembakan Warga Takut	1		1		1		1			1
10	Penembakan Terus Terjadi di Papua		1		1	1			1		1
11	Pengiriman Pasukan ke Papua Dikritik	1			1		1	1		1	
12	TNI dan Polisi Diduga Langgar HAM di Papua		1	1		1			1	1	
JUMLAH		**3**	**9**	**4**	**8**	**7**	**5**	**3**	**9**	**4**	**8**

Coder Hendra

Kompas- Uji Realitabilitas

No	Judul Berita	Unit analisis									
		Tujuan Pemberitaan		Penyajian Fakta		Keberpihakan		Kecenderungan Berita		Bahasa	
		Berorientasi Perdamaian / Jurnalisme Damai	Berorientasi Perang / Jurnalisme Perang	Berorientasi Kebenaran / Jurnalisme Damai	Berorientasi Propaganda / Jurnalisme Perang	Berorientasi Rakyat / Jurnalisme Damai	Berorientasi Elit / Jurnalisme Perang	Berorientasi Solusi / Jurnalisme Damai	Berorientasi Kemenangan / Jurnalisme Perang	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1	Saat Menepati Janji-Janji	1		1		1		1		1	
2	Posko Brimob Ditembaki		1		1		1		1		1
3	Situasi di Papua Memanas		1	1			1	1			1
4	Pengejar Belum Menemukan Pelaku		1		1	1			1		1
5	Polisi Tetapkan Enam Tersangka		1		1		1		1		1
6	Kondisi Timika Berangsur Pulih	1		1		1			1	1	
7	Tiga Tewas Ditembak		1	1			1		1		1
8	Satu Tewas di Freeport		1	1			1	1			1
9	Reformasi Dibayangi Tindakan Kekerasan	1		1		1		1		1	
10	Belasan Warga Papua Mengaku Dianiaya Polisi		1		1	1			1		1
11	Rakyat Papua Ingin Didengar		1	1		1		1			1
JUMLAH		**3**	**8**	**7**	**4**	**6**	**5**	**5**	**6**	**3**	**8**

Coder Hendy Aditya

Kompas-Uji Realitabilitas

No	Judul Berita	Unit analisis									
		Tujuan Pemberitaan		Penyajian Fakta		Keberpihakan		Kecenderungan Berita		Bahasa	
		Berorientasi Perdamaian / Jurnalisme Damai	Berorientasi Perang / Jurnalisme Perang	Berorientasi Kebenaran / Jurnalisme Damai	Berorientasi Propaganda / Jurnalisme Perang	Berorientasi Rakyat / Jurnalisme Damai	Berorientasi Elit / Jurnalisme Perang	Berorientasi Solusi / Jurnalisme Damai	Berorientasi Kemenangan / Jurnalisme Perang	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1	Saat Menepati Janji-Janji	1		1		1		1		1	
2	Posko Brimob Ditembaki		1		1		1		1		1
3	Situasi di Papua Memanas		1		1		1	1			1
4	Pengejar Belum Menemukan Pelaku		1		1		1		1		1
5	Polisi Tetapkan Enam Tersangka		1		1		1		1		1
6	Kondisi Timika Berangsur Pulih	1		1			1		1	1	
7	Tiga Tewas Ditembak		1	1			1		1	1	
8	Satu Tewas di Freeport		1	1			1		1		1
9	Reformasi Dibayangi Tindakan Kekerasan		1	1		1			1		1
10	Belasan Warga Papua Mengaku Dianiaya Polisi		1		1	1			1		1
11	Rakyat Papua Ingin Didengar	1		1		1		1		1	
JUMLAH		**3**	**8**	**6**	**5**	**4**	**7**	**3**	**8**	**4**	**7**

Coder Hendy Aditya

Koran Tempo-Uji Realitabilitas

No	Judul Berita	Unit analisis									
		Tujuan Pemberitaan		Penyajian Fakta		Keberpihakan		Kecenderungan Berita		Bahasa	
		Berorientasi Perdamaian / Jurnalisme Damai	Berorientasi Perang / Jurnalisme Perang	Berorientasi Kebenaran / Jurnalisme Damai	Berorientasi Propaganda / Jurnalisme Perang	Berorientasi Rakyat / Jurnalisme Damai	Berorientasi Elit / Jurnalisme Perang	Berorientasi Solusi / Jurnalisme Damai	Berorientasi Kemenangan / Jurnalisme Perang	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1	Istana Tolak Temuan Komnas HAM		1		1		1		1		1
2	Peserta Kongres Papua Disiksa dan Ditembak		1	1		1			1		1
3	Polisi Serbu OPM Puluhan Orang Tertembak		1		1		1		1	1	
4	Anggota Brimob Ditembak di Papua		1		1		1		1		1
5	Ulang Tahun Papua diwarnai Insiden penembakan		1		1		1		1	1	
6	Stop Kekerasan di Papua	1		1		1		1			1
7	Korban Penembakan dimakamkan di Abepura		1		1		1		1		1
8	Pekerja Freeport Tewas Tiga Polisi Terluka		1		1		1		1		1
9	Pasca Penembakan Warga Takut	1		1		1			1	1	
10	Penembakan Terus Terjadi di Papua		1		1		1		1		1
11	Pengiriman Pasukan ke Papua Dikritik		1		1		1		1	1	
12	TNI dan Polisi Diduga Langgar HAM di Papua		1	1		1			1	1	
JUMLAH		**2**	**10**	**4**	**8**	**4**	**8**	**1**	**11**	**5**	**7**

Coder Pius Erlangga

Kompas-Uji Realitabilitas

No	Judul Berita	Unit analisis									
		Tujuan Pemberitaan		Penyajian Fakta		Keberpihakan		Kecenderungan Berita		Bahasa	
		Berorientasi Perdamaian / Jurnalisme Damai	Berorientasi Perang / Jurnalisme Perang	Berorientasi Kebenaran / Jurnalisme Damai	Berorientasi Propaganda / Jurnalisme Perang	Berorientasi Rakyat / Jurnalisme Damai	Berorientasi Elit / Jurnalisme Perang	Berorientasi Solusi / Jurnalisme Damai	Berorientasi Kemenangan / Jurnalisme Perang	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1	Saat Menepati Janji-Janji	1		1		1		1		1	
2	Posko Brimob Ditembaki		1		1		1		1		1
3	Situasi di Papua Memanas		1	1			1	1			1
4	Pengejar Belum Menemukan Pelaku		1		1	1			1		1
5	Polisi Tetapkan Enam Tersangka	1		1		1			1	1	
6	Kondisi Timika Berangsur Pulih	1		1			1	1		1	
7	Tiga Tewas Ditembak		1		1		1		1		1
8	Satu Tewas di Freeport		1	1			1	1		1	
9	Reformasi Dibayangi Tindakan Kekerasan	1		1		1			1	1	
10	Belasan Warga Papua Mengaku Dianiaya Polisi		1		1	1			1		1
11	Rakyat Papua Ingin Didengar		1		1		1	1			1
JUMLAH		**4**	**7**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**6**	**5**	**6**

Coder Pius Erlangga

Koran Tempo - Uji Realitabilitas

No	Judul Berita	Unit analisis									
		Tujuan Pemberitaan		Penyajian Fakta		Keberpihakan		Kecenderungan Berita		Bahasa	
		Berorientasi Perdamaian / Jurnalisme Damai	Berorientasi Perang / Jurnalisme Perang	Berorientasi Kebenaran / Jurnalisme Damai	Berorientasi Propaganda / Jurnalisme Perang	Berorientasi Rakyat / Jurnalisme Damai	Berorientasi Elit / Jurnalisme Perang	Berorientasi Solusi / Jurnalisme Damai	Berorientasi Kemenangan / Jurnalisme Perang	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1	Istana Tolak Temuan Komnas HAM	1		1		1		1		1	
2	Peserta Kongres Papua Disiksa dan Ditembak		1		1		1		1		1
3	Polisi Serbu OPM Puluhan Orang Tertembak		1		1		1		1		1
4	Anggota Brimob Ditembak di Papua		1		1		1		1		1
5	Ulang Tahun Papua diwarnai Insiden penembakan		1		1		1		1		1
6	Stop Kekerasan di Papua	1		1		1		1		1	
7	Korban Penembakan dimakamkan di Abepura		1		1	1			1		1
8	Pekerja Freeport Tewas Tiga Polisi Terluka		1	1		1			1		1
9	Pasca Penembakan Warga Takut	1		1		1		1			1
10	Penembakan Terus Terjadi di Papua		1		1	1			1		1
11	Pengiriman Pasukan ke Papua Dikritik	1		1			1	1		1	
12	TNI dan Polisi Diduga Langgar HAM di Papua		1		1		1		1		1
JUMLAH		**4**	**8**	**5**	**7**	**6**	**6**	**4**	**8**	**3**	**9**

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Aksi Mogok Berakhir * Freeport Indonesia dan Serikat Pekerja Sepakati Kenaikan Upah

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 15 Dec 2011 Halaman: **15** Penulis: **Evy; Ben** Ukuran: **2496** Pengindex: **pik.ris**

Aksi Mogok Berakhir

Freeport Indonesia dan Serikat Pekerja Sepakati Kenaikan Upah

JAKARTA, KOMPAS — Manajemen PT Freeport Indonesia dan serikat pekerja perusahaan itu akhirnya mencapai kesepakatan soal besaran kenaikan upah dalam dua tahun ke depan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, **mogok** kerja karyawan perusahaan pertambangan itu **berakhir**.

Kesepakatan antara manajemen PT Freeport Indonesia (FI) dan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT FI itu akan dimasukkan ke perjanjian kerja bersama untuk dua tahun ke depan.

Dengan demikian, **mogok** kerja yang dimulai pada 15 September 2011 atau sekitar tiga bulan terakhir itu **berakhir**. Para pekerja akan melapor ke posisi kerja masing-masing dalam beberapa hari mendatang.

Sebagaimana diungkapkan Juru Bicara PT FI Ramdhani Sirait, Kamis (14/12), di Jakarta, berdasarkan persyaratan yang disepakati, PT FI meningkatkan upah dasar 24 persen pada tahun pertama dan 13 persen pada tahun kedua (setara dengan kenaikan 40 persen selama dua tahun). Selain itu, PT FI juga memberikan peningkatan manfaat, termasuk peningkatan tunjangan perumahan, bantuan pendidikan, dan tabungan pensiun.

"Untuk tujuan kemanusiaan, PT FI juga setuju membayar satu kali bonus penandatanganan, setara tiga bulan upah dasar. Para pihak juga sepakat negosiasi upah di masa depan didasarkan pada biaya hidup dan daya saing upah di Indonesia," katanya.

Realisasi kenaikan

Secara terpisah, juru bicara SPSI PT FI, Juli Parorongan, menyatakan, manajemen dan SPSI PT FI telah menandatangani beberapa kesepakatan. Jadi, realisasi kenaikan gaji 24 persen berlaku 1 Oktober 2011-1 Oktober 2012. Selanjutnya, kenaikan gaji 13 persen berlaku 1 Oktober 2012-30 September 2013. Selain itu, manajemen dan SPSI PT FI juga sepakat tidak

ada sanksi bagi karyawan yang ikut **mogok** kerja.

Pihak SPSI PT FI menerima kesepakatan itu dengan pertimbangan kemanusiaan terhadap pekerja yang sudah 3 bulan tidak menerima gaji sehingga kesulitan menghidupi keluarga mereka. "Kami berharap, ke depan pihak perusahaan memperlakukan karyawan sebagai mitra usaha yang menikmati keuntungan dan tanggung jawab bersama, bukan sebatas alat usaha," ujarnya.

Kegiatan di pabrik pengolahan PT FI berhenti sejak 22 Oktober 2011 selama menunggu perbaikan pipa konsentrat dan bahan bakar yang rusak akibat kerusuhan selama pemogokan. Menurut Ramdhani, operasi di lokasi pertambangan itu diharapkan kembali normal pada awal tahun 2012. (EVY/ben)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Dampak pemogokan : Aktivitas Kerja PT Freeport Masih Terbatas

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 21 Sep 2011 Halaman: **21** Penulis: **JOS** Ukuran: **2457** Pengindex: **pik.ris**

DAMPAK PEMOGOKAN

Aktivitas Kerja PT **Freeport** Masih Terbatas

JAYAPURA, KOMPAS — Dampak pemogokan pekerja PT **Freeport** Indonesia pada produksi dan pengiriman hingga kini belum diketahui. Meski diklaim bahwa sebagian pekerja, terutama pekerja pada kontraktor di bawah PT **Freeport** Indonesia telah kembali aktif beroperasi, aktivitas di perusahaan tersebut masih terbatas.

Juru Bicara PT **Freeport** Indonesia Ramdani Sirait dalam keterangannya, Selasa (20/9), menyebutkan, mogok kerja tersebut menyebabkan terbatasnya kegiatan pertambangan, pabrik pengolahan, dan pengapalan konsentrat.

Ramndani menyatakan, pihaknya masih menilai dampak dari aksi mogok itu pada produksi dan pengiriman konsentrat itu. Namun, ia menyatakan, para pekerja yang umumnya tergabung dalam kontraktor-kontraktor pada PT **Freeport** Indonesia itu saat ini mengendalikan operasi di wilayah kerja perusahaan tambang tersebut.

Pantauan di lapangan, lorong di terminal karyawan di Gorong-Gorong Timika tampak lengang. Beberapa pekerja yang tergabung pada beberapa kontraktor yang bekerja untuk PT **Freeport** Indonesia tampak berjalan menyusuri lorong itu, dan mengaku hendak ke area kerja.

Namun, Terminal Gorong-Gorong yang biasanya ramai dipenuhi pekerja yang naik atau turun dari area kerja terlihat lengang hingga tengah hari.

Pemandangan berbeda justru tampak di depan pintu gerbang Kuala Kencana. Sekitar 2.000 pekerja hingga Selasa petang berkumpul di tempat itu untuk mengikuti ibadah bersama.

Di depan ribuan pekerja itu, Juru Bicara SPSI PT **Freeport** Indonesia Juli Parorongan mengatakan, solidaritas para pekerja semakin kuat, dan semakin banyak pekerja PT **Freeport** Indonesia yang turun dan bergabung dalam aksi tersebut.

Mengenai klaim dari manajemen PT **Freeport** Indonesia bahwa ribuan pekerja, terutama mereka yang bekerja pada kontraktor telah kembali aktif, menurut Juli hanya menunjukkan kepanikan manajemen saja.

Para pekerja memang diberi ruang untuk tetap aktif supaya proses perawatan alat dan tambang tetap berjalan. Langkah itu diambil agar setelah pemogokan selesai, pekerja dapat kembali aktif.

Ketua SPSI PT **Freeport** Indonesia Sudiro mengatakan, manajemen sebaiknya menghentikan konflik tersebut. Manajemen juga harus dengan jujur dan terbuka mengungkapkan berapa besar "kue" untuk pekerja. Pekerja adalah mitra yang harus dihargai setara, lebih-lebih dari jerih payah para pekerjalah semua pemangku kepentingan mendapat manfaat.(JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET

Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Konflik Papua : Amunisi Tak Berasal dari Polisi dan TNI

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 06 Dec 2011 Halaman: **22** Penulis: **JOS; APO; ANO** Ukuran: **3231**
Pengindex: **pik.ris**

KONFLIK PAPUA

Amunisi Tak Berasal dari Polisi dan TNI

JAYAPURA, KOMPAS — Polisi terus berupaya memproses dan mengurai rentetan kasus penembakan yang diduga dilakukan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya. Menurut Kepala Polda Papua Irjen BL Tobing, polisi tidak hanya berupaya mengejar pelaku, tetapi juga berupaya menemukan sumber logistik kelompok bersenjata itu.

Ketika ditemui seusai mengikuti forum komunikasi pimpinan daerah di ruang kerja Gubernur Papua, Senin (5/12), Irjen BL Tobing mengatakan, sejauh ini tidak ada indikasi keterlibatan anggota TNI atau Polri terkait persoalan itu. Ia mengatakan, **amunisi** yang digunakan tidak berasal dari TNI atau Polri.

Untuk itulah, ia menegaskan, polisi akan berupaya mencari tahu dari mana kelompok bersenjata di Puncak Jaya memperoleh pasokan **amunisi**. Sebelumnya, beberapa tokoh masyarakat seperti Pendeta Herman Awom, mempertanyakan sumber logistik kelompok bersenjata itu.

Menurut dia, posisi Puncak Jaya yang tidak mudah dijangkau tentu akan menyulitkan mengirimkan pasokan senjata dan munisinya. Apalagi, semua barang yang dikirim ke wilayah itu setidaknya harus melewati Bandara Sentani, Bandara Wamena, dan Bandara Mulia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 3 Desember lalu, dua anggota Brimob Mabes Polri yang ditugaskan di Puncak Jaya tewas dalam penghadangan oleh kelompok sipil bersenjata. Kasus itu menambah panjang kasus penembakan di wilayah tersebut.

Patroli mereka pun kerap dihadang. Bahkan saat aparat berjaga-jaga di tempat umum pun diserang. Oktober lalu misalnya, Kepala Polsek Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes, tewas ditembak.

Aman

Secara umum, para pejabat di Papua yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan, kondisi Papua aman. Para pejabat provinsi yang hadir dalam pertemuan itu antara lain, Pejabat

Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai, Kepala Polda Papua Irjen BL Tobing, Panglima Kodam XVII Cendrawasih Mayjen Erfi Triassunu, Ketua DPR Papua John Ibo, dan Sekretaris Daerah Papua Constan Karma. Menurut Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai, pertemuan tersebut antara lain membahas evaluasi para pemimpin daerah, sebagaimana tugas pokok masing-masing.

Ia mengatakan, dari evaluasi atas peringatan 1 Desember, kondisi Papua tidak seperti yang diperkirakan. Sebelumnya, sebagian besar masyarakat memperkirakan kondisi Papua akan mencekam. Ternyata, hingga pasca peringatan 1 Desember situasi umum Papua kondusif. Penembakan di Puncak Jaya yang menewaskan dua anggota Brimob Mabes Polri dan penganiayaan seorang anggota Intelkam Polres Jayapura, menurut Syamsul, diluar perkiraan.

Kanisius Karyadi, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga, Surabaya, mengatakan, untuk menyelesaikan konflik di Papua yang berlarut-larut dibutuhkan seorang negosiator ulung. Pelbagai upaya penyelesaian konflik melalui dialog selama ini kurang membawa hasil karena lemahnya proses negosiasi.

Sementara itu, Brigadir Dua Feriyanto Kaluku, anggota Brimob asal Gorontalo, yang tewas tertembak di Papua, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Limboto, Gorontalo, Senin (5/12). Feriyanto Kaluku (21) juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Satu anumerta.

(JOS/APO/ANO)

Kembali ke atas

KOMPASNET

Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Angkat Budaya Papua *Papua adalah Masyarakat yang Kompleks dengan Budaya Khas

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 30 Nov 2011 Halaman: **4** Penulis: **edn; fer; ina** Ukuran: **3197** Foto: **1**
Infografis: **1** Pengindex: **pik.eli**



Angkat Budaya **Papua**

Papua adalah Masyarakat yang Kompleks dengan Budaya Khas

Jakarta, Kompas — Konteks budaya masyarakat **Papua** merupakan modal bagi pemerintah untuk mengadakan dialog. Pemerintah diharapkan tidak terjebak pada pikiran tentang separatisme yang selama ini sering ditudingkan kepada orang **Papua**.

Hal itu mengemuka dalam Koentjaraningrat Memorial Lecture VIII/2011 oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia dengan tema "Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Sikluas Konflik dan Kekerasan di **Papua**", Selasa (29/11). Hadir pembicara Koordinator Jaringan Damai **Papua** Muridan Widjojo, dosen Antropologi Universitas Cendrawasih Agapitus E Dumatubun, dan dosen Sekolah Tinggi Teologi GKI Karel Phil Erari.

Muridan menyampaikan, tema yang harus diangkat dalam dialog adalah terkait sejarah integrasi **Papua** ke Indonesia tahun 1963. Hal ini menjadi salah satu akar masalah karena terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan rakyat **Papua**.

Dialog yang berbasis pada konteks kultur asli masyarakat **Papua** menjadi langkah yang seharusnya dilaksanakan pemerintah. **Papua** adalah masyarakat yang kompleks dengan budaya khas yang tidak bisa dipaksakan untuk menerima cara dari luar.

Dari total 1,2 juta warga asli **Papua**, misalnya, ada 250 etnik. Namun, ada tradisi sederhana yang merupakan kebiasaan orang **Papua** menyelesaikan masalah dengan damai, yaitu dengan

duduk bersama. "Pelajari sejarah budaya **Papua** dan masukan ungkapan budaya **Papua**," kata Agapitus Dumatubun.

Pendekatan militer

Karel juga sependapat pendekatan budaya sangat penting. Ia mencontohkan, tanggal 1 Desember merupakan hari Bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultural. Namun, pemerintah yang terikat stigma separatisme selalu menghukum berat tindakan rakyat **Papua** mengibarkan bendera yang merupakan ungkapan kultural tersebut. "Bicaralah secara adat dengan **Papua** dan hentikan pendekatan militer yang jelas gagal itu," kata Karel.

Secara terpisah, para tokoh agama di Jakarta meminta aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan pada hari peringatan Organisasi **Papua** Merdeka tanggal 1 Desember 2011. Pendekatan keamanan, baik oleh TNI maupun Polri, akan menimbulkan masalah dan berdampak buruk bagi masyarakat di **Papua**.

"Jangan ada lagi darah tertumpah di **Papua**," kata tokoh Nahdlatul Ulama KH Salahuddin Wahid.

Hadir dalam acara itu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo Pr, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom. Tokoh agama dari **Papua** antara lain Pendeta Obednego Mauri, Pendeta Willem Maury, dan Pendeta Yan Piet Wambrauw.

(edn/fer/ina)

Image :

KOMPAS/RIZA FATHONI

Tokoh agama (dari kiri ke kanan) KH Salahuddin Wahid, pendiri Maarif Institute Ahmad Syafii Maarif, Pendeta Obednego Mauri, dan Pendeta Gomar Gultom saat konferensi pers di Sekretariat Maarif Institute, Jakarta, Selasa (29/11). Para tokoh lintas agama meminta pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di **Papua**.

Kembali ke atas

KOMPASNET

Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Teror Freeport : Aparat agar Serius Lindungi Warga

KOMPAS(Nasional) - Senin, 24 Oct 2011 Halaman: **22** Penulis: **APA** Ukuran: **2508** Pengindex: **pik.lis**

TEROR FREEPORT

Aparat agar Serius Lindungi Warga

TIMIKA, KOMPAS — Sejumlah tokoh agama dan masyarakat menilai TNI dan Polri telah gagal melindungi masyarakat yang beraktivitas di areal PT Freeport Indonesia, Timika, **Papua**, sehingga penembakan terus terjadi. Menyikapi hal ini, pemerintah mengimbau agar untuk sementara masyarakat menjauhi areal PT Freeport.

Penilaian itu menjadi salah satu poin dalam pernyataan sikap Gereja Protestan Indonesia (GPI) di **Papua** Klasis Mimika. Pernyataan sikap dibacakan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis GPI **Papua** Mimika, Pendeta NTH Essuruw, saat pemakaman Albertus Laitawono (29), satu dari tiga korban tewas penembakan di Mil 40, areal PT Freeport, di Timika, **Papua**, Minggu (23/10).

"Kegagalan aparat telah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan bagi warga yang beraktivitas di areal PT Freeport," ujar Essuruw.

Sejak satu pekan terakhir, enam orang tewas ditembak di areal PT Freeport. Sebelum kejadian penembakan ini, tepatnya sejak Juli 2009, penembakan telah menewaskan 8 orang dan mencederai 40 orang. Mereka yang tewas tidak hanya karyawan, tetapi juga mereka yang beraktivitas di sana, seperti penembakan 21 Oktober lalu yang menewaskan dua penjaga kios di Mil 40.

Karena itu, GPI **Papua** Klasis Mimika mengimbau pimpinan TNI dan kepolisian untuk menginstruksikan kepada anggotanya yang bertugas di areal PT Freeport agar lebih serius dalam menjalankan tugas. "Pelaku penembakan harus bisa ditangkap. Jaminan keamanan kepada masyarakat yang beraktivitas di PT Freeport pun harus diberikan," tambahnya.

Hentikan aktivitas

Penilaian senada mengenai buruknya kinerja aparat di Timika pun diungkapkan secara terpisah oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ridha Saleh, yang pekan lalu datang ke Timika, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika

Atanasius Allo Rafra. "Penambahan personel TNI dan kepolisian di areal PT Freeport sudah dilakukan, tetapi penembakan masih saja terjadi. Aparat keamanan harus bersungguh-sungguh mengungkap kasus yang terus berulang," kata Allo.

Karena pelaku penembakan belum jelas, Ridha Saleh meminta semua pihak tidak gegabah menuduh satu pihak tertentu. Jika ini terjadi, bisa memicu konflik baru di Timika.

Asisten I Pemkab Mimika Alfred Douw mengimbau masyarakat berhenti beraktivitas di areal PT Freeport untuk sementara. "Ada oknum-oknum yang ingin terus mengacau dan semua orang menjadi sasaran." (APA)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Papua: Aparat Keamanan Diminta Proporsional

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 01 Dec 2011 Halaman: **2** Penulis: **EDN; FER; RWN; THT; ABK; UTI; JOS; SIR** Ukuran: **2862** Pengindex: **pik.nnk**

PAPUA

Aparat Keamanan Diminta Proporsional

Jakarta, Kompas — Aparat TNI dan Polri diminta bersikap proporsional dan profesional serta tidak mengedepankan kekerasan dalam menghadapi dinamika masyarakat **Papua** merayakan ulang tahun emas Organisasi **Papua** Merdeka pada 1 Desember ini. Respons dan penanganan yang berlebihan tidak hanya akan kontraproduktif, tetapi juga berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Hal itu disampaikan Yusman Conoras, Wakil Direktur Aliansi Demokrasi untuk **Papua**, dan Al Araf dari Imparsial, serta Usman Hamid dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Rabu (30/11), di Jakarta.

"Dari pengalaman lalu, penggunaan kekuatan koersif berlebihan tidak akan menyelesaikan konflik di **Papua**," kata Al Araf.

Sementara itu, kekerasan yang sering kali berujung pada terjadinya pelanggaran HAM berakibat pada terus memanasnya konflik di **Papua**. "Ini memperkeruh penyelesaian konflik di **Papua**," kata Yusman.

Mengingat status keamanan di **Papua** masih dalam status Tertib Sipil, polisilah yang seharusnya berada di garda depan dan lebih banyak berperan di lapangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Menurut Al Araf, pelibatan TNI dalam konteks tugas perbantuan hanya boleh dan bisa dilakukan atas dasar keputusan otoritas politik sipil (presiden).

Usman Hamid meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi instruksi tegas dan jelas kepada jajaran keamanan agar mencegah penggunaan kekuatan dan kekerasan terkait pengibaran bendera Bintang Kejora atau penyampaian aspirasi politik, baik di **Papua** maupun di Jakarta.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan, Polri berupaya menjaga keamanan di **Papua** agar tetap kondusif pada peringatan OPM, 1 Desember ini. Polri antara lain menambah satu kompi pasukan Brimob

dari Sulawesi Utara, patroli, pengawalan, dan razia. Pasukan Brimob antara lain ditempatkan di Jayapura, Puncak Jaya, Timika, dan Paniai. Polda **Papua** juga menempatkan pasukan di daerah yang dianggap rawan.

Polri tetap akan menekankan tindakan persuasif terhadap orang yang menaikkan bendera Bintang Kejora. "Ya, kita akan imbau dan persuasif. Represif langkah terakhir," kata Saud.

Pada Kamis ini, sejumlah masyarakat **Papua** di sejumlah daerah berencana menggelar peringatan Hari Kemerdekaan **Papua**, 1 Desember. Peringatan secara nasional dipusatkan di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia **Papua**, Sentani, Kabupaten Jayapura. Taman tersebut merupakan bagian dari makam tokoh **Papua**, Theys Hiyo Eluay, yang meninggal pada 2001.

"Untuk Jawa dan Bali, peringatan dipusatkan di depan Istana Negara," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah **Papua** se-Indonesia Markus Haluk di Jayapura.

(edn/fer/RWN/THT/ABK/UTI/JOS/SIR)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,15
  halaman lainnya: ---

Kekerasan di Papua: Australia Tidak Mendukung Gerakan di Papua

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 29 Oct 2011 Halaman: **1,15** Penulis: **Dhf; Ong; Fer** Ukuran: **4088**
Pengindex: **pik.susy**

KEKERASAN DI PAPUA

Australia Tidak Mendukung Gerakan di **Papua**

Depok, Kompas — Australia tidak mendukung setiap gerakan yang berujung pada kemerdekaan dan pemisahan **Papua** dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Australia menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati kedaulatan dan keutuhan teritorial RI sesuai dengan yang termaktub dalam Traktat Lombok.

Demikian ditegaskan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Jumat (28/10). Masalah **Papua** menjadi topik paling banyak ditanyakan oleh mahasiswa dalam sesi diskusi setelah pemaparan Moriarty.

Menjawab pertanyaan tentang posisi Australia dalam melihat **Papua**, termasuk kaitan dengan serangkaian insiden kekerasan baru-baru ini, Moriarty menegaskan, **Papua** termasuk dalam pokok paling mendasar dalam Traktat Lombok yang disepakati kedua negara pada 2006.

"Poin fundamental itu adalah Australia menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, termasuk di dalamnya **Papua** dan **Papua** Barat," ujar Moriarty. Ia memastikan, Australia tidak akan mendukung setiap gerakan yang berniat mengganggu integritas teritorial RI.

Menurut Moriarty, Pemerintah Australia berpendapat bahwa kegiatan Kongres Rakyat **Papua** III pada 17-19 Oktober lalu, yang berujung pada deklarasi kemerdekaan **Papua** Barat serta pengangkatan presiden dan perdana menteri **Papua** Barat, sebagai kegiatan yang ilegal, provokatif, dan kontraproduktif. "Anda tak bisa melangsungkan dialog saat ada kelompok-kelompok yang mengatakan mereka ingin memisahkan diri," ujar Moriarty.

Kongres itu akhirnya dibubarkan aparat Polri/TNI, yang kemudian menahan sekitar 200 peserta kongres. Moriarty mengatakan, Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Julia Gillard berkomitmen menempatkan peningkatan hubungan baik dan kerja sama dengan Indonesia sebagai prioritas.

Beberapa waktu belakangan ini, suhu politik **Papua** memang memanas. Selain Kongres Rakyat **Papua** III, sejumlah kekerasan dan penembakan juga terjadi, seperti di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dan di areal PT Freeport Indonesia di Mimika. Namun, dalam rangkaian kekerasan tersebut, diperkirakan banyak keganjilan. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Jumat, mengatakan, kematian Kepala Polsek Mulia Ajun Komisaris Dominggus Awes sangat misterius.

"Kapolsek sangat dekat dengan masyarakat. Badannya tinggi besar dan memiliki bobot lebih dari 100 kilogram. Bagaimana mungkin ada dua pria tiba-tiba bisa menelikung tangan, menjatuhkan badan, mencabut pistol Kapolsek, dan menembaknya dari jarak dekat. Hebat sekali kalau separatis bisa berbuat seberani itu. Pasti orang terlatih yang melakukan pembunuhan itu," tutur Haris.

Michael Rumaropen dari Komunitas Adat Masyarakat **Papua** Antikorupsi yang ditemui terpisah membenarkan ucapan Haris. "Dominggus dekat sekali dengan masyarakat. Apalagi di daerah pegunungan yang dikatakan rawan ternyata dia akrab dengan warga. Kecil kemungkinan separatis yang menyerang dan membunuh Dominggus," katanya.

Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida juga mempertanyakan bantuan keuangan yang diterima Polda **Papua** dari PT Freeport Indonesia. "Aparat harus dibiayai negara dan bukan didanai swasta. Ini perbuatan melanggar hukum," kata Indria.

Secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, pihak yang diamankan dapat saja memberi uang makan kepada anggota Polri yang berjaga. Pemberian uang makan itu dapat dipahami mengingat situasi di lapangan yang sulit.

"Kalau pihak yang diamankan memberi uang makan langsung kepada anggota, apalagi dalam situasi tugas yang sangat sulit, saya kira akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan," katanya. Ia menambahkan, Polri juga memiliki anggaran untuk pengamanan obyek vital.

Soal penembakan, Timur mengatakan, setiap informasi terkait dengan kasus-kasus penembakan di **Papua** dijadikan bahan penyelidikan. Polisi tetap mengejar orang-orang yang melanggar hukum. (DHF/ONG/FER)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Konflik Papua: Bambang Dharmono Pimpin Unit Papua

KOMPAS(Nasional) - Senin, 31 Oct 2011 Halaman: **1** Penulis: **ATO; RWN; LAS; ONG** Ukuran: **2824**
Foto: **1** Pengindex: **pik.lis**



KONFLIK PAPUA

Bambang Dharmono Pimpin Unit **Papua**

Jakarta, Kompas — Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat merupakan terobosan penting untuk menyelesaikan masalah **Papua** secara sistematis dan terukur dalam jangka panjang. Organ yang berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin Letjen (Purn) Bambang Dharmono ini akan menerapkan upaya penyelesaian **Papua** lewat pendekatan sosial-ekonomi serta pendekatan sosial-politik dan budaya.

Hal itu dikatakan Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, Minggu (30/10).

Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011. Perpres ini dikeluarkan pada September lalu. UP4B dipimpin Letjen (Purn) Bambang Dharmono, mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional.

Bambang Dharmono adalah mantan Panglima Komando Operasi di Aceh (2002-2003). Ia pernah menjadi wakil RI pada Aceh Monitoring Mission (2005). Sebelum pensiun, Bambang menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional. Ia diangkat sebagai Kepala UP4B pada pertengahan Oktober 2011, atau sekitar satu bulan setelah UP4B dibentuk.

Velix mengatakan, untuk pendekatan sosial-ekonomi, UP4B akan bekerja memadukan perencanaan pembangunan di Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat.

Terkait upaya memperbaiki perencanaan pembangunan di **Papua** dan **Papua** Barat, menurut Velix, kerja konkret UP4B antara lain memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan khusus bagi kedua provinsi tersebut.

Untuk pendekatan sosial-politik dan budaya, UP4B akan berupaya membangun komunikasi konstruktif dengan kelompok strategis di **Papua** dan **Papua** Barat. "Jadi, UP4B akan memetakan secara detail persoalan dasar di **Papua** dan **Papua** Barat. Kemudian, lembaga ini berupaya menjalin komunikasi strategis," tutur Velix.

Di tempat terpisah, Koordinator Jaringan Damai **Papua** Neles Tebay di Jayapura, Sabtu (29/10), menuturkan, perlu ada utusan khusus Presiden bertugas mempersiapkan dan menggelar dialog dengan berbagai elemen masyarakat **Papua**. Dengan dialog, suara masyarakat diharapkan tersampaikan kepada Presiden.

Menurut Neles, utusan khusus bisa dua orang. Satu orang bertugas menggelar dialog. Adapun utusan khusus yang lain berkonsentrasi menenangkan dan menciptakan situasi damai di **Papua** selama dialog digelar. Untuk itu, diperlukan sosok yang bisa diterima masyarakat **Papua**.

Secara terpisah, Direktur Program Imparsial Al Araf dalam jumpa pers, di Jakarta, kemarin, mengatakan, UP4B harus membentuk ruang dan peluang dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat **Papua**.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng, di Jakarta, kemarin, mengatakan, Badan Anggaran DPR meminta semua pemerintah daerah yang menerima dana otonomi khusus membuat program yang komprehensif berikut target-targetnya.
(ATO/RWN/LAS/ONG)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,15

halaman lainnya: ---

Masalah Papua: Bangun Komunikasi Efektif dan Konstruktif

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 01 Nov 2011 Halaman: **1,15** Penulis: **WHY; ONG; ABK; ILO; NWO; ANO; APA; FER** Ukuran: **4904** Pengindex: **pik.hti**

MASALAH PAPUA

Bangun Komunikasi Efektif dan Konstruktif

Jakarta, Kompas — Komunikasi efektif dan konstruktif antara pemerintah pusat dan masyarakat **Papua** merupakan hal yang sangat penting untuk mengerti keinginan dan menangkap masalah yang dikehendaki masyarakat **Papua**.

"Jika Aceh bisa damai, mengapa **Papua** tidak? Saya berkomunikasi langsung dengan para aktivis **Papua**, termasuk dari kelompok antipemerintah. Terkadang datang rombongan hingga 30 orang dari tokoh masyarakat hingga yang berpandangan anti-Jakarta," kata Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B) Bambang Dharmono, Senin (31/10).

Mantan Panglima Komando Operasi Aceh dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional itu mengakui, menjalin komunikasi sangat penting untuk mengerti keinginan yang disampaikan masyarakat **Papua**.

Bambang setuju ada dialog Jakarta-**Papua**, tetapi formatnya dialog tentang **Papua**. "Dialog Jakarta-**Papua** seperti menggambarkan ada keterpisahan antara Jakarta dan **Papua**. Integrasi teritorial adalah fakta yang sudah selesai dengan persetujuan 80 negara anggota PBB, ada yang abstain, tetapi tidak ada yang menentang," ujar Bambang.

Persoalan di **Papua** adalah masalah integrasi sosial agar warga **Papua** memiliki kedudukan setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun, persoalan itu juga terhadang masalah korupsi massal yang terjadi di kalangan elite politik **Papua**.

Keseriusan pemerintah membangun komunikasi efektif dan konstruktif disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Wanggai. "Kita (pemerintah) ingin bangun saling kepercayaan. Jakarta percaya kepada **Papua**, **Papua** percaya kepada Jakarta. Kita tidak ingin saling menyalahkan. Ini saatnya membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat **Papua**," kata Velix Wanggai, Senin.

Menurut Velix, ada berbagai persoalan yang merupakan warisan masa lalu di **Papua**, baik

struktural maupun kultural. Selain kemiskinan, kesenjangan budaya, serta kesenjangan pembangunan antargolongan penduduk dan antarwilayah, **Papua** juga menghadapi persoalan sosial budaya yang beragam, kondisi geografis yang luas, dan penduduk yang tersebar tidak merata.

Pendekatan pembangunan yang menyeluruh, terintegrasi, dan terpadu menjadi pilihan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu. Strategi pembangunan yang dipilih berdimensi kewilayahan melalui kluster-kluster, disesuaikan dengan budaya masyarakat pantai, pegunungan, sungai, dan perbatasan. "Presiden SBY menyebut grand design pembangunan di Tanah **Papua** ini sebagai 'New Deal for **Papua**' yang menekankan pendekatan sosial ekonomi, pendekatan sosial, politik, budaya," kata Velix.

Desain besar pembangunan **Papua** tersebut diarahkan pada percepatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di kampung-kampung, yang mencakup pengoptimalan kebijakan penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pengembangan transportasi dan infrastruktur.

Disinggung pembentukan UP4B, Velix menyatakan, langkah itu merupakan terobosan untuk mengoreksi langkah-langkah yang selama ini bersifat business as usual dalam menangani **Papua**. "Melalui UP4B, Presiden SBY memberikan kewenangan teknokratis kepada unit khusus ini untuk memadukan, menyinkronkan, dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersifat khusus bagi **Papua** dan **Papua** Barat. UP4B akan memadukan aspek pembiayaan pembangunan lintas sektoral bagi **Papua** serta mengefektifkan pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi tanah **Papua**," tuturnya.

Utusan Khusus Presiden untuk **Papua** Farid Husain, yang juga anggota delegasi pemerintah dalam perundingan yang menghasilkan Nota Kesepahaman (MOU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, meyakini, konflik di **Papua** dapat diselesaikan seperti halnya konflik di Aceh. Namun, penyelesaian konflik di **Papua** butuh waktu. "Saya belum bisa membuka (langkah-langkah penyelesaian konflik di **Papua**). Namun, (konflik **Papua**) ini bisa selesai dengan cara Aceh meski perlu waktu," kata Farid.

Menurut Ridha Saleh, Komisioner Komisi Nasional HAM, penyelesaian konflik di **Papua** dapat diawali dengan menghilangkan pendekatan keamanan.

Sementara itu, menyangkut dana keamanan Freeport yang disetor ke polisi, menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, hanya dapat diperiksa jika bersumber dari uang negara. "Kalau bukan termasuk APBN atau APBD, bukan kewenangan BPK," kata Hadi Poernomo, di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.

"Terkait informasi aparat terima dana (itu)," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, "Polri siap diaudit, diklarifikasi, dan transparan."

Polri juga akan minta klarifikasi kepada PT Freeport Indonesia. "Kami juga belum tahu persis dana untuk apa," katanya.

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Bangun Saling Percaya * Samakan Persepsi tentang Dialog Jakarta-Papua

KOMPAS(Nasional) - Senin, 21 Nov 2011 Halaman: **4** Penulis: **jos; bil** Ukuran: **3241** Foto: **1**
Pengindex: **pik.nnk**



Bangun Saling Percaya

Samakan Persepsi tentang Dialog Jakarta-**Papua**

Jayapura, Kompas — Pegiat demokrasi di **Papua** menilai perlu ada jaminan keamanan untuk mempertemukan pihak-pihak di **Papua**, terutama yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Langkah ini penting agar memberi ruang aman untuk memulai pertemuan dan membangun kesalingpercayaan sebelum dialog digelar.

Victor Mambor, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia Jayapura, Minggu (20/11), di Jayapura, mengatakan, upaya mempertemukan pihak-pihak di **Papua** semata-mata didorong pertimbangan kemanusiaan. Pihak-pihak yang akan dipertemukan tersebut antara lain anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi **Papua** Merdeka (TPN-OPM).

Pengamat sosial politik **Papua**, John Manangsang, mengatakan, anggota TPN-OPM perlu jaminan khusus agar mereka dapat leluasa menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka.

Menurut dia, dialog yang saat ini menjadi wacana adalah terobosan yang baik untuk mencapai solusi bagi persoalan **Papua**. Namun, untuk itu, pendapat, keprihatinan, dan harapan orang asli **Papua** harus didengar.

Ia yang selama ini terlibat dalam pelayanan medis di wilayah pinggiran menyatakan diri mau menjadi jaminan jika nanti anggota TPN-OPM hadir.

Samakan persepsi

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Koordinator Jaringan Damai **Papua** Neles Tebay mengatakan perlunya membangun persepsi bersama tentang dialog Jakarta-**Papua**. Dialog itu tidak perlu dilaksanakan secara tergesa-gesa, tetapi harus dipersiapkan dengan baik.

"Suatu hal mendesak yang perlu dilakukan adalah penyamaan persepsi tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, target, agenda, mekanisme atau tahapan, tempat, dan fasilitator dialog. Semua hal ini perlu dibahas dan didiskusikan oleh wakil-wakil dari pemerintah dan rakyat **Papua**," kata Neles Tebay.

Diskusi-diskusi itu sangat vital, tidak hanya untuk mengikis sikap curiga dan meningkatkan sikap saling percaya antara pemerintah dan rakyat **Papua** sebelum dialog dimulai, tetapi juga untuk melahirkan suatu kerangka atau format dialog yang dapat diterima dan disetujui kedua belah pihak.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta, akhir minggu lalu, mengatakan, pemerintah harus segera mewujudkan dialog dengan para pemangku kepentingan di **Papua**. Dialog itu harus dilakukan dengan pendekatan hati yang menghargai martabat masyarakat setempat. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk mencari jalan keluar atas masalah yang sudah lama menyengsarakan rakyat setempat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seusai rapat terbatas pada awal November lalu, menjanjikan dilog Jakarta-**Papua**.

Menurut Poengky, dialog itu akan efektif dan bisa menemukan solusi jika mampu mengumpulkan semua pihak ke pertemuan yang terbuka. Hal ini membutuhkan waktu panjang, kesabaran, kerendahan hati, dan komitmen semua pihak untuk menjadikan **Papua** lebih baik. Pemerintah harus mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan kemanusiaan.

"Untuk jangka pendek, segera tarik pasukan militer dan kepolisian non-organik di **Papua**. Jangan lakukan operasi intelijen besar. Masyarakat **Papua** trauma dengan pendekatan keamanan. Banyak korban jatuh, sementara para pelaku kekerasan tidak dihukum dengan adil," katanya.

(jos/bil)

Image :

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Aktivitas warga di Pasar Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, **Papua**, Jumat (18/11), berjalan normal. Menurut para pedagang, terjadinya insiden penembakan dan gangguan keamanan di kota yang berada di pegunungan tersebut membuat aktivitas perdagangan menurun karena warga khawatir terjadi lagi gangguan keamanan.

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian'
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Kekerasan: Belasan Warga Papua Mengaku Dianiaya Polisi

KOMPAS(Nasional) - Senin, 05 Sep 2011 Halaman: **2** Penulis: **Jos; Ong** Ukuran: **2775** Pengindex: **pik.yrm**

KEKERASAN

Belasan Warga **Papua** Mengaku Dianiaya Polisi

Jakarta, Kompas — Kepolisian Resor Jayapura dituduh menyiksa 15 saksi kasus kekerasan di Abepura yang semula diduga anggota Organisasi **Papua** Merdeka. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar, Minggu (4/9), mengatakan, warga tersebut dibawa polisi kemudian dianiaya sebelum dilepas.

"Sebanyak 13 orang sudah dilepaskan polisi. Mereka sudah divisum atas luka-lukanya. Para korban adalah warga kompleks Vuria Kotaraja. Mereka adalah jemaat Gereja Baptis Wahno, Kotaraja," kata Haris. Penangkapan warga didasari tuduhan melakukan penembakan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura pada hari Senin 1 Agustus 2011 yang menewaskan tiga warga sipil dan seorang anggota TNI.

Dikatakan Haris, saat penangkapan pada Rabu (31/8), polisi tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Mereka yang ditangkap itu tengah tertidur dan beberapa orang lainnya bersiap-siap hendak ke kebun. Warga yang mengaku disiksa itu adalah Yawanus Kogoya, Tinus Wenda, Siki Kogoya, Arinus Wenda, Yusman Kogoya, Mis Kogoya, Bodi Kogoya, Wen Wenda, Denias Kogoya, Ekimar Kogoya, Panius Kogoya, Yeskiel Kogoya, dan seorang lagi belum diketahui namanya.

Menurut Haris, warga tersebut dipukul menggunakan laras senjata, ditendang, ditempeleng, dipukul, dan diinjak dengan sepatu lars dalam posisi tangan diborgol atau diikat. Akibatnya, korban mengalami luka-luka memar di bagian kepala, wajah, badan, dan kaki. Saat penggerebekan, lanjut Haris, polisi melepaskan tembakan. Dari lokasi penangkapan, polisi juga menyita sejumlah panah, parang, kapak, pisau, dan lain-lain, serta beberapa dokumen terkait Organisasi **Papua** Merdeka (OPM).

Kontras mengecam penyiksaan tersebut sebagai bagian dari stigma buruk terhadap warga **Papua** yang berkembang di aparat penegak hukum. Haris Azhar mengingatkan, praktik penyiksaan merupakan tindakan tidak manusiawi yang bertentangan aturan hukum di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Antipenyiksaan menyatakan bahwa Indonesia terikat dengan Konvensi Antipenyiksaan Internasional.

Hanya diminta tiarap

Dihubungi di Jayapura, Komisaris Besar Wahyono dari Humas Polda **Papua** membantah tudingan penyiksaan fisik terhadap belasan warga yang dimintai keterangan sebagai saksi tersebut. "Saya sudah menghubungi penyidik yang memeriksa. Sewaktu berada di tempat kejadian perkara, mereka hanya diminta untuk tiarap," ujar Wahyono.

Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Setiawan melalui pesan singkat juga mengatakan, tidak benar ada penyiksaan. "Ini salah satu strategi OPM agar aparat tidak fokus mencari pelaku penembakan di Nafri," ujar Imam.

(Jos/Ong)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Masalah Papua : Berbagai Kekerasan Belum Akan Berhenti

KOMPAS(Nasional) - Senin, 31 Oct 2011 Halaman: **2** Penulis: **Ong; RWN** Ukuran: **2918** Pengindex: **pik.lis**

MASALAH PAPUA

Berbagai Kekerasan Belum Akan Berhenti

Jayapura, Kompas — Berbagai bentuk kekerasan di **Papua** belum akan berhenti dalam waktu dekat. Apalagi, Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi **Papua** dan sejumlah kabupaten akan digelar dalam beberapa waktu ke depan. Pelaksanaan pilkada dinilai berpotensi kembali melahirkan konflik. Sementara hal-hal terkait dengan pelaksanaan Kongres Rakyat **Papua** III merupakan bentuk kekecewaan terhadap otonomi khusus yang dirasakan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai **Papua**, mengemukakan hal tersebut di Jayapura, Sabtu (29/10).

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah **Papua** Komisaris Besar Wachyono menuturkan, kepolisian sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penambakan dan perampasan senjata terhadap Kepala Kepolisian Sektor Mulia Komisaris Dominggus Awes di Mulia, Puncak Jaya. "Kami masih melakukan penyelidikan serta berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku," ungkapnya.

Terkait adanya surat untuk Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, pekan lalu, dari pihak yang mengaku sebagai kelompok Organisasi **Papua** Merdeka (OPM) pimpinan Purom alias Okinak Wonda, yang isinya mengklaim dan bertanggung jawab atas peristiwa penembakan dan perampasan senjata terhadap Kepala Polsek Mulia, kepolisian meragukan keaslian surat itu.

"Bupati kerap kali menerima surat semacam itu dan ada tendensi untuk mencari dana ke bupati dengan alasan untuk acara adat," kata Wachyono.

Sementara itu, situasi di Puncak Jaya saat ini normal kembali. Wachyono mengungkapkan, kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan dan berpatroli guna meningkatkan rasa aman masyarakat.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang ditemui kemarin seusai kunjungan ke Timika menjelaskan, ada kontak senjata di Mil 37,

Sabtu. Ia juga mengatakan, di wilayah itu tidak ada OPM. "Perlawanan di sana dilakukan gerakan adat. Bahkan, masyarakat adat dari enam suku menggabungkan diri ke Serikat Pekerja Freeport. Mengada-ada kalau dikatakan gerakan separatis di Kabupaten Mimika. Penembakan gelap selalu terjadi dan tidak pernah terungkap siapa yang bertanggung jawab dalam beberapa tahun terakhir," ujar Haris.

Haris mengkhawatirkan, aksi penembakan dibiarkan terjadi untuk menunjukkan ada ancaman keamanan yang serius sebagai alasan pembenar untuk menambah aparat dan turunnya upah tambahan. Pihak Kontras juga menemukan fakta bahwa gerakan para karyawan dituduh ditunggangi dan dikaitkan dengan OPM.

Dia mewaspadai surat peringatan Kepala Polres Mimika tanggal 30 Oktober yang meminta karyawan yang mogok kerja di Mil 28 membubarkan diri dalam waktu 2 x 24 jam. Dikhawatirkan akan terjadi tindak kekerasan aparat terhadap pekerja Freeport dan masyarakat asli **Papua**. (Ong/RWN)

"Kepolisian sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penambakan". Wachyono

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Otsus : Berdialog Soal yang Substansial

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 04 Nov 2011 Halaman: **45,47** Penulis: **JOS** Ukuran: **5000** Foto: **1**
Infografis: **1** Pengindex: **pik.pry**



OTSUS

Berdialog Soal yang Substansial

Persoalan yang melibatkan **Papua**, termasuk problem geopolitik-ekonomi di tingkat regional dan internasional akan lebih mudah dikendalikan jika pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi **Papua** mampu mengoptimalkan otonomi khusus.

Menurut peneliti CSIS, J Kristiadi, persoalan konsensus nasional terkait **Papua**, yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus bagi **Papua**, mendesak diselesaikan, "Saat ini yang terutama membenahi **Papua** sendiri," katanya.

Papua menjadi sorotan internasional, antara lain, karena posisi geografis, kekayaan alam, dan sejarah kekerasan di sana.

Menurut Kristiadi, proses pelaksanaan otonomi khusus (otsus) terus diwarnai tawar-menawar luar biasa alot. Pada satu sisi, otsus menunjukkan terobosan luar biasa atas tuntutan merdeka. Di situ diungkap pengakuan pemerintah yang selama ini mengabaikan **Papua** dan ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pemerintah juga siap memberi kebijakan khusus yang mengutamakan orang **Papua**.

Pada sisi lain, mengimplementasikan otsus tak sederhana. Berbagai kebijakan yang lahir setelah otsus disahkan menjadi contoh ketatnya tawar-menawar Jakarta-**Papua**. Salah satunya, lahirnya Provinsi **Papua** Barat.

Namun, tersendatnya proses implementasi otsus juga lahir dari sisi **Papua**. "Banyak pemimpin **Papua** mudah tergoda kekuasaan," kata Kristiadi. Gelontoran uang triliunan

rupiah ke **Papua** terdistribusi tanpa kontrol. Menurut dia, dana pembangunan yang dibagi ke kampung-kampung tak teraudit baik. Bahkan, melanggar ketentuan karena APBD memiliki mata anggaran jelas.

Tidak mengherankan jika setelah 10 tahun berjalan sebagian masyarakat berpendapat otsus gagal. Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otsus Tahun 2010 menyebutkan, Pemprov **Papua** belum memiliki komitmen terhadap pengelolaan dana otsus, antara lain, tampak dari belum adanya perda khusus dan perda provinsi yang memberi arah serta batasan penggunaan dana otsus.

Akibatnya, ada dana otsus yang digunakan untuk membiayai kegiatan aparat pemerintah atau kegiatan publik yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan

Peneliti di Pusat Kajian Demokrasi Universitas Cendrawasih Jayapura, Bambang Sugiono, sependapat dengan Kristiadi, yaitu otsus sebenarnya merupakan solusi cukup komprehensif untuk **Papua**. Namun, otsus harus dilihat sebagai bukan semata-mata soal uang.

Dana adalah hal yang mengikuti setelah persoalan lebih substansial dibicarakan dan dituntaskan. Hal substansial itu adalah kewenangan. Bambang menilai proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi hingga ke pemerintah kabupaten belum optimal.

Ia mencontohkan, belum jelas siapa yang berwenang memberi izin membuka tambang. Akibatnya, terjadi tumpang tindih izin dan ujungnya proses investasi macet. Jika persoalan semacam itu dapat diselesaikan, pembangunan di **Papua** dapat berjalan lebih optimal.

Demikian juga dalam ranah politik, seperti pembentukan pengadilan HAM di **Papua**, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta partai lokal. Jika soal kewenangan dapat diselesaikan, Indonesia tidak perlu membuang energi menanggapi tekanan internasional terkait isu **Papua**.

Bambang dan Kristiadi berpendapat, jauh lebih baik bagi Pemerintah Indonesia dan Pemprov **Papua** untuk mengoptimalkan implementasi otsus daripada sibuk mempersoalkan pendapat internasional. Peran strategis di Asia-Pasifik akan lebih mudah dilakukan Pemerintah Indonesia jika otsus berjalan optimal.

Menko Polhukam Djoko Suyanto saat membuka Konferensi Perdamaian Tanah **Papua**, 5 Juli 2011, mengatakan, "Dewasa ini dalam tahap transformasi kita melihat bagaimana demokrasi sebagai nilai dan prinsip yang mengedepankan aspirasi, kemerdekaan, kesetaraan, dan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan semakin membudaya dan dipraktikkan sebagai praktik politik yang meluas."

Menurut Djoko, fenomena positif itu, khususnya dalam tata kehidupan politik yang didukung proses komunikasi yang sehat di antara pemangku kepentingan, akan bermuara pada

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Pelanggaran HAM: Cepat Tangani Kasus Penembakan di Freeport

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 19 Oct 2011 Halaman: **2** Penulis: **Bil** Ukuran: **2381** Pengindex: **pik.susy**

PELANGGARAN HAM

Cepat Tangani Kasus Penembakan di Freeport

Jakarta, Kompas — Pemerintah harus cepat menangani kasus penembakan tiga karyawan PT Puri Fajar Mandiri, kontraktor yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tanggul penahan tailing PT Freeport Indonesia, dan tewasnya pekerja perusahaan tersebut saat berunjuk rasa. Bila terus dibiarkan dan hanya ditangani secara internal oleh PT Freeport, kasusnya dikhawatirkan akan melebar dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara serius.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh mengatakan, insiden penembakan yang terjadi hampir bersamaan dengan terjadinya unjuk rasa buruh PT Freeport itu bisa memunculkan kekhawatiran bakal terjadinya tindak kekerasan lanjutan. Menurut Ridha, Komnas HAM telah menurunkan tim ke Kabupaten Mimika untuk menyelidiki insiden penembakan sekaligus meninggalnya buruh PT Freeport yang berunjuk rasa.

"Komnas HAM telah mengirim surat ke Kapolri dan meminta agar tidak ada penambahan pasukan ke Mimika. Penambahan pasukan hanya akan menambah peluang terjadinya kekerasan karena pada saat yang bersamaan masih ada ribuan karyawan PT Freeport yang berunjuk rasa menuntut perbaikan hak mereka," kata Ridha di Jakarta, Senin (17/10).

Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM di **Papua** Mathius Murib yang sempat ke Mimika mengatakan, suasananya sangat tegang. Emosi buruh yang berunjuk rasa selama dua bulan terakhir juga masih tinggi. "Situasinya memang sangat sulit sehingga butuh penanganan serius dari pemerintah," kata Mathius.

Terlepas dari masalah penembakan dan meninggalnya karyawan PT Freeport yang berunjuk rasa, menurut Mathius, ada masalah lain yang juga bakal mengganjal jika pemerintah tidak turun tangan langsung. "Masyarakat tujuh suku di kawasan kontrak karya pertambangan PT Freeport saat ini juga tengah menuntut hak ulayat atas tanah mereka," katanya.

Ridha mengatakan, persoalan PT Freeport memang sangat rumit. Di sisi lain, aparat keamanan menganggap masih ada kelompok perlawanan Organisasi **Papua** Merdeka di

sekitar kawasan pertambangan, sementara masalah buruh kasar PT Freeport yang menuntut kesejahteraan juga belum terselesaikan. "Untuk itu, rencana renegosiasi ulang kontrak karya PT Freeport harus juga dibarengi dengan audit secara menyeluruh terhadap perusahaan itu," katanya. (BIL)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Membangun Papua : Dari Otsus "Terbitlah" UP4B

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 04 Nov 2011 Halaman: **46** Penulis: **har; oin** Ukuran: **3776** Pengindex: **pik.pry**

MEMBANGUN PAPUA

Dari Otsus "Terbitlah" UP4B

Ketidakpercayaan sebagian rakyat **Papua** terhadap pemerintah pusat muncul akibat tewasnya Ketua Presidium Dewan **Papua** Theys Hiyo Eluay beberapa hari sebelum Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, tanggal 21 November 2001.

Padahal, sebelumnya, rakyat **Papua** melihat UU Otsus ibarat titik cahaya setelah 30 tahun **Papua** berada dalam status daerah operasi militer (DOM). Selain mengubah DOM menjadi tertib sipil, pemerintah juga berjanji membentuk Dewan Perwakilan Rakyat **Papua** dan Majelis Rakyat **Papua** yang merepresentasikan penduduk asli dan kepentingan politik **Papua**, selain menjanjikan dukungan dana untuk APBD yang tiap tahun membesar, dana otsus, bagi hasil pajak, tambang, minyak dan gas, serta dana tambahan infrastruktur.

Setelah 10 tahun pelaksanaan UU Otsus, **Papua** ternyata tetap menjadi wilayah penuh paradoks dan ironi. "Kaya raya sumber daya alam dan mendapat dukungan dana luar biasa, tetapi rakyatnya miskin dan tertinggal," kata Ketua Evaluasi dan Pemantauan Otsus **Papua** DPR Yorris Raweyai, Senin (31/10).

Menurut anggota Komisi I DPR itu, kucuran dana otsus ke **Papua** luar biasa besar dibandingkan ke daerah lain di Indonesia. Tahun 2011, transfer APBN ke APBD **Papua** lebih dari Rp 5 triliun. Dana otsus 2011 senilai Rp 28,2 triliun dan akan bertambah lebih dari Rp 4 triliun tahun depan. "Belum lagi dana tambahan untuk infrastruktur serta bagi hasil tambang dan migas," kata Yorris.

Sayangnya, dana otsus tidak menyentuh pendidikan dan kesehatan warga di kampung terpencil. "Kehidupan mereka jauh dari sejahtera," ujar Ketua Kaukus **Papua** di Parlemen Paskalis Kossay dari Jayapura.

Jika memang tidak dijalankan optimal dan tak efektif, Ketua DPR **Papua** John Ibo mengusulkan agar UU Otsus direvisi. "Membangun **Papua** seharusnya dengan hati," katanya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menjajaki dialog Jakarta-**Papua** berpendapat, rakyat **Papua** harus terus diyakinkan tentang komitmen pemerintah. "Laksanakan juga komitmen dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melihat secara obyektif ada kendala yang harus diatasi, yaitu wilayah **Papua** yang amat luas. "Rasa sayang pemerintah kepada **Papua** memang sangat besar, melebihi kepada daerah lain. Kami berusaha mengatasi ketertinggalan untuk menjadi satu titik yang sama. Titik awal **Papua** membangun memang berbeda dari daerah lain," kata Gamawan.

Perbaikan keadaan **Papua** kini ditumpukan pada Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B) yang dipimpin Letnan Jenderal (Purn) Bambang Dharmono. "Kami berharap banyak kepada Kepala UP4B untuk meraih hati masyarakat **Papua** dan **Papua** Barat," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Minggu lalu.

Tugas pertama Bambang adalah merangkul aparat dari tingkat RT hingga lurah untuk berdialog. "Wajib juga mengajak serta semua kepala suku untuk mengelola dana yang mengalir ke **Papua** dan **Papua** Barat," Hatta menambahkan.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan, UP4B merupakan koreksi untuk memperkuat otsus. Karena itu, UP4B harus menjadi katalisator dan fasilitator untuk mempertajam langkah di bidang sektoral dan regional.

Bambang yang tengah mempersiapkan sekretariat UP4B sambil menunggu pelantikan oleh Presiden tak mau banyak bicara. "Memperkuat otsus harus ada iktikad baik dari apa yang sudah menjadi komitmen di UU Otsus," tuturnya. Itu dapat dimaknai, penyelesaian damai dan bermartabat adalah cara terbaik untuk **Papua**. (har/oin)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Dialog di Tingkat Bawah * Suara Tembakan Terdengar Lagi di Areal PT Freeport

KOMPAS(Nasional) - Minggu, 30 Oct 2011 Halaman: **2** Penulis: **EDN; APA; ANO** Ukuran: **4417**
Pengindex: **pik.yrm**

Dialog di Tingkat Bawah

Suara Tembakan Terdengar Lagi di Areal PT Freeport

Jakarta, Kompas — Pemerintah mengakui ketidakefektifan otonomi khusus di **Papua** sebagai salah satu akar masalah. Berbeda dengan wacana dialog nasional antara pemerintah dan perwakilan masyarakat **Papua**, pemerintah justru melihat dialog di tingkat bawah lebih menyelesaikan masalah.

Hal itu disampaikan Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Khusus, Sabtu (29/10), dalam diskusi "Konflik **Papua** Tak Kunjung Usai". Hadir juga sebagai pembicara Paskalis Kossay dari Kaskus **Papua** di Parlemen, Bondan Gunawan yang mantan Menteri Sekretaris Negara pada era Gus Dur, dan Adriana Elizabeth dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Menurut Velix, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2006 menyimpulkan ada simpul-simpul masalah yang membuat otonomi khusus di **Papua** tidak efektif, misalnya muncul pada regulasi. Velix mencontohkan, terkait sejarah dan masalah hak asasi manusia, dalam UU Otonomi Khusus **Papua** tahun 2001 diatur soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, pasal yang mengatur kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, langkah yang diambil pemerintah adalah mengadakan dialog-dialog di tingkat bawah untuk mencari solusi. Menurut Velix, Presiden Yudhoyono memerintahkan menteri untuk membenahi regulasi sektoral agar bisa sesuai dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat **Papua**.

Dialog, kata Adriana, sesuai hasil penelitian LIPI, bisa menjadi pendekatan yang efektif. Ia menilai, selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah hanya bersifat fisik. Padahal, banyak soal, seperti sejarah, kemanusiaan, dan HAM, yang tak tertangani hanya dengan memberikan dana otonomi khusus. "Kekerasan di **Papua** bikin tidak nyaman. Persoalan rekognisi dan martabat tidak akan pernah selesai hanya dengan pembangunan dan

pengiriman pasukan," katanya.

Adriana mengatakan, dialog nasional tidak harus berarti merdeka. Kata "merdeka" kerap menjadi slogan untuk menarik perhatian pemerintah. Hal itu kerap dilakukan pejabat di **Papua** yang korup untuk menghindari jeratan hukum.

Bagi Paskalis, banyak kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat dengan prasangka karena tidak percaya kepada orang **Papua**. Dalam melaksanakan kebijakan, yang selalu mengemuka adalah apakah ini menguntungkan orang **Papua** atau Indonesia. Akibatnya, tidak ada implementasi yang jalan. Ujung-ujungnya kegagalan pembangunan dan kemiskinan. "Berikan kepercayaan penuh. Orang **Papua**, kan, orang Indonesia juga," ujarnya.

Menurut Bondan Gunawan, akar masalah adalah ekonomi. Ia berharap agar orang **Papua** mengubah pola pikir agar dapat mengikuti arus ekonomi. Sebaliknya Bondan juga menyoroti ketidakadilan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan persepsi dan kebijakan.

Masalah Freeport

Sementara itu, kemarin, di Timika, Bupati Mimika Klemen Tinal kembali bertemu perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia (FI) dan perwakilan karyawan. Bupati meminta semua pihak berpikir jernih dan memikirkan imbas dari kisruh di FI.

"Masyarakat terganggu. Kehidupan keluarga karyawan terganggu, penjualan pedagang menurun, bank-bank khawatir pembayaran kredit macet, dan pesawat terancam tidak masuk lagi karena pasokan avtur dari pelabuhan milik PT Freeport ke bandara terhenti akibat jalan diblokir karyawan," katanya.

Karena itu, dia berharap karyawan yang mogok kerja sejak 15 September segera kembali bekerja. "Kembalilah bekerja, sementara yang berunding biarkan tetap berunding," katanya.

Perwakilan manajemen PT FI, Sinta Sirait, mengatakan, sejak perundingan bipartit digelar kembali pada 21 Oktober hingga Jumat lalu, pihaknya sudah dua kali menaikkan upah hingga besaran 30 persen dari gaji pokok selama dua tahun.

Dengan kenaikan itu, Sinta berjanji pada tahun 2011 pendapatan kotor karyawan setiap bulan Rp 11 juta-Rp 17 juta. Namun, juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT FI, Juli Parorongan, menilai, "Bonus dan tunjangan di luar upah pokok yang kami terima setiap bulan tidak tetap besarannya."

Kemarin pukul 08.30, bunyi letusan tembakan terdengar lagi di areal hutan di sekitar Mil 36, areal PT FI. "Setelah menembak, para pelaku lari dan hingga Sabtu sore aparat gabungan yang mengejar belum bisa menangkap mereka," ujar Wakil Kepala Polres Mimika Komisaris Mada Laksanta. (EDN/APA/ANO)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Dorong Integrasi Sosial * Kepala UP4B Akui Papua Baru Terintegrasi Teritorial

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 12 Nov 2011 Halaman: **15** Penulis: **ONG; NWO; ATO; NTA** Ukuran: **2548**
Pengindex: **pik.nnk**

Dorong Integrasi Sosial

Kepala UP4B Akui **Papua** Baru Terintegrasi Teritorial

Jakarta, Kompas — Kepala Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat Bambang Dharmono menegaskan, UP4B mendorong integrasi sosial di **Papua** dan mengesampingkan pendekatan keamanan. Warga **Papua** belum terintegrasi secara sosial dengan bangsa Indonesia sampai saat ini.

"**Papua** baru terintegrasi secara teritorial, tidak secara sosial. **Papua** harus setara dengan bagian lain dari Indonesia. Kalau integrasi sosial tidak terjadi, bisa mengancam integrasi teritorial," ungkap Bambang di Jakarta, Jumat (11/11).

Sebelum UP4B terbentuk, kata Bambang, sejak akhir tahun lalu ia sudah menjalin lobi dengan pelbagai kelompok masyarakat **Papua**, pemuka adat, tokoh agama yang dikenal vokal, dan kubu yang dianggap berseberangan dengan pemerintah pusat. Hubungan juga dibuka dengan berbagai kelompok di luar Indonesia. Perwakilan diplomatik Indonesia juga mendapatkan pemahaman yang sama dengan UP4B sehingga terjalin sinergi dalam membangun integrasi sosial masyarakat **Papua** dalam masyarakat Indonesia.

Untuk langkah pertama, Bambang menggelar sosialisasi di **Papua**. Selanjutnya, UP4B mendorong penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat di **Papua** serta memerangi korupsi yang membuat pelbagai program dan inisiatif pemerintah pusat belum mencapai hasil yang diharapkan selama ini.

Bambang, dalam jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, juga berjanji akan mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bertugas menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di **Papua** pada masa silam. Pembentukan komisi itu akan membuat pelaksanaan otonomi khusus menjadi lebih efektif.

Pembentukan KKR diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi **Papua**. Hal ini menjadi perhatian serius bagi UP4B. Selain itu, menurut Bambang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggariskan, otonomi khusus merupakan salah satu dari tiga pilar kebijakan penyelesaian **Papua**. Dua pilar lainnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan percepatan pembangunan.

Wakil Presiden Boediono menambahkan, UP4B melakukan koordinasi percepatan pembangunan di **Papua**, mulai dari tahap perencanaan. Dengan demikian, pembangunan di **Papua** dan **Papua** Barat yang melibatkan begitu banyak instansi, kementerian, dan pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran dan efektif.

Menurut Wapres, pengertian pendekatan kesejahteraan perlu memasukkan pula pengertian rasa aman dan rasa adil. Karena itu, lingkup kerja UP4B diperluas.

(ONG/NWO/ATO/NTA)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,11

halaman lainnya: ---

Krisis Papua : Dua Anggota Brimob Tewas Tertembak

KOMPAS(Nasional) - Minggu, 04 Dec 2011 Halaman: **1,11** Penulis: **JOS; FAJ** Ukuran: **4394**
Pengindex: **pik.ris**

KRISIS PAPUA

Dua Anggota Brimob Tewas Tertembak

JAYAPURA, KOMPAS — Konflik di Puncak Jaya, **Papua**, kembali menelan korban. Hari Sabtu (3/12), dua anggota Brigade Mobil dari Markas Besar Polri tewas dalam penghadangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Wandegobak, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

Peristiwa yang juga mencederai seorang anggota Brimob Den-C Sorong itu menambah panjang daftar kasus penembakan oleh orang yang tidak teridentifikasi di wilayah **Papua** yang menewaskan aparat keamanan sejak awal tahun 2011.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah **Papua** Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, penghadangan kemarin terjadi saat anggota Brimob itu kembali dari Tingginambut, Puncak Jaya. Sekitar pukul 13.00 WIT, sebanyak 15 personel Brimob berangkat ke Tingginambut menggunakan kendaraan patroli. Mereka hendak mengevakuasi dua anggota Brimob yang sakit, yakni Ipda Febriyan dan Bripda AR Syukur.

Perjalanan dari Mulia ke Tingginambut awalnya lancar. Namun, sekitar dua jam kemudian, ketika kembali dari Tingginambut, di sekitar Kali Semen, Kampung Wandegobak, pinggiran kota Mulia, rombongan itu dihadang kelompok bersenjata disertai rentetan tembakan.

Dalam penghadangan tersebut, Bripda Feriyanto Kaluku, anggota Satuan Gegana Mabes Polri, tewas setelah peluru mengenai leher dan tembus ke belakang. Sebuah tembakan juga mengenai pelipis kanan Bripda Eko Afriansyah, menyebabkan anggota satuan kesehatan Brimob Mabes Polri itu juga tewas.

AR Syukur tak luput dari tembakan. Sebutir peluru menembus paha kirinya.

Menurut Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah **Papua** Komisaris Besar Wachyono, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Mulia. Anggota Brimob yang lain kemudian menyisir dan mengejar pelaku penghadangan.

Sudah berulang kali

Peristiwa penembakan terhadap aparat keamanan dengan pelaku yang tidak dikenal berulang kali terjadi di **Papua** sejak lima bulan terakhir. Sebelumnya, pada 24 Oktober, Kepala Kepolisian Sektor Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes tewas ditembak orang tak dikenal di Bandar Udara Mulia.

Sehari berikutnya, posko Brimob di kawasan Puncak Jaya dihujani tembakan. Meskipun tidak ada korban jiwa, penyerangan tersebut membuat warga cemas. Polisi memutuskan mengirimkan pasukan tambahan ke Puncak Jaya.

Penembakan di kawasan Puncak Jaya juga telah melukai beberapa anggota TNI dan polisi. Pada akhir Mei, anggota Kopassus, Sersan Satu Kamaru Jaman, cedera ditembak orang tak dikenal di Pasar Ilu.

Pada akhir Juni, anggota Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Udara, Briptu M Yazin, ditembak dan senjatanya direbut saat berjaga di Bandara Mulia.

Pada Juli lalu, Prajurit Satu Lukas Kafiar, anggota TNI Angkatan Darat, tewas dalam kontak senjata di Kampung Yambi, Distrik Mulia.

Bahkan, pada Agustus lalu, kelompok bersenjata juga berani menembaki helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat saat melintas di kawasan Puncak Senyum. Saat itu helikopter baru saja lepas landas dari Bandara Mulia untuk mengevakuasi anggota TNI yang luka akibat kontak senjata sehari sebelumnya.

Tidak kondusif

Menurut keterangan yang dihimpun dari masyarakat, situasi kota Mulia semalam mencekam. Beberapa honai (rumah tradisional di dataran tinggi **Papua**) di Kampung Wandegobak dibakar. Sejak pukul 18.00 WIT, masyarakat tidak berani keluar rumah. Anggota Brimob dengan menggunakan mobil patroli hilir mudik di jalan raya.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, Sabtu kemarin, menjelaskan, situasi di Puncak Jaya sebenarnya sudah relatif aman. Hanya saja, para penyerang menggunakan cara-cara penghadangan, memanfaatkan situasi ketika ada anggota polisi yang melintas di sekitar hutan.

Saud mengatakan, belum diketahui dari kelompok mana penyerang tersebut berasal. Polisi masih terus mengejar kelompok bersenjata itu.

"Kelompok bersenjata tersebut lari dan bersembunyi di hutan. Mereka tampaknya menguasai medan," katanya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyesalkan penghadangan oleh kelompok bersenjata terhadap aparat Polri yang sedang

mengevakuasi anggota yang sakit malaria di Distrik Mulia.

"Penghentian tindakan kekerasan seharusnya juga dilakukan semua pihak," kata Menko Polhukam dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Sabtu petang, seperti dikutip Antara. (JOS/FAJ)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Teror: Freeport Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penembakan

KOMPAS(Nasional) - Minggu, 16 Oct 2011 Halaman: **3** Penulis: **JOS** Ukuran: **3148** Pengindex: **pik.ftn**

TEROR

Freeport Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penembakan

Jayapura, Kompas — Manajemen PT Freeport Indonesia mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas rentetan kasus penembakan di kawasan PT Freeport Indonesia yang kerap terjadi dua tahun belakangan.

Dalam kasus penembakan terakhir Jumat lalu, tiga karyawan PT Puri Fajar Mandiri—kontraktor yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tanggul penahan tailing—tewas ditembak.

Ketiga korban tersebut adalah Heryana, Iip Abdul Rohman, dan Deden. Menurut keterangan Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah **Papua** Komisaris Besar Wachyono, Sabtu (15/10), seorang karyawan lain, Nasep Riszah selamat dari penembakan itu.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait, seusai mengikuti video konferensi dengan Presiden Direktur dan CEO PT Freeport Indonesia Armando Mahler, kemarin mengatakan, pihak manajemen menyampaikan dukacita dan menyesalkan penembakan di Mil 37, di dalam areal perusahaan tambang emas tersebut.

Mengutip keterangan Armando Mahler, Ramdani mengatakan, kasus tersebut menambah panjang rentetan kasus penembakan yang terjadi di areal perusahaan tambang itu.

Setidaknya, sejak Juli 2009, rentetan kasus penembakan di areal PT Freeport Indonesia telah menewaskan delapan orang dan mencederai 40 orang. Pihak berwenang didesak untuk mengungkap rentetan kasus tersebut dan menangkap pelakunya.

Kantor berita Antara melaporkan, melalui video jarak jauh dari Tembagapura, Mimika, Armando berharap dalang berbagai kasus penembakan di areal Freeport harus dicari dan dibongkar hingga tuntas.

"Kalau pelakunya tidak diseret ke meja hijau atau lembaga peradilan, perasaan karyawan, masyarakat, anak-anak, dan ibu-ibu pasti akan tertekan dan takut. Kami, karyawan Freeport,

adalah rakyat Indonesia yang punya hak asasi untuk hidup aman dan tenteram serta dilindungi oleh negara. Mohon aparat berwenang dapat mengusut siapa dalang dan pelaku teror selama ini," tutur Armando.

Menurut dia, penembakan brutal yang terjadi di areal kerja PT Freeport Indonesia di Mimika, **Papua**, dua tahun terakhir dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pekerja meninggal

Seorang karyawan PT Freeport Indonesia, Leo Wandegau, yang terluka dalam bentrok antara pekerja dan polisi beberapa waktu lalu, Sabtu siang, meninggal dunia di rumahnya di Kwamki Lama, Timika. Belum diketahui secara pasti yang menjadi penyebab kematian Leo.

Ketika dihubungi dari Jayapura, kemarin, paramedis Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, dokter Frans Thio, mengatakan, Leo sempat dirawat di unit gawat darurat RS tersebut karena ada luka di bagian punggungnya.

"Itu luka supervisial, tidak menembus badan dan organ vital," kata Frans.

Frans tak mengetahui penyebab kematian Leo. Ia juga enggan mengaitkan kematian Leo dengan aksi pemogokan karyawan Freeport yang sudah berlangsung selama sebulan.

Pada Rabu, 12 Oktober 2011, Leo sempat memeriksakan kembali luka itu dan, menurut Frans Thio, tidak ditemukan indikasi yang membahayakan. (JOS)

"Sejak Juli 2009 rentetan penembakan di areal Freeport telah menewaskan delapan orang dan mencederai 40 lainnya."

"Sejak Juli 2009 rentetan penembakan di areal Freeport telah menewaskan delapan orang dan mencederai 40 lainnya."

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Freeport "Force Majeure" * Pemogokan Buruh Freeport Juga Terjadi di Cile dan Peru

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 27 Oct 2011 Halaman: **15** Penulis: **DHF; EVY** Ukuran: **2742** Pengindex: **pik.snt**

Freeport "Force Majeure"

Pemogokan Buruh Freeport Juga Terjadi di Cile dan Peru

Jakarta, Kompas — Mogok kerja oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia telah berdampak terhadap produksi dan pengapalan konsentrat. Akibatnya, PT Freeport Indonesia menyatakan force majeure terhadap perjanjian penjualan konsentrat.

Hal ini dikatakan Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait, Rabu (26/10), di Jakarta.

Perkiraan dampak-dampak itu termasuk di dalam laporan pendapatan perusahaan yang diterbitkan pekan lalu.

"Selama masa itu, kami telah bekerja sama secara kooperatif dengan para pembeli kami berdasarkan perubahan jadwal produksi dan pengapalan konsentrat kami," katanya.

Produksi konsentrat yang lebih rendah tersebut, lanjut Ramdani, berdampak terhadap kemampuan kinerja perusahaan itu untuk memenuhi komitmen-komitmen penjualan hasil produksinya secara optimal.

Di bawah kondisi force majeure, Freeport lepas dari kewajiban membayar kompensasi kepada pembeli atas keterlambatan pengiriman dan tidak terpenuhinya berbagai kewajiban lain sesuai dengan kontrak pembelian. Sekitar 8.000 dari total 23.000 pekerja Freeport di Indonesia telah mogok lebih dari sebulan dan menyebabkan gangguan terhadap proses produksi.

"Produksi (yang lebih rendah) itu telah berpengaruh terhadap kemampuan kami memenuhi seluruh komitmen penjualan kami. Akibatnya, kami perlu menyatakan (kondisi) force majeure terhadap beberapa perjanjian penjualan yang terdampak," tutur Ramdani kepada kantor berita Agence France-Presse (AFP).

Pemogokan pekerja Freeport tidak hanya terjadi di tambang Grasberg di **Papua**, Indonesia, tetapi juga di tambang-tambangnya di Cile dan Peru. Perusahaan tersebut memperkirakan akan kehilangan produksi sebesar 45 juta kilogram tembaga dan 3.100 kilogram emas pada tahun ini akibat pemogokan itu.

Para pekerja di tambang Freeport di Indonesia mogok untuk menuntut kenaikan upah, dari 1,50 dollar AS (sekitar Rp 13.270) per jam menjadi 7,50 dollar AS (sekitar Rp 66.340) per jam. Pekerja Freeport di Indonesia mengaku diupah paling rendah dibandingkan dengan pekerja Freeport di belahan dunia lain.

Sementara itu, mogok ribuan karyawan PT Freeport Indonesia sekaligus blokade akses masuk ke areal Freeport, yang dilakukan sejak 15 September lalu, tampaknya belum akan berakhir. Penawaran baru manajemen PT Freeport Indonesia berupa kenaikan upah karyawan sebesar 28 persen selama dua tahun, yang diajukan pihak manajemen Selasa malam lalu, masih ditolak karyawan.

"Kenaikan itu masih jauh dari tuntutan karyawan sehingga kami menolaknya," ujar juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan. (APA/AFP/DHF/EVY)

Kembali ke atas

KOMPASNET

Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Pertambangan: Freeport Pertimbangkan Hentikan Operasi

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 18 Oct 2011 Halaman: **20** Penulis: **evy** Ukuran: **3067** Foto: **1**
Pengindex: **pik.nnk**



PERTAMBANGAN

Freeport Pertimbangkan Hentikan Operasi

Jakarta, Kompas — Manajemen PT Freeport Indonesia mempertimbangkan penghentian operasi di lokasi pertambangan perusahaan tersebut di Timika, **Papua**. Hal ini sebagai tindak lanjut atas terjadinya aksi perusakan terhadap fasilitas perusahaan dan aksi sabotase atau penutupan jalan untuk menghambat komunitas perusahaan mendapat suplai barang-barang yang dibutuhkan.

Menurut juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, Senin (17/10), di Jakarta, kegiatan produksi masih dilakukan dengan kapasitas yang terbatas.

Wakil Presiden Bidang Surface Mine PT Freeport Indonesia Nurhadi Sabirin menyatakan, kegiatan produksi terbatas itu hanya dapat dilakukan jika para karyawan dapat bekerja dengan aman, fasilitas perusahaan dapat dihindari dari aksi sabotase, dan komunitas perusahaan mendapat suplai barang-barang yang dibutuhkan.

"Jika hal-hal itu tidak dapat dilakukan, kegiatan produksi dihentikan," ujar Nurhadi.

Sebagai buntut bentrok ribuan karyawan Freeport dengan kepolisian yang menimbulkan korban jiwa, massa memasuki wilayah operasi PT Freeport Indonesia dengan merusak pagar pintu masuk, merusak kantor salah satu kontraktor. Massa juga memotong pipa konsentrat, yaitu pipa yang mengalirkan konsentrat dari pabrik di dataran tinggi menuju pabrik pengeringan di pelabuhan. Begitu pipa dipotong, hasil produksi tidak bisa lagi dikirim.

"Saat ini, kami fokus meneruskan manajemen pemeliharaan keselamatan tambang, seperti yang diminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," kata dia. Karena situasi keamanan tidak kondusif, sekolah-sekolah yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Jaya

Wijaya mulai kemarin ditutup untuk menjaga keselamatan anak-anak sekolah.

Ramdhani menjelaskan, massa menutup jalan akses dari pelabuhan menuju wilayah kerja perusahaan dengan menggunakan truk-truk besar sejak lima hari terakhir. Selain itu, massa menutup jalan menuju kawasan permukiman dan perkantoran PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana sejak hari Minggu.

Kondisi itu mengakibatkan barang-barang logistik yang diperlukan untuk kegiatan produksi dan operasional perusahaan ataupun kebutuhan logistik untuk keluarga karyawan serta avtur untuk bandara tertahan di pelabuhan. Akibat tidak ada lagi stok avtur, sejak hari Minggu tidak ada lagi penerbangan dari Timika dan sebaliknya.

"Selain operasi penerbangan Freeport ke Timika, penerbangan komersial lain juga terganggu. Garuda yang semula melayani Denpasar-Timika-Jayapura menjadi Denpasar-Jayapura. Merpati juga menghentikan penerbangannya. Penerbangan perintis ke pedalaman **Papua** juga dihentikan karena stok avtur tidak ada," kata Ramdhani. (EVY)

Image :

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Director Executive Vice President Chief Administration Officer PT Freeport Indonesia Sinta Sirait (kanan) di Jakarta, Senin (17/10), menjelaskan kondisi terakhir PT Freeport di **Papua**. Freeport terpaksa berhenti beroperasi karena ada gangguan keamanan. Situasi terakhir dilaporkan karyawan di **Papua** melalui konferensi via video.

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Penyelesaian Papua: Gunakan Pendekatan Non-kekerasan

KOMPAS(Nasional) - Minggu, 13 Nov 2011 Halaman: **2** Penulis: **APA; ONG** Ukuran: **2410** Pengindex: **pik.ris**

PENYELESAIAN PAPUA

Gunakan Pendekatan Non-kekerasan

JAKARTA, KOMPAS — Pendekatan non-kekerasan tetap dilakukan dalam menyelesaikan berbagai kasus di **Papua**. "Saya merintis dialog sejak akhir tahun lalu sebelum UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat) dibentuk. Saya terbuka berdialog dengan semua pihak dan akan bekerja mengawal dan mengendalikan pembangunan di **Papua**," ujar Ketua UP4B Bambang Dharmono.

Dia meminta seluruh kelompok di **Papua** mau berbagi informasi dan membantu mengawasi pembangunan. Dia akan merespons positif seluruh informasi dugaan korupsi yang merajalela di **Papua**.

Namun, ujar Direktur Program Imparsial Al Araf, seusai diskusi terbatas Undang-Undang Keamanan Negara, Sabtu (12/11), UP4B akan lebih terlegitimasi apabila mendukung pengusutan tuntas terhadap kasus-kasus kekerasan di **Papua**. "Itu bukan tugas UP4B, tetapi akan menjadi dasar legitimasi dan kepercayaan rakyat **Papua** kalau pemerintah mau menindak tegas pelanggar HAM di **Papua**," ujarnya.

Menurut Al Araf, setelah menuntaskan pengusutan kasus kekerasan, UP4B harus bisa berdialog dengan semua kelompok, termasuk separatis.

Koordinator Komunitas Adat **Papua** Anti Korupsi (Kampak) **Papua**, Michael Rumaropen, di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, menegaskan, UP4B tidak perlu datang ke **Papua** sebelum kekerasan di **Papua** diselesaikan. UP4B juga dituntut menindak tegas pejabat korup di **Papua**.

Di Timika, dukungan dana dijanjikan diberikan berbagai serikat pekerja dari luar negeri untuk membantu perjuangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia (FI) yang menuntut upah layak. Dukungan dana ini salah satunya untuk mengganti upah yang tidak dibayarkan pihak manajemen PT FI selama karyawan mogok kerja.

Juru Bicara SPSI PT FI, Juli Parorongan, mengatakan hal tersebut kepada ribuan karyawan di

checkpoint 1 areal PT FI di Timika, Kabupaten Mimika, Sabtu. Serikat pekerja dari luar negeri yang akan membantu terse-but antara lain dari Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Australia.

Juru Bicara PT FI, Ramdhani Sirait, beberapa waktu lalu, mengatakan, upah tidak dibayar selama mogok kerja karena FI menilai mogok kerja tidak sah. Ketua Lembaga Masyarakat Adat **Papua**, Lenis Kogoya, di Timika, memohon manajemen dan karyawan PT FI segera menyelesaikan perselisihan. (APA/ONG)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Krisis Papua: Hari Ini Pemerintah Kembali Gelar Dialog

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 07 Dec 2011 Halaman: **23** Penulis: **JOS; EDN; INA; WHY; OSA** Ukuran: **3553** Pengindex: **pik.snt**

KRISIS PAPUA

Hari Ini Pemerintah Kembali Gelar Dialog

Jakarta, Kompas**Pemerintah** pusat, Rabu (7/12) **ini**, kembali berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat di Jayapura, Papua. Pertemuan itu mengagendakan paparan dan evaluasi **pemerintah** pusat atas penyelenggaraan otonomi khusus Papua, serta penyampaian aspirasi dari para tokoh di Papua.

"Saya malam **ini** (Selasa, 6/12) berangkat ke Papua untuk berdialog tentang pembangunan di sana. Bersama Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat, dan Kepala Polri, kami akan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua dan berdialog secara intensif," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Selasa, di Istana Negara, Jakarta.

Sehari menjelang dialog tersebut, situasi keamanan di Papua secara umum kondusif. Namun tidak ada kegiatan atau persiapan menonjol terkait penyelenggaraan dialog itu. Informasi yang dihimpun dari Pemprov Papua menyebutkan, acara tersebut kemungkinan digelar di kompleks Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua.

Dialog kali **ini** merupakan kelanjutan dari dialog yang digelar di Kemendagri, 2 Desember lalu. Dalam dialog terdahulu, mengemuka persoalan tentang pembangunan di Papua yang selama **ini** tidak melibatkan kelompok agama dan masyarakat adat. Akibatnya, dana yang dicairkan maupun upaya pembangunan tidak membawa manfaat bagi warga.

Dalam pertemuan itu, Presiden West Papua National Authority Teriyomus Yoku mengatakan, kegagalan **pemerintah** disebabkan program hanya sampai birokrasi **pemerintah**. Teriyomus juga mengatakan, saat **ini** warga Papua tidak mempunyai hak milik atas kekayaan alamnya, tidak memiliki tempat tinggal yang aman, dan tidak dapat menikmati dalam suasana aman dan bebas.

Berangsur membaik

Kondisi keamanan di Papua secara umum berangsur membaik, setelah beberapa **hari** terakhir situasi Papua mencekam dengan berbagai kasus kekerasan, seperti penembakan dan

penganiayaan yang menewaskan tiga anggota polisi.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono mengatakan, secara umum kondisi Papua aman.

Pada sisi lain, menurut Wachyono, polisi juga terus berupaya mengejar dan menangkap pihak-pihak yang selama **ini** melakukan kekerasan, termasuk yang menyerang aparat keamanan belakangan **ini**.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, di Jakarta, Senin malam, mengatakan, **pemerintah** tetap akan berupaya menegakkan hukum atas setiap tindak kriminal.

"Saya setuju dengan berbagai kalangan pegiat HAM tentang penghentian kekerasan di Papua," kata Djoko. Menurut Djoko, aparat polisi, TNI, dan pemda sepakat untuk tidak bertindak keras menghadapi situasi di Papua belakangan **ini**.

Kemarin, mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, di Jakarta, mengatakan, konflik Papua pasti berdampak serius. Orang akan khawatir, karena masyarakat luar negeri tidak mengetahui persis letak Papua. Padahal, Indonesia memiliki banyak pulau," katanya dalam dialog tunggal bertajuk "Jusuf Kalla Speaks His Mind: The Art of Leadership" yang diselenggarakan oleh Majalah Globe Asia di Jakarta.

Kalla mengatakan, betapa pun pentingnya Pulau Jawa, keberadaan Papua tetap tidak boleh dipandang secara diskriminatif. Munculnya konflik berakar pada ketidakadilan dalam sistem anggaran. Bukan sekadar untuk anggaran pengamanan. Padahal, penyebaran anggaran yang merata dapat digunakan untuk menunjang kegiatan investasi, seperti membangun jalan dan memberikan subsidi untuk kesejahteraan rakyat.

(JOS/EDN/INA/WHY/OSA)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Krisis Papua: Hari Ini Pemerintah Kembali Gelar Dialog

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 07 Dec 2011 Halaman: **23** Penulis: **JOS; EDN; INA; WHY; OSA** Ukuran: **3553** Pengindex: **pik.snt**

KRISIS PAPUA

Hari Ini Pemerintah Kembali Gelar Dialog

Jakarta, Kompas**Pemerintah** pusat, Rabu (7/12) **ini**, kembali berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat di Jayapura, Papua. Pertemuan itu mengagendakan paparan dan evaluasi **pemerintah** pusat atas penyelenggaraan otonomi khusus Papua, serta penyampaian aspirasi dari para tokoh di Papua.

"Saya malam **ini** (Selasa, 6/12) berangkat ke Papua untuk berdialog tentang pembangunan di sana. Bersama Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat, dan Kepala Polri, kami akan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua dan berdialog secara intensif," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Selasa, di Istana Negara, Jakarta.

Sehari menjelang dialog tersebut, situasi keamanan di Papua secara umum kondusif. Namun tidak ada kegiatan atau persiapan menonjol terkait penyelenggaraan dialog itu. Informasi yang dihimpun dari Pemprov Papua menyebutkan, acara tersebut kemungkinan digelar di kompleks Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua.

Dialog kali **ini** merupakan kelanjutan dari dialog yang digelar di Kemendagri, 2 Desember lalu. Dalam dialog terdahulu, mengemuka persoalan tentang pembangunan di Papua yang selama **ini** tidak melibatkan kelompok agama dan masyarakat adat. Akibatnya, dana yang dicairkan maupun upaya pembangunan tidak membawa manfaat bagi warga.

Dalam pertemuan itu, Presiden West Papua National Authority Teriyomus Yoku mengatakan, kegagalan **pemerintah** disebabkan program hanya sampai birokrasi **pemerintah**. Teriyomus juga mengatakan, saat **ini** warga Papua tidak mempunyai hak milik atas kekayaan alamnya, tidak memiliki tempat tinggal yang aman, dan tidak dapat menikmati dalam suasana aman dan bebas.

Berangsur membaik

Kondisi keamanan di Papua secara umum berangsur membaik, setelah beberapa **hari** terakhir situasi Papua mencekam dengan berbagai kasus kekerasan, seperti penembakan dan

penganiayaan yang menewaskan tiga anggota polisi.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono mengatakan, secara umum kondisi Papua aman.

Pada sisi lain, menurut Wachyono, polisi juga terus berupaya mengejar dan menangkap pihak-pihak yang selama **ini** melakukan kekerasan, termasuk yang menyerang aparat keamanan belakangan **ini**.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, di Jakarta, Senin malam, mengatakan, **pemerintah** tetap akan berupaya menegakkan hukum atas setiap tindak kriminal.

"Saya setuju dengan berbagai kalangan pegiat HAM tentang penghentian kekerasan di Papua," kata Djoko. Menurut Djoko, aparat polisi, TNI, dan pemda sepakat untuk tidak bertindak keras menghadapi situasi di Papua belakangan **ini**.

Kemarin, mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, di Jakarta, mengatakan, konflik Papua pasti berdampak serius. Orang akan khawatir, karena masyarakat luar negeri tidak mengetahui persis letak Papua. Padahal, Indonesia memiliki banyak pulau," katanya dalam dialog tunggal bertajuk "Jusuf Kalla Speaks His Mind: The Art of Leadership" yang diselenggarakan oleh Majalah Globe Asia di Jakarta.

Kalla mengatakan, betapa pun pentingnya Pulau Jawa, keberadaan Papua tetap tidak boleh dipandang secara diskriminatif. Munculnya konflik berakar pada ketidakadilan dalam sistem anggaran. Bukan sekadar untuk anggaran pengamanan. Padahal, penyebaran anggaran yang merata dapat digunakan untuk menunjang kegiatan investasi, seperti membangun jalan dan memberikan subsidi untuk kesejahteraan rakyat.

(JOS/EDN/INA/WHY/OSA)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,15
  halaman lainnya: ---
- Total Image: 2

Hentikan Kekerasan di Papua * Sebuah Mobil Patroli Ditembaki di Areal PT Freeport Indonesia

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 27 Oct 2011 Halaman: **1,15** Penulis: **APA; JOS; UTI; ONG; BIL; NTA; FER; TRA** Ukuran: **6489** Foto: **1** Infografis: **1** Pengindex: **pik.snt**





Hentikan Kekerasan di **Papua**

Sebuah Mobil Patroli Ditembaki di Areal PT Freeport Indonesia

Timika, Kompas — Kekerasan di **Papua** terus terjadi. Mobil patroli Route Patrol 15 ditembaki orang tak dikenal saat melewati Mil 35 (Kilometer 56) di areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (26/10). Pemerintah diminta menghentikan aksi kekerasan itu.

Koordinator Jaringan Damai **Papua** Neles Tebay di Jayapura, Rabu, menegaskan, setiap bentuk kekerasan harus dihentikan karena kekerasan tidak akan memberikan hasil positif bagi **Papua**. Sebaliknya, dialog harus dihidupkan untuk mencari solusi guna menuntaskan berbagai persoalan di **Papua**.

Ketua Tim Kajian **Papua** Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan Widjojo juga mengatakan, pemerintah harus melakukan pendekatan politik dengan melakukan dialog bersama para pemimpin politik di **Papua**. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga harus mulai berani menegakkan hukum dengan mengejar dan menangkap pelaku kekerasan. "Ini untuk mencegah eskalasi lebih lanjut," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengaktifkan utusan khusus **Papua**. "Segera dilantik, beraksi, dan bertindak supaya Presiden bisa ambil tindakan dan keputusan," ujar Muridan yang tengah berada di **Papua** Barat.

Dalam tiga hari berturut-turut terjadi penembakan di **Papua**. Setelah penembakan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, yang menewaskan Kepala Polsek Ajun Komisaris Dominggus Awes

dan serangan ke posko Brimob, penembakan terjadi di Timika ketika mobil patroli ditembaki saat melintasi Mil 35, areal PT Freeport Indonesia, Rabu pukul 00.15. Padahal, pengamanan areal Freeport sudah diperketat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, mobil patroli Route Patrol (RP) 15 berpatroli rutin di areal PT Freeport dengan mobil patroli RP 17. Malam itu, kedua mobil patroli bergerak dari Mil 40 (Kilometer 64) ke arah Kuala Kencana. Saat melintas di Mil 35, mobil patroli RP 15 yang berada di depan, sekitar 50 meter dari mobil RP 17, dihujani tembakan. Kaca depan mobil RP 15 retak, kaca belakang kiri dan kanan pecah. Sejumlah lubang bekas tembakan terlihat di bodi mobil.

Meski demikian, tak ada korban. Lima orang yang berada di mobil RP 15 tidak terluka. Kelima orang itu adalah tiga personel Brimob Polda **Papua**, yaitu Brigadir Kepala Bambang, Brigadir Kepala Leo, dan Brigadir Kepala Hartawan, serta dua petugas keamanan PT Freeport, yakni P Pangemanan dan Benyamin Sampe. Tembakan itu dibalas anggota Brimob yang berada di mobil RP 17. Baku tembak berlangsung 10 menit, sampai kelompok penembak itu kabur.

"Aparat gabungan TNI dan polisi masih berupaya mengejar para pelaku penembakan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Toni Sarjaka.

Di areal PT Freeport saja penembakan kemarin merupakan peristiwa ketiga dalam dua pekan terakhir ini. Dua penembakan sebelumnya menewaskan enam orang, terdiri dari empat karyawan PT Freeport dan dua penjaga kios di Mil 40. "Aparat harus bekerja lebih serius untuk mengakhiri teror karena teror membuat warga diliputi rasa takut," kata tokoh adat di Lembaga Adat Mimika, Thomas Wanmang.

Memang, penjagaan di areal PT Freeport diperketat. Satuan Tugas Amole yang khusus menjaga areal PT Freeport, yang biasanya berjumlah 635 personel TNI dan polisi, ditambah 100 polisi. Meski demikian, kata Ketua Tim Asisten Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw, perlu koordinasi dan komitmen kuat semua pihak, baik aparat maupun masyarakat.

Hanya saja tidak mudah mengejar para pelaku. Wakil Kapolres Mimika Komisaris Mada Indra Laksanta mengatakan, kondisi geografis berupa hutan lebat dan pegunungan, ditambah cuaca yang kerap ekstrem, menjadi kendala cukup besar.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, operasi pengejaran penembakan di Puncak Jaya di bawah kendali Kepala Polda **Papua** Inspektur Jenderal BL Tobing dan diawasi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Imam Sujarwo. Pengawasan terhadap penyidikan kasus-kasus seperti Kongres Rakyat **Papua** III dan kasus penembakan dilakukan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Bekto Suprapto.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengingatkan pemerintah untuk mengurangi pendekatan represif keamanan di **Papua**. Pemerintah jangan tergesa-gesa menerjunkan tentara dalam jumlah lebih banyak ke **Papua** karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk

memunculkan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Penanganan masalah tetap diprioritaskan dilakukan oleh aparat kepolisian. TNI diturunkan hanya untuk membantu hal-hal yang sulit ditangani polisi," katanya di Jakarta.

Menurut Mahfudz, kekuatan separatis di **Papua** tak besar, baik jumlah maupun persenjataan. Kelompok separatis bersenjata di **Papua**, kata Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo secara terpisah, harus dilawan dengan senjata. "Komitmen TNI AD adalah menjaga keutuhan Republik Indonesia. Namun, dalam penindakan, kita mengedepankan peran polisi," kata Pramono.

Karena itu, menurut Neles Tebay, dialog menjadi sangat penting. Penyelesaian demokratis juga disuarakan mahasiswa **Papua** di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat **Papua** Anti Militerisme saat berunjuk rasa di Semarang, Rabu.

Penyerbuan

Terkait pembubaran Kongres Rakyat **Papua** III, menurut anggota Komnas HAM, Ridha Saleh, di Jayapura, banyak kejanggalan. Pembubaran paksa yang diwarnai kekerasan, seperti penembakan secara sporadis, mengakibatkan masyarakat menjadi korban dan semakin takut.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo Pr mengatakan, dari laporan Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Neles Tebay, terjadi penyerbuan aparat di kampus STFT, seminari, dan biara. "Pendekatan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah," katanya.

Koordinator Tim Pembela Muslim Mahendradatta meminta Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa kasus penembakan di **Papua** bukan dilakukan gerakan separatis, melainkan oleh teroris agar penanganannya lebih serius lagi.

(APA/JOS/UTI/ONG/BIL/NTA/FER/TRA)

Image :

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Mobil patroli yang ditumpangi 3 personel polisi dan 2 petugas pengamanan PT Freeport Indonesia ditembaki di Mil 35 (Kilometer 56), areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, **Papua**, Rabu (26/10) pukul 00.15. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Keamanan: Hentikan Kekerasan di Tanah Papua

KOMPAS(Nasional) - Senin, 21 Nov 2011 Halaman: **4** Penulis: **LOK; ONG; OSD** Ukuran: **2905**
Pengindex: **pik.nnk**

KEAMANAN

Hentikan Kekerasan di Tanah **Papua**

Jakarta, Kompas — Untuk menyelesaikan persoalan **Papua**, hal penting yang harus dilakukan adalah menghentikan kekerasan negara di tanah **Papua**. Setelah itu, menasionalisasi seluruh aset/kekayaan Indonesia yang dikuasai asing, seperti Freeport, yang hingga kini menimbulkan persoalan di **Papua**.

"Yang terjadi adalah praktik korporasi yang menjalankan praktik-praktik ketidakadilan," kata Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi Masinton Pasaribu dalam dialog Petisi 28 bertema "Mengungkap Kolonialisme dari Lubang Tambang" di Jakarta, Minggu (20/11).

Menurut Masinton, sejarah kehadiran PT Freeport di Indonesia adalah sejarah pengukuhan beroperasinya mesin-mesin penjajahan baru yang merampok kekayaan Indonesia. Dari tahun ke tahun, Freeport terus meraup keuntungan besar dari tambang emas, perak, tembaga, dan uranium. Menurut PT Freeport, penghasilan bersihnya mencapai 20 juta dollar AS (Rp 180 miliar) per hari atau lebih kurang Rp 70 triliun per tahun.

"Sebanyak 99 persen keuntungan Freeport dari tanah **Papua** dibawa ke Amerika Serikat dan hanya 1 persen yang diberikan kepada Indonesia. Secuil keuntungan yang diserahkan ke Indonesia itu hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha dan pejabat pusat di Jakarta serta pejabat daerah di **Papua**," katanya.

Pelanggaran HAM

Selama 10 tahun pelaksanaan otonomi khusus **Papua** tidak berarti banyak bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di **Papua**. Bahkan, tujuh tahun usia pelaksanaan otonomi khusus **Papua** di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru melebarkan jurang kesenjangan di **Papua**. Tindak kekerasan aparat TNI/Polri sejak zaman Orde Baru, Soeharto, terhadap rakyat **Papua** masih dilanjutkan oleh Presiden Yudhoyono.

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), banyak terjadi

kasus kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di **Papua** dalam 40 tahun terakhir. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan pelanggaran HAM berat. Namun, kata Koordinator Kontras Haris Azhar, kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Wamena dan Wasior, tidak pernah dituntaskan meski berkasnya telah sampai di Kejaksaan Agung.

Presiden Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, Sabtu malam, mengatakan, jika tentara atau polisi, termasuk yang ditempatkan di **Papua**, melanggar hukum atau melanggar HAM, mereka pasti akan ditindak.

"Tetapi, ada situasi di **Papua** karena ada gerakan-gerakan **Papua** merdeka, ada masalah kedaulatan negara, mereka menyerang TNI, Polri, pekerja, dan rakyat. Ketika tentara melakukan pembelaan diri, mengapa itu tidak boleh? Mengapa itu dikatakan melanggar HAM. Mereka melakukan tugasnya. Tetapi, kalau mereka dalam tindakannya melebihi kepatutan, bisa dilakukan investigasi," kata Presiden dalam jumpa pers setelah KTT ASEAN dan KTT Asia Timur berakhir. (LOK/ong/osd)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Papua: Mendagri: Hilangkan Pikiran tentang Referendum

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 08 Dec 2011 Halaman: **4** Penulis: **ODY; EDN; JOS** Ukuran: **2543**
Pengindex: **pik.nnk**

PAPUA

Mendagri: **Hilangkan Pikiran** tentang Referendum

Jayapura, Kompas — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta masyarakat Papua agar tidak lagi berpikir tentang referendum atau keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut dia, pemerintah menyadari pembangunan di Papua belum optimal. Untuk itu, pemerintah berniat kuat mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan di Papua.

Besarnya dana yang dilimpahkan untuk Provinsi Papua rata-rata Rp 5 triliun per tahun, kata Gamawan, merupakan salah satu bentuk perhatian tersebut. Besarnya dana tersebut juga merupakan bentuk penghargaan yang wajar dan adil bagi Papua karena pembangunan Papua pada masa lalu memang tertinggal.

"Namun, untuk sejahtera dibutuhkan waktu. Masyarakat perlu bekerja keras dan pemerintah akan memfasilitasinya," kata Gamawan dalam dialog bersama beberapa wakil masyarakat Papua, Rabu (7/12), di kompleks Kantor Gubernur Papua di Jayapura.

Menurut Penjabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai, pertemuan dan dialog tersebut merupakan bagian dari komunikasi konstruktif. Pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B).

Dialog itu juga dihadiri Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Bambang Dharmono, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara Letjen Marciano Norman, Penjabat Gubernur Papua Barat Tanri Bali Lamo, Panglima Kodam XVII Cendrawasih Mayjen Erfi Triassunu, Kepala Polda Papua Irjen BL Tobing, serta Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Letjen Hotmangaradja Pandjaitan.

Wakil masyarakat Papua yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya, Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni, juru bicara mantan narapidana politik Papua, Saul J Bomay, dan tokoh pemuda Isaac Samuel Karubaba.

Dalam pertemuan itu, masing-masing wakil masyarakat mendapat kesempatan berbicara. Saul J Bomay dan Mako Tabuni menyampaikan bahwa referendum adalah hak politik yang harus dihargai pemerintah.

Menurut Saul J Bomay, P4B hanyalah gula-gula politik. "Ujung-ujungnya menyengsarakan," katanya.

Secara terpisah, Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah Ngesti D Prasetyo mengatakan, dialog antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat harus terus didorong demi menemukan solusi damai atas kekerasan yang terus berlangsung.

(ODY/EDN/JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Hukum Harus Tegak * Gunakan Pendekatan Kemanusiaan di Papua

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 22 Nov 2011 Halaman: **4** Penulis: **INA; BIL; NTA; EDN** Ukuran: **3006**
Infografis: **1** Pengindex: **pik.yrm**



Hukum Harus Tegak

Gunakan Pendekatan Kemanusiaan di **Papua**

Jakarta, Kompas — Dialog Jakarta-**Papua** diyakini tidak bisa berjalan baik jika tidak dibarengi penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di **Papua**. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus punya kemauan politik yang besar untuk menegakkan hukum di **Papua**.

"Dengan entry point penegakan hukum, baru bisa dimulai dengan dialog, dan dialog itu menurut saya harus dipimpin Presiden," kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi di Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Hendardi, untuk bisa menegakkan hukum di **Papua**, dibutuhkan keberanian, terutama mengingat penegakan hukum ini juga harus dilakukan terhadap aparat militer dan polisi yang terbukti melanggar hukum di **Papua**. "Presiden yang harus memimpin penegakan hukum di sana, kalau perlu memberikan sanksi kepada aparat penegak hukum yang ditugaskan menegakkan hukum, tetapi tidak menegakkan hukum," katanya.

Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B), lanjut Hendardi, bisa mendorong percepatan dialog. Namun, tanpa keseriusan dalam penegakan hukum, UP4B juga bisa gagal mewujudkan dialog di **Papua**.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, secara terpisah, pemerintah terkesan membiarkan penyelesaian masalah HAM di **Papua**. Hal ini menimbulkan dugaan adanya konspirasi pemerintah pusat untuk membiarkan konflik dan

kekerasan terus terjadi di **Papua**.

Anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar asal **Papua**, Agustina Basik, menambahkan, di daerah asalnya, petugas intelijen bertebaran, baik dari Badan Intelijen Negara maupun Badan Intelijen Strategis. Namun, masih saja ada penembakan secara misterius dan penyerangan.

"Kalau OPM (Organisasi **Papua** Merdeka) menyerang, tidak ada panah ditinggalkan sebab panah itu seperti istrinya. Ketika ada yang memanah dan meninggalkan panahnya, itu OPM jenis apa, OPM jadi-jadian?" kata Agustina dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin.

Pendekatan kemanusiaan

Hendardi mengatakan, sebaiknya pemerintah saat ini mencontoh apa yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid—biasa dipanggil Gus Dur—yang menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk menangani **Papua**.

"Dia datang sendiri ke **Papua** untuk merayakan tahun baru bersama masyarakat **Papua**. Itu satu pendekatan manusiawi. Jadi, orang **Papua** juga dianggap sebagai bagian dari kita. Belum lagi soal bendera, Gus Dur menganggap ini sebagai suatu simbol budaya saja. Bagian dari ekspresi budaya, asal tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih," katanya.

Agustina mengatakan, pemerintah harus mengubah pendekatan pembangunan di **Papua** dan **Papua** Barat. Masyarakat di kedua daerah itu memerlukan pendampingan untuk membangun daerah, bukan gelontoran anggaran otonomi khusus sebagaimana selama ini dilakukan pemerintah.

(ina/bil/nta/edn)

Grafik: Langkah Pemerintah Untuk **Papua**

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Istana Sulit Atasi Masalah di Papua * Briptu Marselinus Tertembak di Pelipisnya

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 08 Nov 2011 Halaman: **15** Penulis: **har; apa; fer; ina; nwo; why;** Ukuran: **3122** Pengindex: **pik.hti**

Istana Sulit Atasi Masalah di **Papua**

Briptu Marselinus Tertembak di Pelipisnya

Jakarta, Kompas — Pihak Istana Kepresidenan mengakui kesulitan mengatasi gangguan keamanan yang terus berulang di **Papua** dan **Papua** Barat. Hal ini karena ada banyak kelompok bersenjata di kedua provinsi itu, yang terus mengacau keamanan wilayah itu. Persoalan di **Papua** saat ini juga amat krusial.

Demikian dikatakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Senin (7/11), di Bina Graha Jakarta. "Memang sulit karena masalahnya yang diamankan bukan hanya satu orang," katanya.

Menurut Julian, kemunculan kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan di **Papua** menjadi persoalan yang krusial. Diperlukan penanganan yang khusus dan tegas terhadap kelompok bersenjata itu. "Jika ada kelompok bersenjata yang secara sadar mengacau keamanan, tentu akan ditindak tegas," ujarnya.

Kepolisian, menurut dia, terus bekerja untuk memastikan kondisi di **Papua** normal lagi. "Yang jelas tidak boleh ada pembiaran oleh negara dalam hal yang sifatnya anarkistis dan mengganggu keamanan masyarakat," ujar Julian.

Soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada saat aparat keamanan membubarkan Kongres Rakyat **Papua** III, beberapa saat lalu, Julian memastikan, Polri tengah menyelidiki kasus itu. Hingga saat ini belum ada kesimpulan mengenai siapa yang bersalah atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi pasca-pembubaran kongres tersebut.

"Instruksi langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak boleh ada kekerasan kepada rakyat," ujarnya.

Stabilitas keamanan dan upaya percepatan pembangunan di **Papua** dan **Papua** Barat akan menjadi bahasan dalam rapat kabinet terbatas, yang dipimpin Presiden pada Rabu besok. "Ini menunjukkan Presiden sangat menaruh perhatian mendalam terhadap persoalan di **Papua** dan **Papua** Barat," katanya.

Julian sebelumnya juga menjelaskan, Presiden tidak pernah meninggalkan rakyat **Papua** dan **Papua** Barat. Presiden memberikan perhatian khusus terhadap rakyat dan pembangunan di **Papua** dan **Papua** Barat.

Dia menambahkan, pelantikan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat Bambang Dharmono menunggu saat yang tepat saja. Namun, Julian tidak menjelaskan kapan waktu tepat itu.

Penembakan masih terjadi

Dari Kabupaten Mimika dilaporkan, Briptu Marselinus Gua, anggota Satuan Tugas Amole, yang mengamankan areal PT Freeport Indonesia, Senin siang, tertembak di pelipis kirinya oleh orang tidak dikenal. Penembakan terjadi saat Marselinus berpatroli di Mil 45 (Km 72), areal Freeport, di Timika, Mimika.

Komandan Satgas Amole Ajun Komisaris Besar Alexander Louw mengatakan, Marselinus ditemani lima personel satgas berpatroli memakai mobil bernomor lambung SA-07. Mobil patroli bergerak dari Mil 38 (Km 60,8), areal Freeport ke Mil 50 (Km 80). Tiba di Mil 45, mobil ditembaki dari arah hutan di kiri jalan. Marselinus tertembak. Penembakan di areal Freeport adalah yang keenam dalam sebulan terakhir.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menuturkan, polisi masih memburu pelakunya.

(har/apa/fer/ina/nwo/why)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Dialog : Jalan Kekerasan Versus Jalan Damai

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 04 Nov 2011 Halaman: **45** Penulis: **B Josie S Hardianto** Ukuran: **5096**
Pengindex: **pik.pry**

DIALOG

Jalan Kekerasan Versus Jalan Damai

Oleh B Josie S Hardianto

Pembubaran Kongres Rakyat **Papua** III, penembakan di Mulia, dan penembakan di area PT Freeport Indonesia menambah panjang sejarah kekerasan di **Papua**.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan S Widjojo, melihat kekerasan itu sebagai siklus. Tak lama seusai Kongres Rakyat **Papua** (KRP) II pada tahun 2000, para tokoh KRP yang tergabung dalam Presidium Dewan **Papua**, seperti Theys Eloway, Thaha Al Hamid, dan John Mambor, ditangkap dan diadili. Setahun kemudian, Theys Eloway dibunuh tentara. Pada 19 Oktober lalu, yang ditangkap bukan hanya panitia KRP III—Forkorus Yaboisembut, Selfius Bobii, Edison Waromi, dan Dominikus Sorabut—melainkan juga ratusan peserta lain.

Dua peristiwa itu menggenapi sejarah kelam pelaksanaan KRP I, Oktober 1961. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di Alun-alun Utara Yogyakarta mengumandangkan Trikora. Salah satunya, merebut kembali Irian Barat dan membubarkan negara boneka bentukan Belanda.

Rangkaian penembakan di area PT Freeport Indonesia, akhir-akhir ini, seperti mengulang sejarah tahun 2009 dan sebelumnya. Pada 2009, Kelly Kwalik, tokoh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi **Papua** Merdeka, dituduh mendalangi aksi itu. Mantan guru yang terkenal sejak penyanderaan di Mapenduma pada tahun 1996 itu akhirnya ditembak mati pada pengujung 2009.

Rangkaian penembakan di wilayah Freeport hingga kini terus terjadi. Korban tewas juga bertambah. Hingga kini, hanya dua nama yang jadi tertuduh: Kelly Kwalik serta Antonius Wamang yang divonis penjara karena dianggap membunuh dua warga Amerika Serikat pada 2002. Selebihnya misterius.

Mama Yosepha Alomang, tokoh perempuan Suku Amungme, pemilik ulayat kawasan tambang Freeport, mengatakan, masyarakat tahu siapa pelakunya, tetapi takut mengatakan.

Menurut Kepala Humas Polda **Papua** Komisaris Besar Wachyono, polisi terus mencari pelaku. Namun, berbagai peristiwa itu menempatkan **Papua** sebagai wilayah sarat konflik. Penembakan Kepala Polsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Ajun Komisaris Dominggus Awes menambah panjang insiden kekerasan. Juni lalu, Brigadir Satu M Yazin juga ditembak di Bandar Udara Mulia.

Anggota TNI pun ditembak. Pos dan patroli mereka disatroni. Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Erfi Triasunu pernah mengatakan, meski kekuatan gerombolan bersenjata di wilayah itu kecil, mereka menguasai medan dan telah beradaptasi dengan kondisi wilayah tersebut.

Puncak Jaya sulit dijangkau. Makanan dan bahan bakar didatangkan dari Wamena. Namun, aktivitas bersenjata kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi **Papua** Merdeka di wilayah itu termasuk paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, seperti Wamena, Paniai, Jayapura, dan Keerom.

Tiga wilayah segitiga konflik bersenjata dan politik itu, yaitu Jayapura-Timika-Puncak Jaya, bertautan dengan meratanya persoalan sosial dan ekonomi di semua wilayah, menjadikan aneka persoalan tidak mudah diselesaikan.

Dialog

Karena itu, aneka persoalan tersebut perlu diidentifikasi bersama. "Apa masalahnya? Bisa jadi perspektif berbeda, tetapi ketika dibicarakan, bisa cari solusi," kata Koordinator Jaringan Damai **Papua** (JDP) Neles Tebay.

Saat ini ada dua sikap, yaitu NKRI harga mati dan **Papua** merdeka harga mati. Masing-masing punya alasan melakukan kekerasan.

Menurut Tebay, yang dibutuhkan tak hanya menghentikan, tetapi juga mencegah kekerasan. "Tidak bisa mengakhiri kekerasan dengan kekerasan. Menghadirkan tentara dalam jumlah besar juga tidak menyelesaikan soal," ujarnya.

JDP menawarkan dialog sebagai sarana mempertemukan semua pihak yang berkonflik. Peluang terbuka lebar. Juli lalu, perwakilan orang asli **Papua** melalui Konferensi Perdamaian Tanah **Papua** menyepakati dialog sebagai jalan bermartabat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, Agustus 2011, mengatakan pentingnya membangun **Papua** dengan hati. Itu menegaskan sikap pemerintah yang mengedepankan langkah damai melalui komunikasi konstruktif sebagaimana dia kemukakan pada pidato 16 Agustus 2010.

Muridan menyatakan, dialog adalah langkah moderat karena pendekatan keamanan tidak efektif. Di sisi lain, meski Undang-Undang Otonomi Khusus telah mengakomodasi apa yang perlu diselesaikan, misalnya hak asasi manusia melalui pengadilan HAM dan soal sejarah lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, implementasi otonomi khusus tidak konsisten.

Menurut dia, pemerintah mengenali tiap persoalan di **Papua**, tetapi sayang tidak segera merespons. Penyelesaian masalah **Papua**, misalnya, berubah menjadi pendekatan kesejahteraan, tetapi penanganannya masih di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam Konferensi Perdamaian Tanah **Papua**, 5 Juli 2011, menuturkan, kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru. Berbagai persoalan harus diselesaikan secara damai lewat komunikasi konstruktif untuk mencari akar permasalahan dan menemukan solusi terbaik.

Saat ini, masyarakat **Papua** menunggu wujud konkret komunikasi konstruktif itu.

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Pertambangan: Kapasitas Produksi Freeport 50 Persen

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 19 Oct 2011 Halaman: **20** Penulis: **EVY** Ukuran: **2247** Pengindex: **pik.ris**

PERTAMBANGAN

Kapasitas Produksi Freeport 50 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi produksi di lokasi pertambangan di Kabupaten Mimika, **Papua**, yang dikelola PT Freeport Indonesia mulai berjalan 50 persen dari kapasitas normal sejak kemarin. Kegiatan pemeliharaan peralatan produksi sudah berjalan normal.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Selasa (18/10), di Jakarta, dari sisi produksi, volume produksi biji emas dan tembaga Freeport 207.000 ton per hari. Ore atau biji yang diproses 221.000 ton per hari, termasuk stok cadangan. Hasil konsentrat 5.460 ton per hari.

Sebelumnya, produksi di lokasi tambang itu sempat dihentikan untuk pertimbangan taktis teknis. Dengan pengamanan serta penyambungan lagi pipa tambang yang mengalirkan konsentrat emas dan tembaga, kapasitas produksi mulai meningkat.

Secara terpisah, juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, menyatakan, manajemen Freeport terus berupaya berproduksi di tengah sejumlah aksi oleh para karyawan yang mogok kerja, termasuk pemalangan jalan, pemotongan pipa konsentrat, dan pemakaian peralatan milik perusahaan secara tak sah. Saat ini, PT Freeport Indonesia masih memproduksi konsentrat dalam kapasitas terbatas.

Lokasi pertambangan Freeport merupakan satu dari beberapa obyek vital nasional yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun lalu pemerintah membentuk tim obyek vital nasional yang dipimpin salah satu deputi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Apabila produksi tambang terganggu, akan memengaruhi penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja di sana," kata Darwin.

Terkait hal itu, pemerintah berfokus pada aspek teknis dan lingkungan di lokasi tambang Freeport. Jika fasilitas produksi terganggu dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan pekerja. "Apabila air yang tergenang dalam cekungan tambang tidak dipompa keluar, hal itu akan menimbulkan berat yang masif pada dinding cekungan dan bisa longsor sehingga

membahayakan lingkungan dan keamanan sekitar," ujar Darwin.

Untuk membantu menyelesaikan masalah itu, Kementerian ESDM telah menempatkan inspektur tambang di lapangan.

(EVY)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Total Image: 1

Freeport : Kelam di Balik Kemilau Emas

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 25 Nov 2011 Halaman: 52 Penulis: A PONCO ANGGORO Ukuran: 7484
Foto: 1 Pengindex: pik.pry



FREEPORT

Kelam di Balik Kemilau Emas

Oni Rumaropen (43) pusing bukan kepalang. Bekerja 13 tahun **di** penambangan emas PT Freeport Indonesia **di** Kabupaten Mimika, Papua, seakan tak mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Akan tetapi, apa boleh buat, Oni, seperti juga ribuan pekerja tambang lain, begitu tergantung pada perusahaan itu.

"Orang selalu berpikir, pendapatan kami besar karena perusahaan tempat kami bekerja menambang emas. Nyatanya tidak seperti itu," tutur ayah dari tiga anak itu.

Oni pusing bagaimana caranya bisa melunasi utang-utangnya. Utang **di** bank yang diambilnya untuk membangun rumah masih tersisa Rp 130 juta. Selain itu, dia masih menyisakan utang **di** rentenir sebesar Rp 3 juta. Pinjaman kepada rentenir meski dengan bunga tinggi, mencapai 30 persen, terpaksa diambil untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan upah pokok ditambah bonus produksi yang besarnya tidak tentu setiap bulan, Rp 6,2 juta-Rp 6,7 juta, utang mustahil bisa dilunasi Oni. Sebagian besar uang itu sudah habis untuk biaya hidup. Uang sewa kos saja Rp 800.000, belum lagi biaya makan dan sekolah.

Dia telah berupaya memenuhi tanggung jawabnya setiap bulan dengan bekerja lembur. Jika tanpa lembur, Oni sudah menguras tenaganya mengoperasikan alat berat selama 9,5 jam setiap hari. Ditambah lembur, dia bisa bekerja sampai 14 jam, barulah dia bisa meraup uang sekitar Rp 10 juta per bulan.

Oni mengoperasikan alat berat **di** kawasan Grasberg pada ketinggian 4.200 meter **di** atas permukaan laut. Bekerja **di** ketinggian itu bukanlah hal yang mudah, kondisi oksigen

menyulitkan pernapasan.

Saat ribuan karyawan lain mogok kerja selama hampir dua bulan, kesulitan Oni kian parah. Dia terpaksa meminjam uang kepada kerabatnya karena rentenir sudah tidak mau lagi memberi pinjaman. Pembayaran uang sekolah anaknya terpaksa ditunda, begitu pula uang kos.

Mimpinya untuk tinggal **di** rumah sendiri kian sulit terwujud. Sampai sekarang, uang dari bank hanya bisa untuk membangun fondasi dan dinding rumah. Maklum, harga bahan bangunan pun dua kali lipat dari harga **di** Jawa. Akhirnya, Oni sekeluarga masih tinggal **di** kamar kos **di** Jalan Dirgantara, Timika.

Kamar kos seluas 16 meter persegi itu sempit karena dibagi lagi menjadi empat ruangan, ruang tamu, satu kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Karena hanya satu kamar tidur, Oni dan istrinya, Regina Waweyao (42), terpaksa tidur **di** sebuah ruang beralas tikar bersama ketiga anaknya.

Mirisnya, kehidupan Oni ini menjadi gambaran dari kehidupan sebagian besar karyawan Freeport. Karolus Kameubun (55) yang sudah menghabiskan separuh hidupnya **di** Freeport, dan dalam waktu dekat akan pensiun, pun belum mampu membeli rumah sendiri.

Ditambah lagi kondisi kesehatan yang terus menurun selama bekerja **di** Freeport. Jadi, tidak sedikit karyawan yang setelah pensiun justru harus menghabiskan uang pensiun untuk berobat atau bahkan meninggal karena sakit.

Simon Fairyo (39) yang sehari-hari bekerja 12 jam **di** bawah tanah mengatakan kerap mengeluarkan dahak berwarna hitam, bahkan tak jarang bercampur darah, dan dadanya terasa sesak. "Petugas medis **di** Freeport selalu bilang kami sehat. Namun, saat kami sudah tua, kami sakit-sakitan," ujarnya.

Tak mengherankan jika mereka lalu berani mogok kerja berminggu-minggu, juga memblokade akses masuk ke area Freeport. Itu dilakukan agar perusahaan menghargai mereka dengan upah yang layak atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk Freeport.

Saat ini, upah pokok per bulan antara Rp 3,3 juta (untuk karyawan nonstaf level terendah F1) dan Rp 5,5 juta (untuk nonstaf tertinggi A5).

Tuntutan karyawan, upah pokok naik menjadi Rp 11,6 juta-Rp 51,3 juta per bulan. Sementara Freeport pada perundingan terakhir menawarkan kenaikan menjadi Rp 4,4 juta-Rp 7,4 juta.

Bukan benci

Mogok kerja dan penutupan akses ke area Freeport yang sudah berjalan hampir dua bulan sesungguhnya bukanlah tanda kebencian akan keberadaan Freeport **di** Mimika. "Kami hanya tidak suka dipandang sebagai alat oleh perusahaan, tanpa memikirkan bagaimana kami hidup selama ini," kata juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, Juli

Parorongan.

Membayangkan Freeport hengkang dari Mimika sama sekali tidak pernah. Ketergantungan mereka pada Freeport begitu besar.

Menjadi perusahaan pertambangan terbesar **di** Papua, Freeport merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar **di** Papua. Karyawannya berasal dari Sabang sampai Merauke. Kepada Freeport, lebih kurang 22.000 pekerja, ditambah lagi anggota keluarga mereka, masih menggantungkan hidup.

Besarnya ketergantungan pada Freeport mengakar juga ke hampir setiap sendi kehidupan **di** Kabupaten Mimika, bahkan Papua. Ini terlihat jelas saat ribuan karyawan mogok kerja.

Pedagang Pasar Sentral, pasar terbesar **di** Timika, misalnya, mengeluhkan penurunan pendapatan yang membuat mereka merugi. Luther (40), pedagang ikan, bahkan harus membuang sebagian ikan hasil tangkapan yang dijualnya karena tak laku. Penurunan pendapatan juga dirasakan pelaku usaha lain.

Terhentinya pasokan avtur ke Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika, menjadi gambaran lain. Selama ini, avtur dimiliki oleh Freeport, begitu pula bandara. Sebagai pemilik avtur, Freeport tidak mau memasok avtur itu kepada maskapai lain selama karyawan menolak memberikan avtur bagi pesawat-pesawat Airfast yang digunakan untuk kepentingan perusahaan.

Akibatnya merembet ke kabupaten-kabupaten lain **di** Papua bagian tengah dan selatan. Tak lain karena selama ini Timika menjadi urat nadi bagi penerbangan ke daerah-daerah itu.

Sebanyak 17 rute pesawat perintis dari Timika ke daerah-daerah **di** sembilan kabupaten terhenti. Tiga daerah **di** antaranya, Beoga, Ilaga, dan Wangde **di** Kabupaten Puncak, terdampak paling parah karena hanya pesawat perintis yang bisa mengaksesnya.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob mengatakan, pesawat perintis vital untuk mengangkut warga pedalaman yang sakit dan membutuhkan perawatan **di** rumah sakit **di** Timika, juga untuk memasok obat-obatan dari Timika. Dengan pesawat pula bahan makanan dipasok.

Sayang, besarnya ketergantungan pada perusahaan asal Amerika Serikat yang sebetulnya sudah disadari oleh pemerintah daerah itu dibiarkan saja. Belum ada upaya dari pemerintah untuk membuat masyarakat Mimika dan Papua mandiri. "Apa yang terjadi selama karyawan mogok kerja menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk membuat program-program yang bisa melepas ketergantungan itu," ujar Wakil Bupati Mimika Abdul Muis.

Upaya membeli 9,36 persen saham Freeport merupakan salah satu **di** antaranya. Dengan pendapatan yang diperoleh dari saham yang rencananya dimiliki itu, program-program lain yang tidak bergantung pada Freeport bisa dirancang, selain upaya pemerintah mengembangkan sektor pertanian dan perikanan.

Ingat bahwa kontrak karya Freeport akan berakhir tahun 2021. Artinya, tinggal tersisa waktu sepuluh tahun. Seandainya kontrak karya itu tidak diperpanjang lagi dan Freeport hengkang, sudah bisa dibayangkan kelamnya masa depan kehidupan masyarakat Mimika, bahkan Papua.

(A Ponco Anggoro)

Image :

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan privatisasi PT Freeport Indonesia yang hendak bekerja **di** area penambangan PT Freeport terpaksa mengurungkan niatnya karena akses jalan **di** check point 32 area Freeport, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, ditutup, Senin (7/11).

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Konflik Freeport: Kondisi Timika Berangsur Pulih

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 12 Oct 2011 Halaman: **23** Penulis: **JOS; BAY; EVY** Ukuran: **2440**
Pengindex: **pik.nnk**

KONFLIK FREEPORT

Kondisi Timika Berangsur Pulih

Jayapura, Kompas — Hingga Selasa (11/10) malam, kondisi Kota Timika berangsur-angsur pulih. Wakil Kepala Polres Mimika Komisaris Made Indra Laksanta mengatakan, situasi Timika semakin kondusif pascarusuh antara pekerja yang mogok dan polisi.

Polisi terus mengupayakan pendekatan persuasif bersama anggota Muspida Kabupaten Mimika. Polisi bersepakat untuk saling mendukung dalam menciptakan situasi menjadi lebih baik sesuai fungsi masing-masing. "Polisi juga terus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar tidak ada celah bagi pihak ketiga untuk memanfaatkan situasi," kata Made.

Dihubungi terpisah, juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia (FI), Juli Parorongan, membenarkan bahwa situasi Timika semakin kondusif. Namun, ia menyebut para pekerja masih dilingkupi suasana tegang.

Di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyatakan, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk mencari solusi permasalahan di PT FI di **Papua** karena masalahnya berkaitan dengan ketenagakerjaan, gangguan keamanan, dan gangguan produksi komoditas pertambangan. "Persoalan Freeport tidak terlepas dari substansinya, yaitu belum tuntasnya masalah upah. Ini ada di domain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi."

Hingga Selasa malam, jenazah pekerja PT Pangan Sari, anak perusahaan PT FI, Petrus Ayamiseba (36), masih disemayamkan di Kantor DPRD Kabupaten Mimika. Menurut beberapa pekerja, keluarga meminta agar manajemen PT FI dan polisi bertanggung jawab atas kematian Petrus. Mereka juga meminta DPRD Mimika memfasilitasi persoalan itu agar tidak berlarut-larut.

Sementara kondisi Briptu Jamil, anggota intel Brimob Kelapa Dua yang kemarin ditemukan luka parah, Selasa siang diterbangkan ke Makassar. Kondisi Jamil masih kritis, dan saat ini dirawat di RS Polri Makassar.

Di Jayapura, Ketua DPR **Papua** John Ibo mengklarifikasi terkait surat dari DPR **Papua** yang berisi imbauan ke PT FI untuk menghentikan aktivitas penerimaan pegawai baru, intimidasi, dan penghentian sementara operasi perusahaan tambang itu. Menurut Ibo, ia tak pernah menandatangani surat itu. Surat itu, tuturnya, dikirimkan orang tanpa sepengetahuan dirinya. "Saya minta maaf kepada semua pihak yang dirugikan atas surat itu. DPR **Papua** akan menginvestigasinya," kata Ibo. (JOS/BAY/EVY)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Kongres Rakyat Papua : Lebih dari 200 Peserta Ditangkap Aparat

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 20 Oct 2011 Halaman: **1** Penulis: **JOS** Ukuran: **2461** Pengindex: **pik.nnk**

KONGRES RAKYAT PAPUA

Lebih dari 200 Peserta Ditangkap Aparat

Jayapura, Kompas — Sekitar 200 peserta Kongres Rakyat **Papua** III, Rabu (19/10), ditangkap aparat gabungan kepolisian dan TNI setempat. Kongres yang telah berlangsung tiga hari di Lapangan Sepak Bola Zakheus, Abepura, **Papua**, itu juga dibubarkan karena dinilai melakukan kegiatan makar.

Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan mengatakan, makar tersebut terindikasi dari adanya deklarasi Negara Federasi **Papua** Barat dan strukturnya. Aparat dan panitia kongres sebenarnya telah sepakat untuk tidak ada aksi-aksi seperti pengibaran bendera dan deklarasi negara. "Namun, hal itu dilanggar," ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun dilakukan kelompok kecil, hal itu tetap berbahaya jika dibiarkan. "Belajarlah kepada yang tahu sejarah. Tak ada niat apa pun di balik penangkapan itu, selain menegakkan hukum," katanya.

Ke-200 orang yang ditangkap hingga Rabu malam masih berada di Markas Kepolisian Daerah **Papua**. Mereka menjalani pemeriksaan intensif. "Polisi ingin mengetahui mana elite, mana yang terlibat makar, pendukung, atau penggembira," ujar Imam.

Kongres Rakyat **Papua** digelar sejak Senin dan diikuti sekitar 4.000 orang dari beberapa wilayah **Papua**. Pada hari ketiga dibahas antara lain hasil rapat komisi dan pemilihan pemimpin.

Terpilih saat itu adalah Ketua Dewan Adat **Papua** Forkorus Yaboisembut sebagai presiden dan Edison Waromi dari West **Papua** National Authority sebagai perdana menteri. Menjelang pukul 15.00, Forkorus mendeklarasikan hasil kongres, antara lain pembentukan Negara Federasi **Papua** Barat dengan lagu kebangsaan "Hai Tanahku **Papua**" dan Bintang Fajar sebagai bendera nasional.

Ketua Panitia KRP III Selfius Bobii mengatakan, deklarasi tersebut menandai kembali kedaulatan **Papua** seperti dideklarasikan pada Kongres Rakyat **Papua** I, 19 Oktober 1961,

oleh Komite Nasional **Papua**.

Tak lama kemudian, aparat gabungan menyerbu dan melepaskan tembakan peringatan serta menangkapi peserta, termasuk Edison Waromi dan Forkorus.

Ketua Sinode Gereja Kingmi **Papua** Pendeta Benny Giyai menyayangkan penangkapan itu. Jika yang dicurigai adalah elite atau panitia kongres, cukup mereka yang ditangkap. "Sebenarnya masyarakat tidak setuju gagasan pemerintahan transisi. Saya minta polisi bertindak proporsional. Jangan tangkap sembarangan. Konkretkan kasih dan damai itu indah," kata Benny. (JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Libatkan Masyarakat*Implementasi dan Pencapaian Otonomi Khusus Papua Tak Jelas

KOMPAS(Nasional) - Senin, 07 Nov 2011 Halaman: **5** Penulis: **RWN; INA** Ukuran: **3396** Pengindex: **pik.mg1**

Libatkan Masyarakat

Implementasi dan Pencapaian Otonomi Khusus **Papua** Tak Jelas

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah pusat harus segera mengevaluasi implementasi otonomi khusus di **Papua** dan **Papua** Barat untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi otonomi khusus selama 10 tahun ini. Evaluasi ini harus melibatkan masyarakat **Papua**, terutama yang menolak dan menilai otonomi khusus gagal.

"Kalau pemerintah pusat punya komitmen memperbaiki tata pengelolaan otonomi khusus (otsus), tidak ada jalan lain kecuali membuat evaluasi," kata Koordinator Jaringan Damai Neles Tebay di Jayapura, **Papua**, Sabtu (5/11).

Evaluasi otsus, kata Neles, harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun tokoh-tokoh adat, terutama masyarakat **Papua** yang menolak otsus dan menyatakan otsus gagal. Dengan demikian, hal itu diharapkan bisa mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan otsus untuk membenahi otsus.

Neles mengatakan, tidak ada desain besar dan target yang hendak dicapai sejak otsus dilahirkan tahun 2001. Oleh karena itu, apa yang sudah dicapai dan belum dicapai selama implementasi otsus pun tidak jelas.

"Kalau faktor-faktor penghambat ini diketahui, bisa dicari solusi mengatasi hambatan-hambatan itu sehingga Undang-Undang Otsus (Nomor 21 Tahun 2001) bisa dilaksanakan tanpa hambatan," katanya.

Apabila dalam evaluasi tersebut ditemukan masalah-masalah di **Papua** yang ternyata tidak diakomodasi dalam UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi **Papua**, tidak menutup kemungkinan diperlukan revisi terhadap UU itu. "Selama faktor-faktor penghambat tidak ditemukan dan kondisi sekarang dibiarkan terus, tidak akan ada perbaikan," katanya.

Desain besar

Neles mengatakan, Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B) bisa memfasilitasi berbagai pihak dan kepentingan untuk bersama-sama merumuskan desain besar implementasi otsus dan memfasilitasi evaluasi otsus. "Apabila dua ini bisa dibuat, sudah luar biasa," katanya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan beberapa waktu lalu mengatakan, Kementerian Dalam Negeri tengah mengevaluasi Otsus **Papua**. Diakui, selama ini belum pernah ada evaluasi.

Neles juga mengharapkan, dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat **Papua** harus segera digelar. Pemerintah pusat dengan kelompok-kelompok masyarakat **Papua** yang memiliki aspirasi merdeka harus mau keluar dari posisi harga mati masing-masing agar ada jalan tengah. Dialog kedua pihak selama ini tidak pernah terwujud karena kuatnya rasa saling curiga.

"Memang belum ada suatu konsep dialog yang bisa diterima kedua belah pihak. Ini yang perlu diupayakan," ujar Neles.

Secara terpisah, Ketua II Dewan Adat **Papua** Sayid Fadhal Alhamid mengatakan, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah Kongres Rakyat **Papua** III pada 19 Oktober 2011 harus diusut dan diungkap secara jujur. Pelaku dan pemimpin yang bertanggung jawab atas insiden itu, baik Polri maupun TNI, harus diproses secara hukum dan tidak boleh ada praktik impunitas.

Ke depan, jika rakyat **Papua** hendak melaksanakan aksi politik guna menyampaikan aspirasi politik secara damai dan bermartabat, hendaklah Pemerintah Indonesia, terutama aparat Polri dan TNI, tidak meresponsnya dengan cara-cara kekerasan," katanya. (RWN/INA)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Libatkan Tokoh Warga *Keprihatinan Warga Papua Kurang Dapat Perhatian

KOMPAS(Nasional) - Senin, 05 Dec 2011 Halaman: **23** Penulis: **JOS** Ukuran: **3117** VOD1 Pengindex: **pik.eli**

Libatkan Tokoh Warga

Keprihatinan **Warga** Papua Kurang Dapat Perhatian

Jayapura, Kompas — Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan kebudayaan dan pelibatan **tokoh-tokoh** masyarakat untuk mengendalikan api kekerasan di Papua. Sebaliknya, pendekatan yang cenderung struktural dari atas ke bawah justru dinilai berpotensi melanggengkan kekerasan di Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan **tokoh** masyarakat Papua, Pendeta Herman Awom, yang dihubungi terpisah, Minggu (4/12).

Ketika dihubungi dari Jayapura, Ifdhal Kasim mengatakan, semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, gejolak di Papua dapat diredam. Gus Dur lebih mengedepankan pendekatan kebudayaan dan memberi ruang pada aspirasi kultural rakyat Papua. **Tokoh-tokoh** Papua diberi kesempatan terlibat aktif mengambil bagian dalam mengelola masyarakat.

Namun, pendekatan itu kemudian berubah semenjak Megawati menjadi presiden. Papua kemudian dibagi menjadi dua provinsi dan Majelis Rakyat Papua dikontrol. Padahal, menurut Ifdhal, pelibatan **tokoh-tokoh** sekelas almarhum Theys Eluay bisa dengan efektif membantu menyelesaikan masalah Papua. "Namun, **tokoh-tokoh** strategis seperti itu justru dicurigai," ujar Ifhdal.

Pendekatan seperti itulah yang menurutnya melanggengkan kekerasan di Papua dan sayangnya hingga saat ini pendekatan semacam itu belum diubah. Hadirnya Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dinilai Ifdhal juga tidak akan banyak berdampak. Pasalnya, masyarakat Papua tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya.

Logistik

Secara terpisah **tokoh** masyarakat Papua, Pendeta Herman Awom, mengatakan, selama ini keprihatinan **tokoh** masyarakat dan **tokoh** agama di Papua kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

"Kami, misalnya, telah berulang kali mengatakan, sebaiknya pasukan-pasukan non-organik ditarik dari Papua dan hanya gunakan pasukan organik dari Papua saja," kata Herman.

Menurutnya, kekerasan di Papua dapat diatasi jika **tokoh-tokoh** masyarakat diberi ruang lebih untuk terlibat dan menata kembali kehidupan masyarakat. Namun, sayang suara mereka kurang mendapat perhatian.

Terkait dengan konflik bersenjata di Mulia, Pendeta Herman Awom mempertanyakan kemampuan logistik kelompok bersenjata yang kerap menyerang aparat. Menurutnya, semua barang yang hendak dikirim ke Mulia pasti melalui pintu-pintu bandara, entah itu Sentani, Wamena, atau Mulia. "Masyarakat sebenarnya tahu siapa yang kerap disebut sebagai kelompok bersenjata atau orang tak dikenal itu," tutur Herman Awom.

Sementara itu, berdasarkan informasi masyarakat, saat ini kondisi Kota Mulia belum sepenuhnya normal. **Warga** masih diliputi rasa takut, apalagi beberapa honai (rumah tradisional) di Kampung Wondegobak dibakar, seusai penghadangan dan kontak senjata pada Sabtu lalu.

Ditemui seusai mengantar jenazah dua anggota Brimob Mabes Polri yang menjadi korban penghadangan itu, Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono mengatakan, kondisi Mulia berangsur aman. Polisi terus mengejar kelompok bersenjata itu. (JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Konflik di Papua: Mahasiswa Merasa Terancam dan Terintimidasi

KOMPAS(Nasional) - Senin, 14 Nov 2011 Halaman: **4** Penulis: **bil; egi** Ukuran: **2843** Pengindex: **pik.nnk**

KONFLIK DI PAPUA

Mahasiswa Merasa Terancam dan Terintimidasi

jakarta, kompas — Mahasiswa asal **Papua** yang menuntut ilmu di sejumlah kota di Indonesia akan meminta suaka politik ke luar negeri apabila aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tak menghentikan penggeledehan asrama mahasiswa **Papua**, yang dinilai dilakukan sewenang-wenang. Mahasiswa dari **Papua** merasa terancam dan terintimidasi dengan tindakan itu.

Sejumlah asrama mahasiswa asal **Papua** di Jakarta dan Bali digeledah aparat TNI dan Polri, pekan lalu, dengan alasan pendataan. Kamis lalu, Asrama Mahasiswa Paniai-Nabire di Tebet, Jakarta Selatan, digeledah tanpa alasan yang jelas oleh aparat TNI dan Polri.

Penggeledahan itu, kata Dorus Wakum dari Komunitas Masyarakat Adat **Papua** Antikorupsi di Jakarta, Minggu (13/11), dilakukan tanpa surat perintah apa pun. Tindakan penggeledahan itu jelas sangat intimidatif, meneror, dan mengancam langsung mahasiswa **Papua** di Jakarta.

Penggeledahan serupa, lanjut Dorus, juga terjadi di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta. Bahkan, di Denpasar, Bali, penggeledahan dilakukan polisi, yang mengaku intel terhadap asrama putri. Di Tebet, aparat datang dengan mendobrak pintu masuk asrama dan meminta mahasiswa menyerahkan data pribadi, seperti nama, alamat di daerah asal, tempat kuliah, hingga lama tinggal di Jakarta. Selain itu, aparat juga sempat memotret mahasiswa yang tengah berada di asrama dan merekam isi asrama.

"Sekarang kami cemas dan khawatir. Isunya berkembang di seluruh mahasiswa **Papua** yang sedang menuntut ilmu di Jawa dan Bali. Orangtua kami di **Papua** merasa khawatir dan menyuruh kami pulang," ujar Oktovianus Pagau dari Komite Nasional **Papua** Barat.

Dorus mengatakan, penggeledahan terhadap asrama mahasiswa asal **Papua** jelas menunjukkan pemerintah tidak punya solusi yang jelas terhadap permasalahan di **Papua**. "Kami menyesal, sebagai anak bangsa Indonesia, tetapi malah diperlakukan tidak manusiawi. Orang **Papua** juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi aparat memperlakukan kami dengan diskriminatif. Seolah-olah kami ini bukan warga negara

Indonesia," katanya.

Menurut Dorus, janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah **Papua** dengan baik tidak terbukti. Mahasiswa asal **Papua** merasa diperlakukan dengan tak baik.

Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, tindakan aparat keamanan menggeledah asrama mahasiswa asal **Papua** di Jakarta mirip dengan tindakan terhadap mahasiswa asal Aceh, sesaat setelah pemerintah menerapkan Darurat Militer di Aceh tahun 2003.

Di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendukung rencana pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport di **Papua**. (bil/egi)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark
tamujogja
10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Pemogokan Freeport: Menteri ESDM Minta Pekerja Kembali, Rugi 8,2 Juta Dollar

KOMPAS(Nasional) - Minggu, 18 Sep 2011 Halaman: **4** Penulis: **JOS** Ukuran: **3234** VOD1 Pengindex: **pik.lis**

PEMOGOKAN FREEPORT

Menteri ESDM Minta Pekerja Kembali, Rugi 8,2 Juta Dollar

JAYAPURA, KOMPAS — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyambut baik para pekerja PT Freeport Indonesia yang mau kembali bekerja. Setidaknya sebanyak 489 pekerja perusahaan sudah kembali aktif bekerja.

Dalam jumpa pers Sabtu (17/9) malam di Jayapura, Darwin Zahedy Saleh mengatakan, jika operasi tambang berhenti, ada banyak aspek lingkungan hidup dan teknis yang terganggu. Bahkan, gangguan itu berpotensi menimbulkan bencana, seperti tanah longsor dan banjir bandang, serta pencemaran di hilir.

Tidak hanya itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Armando Mahler mengatakan, setiap hari potensi pendapatan negara yang hilang karena pemogokan mencapai 8,2 juta dollar AS. Pendapatan itu antara lain dalam bentuk royalti dan pajak.

Sebanyak 7.612 karyawan PT Freeport Indonesia sejak Kamis pukul 00.00 mogok kerja karena beberapa tuntutan perbaikan kesejahteraan, seperti penyesuaian upah pokok, nilai persentase program asuransi, dan tabungan hari tua, tak juga dipenuhi oleh manajemen Freeport. Derek Mote, pekerja PT Freeport, Kamis, mengatakan, saat ini sedikitnya 5.000 pekerja telah turun dari area operasi di dataran tinggi untuk mogok kerja.

"Semua operasi berhenti, mulai dari tambang bawah tanah hingga pelabuhan. Mogok damai sah dan dilindungi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengatakan, manajemen kecewa karena SPSI PT Freeport dan pekerja memutuskan mogok. Pemogokan dinilainya tidak sah (Kompas, 16 September 2011).

Menurut Armando, para pekerja pun akan kehilangan pendapatan mereka Rp 577.000 per hari. Kerugian itu tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja, tetapi juga keluarga mereka.

Darwin Zahedy Saleh menambahkan, dalam kegiatan penambangan bawah tanah umumnya digunakan bahan peledak.

Tanah yang telah diluruhkan sebagai bagian dari kegiatan tersebut harus dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola, berpotensi memunculkan genangan air. Hal itu tidak hanya akan mengganggu lingkungan, tetapi juga berbahaya bagi keselamatan kerja.

Pada Juli lalu, tersendatnya kegiatan akibat pemogokan pekerja juga sempat memunculkan potensi gangguan serupa. Oleh karena itu, pemerintah, kata Darwin Zahedy Saleh, mendukung upaya-upaya agar alat-alat di area penambangan tetap beroperasi. Kementerian ESDM, tuturnya, akan melakukan evaluasi teknis untuk itu. Ia menyambut baik para pekerja yang telah mulai kerja.

Menurut Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, sebenarnya banyak pekerja yang mau kembali bekerja, tetapi karena takut dan diintimidasi, mereka tidak berani kembali bekerja. Saat ini, tuturnya, ada titik terang karena ada sebagian pekerja yang kembali aktif bekerja. Ia menyambut baik hal itu karena, menurutnya, tidak ada yang diuntungkan dari pemogokan tersebut.

Kepala Kepolisian Daerah **Papua** Inspektur Jenderal BL Tobing mengatakan, kondisi Timika kondusif. "Yang mogok silakan, tetapi yang ingin bekerja jangan dihasut atau dipengaruhi," tuturnya. Hal itu ia kemukakan karena ada upaya untuk menghalang-halangi pekerja yang mau kembali bekerja. (JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,15
  halaman lainnya: ---
- Total Image: 1

Papua: Otonomi Khusus Tak Jawab Persoalan

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 04 Nov 2011 Halaman: **1,15** Penulis: **Ina; apa; iam; evy; ato; rwn; why**
Ukuran: **4748** Image: **1** http://kom.ps/bV5t Pengindex: **pik.ris**

PAPUA

Otonomi Khusus Tak Jawab Persoalan

JAKARTA, KOMPAS — Kendati otonomi khusus diberikan dan pemekaran wilayah diterapkan, kebijakan pemerintah dinilai setengah hati. Tiadanya upaya mempersiapkan orang **Papua** untuk menjadi tuan di rumahnya sendiri membuat kesejahteraan tidak terwujud kendati otonomi khusus diundangkan sejak tahun 2001.

"Selama ini, otonomi khusus tidak dijalankan sepenuh hati. Konsep otonomi khusus tidak jelas dan tidak ada badan yang berwenang mempercepat pembangunan, memperlancar komunikasi, dan memastikan dana publik digunakan untuk kesejahteraan rakyat," kata Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo Pr, Kamis (3/11), di Jakarta.

Sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi **Papua** diterbitkan, kewenangan pemerintah daerah sangat luas, mulai dari kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, moneter, fiskal, agama, hingga peradilan. Provinsi **Papua** juga dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri.

Setelah otonomi khusus itu pula kini terdapat 29 kabupaten/kota di Provinsi **Papua** dan 11 kabupaten/kota di Provinsi **Papua** Barat. Sebelumnya, menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, di Provinsi Irian Jaya hanya ada sembilan kabupaten/kota.

Sejak tahun 2002, dana otonomi khusus yang diberikan sudah berkisar Rp 30 triliun. Namun, tidak tampak peningkatan kesejahteraan signifikan pada masyarakat **Papua**.

UU No 21/2001 juga menyebutkan, pelaksanaan aturan ini semestinya dievaluasi setiap tahun

dan pertama kali dilakukan pada akhir tahun ketiga setelah pemberlakuan undang-undang. Namun, belum pernah ada evaluasi. Baru pada tahun 2011 Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus.

Untuk menjadikan orang **Papua** sebagai tuan di tanah airnya sendiri, lanjut Benny, diperlukan niat politik pemerintah untuk memberikan kepercayaan dan mempersiapkan orang **Papua**. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, orang **Papua** akan selalu terpinggirkan.

Identik korupsi

Menurut pengamat politik J Kristiadi, masyarakat di **Papua** justru melihat otonomi khusus di Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat sama dengan korupsi karena mereka tak merasakan secara nyata manfaat otonomi khusus. "Pada masa otonomi khusus terjadi korupsi yang luar biasa," katanya.

Kristiadi mengatakan hal tersebut seusai berbicara dalam diskusi masalah **Papua** di kantor Kementerian Pertahanan. Diskusi tertutup itu mengundang tokoh **Papua**, Balthasar Kambuaya, yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Rektor Universitas Cenderawasih, **Papua**, sebagai pembicara. Pejabat yang juga hadir sebagai pembicara antara lain Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Imam Sujarwo dan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Erfi Triasunu.

Menurut Kristiadi, menghapus anggapan otonomi khusus identik dengan korupsi harus menjadi prioritas tugas Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B). Caranya, UP4B segera menyempurnakan otonomi khusus dengan mendorong penerbitan peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan daerah khusus, sebagaimana diamanatkan UU No 21/2001. Peraturan daerah khusus harus dihasilkan oleh masyarakat **Papua** serta mengatur pengalokasian dana otonomi khusus dan pengawasan sosial, hukum, dan politik terhadap penggunaan dana otonomi khusus.

Menurut Kambuaya, otonomi khusus merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah **Papua**, terutama masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan. UU Otonomi Khusus adalah bukti komitmen kuat pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah **Papua**.

Persoalannya, kata Kambuaya, adalah konsistensi dalam mengimplementasikan otonomi khusus. "Ada lebih dari 18 perangkat hukum yang harus segera dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah di **Papua**," ujarnya.

Ia juga mengakui, salah satu hambatan dalam mewujudkan konsistensi pelaksanaan otonomi khusus ialah minimnya kapasitas dan kepemimpinan orang-orang yang duduk di pemerintahan daerah serta lembaga perwakilan di **Papua**/**Papua** Barat.

Pemerintah memang menyadari pelaksanaan otonomi khusus di **Papua** belum berhasil. Oleh karena itu, pemerintah akan mengintensifkan komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan masyarakat **Papua**, baik di Jakarta maupun di **Papua**. Seiring dengan itu,

dilakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan otonomi khusus secara menyeluruh.

"Yang menjadi fokus perhatian kita, kenapa otonomi khusus yang bertujuan baik, disepakati dengan baik, kemudian tidak mencapai hasilnya," ujar Hotmangaradja Pandjaitan, Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, seusai bertemu dengan pimpinan Majelis Rakyat **Papua** di Jayapura, **Papua**, Kamis.

(ina/apa/iam/evy/ato/rwn/why)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark
tamujogja
10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (odf)

halaman lainnya: ---

Pemogokan: Pekerja Freeport Keluhkan Intimidasi

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 17 Sep 2011 Halaman: **21** Penulis: **JOS; EVY** Ukuran: **1588** Pengindex: **pik.nnk**

PEMOGOKAN

Pekerja Freeport Keluhkan Intimidasi

Jayapura, Kompas — Juru Bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Juli Parorongan mengeluhkan berbagai bentuk intimidasi yang dilakukan pihak manajemen PT FI kepada pekerja.

Dihubungi dari Jayapura, **Papua**, Jumat (16/9), Juli mengungkapkan, menyusul aksi mogok sejak Kamis lalu, pihaknya menerima beberapa laporan terkait intimidasi itu. Salah satunya berupa pemeriksaan anggota Komisaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Tembagapura. Namun, upaya itu gagal karena pekerja menolak.

Di Jayapura, PT Freeport Indonesia (FI) melalui media lokal memberitahukan kepada pekerja non-staf bahwa pemogokan pekerja saat ini tidak sah. Hal itu akan memengaruhi kondisi keuangan, termasuk keuangan keluarga pekerja.

Dalam pemberitahuan itu juga disebutkan, sejak 15 September 2011, PT FI memberlakukan program 'Tidak Bekerja, Tidak Dibayar'. Juli menilai hal itu sebagai bentuk intimidasi guna melemahkan mental pekerja. Namun, para pekerja tak terpengaruh, malah kian solid. Pemogokan itu sah dan dijamin Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, Juru Bicara PT FI Ramdani Sirait membantah adanya intimidasi kepada pekerja. Perusahaan menjelaskan secara resmi, undang-undang menjamin tidak ada paksaan untuk ikut mogok kerja atau tidak ikut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, di Jakarta, Jumat, menyatakan telah menugaskan stafnya untuk berangkat ke **Papua** untuk menengahi kekisruhan di perusahaan tambang emas itu.

(JOS/EVY)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Pekerja Konsolidasi * Perundingan Soal Upah Belum Tuntas

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 23 Sep 2011 Halaman: **23** Penulis: **JOS** Ukuran: **2500** Pengindex: **pik.hti**

Pekerja Konsolidasi

Perundingan Soal Upah Belum Tuntas

Timika, Kompas — Sekitar 5.000 pekerja PT Freeport Indonesia dan kontraktor yang bekerja untuk perusahaan tambang itu, Kamis (22/9) siang, menghadiri konsolidasi di depan gerbang Kuala Kencana. Mereka menyatakan tetap pada sikap semula yaitu menuntut perbaikan kesejahteraan.

Sejak pukul 09.00 WIT para pekerja dari berbagai divisi berkumpul di jalan di depan pintu gerbang Kuala Kencana. Mendekati pukul 14.00 WIT, jalan di depan pintu gerbang tersebut telah dipadati pekerja.

"Kami juga hendak menunjukkan kepada manajemen bahwa kami tetap solid dan tetap pada keputusan semula," tegas seorang pekerja.

Sementara itu, perwakilan SPSI PT Freeport Indonesia sejak Kamis pagi menghadiri mediasi yang difasilitasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Ketika dihubungi di sela-sela mediasi, juru bicara SPSI PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan, menjelaskan, masing-masing pihak masih memaparkan proposal. Hal senada juga diungkapkan juru bicara manajemen PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait.

Pihak manajemen PT Freeport Indonesia tetap ingin perundingan dapat diteruskan. Penyelesaian diraih dengan kesepakatan bersama.

Dalam proses itu, mediator dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu proses mediasi itu. "Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan apa pun," ujar Juli Parorongan. Pihak perwakilan pekerja, tuturnya, mengharapkan proses mediasi itu dapat diperpanjang.

Minta penawaran

Hingga saat ini, pekerja masih mengharapkan agar pihak manajemen mau memberi penawaran atas proposal yang diajukan pekerja. Di antaranya penyesuaian upah pokok yang diterima pekerja. Namun selama ini, manajemen belum pernah menawar angka yang diajukan pekerja.

Angka yang diajukan pekerja adalah 17,5 dollar AS per jam untuk pekerja tingkat terendah, dan 45 dollar AS untuk pekerja pada level tiga. Atas proposal itu, manajemen justru menawarkan konsep lain yaitu kenaikan sebesar 22 persen, dibagi untuk dua tahun. Belum adanya kesepakatan dalam hal itulah yang kemudian memicu pemogokan pekerja.

Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan manajemen PT Freeport Indonesia, pada hari kedelapan mogok kerja itu, negara akan kehilangan potensi pendapatan dalam bentuk royalti dan pajak mencapai 64 juta dollar AS. Selain itu, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) juga akan kehilangan dana pengembangan hingga sebesar 1,6 juta dollar AS.

(JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Kecelakaan Kerja : Pekerja Kontraktor PT Freeport Tewas

KOMPAS(Nasional) - Senin, 14 Nov 2011 Halaman: 22 Penulis: JOS Ukuran: 2449 Pengindex: pik.pry

KECELAKAAN KERJA

Pekerja Kontraktor PT Freeport Tewas

JAYAPURA, KOMPAS — Seorang pekerja perusahaan kontraktor yang bekerja untuk PT Freeport Indonesia tewas dalam sebuah kecelakaan kerja, Minggu (13/11) pagi. Peristiwa di area tambang itu terjadi sekitar pukul 08.39 Wita.

Menurut juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, yang dihubungi, Minggu, mengatakan, begitu ada informasi tentang kecelakaan kerja di area tambang, langsung dilakukan proses evakuasi. "Saat ini evakuasi masih berlangsung," ujarnya tanpa merinci penyebab kecelakaan tersebut.

Kendati demikian, peristiwa dengan satu korban tewas itu telah dilaporkan kepada Inspektur Tambang pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dihubungi secara terpisah, juru bicara SPSI PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan, membenarkan adanya informasi tentang seorang pekerja kontraktor tewas. Kendati demikian, pihaknya tidak memiliki banyak informasi karena pihak manajemen dinilai sangat tertutup. Meskipun demikian, ia mengatakan hingga saat ini para pekerja yang mogok tetap solid.

Perundingan

Pada kesempatan itu, Juli Parorongan mengungkapkan, pada Senin (14/11) sudah dijadwalkan perundingan lanjutan pihak manajemen dengan wakil pekerja. Pertemuan bipartit itu direncanakan digelar di Hotel Rimba, **Papua**.

Para pekerja, tutur Juli Parorongan, tetap melanjutkan mogok kerja mereka. Pemogokan akan berhenti jika tercapai kesepakatan tentang kenaikan upah di antara kedua pihak. Jadi, selama kesepakatan belum dicapai oleh kedua pihak, mogok kerja tersebut akan berlanjut.

Manajemen PT Freeport sudah mengajukan kenaikan upah pokok karyawan sebesar 35 persen dari upah pokok yang berlaku sekarang. Artinya, upah pokok per bulan karyawan naik Rp 4,4

juta-Rp 7,4 juta. Padahal, menurut Ketua Bidang Organisasi SPSI PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa, karyawan menuntut kenaikan upah pokok Rp 6,2 juta hingga Rp 28 juta. (Kompas, 9/11)

Ribuan karyawan PT Freeport akan memperpanjang mogok kerja sampai 15 November jika tuntutan kenaikan upah tidak dikabulkan manajemen. Apalagi pihaknya pada 3 November sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kepolisian Resor Mimika terkait rencana perpanjangan mogok kerja ini. Mogok kerja diperpanjang sampai 15 Desember 2011.

Pemberitahuan itu dikirimkan karena pada surat pemberitahuan sebelumnya, mogok kerja sedianya berakhir pada 15 November. (JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Papua: Pemerintah Abaikan UU Otonomi Khusus

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 02 Nov 2011 Halaman: **4** Penulis: **RWN; BIL** Ukuran: **3096** Foto: **1**
Pengindex: **pik.snt**



PAPUA

Pemerintah Abaikan UU Otonomi Khusus

Jakarta, Kompas — Meski telah berusia 10 tahun sejak disahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi **Papua** dinilai tidak pernah serius dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal, undang-undang ini merumuskan semua aspirasi masyarakat **Papua** dan memformulasikan bagaimana penyelesaian masalah **Papua**.

Hal ini disampaikan mantan Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk RUU Otonomi Khusus **Papua** Ferry Mursyidan Baldan dalam diskusi soal penyelesaian masalah **Papua** di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (1/11).

Menurut Ferry, kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B), jika tanpa dilandasi UU Otonomi Khusus **Papua**, bakal percuma.

Menurut Ferry, sejumlah hal dalam UU Otonomi Khusus **Papua** memang tidak dijalankan pemerintah hingga saat ini. Dia menyebut soal pembentukan komite rekonsiliasi, penyelidikan pelanggaran HAM di **Papua**, persoalan dana bagi hasil, dan review kontrak-kontrak karya pertambangan yang tak memberi manfaat bagi rakyat **Papua**. "UU Otonomi Khusus **Papua** memberi peluang untuk me-review kontrak karya pertambangan yang ada di sana jika memang tak memberi manfaat bagi rakyat **Papua**. Apa saja yang bisa memberi manfaat bagi rakyat **Papua**? Semua ada dalam UU Otonomi Khusus **Papua** ini," kata Ferry.

Dalam diskusi, Direktur Setara Institute Hendardi mengatakan, pemerintah pusat seperti sengaja membiarkan UU Otonomi Khusus **Papua** tidak dijalankan dengan benar. "Otonomi khusus gagal dikelola karena pemerintah pusat tidak pernah serius terhadap UU ini. Di daerah pun kepala daerah yang tidak menjalankannya tidak pernah ditegur. Bahkan, korupsi yang

terjadi di banyak daerah di **Papua** seperti dibiarkan," kata Hendardi.

Hendardi mengaku memahami perasaan masyarakat **Papua** yang merasa tidak diperlakukan secara adil. Dia mencontohkan, bagaimana aparat keamanan bisa dengan cepat menindak masyarakat **Papua** yang dituduh makar dalam menyelenggarakan Kongres Rakyat **Papua**, sementara dalam hal tindak kekerasan yang diduga dilakukan aparat, negara tidak pernah serius berani menghukum pelaku.

Koordinator Jaringan Damai **Papua** Neles Tebay, saat dihubungi di Jakarta, kemarin, menyambut baik inisiatif Presiden menunjuk Bambang Dharmono memimpin UP4B.

Dilemahkan

Di Jayapura, kemarin, Ketua Majelis Rakyat **Papua** Timotius Murib mengatakan, UU Otonomi Khusus Papau yang diharapkan memberikan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan orang asli **Papua** justru sedang dilemahkan. (RWN/BIL)

Image :

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Tokoh adat **Papua** di Jakarta, Dorus Wakum, bersama Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nurkholis Hidayat, Indria Fernida (Kontras), peneliti ICW Firdaus Ilyas, dan Koordinator ICW Danang Widoyoko (dari kiri ke kanan) menyampaikan temuan terbaru mengenai PT Freeport Indonesia di kantor ICW, Jakarta, Selasa (1/11). Selain meminta pemerintah meninjau ulang kontrak karya, mereka juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelidiki dana keamanan kepada TNI dan Polri.

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Pemerintah Berikan Apresiasi * Peringatan Kemerdekaan Papua Berjalan Aman

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 02 Dec 2011 Halaman: **15** Penulis: **WHY; EDN; FER; JOS; THT; RWN**
Ukuran: **3845** Foto: **1** Pengindex: **pik.yrm**



Pemerintah Berikan Apresiasi

Peringatan Kemerdekaan **Papua** Berjalan Aman

Jakarta, Kompas — Peringatan Hari Kemerdekaan Ke-50 **Papua** pada 1 Desember kemarin secara umum berlangsung aman. Di sejumlah wilayah di **Papua**, masyarakat memperingati dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora dengan penjagaan polisi tanpa senjata.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kamis (1/12), di Jakarta, memberikan apresiasi kepada masyarakat **Papua** yang tidak terprovokasi isu bahwa situasi akan memanas pada peringatan Hari Kemerdekaan **Papua**. Masyarakat bisa menerima upaya persuasif dan sosialisasi untuk menciptakan situasi damai oleh aparat intelijen dan keamanan.

"Ada beberapa tindakan anarki dan melawan aparat. Namun, sejauh pendemo tidak bertindak di luar hukum, aparat tidak akan melakukan apa-apa. Ini adalah upaya mengembangkan demokrasi," kata Djoko.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengingatkan agar aparat keamanan mengedepankan pendekatan damai dalam menangani setiap persoalan di **Papua**.

"Pendekatan pemerintah pusat terhadap penanganan di **Papua** itu benar-benar harus terukur, tidak ada penanganan yang sifatnya di luar prosedur atau kekerasan. Namun, tidak boleh juga ada ruang untuk kekerasan di mana pun," katanya.

Persuasif

Di Jayapura, perayaan yang dipusatkan di Taman Peringatan Kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia **Papua** atau biasa disebut Taman Theys berlangsung khidmat. Perayaan yang diikuti sekitar 500 orang ini diawali dengan ibadah dan dilanjutkan orasi politik. Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah **Papua** Se-Indonesia Markus Haluk membacakan pidato Presiden Negara Republik Federal **Papua** Barat Forkorus Yaboisembut.

Polisi berjaga-jaga tanpa senjata, hanya membawa tameng. Belajar dari pengalaman menangani Kongres Rakyat **Papua** III yang berakhir ricuh, kata Kepala Bidang Humas Polda **Papua** Kombes Wachyono, kini polisi mengedepankan sikap persuasif dan simpati. "Prinsipnya menegakkan hukum tanpa melanggar hak asasi manusia," ujarnya.

Situasi di Merauke juga aman. Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Marind Anim, Albert Moyuen Gebze, mengatakan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Merauke telah berkomitmen menjaga situasi tetap damai. "Aksi massa maupun pengibaran bendera Bintang Kejora tidak menyelesaikan masalah **Papua**," ujarnya.

Di Manokwari, perayaan dipusatkan di Lapangan Borarsi. Perayaan yang diikuti lebih dari 2.000 orang ini diawali dengan long march massa menuju Lapangan Borarsi. Meski kegiatan ini berjalan tertib dan aman, sebagian pelayanan publik tidak berjalan karena masyarakat khawatir situasi memanas, dan memilih libur.

Peringatan di Timika, Wamena, dan Puncak Jaya, diwarnai pengibaran Bintang Kejora. Peringatan di Timika ricuh ketika polisi membubarkan massa yang mengibarkan Bintang Kejora di Lapangan Timika Indah. Beberapa polisi luka-luka karena dilempari batu saat hendak membubarkan massa. Polisi menangkap tiga orang untuk meminta keterangan terkait pengibaran bendera itu.

Meski peringatan di Jayapura berlangsung aman, pada Kamis dini hari dua polisi dianiaya warga di Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, hingga luka-luka. Hal itu terjadi ketika mereka hendak mengecek informasi pengibaran Bintang Kejora di kampung itu.

(WHY/EDN/FER/JOS/THT/RWN)

Image :

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto (tengah) didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelejen Negara Marciano Norman, dan Sekretaris Kementerian Polhukam Hotmangaradja P (kanan) saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Kamis (1/12), seputar penanganan masalah **Papua**.

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Pemerintah , Mulai Berdialog * Polri-TNI Harus Hentikan Kekerasan di Papua

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 15 Nov 2011 Halaman: **15** Penulis: **edn; bil; ong; jos** Ukuran: **3040**
Pengindex: **pik.pry**

Pemerintah Mulai Berdialog

Polri-TNI Harus Hentikan Kekerasan di **Papua**

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyatakan telah memulai langkah dialog dengan sejumlah pihak yang berkepentingan soal **Papua**. Namun, dialog dalam bentuk forum perundingan untuk menyelesaikan masalah **Papua** masih dibahas format dan waktunya.

Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan, komunikasi yang dilakukan masih bersifat informal. "Hari-hari ini terus dilakukan komunikasi dengan sejumlah pihak," kata Velix seusai bertemu beberapa tokoh dari **Papua**, Senin (14/11), di Jakarta.

Velix mengatakan, sebelum dialog dalam bentuk perundingan, pemerintah harus memetakan kelompok-kelompok strategis di **Papua** dan persoalan apa saja yang harus dipecahkan bersama. Kondisi **Papua** berbeda dari Aceh sehingga membutuhkan cara tersendiri dalam membangun perundingan.

"Organisasi di **Papua** itu, kan, tidak ada organisasi yang tunggal seperti di Aceh," katanya.

Pemerintah, lanjut Velix, juga terbuka dan menghargai upaya sejumlah elemen masyarakat **Papua** agar perwakilan masyarakat **Papua** di luar negeri juga bisa menjadi juru runding masyarakat **Papua** ketika berdialog dengan pemerintah. "Hasil konferensi perdamaian di **Papua** bulan Juli memutuskan ada lima juru runding," katanya.

Dua tokoh **Papua**, yaitu Pendeta Socrates Sofyan Yoman dan Moderator Presidium Dewan **Papua** Pendeta Herman Awom, secara terpisah di **Papua** menilai dialog sebagai mekanisme yang bermartabat dan tepat untuk mencari solusi bagi **Papua**. Syaratnya, dialog itu harus digelar dengan jujur, setara, dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, dan tanpa syarat.

Forum Akademisi untuk **Papua** Damai siap membuat format dialog Jakarta-**Papua** untuk

mencari solusi konflik yang berkepanjangan. "Kami meminta para pihak, yakni pemerintah dan pemangku kepentingan, segera merumuskan dan menyepakati mekanisme dialog dalam resolusi konflik **Papua** sebagai langkah awal memulai dialog," kata Otto Syamsuddin Ishak, anggota Forum Akademisi dari Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, mewakili para akademisi.

Kepala Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat Bambang Dharmono menegaskan, pihaknya siap berdialog dengan siapa pun. "Kalau harus berdialog dengan Organisasi **Papua** Merdeka, saya siap," katanya.

Pendekatan keamanan

Soal kekerasan di **Papua**, kata Velix, pemerintah mulai meninggalkan pendekatan keamanan dalam menangani masalah **Papua** sehingga kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat TNI dan Polri harus ditangani serius oleh pimpinan kedua institusi tersebut.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah **Papua** secara damai dan bermartabat hendaknya ditindaklanjuti oleh aparat TNI dan Polri. Tindakan kekerasan yang masih dilakukan polisi dan TNI seperti dalam kasus penggeledahan asrama mahasiswa asal **Papua** di Jakarta dan Bali seharusnya dihentikan.

(edn/bil/ong/jos)

Kembali ke atas

KOMPASNET

Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Penembakan Belum Terungkap * Polisi Terkendala Kondisi Medan Sekitar Freeport

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 30 Nov 2011 Halaman: **23** Penulis: **JOS; UTI; ODY** Ukuran: **3020**
Pengindex: **pik.nnk**

Penembakan Belum Terungkap

Polisi Terkendala Kondisi Medan Sekitar Freeport

Jayapura, Kompas — Hingga saat ini, polisi belum mampu mengungkap pelaku dan motif rangkaian penembakan yang terjadi di areal PT Freeport Indonesia dalam dua tahun terakhir. Upaya pengejaran yang dilakukan polisi di kawasan tambang emas Freeport acap kali terkendala kondisi medan yang berhutan lebat dan berbukit terjal.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah **Papua** Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengungkapkan hal itu ketika dihubungi di Timika, **Papua**, Selasa (29/11). Namun, ia menegaskan, polisi terus mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari pelaku penembakan di sekitar areal tambang emas Freeport, sekaligus mengajukannya ke pengadilan.

Berdasarkan catatan Kompas, sejak Juli 2009 hingga saat ini, rentetan penembakan yang terjadi di jalur penghubung Timika-Tembagapura telah menyebabkan 12 orang tewas dan 46 lainnya luka-luka. Lokasi beberapa peristiwa tersebut tidak berjauhan dan dalam rentang waktu yang berdekatan.

Pada Rabu (16/11), misalnya, seorang sopir truk pengangkut peti kemas luka-luka ketika kendaraan yang dikemudikannya itu ditembaki orang tak dikenal saat melintas di Mil 51.

Dua hari berikutnya, Jumat, seorang anggota pengamanan PT Freeport Indonesia, Ferry William Sanyakit (52), juga tewas ditembak orang tak dikenal saat melintas di Mil 51. Meski sempat dirawat di Kuala Kencana, Ferry tidak tertolong.

Terakhir, Senin (21/11), sebuah kendaraan patroli juga ditembaki. Pengemudi dan penumpang yang ada di dalam kendaraan itu selamat. Namun, peristiwa itu meresahkan pekerja.

Seorang pekerja tambang bawah tanah yang ditemui di Bandara Moses Kilangin, Timika,

mengaku heran mengapa penembakan berulang kali terjadi di tempat yang tidak berjauhan. Padahal, menurut dia, ada banyak pos pengamanan di jalur menuju dataran tinggi itu.

Pada Selasa siang, jalur darat itu kembali dibuka. Iring-iringan kendaraan berjalan dengan pengawalan dari aparat keamanan. Sementara itu, Mil 28 masih diduduki pekerja Freeport yang mogok kerja.

Kontrak karya

Terkait hubungan pemerintah dengan Freeport, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Usman Hamid, kemarin, di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, mengatakan, pemerintah dapat membatalkan kontrak pertambangan jika dalam realisasinya justru merugikan rakyat dan tidak menguntungkan negara, seperti kasus Freeport. Walaupun pembatalan itu akan membuat Pemerintah Indonesia digugat, jika memiliki bukti-bukti yang kuat, pemerintah pasti akan didukung sejumlah pihak.

Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ngesti D Prasetyo mengatakan, advokasi dan penyelesaian sengketa tetap merupakan alternatif terbaik bagi penyelesaian otonomi khusus **Papua** dibanding jalan lain, seperti jalan militer yang senantiasa mengasumsikan protes di **Papua** sebagai upaya separatisme. **Papua** diyakini masih memiliki hati untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. (JOS/UTI/ODY)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Kisruh Freeport: Penembakan Terjadi Lagi di Kawasan Freeport

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 17 Nov 2011 Halaman: **24** Penulis: **ABK; JOS; ONG** Ukuran: **2198**
Pengindex: **pik.susy**

KISRUH FREEPORT

Penembakan Terjadi Lagi di **Kawasan Freeport**

Jayapura, Kompas — Mobil patroli RP 29 yang dikemudikan Medi Pungus dan ditumpangi lima anggota Brimob serta sebuah truk peti kemas dengan nomor lambung 02-663 yang dikemudikan Makasum, Rabu sekitar pukul 12.24 ditembaki orang tak dikenal di Mil 51. Akibatnya, leher Makasum terluka terkena serpihan kaca yang dihantam peluru, bajunya juga robek terserempet peluru.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Wachyono, Rabu (16/11), mengatakan, kedua mobil itu sebenarnya berjalan dari arah berlawanan. Saat itu, mobil patroli yang dikemudikan Medi melaju dari Tembagapura menuju Mil 50 dan truk yang dikemudikan Makasum melaju dari Mil 38 menuju Mil 68.

Ketika kedua kendaraan melintasi Mil 51, mobil patroli itu ditembaki dari sisi kiri dan truk ditembaki dari sisi kanan. "Polisi dan TNI kemudian menyisir wilayah tersebut sambil membuang tembakan ke hutan," katanya.

Sementara itu, puluhan utusan mahasiswa Papua di Yogyakarta, Rabu (16/11), bertemu dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta. Mereka meminta perlindungan kepada Sultan selaku Kepala Daerah DIY karena pasca-Kongres Rakyat Papua III mereka berulang kali diintimidasi dan diteror oknum tak dikenal.

Koordinator Utusan Mahasiswa Papua Yogyakarta Sagrim Hamah mengungkapkan, konflik di Papua akhir-akhir ini berimbas pada sebagian mahasiswa Papua di Yogyakarta. "Kami sering diintimidasi dan diteror melalui pesan singkat dan ancaman kata-kata. Mereka berkata, kalau kami ingin merdeka, mereka (peneror) akan menyayat kami seperti ayam," ungkap Sagrim.

Para mahasiswa itu bertemu Sultan pukul 09.00-11.00. Tampak di luar gedung Kepatihan beberapa aparat berpakaian preman hilir mudik di sekitar tempat pertemuan.

Sultan menegaskan, Pemerintah Provinsi DIY berkewajiban melindungi siapa pun yang tinggal di Yogyakarta. "Mereka (mahasiswa Papua) adalah bagian dari masyarakat Yogyakarta karena tinggal dan belajar di Yogyakarta," tutur Sultan. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim

menyesalkan minimnya penindakan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan terhadap warga Papua. (ABK/JOS/ONG)

Kembali ke atas

KOMPASNET

Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,11

halaman lainnya: ---

Teror di Freeport: Pengejar Belum Menemukan Pelaku

KOMPAS(Nasional) - Minggu, 23 Oct 2011 Halaman: **1,11** Penulis: **APA; ABK** Ukuran: **5818** VOD1
Pengindex: **pik.ris**

TEROR DI FREEPORT

Pengejar Belum Menemukan Pelaku

TIMIKA, KOMPAS — Pengejaran terhadap pelaku penembakan yang menewaskan tiga orang di Mil 38-40 areal PT Freeport Indonesia, Timika, **Papua**, belum membuahkan hasil. Kecuali menembak, pelaku penembakan ternyata mengambil pula telepon genggam, uang, dan emas di kios tempat korban bekerja.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Toni Sarjaka mengatakan, Sabtu (22/10), upaya pengejaran pelaku penembakan oleh Satuan Tugas Amole, satuan tugas TNI dan polisi yang bertugas di area tambang PT Freeport Indonesia, dibantu personel TNI di Mimika, dilakukan sejak penembakan terjadi, Jumat pagi. "Upaya pencarian kembali dilakukan Sabtu pagi, tetapi belum berhasil," katanya.

Upaya pengejaran disertai upaya peningkatan keamanan di areal PT Freeport dilakukan guna mencegah penembakan berulang. Selain berupaya mengejar pelaku, polisi juga telah memeriksa 11 petambang emas tradisional di Sungai Ajkwa. Para petambang ini berada di kemah mereka saat penembakan terjadi, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penembakan.

Dari pemeriksaan saksi, tidak ada yang melihat pelaku secara jelas. "Mereka sangat ketakutan setelah dua dari tiga korban tewas ditembak karena bergerak. Yang satu melawan saat telepon genggamnya mau diambil, sedangkan satu lagi ditembak karena mau kabur," ujar Toni.

Dua korban, Albertus Laitawono (29) dan Yunus (25), bekerja sebagai penjaga kios di Mil 40. Adapun satu korban tewas lainnya, Aloysius Margono, karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia, salah satu kontraktor PT Freeport Indonesia, ditembak saat mengemudikan mobil operasional perusahaan.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter dan 7,6 milimeter. Ini sama dengan yang ditemukan seusai penembakan di Mil 37 pada 14 Oktober lalu, yang juga menewaskan tiga orang. "Namun, kami belum bisa menyimpulkan pelakunya sama," ujarnya.

Dari informasi pemilik kios tempat Albertus dan Yunus bekerja, penembak mengambil barang berharga di kios, seperti telepon genggam, uang, dan emas.

La Apa (45), pemilik kios tempat Yunus bekerja, mengatakan, uang Rp 3 juta, telepon genggam, dan rokok diambil dari kiosnya. Adapun Jefry Tapasiang (40), pemilik kios tempat Albertus bekerja, mengatakan, selain uang dan rokok, mereka juga mengambil emas hasil kerja petambang tradisional.

Jenazah Aloysius sudah dikirimkan kepada keluarganya di Yogyakarta. Begitu pula jenazah Yunus yang dikirim kepada keluarganya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sementara jenazah Albertus akan dimakamkan di SP-2, Timika.

Aloysius Margono (47) diduga ditembak dalam jarak dekat. Bahkan, lokasi penembakan hanya berjarak beberapa meter dari pos penjagaan. "Korban ditembak dalam jarak kurang dari setengah meter. Saya menyaksikan sendiri proses otopsinya. Freeport adalah salah satu obyek vital, seharusnya ada tupoksi khusus untuk menjaga," kata anggota Komisi I DPR yang juga keponakan korban, Roy Suryo, Sabtu, saat pemakaman korban di pemakaman umum Dusun Pancoh, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta.

Menurut Roy, Aloysius ditembak dari balik pintu mobil Ford Ranger yang dikendarainya. Dari foto sebelum proses otopsi terlihat lengan kanan Aloysius mengalami satu luka tembak yang menembus hingga mengenai jantung.

"Dari posisi luka, pelaku kelihatannya sangat terlatih. Korban yang kebetulan lewat di Mil 40 (Kilometer 64) tiba-tiba dihadang lebih dari 10 orang yang kemudian menembakkan peluru. Dari beberapa tembakan yang dilepaskan, satu mengenai lengan kanannya," tuturnya.

Roy mengungkapkan, Mil 38 dan Mil 40 sebenarnya merupakan lokasi yang sangat tertutup serta relatif aman dan dekat dengan pos penjagaan. Oleh karena itu, menurut Roy, jika petugas keamanan melaksanakan tugas dengan benar, seharusnya peristiwa penembakan tidak perlu terjadi.

"Cukup sampai di sini, harus diselesaikan. Jangan terjadi konflik berkepanjangan. Panglima TNI dan Kapolri harus duduk bersama melihat permasalahan ini secara makro," paparnya.

Komisi I DPR pada Senin besok akan berdialog dengan warga **Papua** yang menjadi korban konflik serta kekerasan. Selanjutnya, Komisi I akan membuat rekomendasi dan langkah penyelesaian konflik **Papua** yang kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk dijalankan.

Perundingan buntu

Sementara itu, perundingan antara pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia sepanjang Jumat lalu tidak berbuah hasil. Kondisi ini kian memperpanjang terhentinya aktivitas penambangan di PT Freeport Indonesia yang berhenti sejak karyawan mogok kerja dan memblokade akses ke pertambangan atau sejak 15 September 2011.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, **Papua**, Dionisius Mameyao seusai perundingan mengatakan, perundingan akan coba kembali dilakukan Senin besok. Pihaknya akan mencoba mendekati kedua belah pihak agar mau mengubah tuntutannya sehingga titik temu bisa dicapai.

Dalam perundingan itu, SPSI PT Freeport Indonesia mensyaratkan, para pekerja yang dirumahkan sebagai sanksi ikut mogok kerja dipekerjakan kembali, upah selama mogok kerja tetap dibayar, dan perusahaan menerima tuntutan kenaikan upah karyawan menjadi berkisar 7,5 dollar AS per jam untuk pekerja nonstaf F1 hingga 33 dollar AS per jam untuk staf tingkat tiga.

Pihak manajemen menuntut agar blokade akses ke areal tambang oleh pekerja dibuka, memberikan kebebasan kepada karyawan yang mau bekerja, serta kenaikan upah karyawan 25 persen dalam jangka waktu dua tahun atau sesuai dengan hasil perundingan tripartit pada 24 September. Dengan kenaikan 25 persen, berarti upah pekerja akan berkisar 2,6 dollar AS per jam sampai 13,75 dollar AS per jam.

(APA/ABK)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (odf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Kisruh Industrial: Perusakan Membuat Freeport Memburuk

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 02 Nov 2011 Halaman: **1** Penulis: **APA; RYO** Ukuran: **3805** Foto: **1**
Pengindex: **pik.nnk**



KISRUH INDUSTRIAL

Perusakan Membuat Freeport Memburuk

Timika, Kompas — Manajemen PT Freeport Indonesia secara terbuka mengungkapkan memburuknya situasi di Freeport. Kini mulai terjadi perusakan fasilitas produksi, seperti penggalian dan pengambilan jaringan pipa dari lokasi tambang Mil 27 menuju pabrik pengolahan.

Dalam jumpa pers yang digelar di Plaza 86, Jakarta, Selasa (1/11), manajemen memperlihatkan foto-foto perusakan pipa dan pencurian solar yang diambil dari helikopter. Namun, mereka belum mampu mengidentifikasi pelaku perusakan fasilitas produksi itu karena helikopter terbang terlalu tinggi.

"Kami siap melanjutkan dialog dengan serikat pekerja, kapan pun. Kalau bisa, hari ini," kata Sinta Sirait, Executive Vice President PT Freeport Indonesia, di Jakarta.

Sinta menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas produksi. "Per hari, akibat pemblokadean dan perusakan pipa, Freeport merugi 18 juta-19 juta dollar AS," ujarnya. Dividen dan royalti kepada negara senilai 8 juta dollar AS menjadi tidak terbayarkan. Produksi Freeport pun terhenti sejak 22 Oktober 2011.

Di lapangan, penanganan demonstrasi dan pemogokan karyawan Freeport bergeser ke tuduhan bahwa karyawan Freeport melarang pengiriman pasokan avtur ke Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika. Polisi akan menggunakan tudingan itu untuk membubarkan blokade karyawan. Tudingan itu juga menguak masalah serius lain, yaitu tidak hadirnya negara di sana karena kilang avtur yang ada ternyata milik Freeport. Maskapai penerbangan lain bertahun-tahun selalu membeli avtur dari Freeport.

Persoalan ini terungkap dari penjelasan Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa, di Timika, Selasa. Virgo membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa karyawan yang mogok tidak pernah melarang pasokan avtur dari pelabuhan milik Freeport ke bandara, asalkan avtur itu tidak digunakan untuk pesawat milik maskapai Airfast yang digunakan bagi kepentingan Freeport.

"Sejak awal, kami sudah menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa kami tidak pernah melarang avtur untuk pesawat perintis dan pesawat komersial lainnya. Yang kami larang hanya avtur untuk Airfast," ujar Virgo. Untuk mencegah avtur digunakan Airfast, Virgo meminta distribusi avtur dikawal oleh karyawan.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob membenarkan pernyataan Virgo tersebut. Namun, kemudian yang terjadi, PT Freeport tidak mau avtur milik mereka digunakan oleh pesawat perintis atau pesawat komersial lain di bandara. "Avtur itu ada, tetapi PT Freeport hanya mau avtur untuk Airfast," lanjutnya.

Selama ini, kata Johannes, avtur untuk operasional pesawat di bandara dimiliki oleh PT Freeport karena hanya mereka yang memiliki kilang untuk menampung avtur. Maskapai dari pesawat perintis dan pesawat komersial lain yang beroperasi di bandara Timika membeli avtur dari Freeport. "Sejak tahun 2009, kami sudah berulang kali meminta Pertamina dan pemerintah pusat membangun kilang avtur sendiri supaya tidak bergantung kepada Freeport," ujar Johannes.

Akibat penghentian pasokan avtur, angkutan pesawat perintis ke 17 daerah terpencil di sembilan kabupaten di **Papua** dari bandara Timika terhenti sejak 15 Oktober. (APA/RYO)

Image :

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja dan menutup akses ke areal perusahaan pertambangan itu di Checkpoint 1, areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, **Papua**, Selasa (1/11). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia meminta waktu sampai 9 November 2011 untuk bisa menuntaskan perundingan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen perusahaan pertambangan tersebut.

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Ketenagakerjaan: Pipa Dijarah, Freeport Berhenti Berproduksi

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 24 Nov 2011 Halaman: 1 Penulis: JOS; EVY Ukuran: 3472 Foto: 1
Pengindex: pik.aan



KETENAGAKERJAAN

Pipa Dijarah, Freeport Berhenti Berproduksi

TEMBAGAPURA, KOMPAS — Penjarahan dan perusakan pipa konsentrat yang terus berlangsung tidak hanya mengakibatkan PT Freeport Indonesia tidak bisa lagi berproduksi menyalurkan konsentrat tembaga, emas, dan perak ke Pelabuhan Amamapare. Penjarahan pipa juga berdampak pasokan solar dari Pelabuhan Amamapare ke area kerja terhenti.

Demikian penjelasan Presiden Direktur dan CEO PT Freeport Indonesia (FI) Armando Mahler, Rabu (23/11), di ruang kerjanya. Terhentinya pasokan solar, menurut Armando, mengakibatkan PT FI terpaksa menghentikan operasi truk-truk pengangkut batuan mineral dari tambang terbuka Grasberg.

Armando menjelaskan, dari sekitar 160 truk berdaya angkut 80-350 ton, yang masih beroperasi kurang dari 10 truk. Keadaan ini memicu proses produksi selanjutnya terhenti. Dalam kondisi normal, dihasilkan 7.000 ton konsentrat per hari. Karena saat ini tidak ada pasokan solar, tidak ada produksi konsentrat sama sekali. Apalagi setelah terjadi penjarahan, stok batuan dan konsentrat di pabrik pengolahan menumpuk. "Pabrik pengolahan berhenti total. Tidak bisa memproduksi karena stok konsentrat sudah penuh," kata Armando. Bagi perusahaan tambang PT FI, pipa penyaluran konsentrat adalah jantung.

Di Jakarta, Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdhani Sirait kemarin menambahkan, saat ini kegiatan operasional hanya penambangan dan pemeliharaan tambang. Tidak ada pengolahan di pabrik karena konsentrat tidak bisa dikirim ke pelabuhan lantaran pipa-pipa pengangkut konsentrat itu telah dirusak dan dijarah pengunjuk rasa.

Wahyu Sunyoto, Vice President PT FI yang khusus menangani geoteknik, mengemukakan bahwa dihitung dengan harga emas hari ini, kerugian perusahaan hari ini saja nilainya 20 juta

dollar AS.

Menyangkut penjarahan dan perusakan, sekitar 20 kilometer pipa telah dijarah. Oleh karena itu, di tambang terbuka Grasberg banyak batuan mineral menumpuk di lereng tambang. Sisa solar yang ada digunakan untuk mengoperasikan truk dan alat-alat guna memelihara tambang.

Armando Mahler mengatakan, kondisi tersebut tidak dapat segera dipulihkan. Apalagi pipa khusus yang digunakan Freeport itu sangat langka di pasaran. Untuk sementara, PT FI mengupayakan membeli pipa serupa dari China meski spesifikasinya tidak persis sama.

Rabu siang, dengan sisa pipa yang ada, teknisi PT FI mencoba membuat jalur pipa baru. Pipa itu diprioritaskan untuk menyalurkan solar dari pelabuhan ke area produksi. Solar tersebut diprioritaskan untuk mengoperasikan alat-alat untuk memelihara tambang. Armando memperkirakan proses produksi dapat kembali dimulai pada minggu kedua Desember 2011. "Itu pun saya perkirakan hanya seperempat dari produksi normal."

Beberapa anggota staf yang ditemui di tambang terbuka Grasberg mengaku sedih melihat kondisi tersebut. Ada banyak batuan mineral menumpuk dan belum dapat diolah.

Ramdhani Sirait pada bagian lain menjelaskan, kerugian akibat mogok kerja yang dilakukan karyawan mencapai 19 juta dollar AS atau sekitar Rp 171,95 miliar per hari. Sementara kerugian pemerintah akibat pemogokan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 72,4 miliar per hari dari penerimaan yang disetor Freepot.

Selain itu, masyarakat diperkirakan kehilangan 200.000 dollar AS (sekitar Rp 1,81 miliar) per hari dari penerimaan dana pengembangan masyarakat. "Kerugian karena tidak ada pengiriman konsentrat ke pembeli," kata Ramdhani. (JOS/EVY)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Pipa Masih Digergaji * Kemelut Freeport Berimbas ke Penerimaan Negara

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 25 Nov 2011 Halaman: **23** Penulis: **Jos; Evy; Ham** Ukuran: **3454** Foto: **1** Pengindex: **pik.susy**



Pipa Masih Digergaji

Kemelut Freeport Berimbas ke Penerimaan Negara

Timika, Kompas — Upaya teknisi PT Freeport untuk memperbaiki jaringan pipa konsentrat dan bahan bakar yang satu bulan terakhir dirusak oknum tertentu terus mendapat gangguan. Dengan demikian, kerugian PT Freeport sebesar 19 juta - 20 juta dollar AS per hari belum teratasi.

Presiden Direktur dan CEO PT Freeport Indonesia Armando Mahler, Kamis (24/11), di Tembagapura, **Papua**, menduga ada oknum tertentu yang kembali menggergaji pipa tersebut. Meskipun kerusakan itu telah diatasi, ia berharap aparat keamanan dapat membantu.

Sejak penjarahan pipa di Mil 21 hingga Mil 31 marak terjadi pada akhir Oktober hingga awal November lalu, proses produksi PT Freeport Indonesia berhenti, terutama di area tambang terbuka Grasberg. Produksi material atau batuan mineral dari tambang bawah tanah pun menurun drastis dari 60.000 ton menjadi 10.000 ton per hari.

Menurut Vice President PT Freeport Indonesia Bidang Operasi Bawah Tanah Joko Basyuni, meskipun jumlah produksi dapat ditingkatkan, kolam penampungan material hampir penuh. Ia memperkirakan, dengan produksi material sebanyak 10.000 ton per hari, kolam penampungan yang mampu menampung hingga 1 juta ton material itu akan penuh dalam 20 hari lagi.

Kerugian akibat terhentinya produksi konsentrat itu diperkirakan 19 juta - 20 juta dollar AS per hari. Namun, jika pipa-pipa konsentrat telah diperbaiki, produksi dapat dilakukan kembali.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar, Kamis, di Jakarta, meminta manajemen dan buruh PT Freeport Indonesia saling menghargai tawaran yang disampaikan dalam perundingan bipartit yang kembali berjalan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama pemerintah daerah berharap, tiga kali negosiasi bipartit yang berjalan bisa segera menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

"Kami harapkan di antara kedua perbedaan ini, dicari titik temu yang paling moderat antara kepentingan manajemen dan buruh. Usulan buruh patut dipertimbangkan sesuai kemampuan," ujar Muhaimin.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan masalah pemogokan karyawan PT Freeport Indonesia dengan memperhatikan dampak pemogokan itu terhadap kegiatan operasional. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Jero Wacik berharap PT Freeport Indonesia maupun serikat pekerja segera mendapatkan titik temu, khususnya dalam kesepakatan upah kerja.

Pemogokan karyawan juga merupakan perhatian pemerintah karena telah mengganggu kegiatan operasi produksi PT Freeport Indonesia, yang pada akhirnya berdampak negatif kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pekerja.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia Syahrir AB menyatakan, kemelut ketenagakerjaan Freeport yang berlarut-larut dikhawatirkan menurunkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, bahkan berdampak buruk terhadap iklim investasi pertambangan. (JOS/EVY/HAM)

Image :

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, **Papua**, tampak sepi, Kamis (24/11). Manajemen PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas produksi menyusul aksi penjarahan dan perusakan pipa konsentrat yang terjadi sejak akhir Oktober hingga pertengahan November ini.

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Polisi Tetapkan Enam Tersangka * Ditemukan Tiga Jenazah di Bukit Heram

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 21 Oct 2011 Halaman: **15** Penulis: **JOS; NWO; BIL; FER** Ukuran: **3753**
Pengindex: **pik.yrm**

Polisi Tetapkan Enam Tersangka

Ditemukan Tiga Jenazah di Bukit Heram

Jayapura, Kompas — Polisi menetapkan enam tersangka setelah memeriksa lebih dari 300 orang yang ditangkap saat membubarkan Kongres Rakyat **Papua** III, Rabu lalu. Mereka adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August M Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, Gat Wenda, dan Selfius Bobii.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah **Papua** Komisaris Besar Wachyono, Kamis (20/10), mengatakan, Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August M Sananay Kraar, dan Dominikus Sorabut dituduh melanggar Pasal 110 Ayat (1) KUHP, Pasal 106 KUHP, dan Pasal 160 KUHP. Adapun Gat Wenda dikenai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Ketua Panitia Kongres Rakyat **Papua** Selfius Bobii menyerahkan diri, Kamis pagi, dengan diantar oleh beberapa penasihat hukum. Salah satu penasihat hukum, Olga Hamadi, mengatakan, polisi juga telah menetapkan Selfius Bobii sebagai tersangka. Ia juga dikenai pasal makar dan penghasutan.

Di Jakarta, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam membenarkan adanya penetapan para tersangka itu. Ia mengatakan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo telah mengirim tim yang dipimpin Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Inspektur Jenderal Imam Sujarwo ke **Papua**. "Tim bertugas mengamankan kondisi di **Papua** dan melakukan upaya-upaya penegakan hukum," ujar Anton.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aparat membubarkan Kongres Rakyat **Papua** III dan menangkap lebih dari 200 orang. Langkah itu dilakukan karena dalam kongres tersebut dideklarasikan pembentukan Negara Federasi **Papua** Barat dan menetapkan Forkorus Yaboisembut sebagai presiden dan Edison Gladius Waromi sebagai perdana menteri (Kompas, 20/10).

Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan menyatakan, deklarasi pembentukan negara sama sekali tak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, aparat terpaksa mengambil langkah tegas membubarkan kongres yang telah berlangsung tiga hari itu dan menangkap auktor intelektualisnya. Sebagian yang ditangkap telah dipulangkan.

Tiga korban

Kemarin ditemukan tiga jenazah di kawasan Bukit Heram, tak jauh dari Kompleks Korem 172 Praja Wira Yakthi. Mereka ditemukan terpisah. Ketiga korban bernama Daniek Kadepa, Max Sesa, dan Yosef Samon Sabra.

Menurut keterangan beberapa saksi mata, jenazah Daniek ditemukan tak jauh dari rumah warga yang berada di kaki Bukit Heram sekitar pukul 10.00. Tak lama kemudian, jenazah Max ditemukan di semak-semak bukit tersebut. Pukul 14.30, jenazah Yosef ditemukan di perbukitan yang sama.

Jenazah Daniak dan Max sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, jenazah Yosef, menurut Imam Setiawan, langsung dibawa keluarga ke Sentani. Ketiga korban diduga anggota penjaga tanah **Papua** (Petapa). Mereka adalah petugas keamanan yang saat Kongres Rakyat **Papua** III digelar bertanggung jawab atas keamanan di tempat acara. Imam menduga mereka dibunuh kelompok lain yang selama ini mengacaukan situasi di sekitar Abepura.

Sekretaris Jenderal Presidium Dewan **Papua** Thaha Al Hamid berpendapat, sebenarnya kegiatan itu tak layak disebut kongres. Selain tidak dipersiapkan dengan matang, dalam kongres itu juga tidak jelas antara panel dan faksi. Representasi peserta tidak jelas sehingga mengaburkan cara pengambilan keputusan.

Tokoh Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, Ramses Ohee, di Jakarta mengatakan, UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus **Papua** sudah jadi solusi terbaik. Namun, pemerintah pusat belum sepenuhnya merealisasikan ketentuan dalam UU Otsus. "Tahun 2010 kami memperjuangkan hak politik orang asli **Papua**, seperti diatur dalam UU Otsus **Papua**, dan kami menang di Mahkamah Konstitusi. Namun, pemerintah belum melaksanakan," katanya. (JOS/NWO/BIL/FER)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Polisi Ultimatum Pekerja Freeport * Aparat Diminta Hindari Cara Kekerasan

KOMPAS(Nasional) - Senin, 31 Oct 2011 Halaman: **15** Penulis: **APA** Ukuran: **2844** Infografis: **1**
http://kom.ps/aeJQ Pengindex: **pik.lis**

Polisi Ultimatum Pekerja Freeport

Aparat Diminta Hindari Cara Kekerasan

Timika, Kompas — Kepolisian Resor Mimika mengancam akan membubarkan blokade karyawan ke areal PT Freeport Indonesia di Timika, **Papua**, jika blokade tersebut tidak dibuka hingga Selasa besok. Pemogokan itu telah mengganggu kelancaran pasukan avtur di Bandar Udara Timika dan mengganggu aktivitas masyarakat lain.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah **Papua** Komisaris Besar Wachyono, yang dihubungi Minggu (30/10) malam, menjelaskan bahwa hal itu sebagai imbauan agar pemogokan karyawan tidak sampai mengusik aktivitas masyarakat lainnya.

Ultimatum polisi mengundang kritik dari Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh. "Itu memberikan kesan polisi berpihak kepada perusahaan tambang emas," katanya secara terpisah.

Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Deny Siregar belum dapat dihubungi untuk menjelaskan hal itu. Pesan singkat yang dikirim Kompas hingga Minggu malam pun belum dijawab.

Dalam surat bernomor B/174/X/2011/Res Mimika, tertanggal 30 Oktober 2011, yang ditandatangani Deny Edward Siregar, disebutkan, mogok kerja dan blokade ke areal PT Freeport Indonesia telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; serta UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pelanggaran ini didasarkan pada sejumlah hal. Hal-hal itu di antaranya, sejak 10 Oktober 2011, karyawan memindahkan aksi mogoknya—yang mestinya dilaksanakan di Checkpoint Utara Lima Kuala Kencana—ke tiga tempat lain, yaitu Gorong-gorong, Mil 27 areal PT Freeport Indonesia, dan CP-1 Mil 28 areal PT Freeport Indonesia.

Polisi menilai aksi mogok telah berubah menjadi unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada polisi, memblokade akses jalan ke obyek vital nasional. Karyawan dinilai telah merusak fasilitas yang ada pada obyek vital nasional, dalam hal ini fasilitas umum dan barang milik PT Freeport Indonesia.

Polisi mengimbau agar aksi mogok karyawan digeser kembali ke Checkpoint Utara Lima Kuala Kencana, sesuai izin ke kepolisian, 6 September lalu.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia sudah menerima surat tersebut. "Kami bahas dulu secara internal sebelum memutuskan langkah selanjutnya," ujar Ketua Bidang Organisasi SPSI PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa.

Hindari kekerasan

Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Atanasius Allo Rafra, mengimbau semua pihak mengedepankan perundingan. Aparat diimbau menghindari cara kekerasan.

Ridha Saleh, yang dihubungi dari Timika, sudah mengetahui adanya surat itu. "Kami akan berkomunikasi dengan pimpinan kepolisian untuk meninjau peringatan itu. Ini juga kian menguatkan dugaan sejumlah pihak mengenai aliran dana dari Freeport yang memengaruhi keberpihakan polisi," tuturnya. (APA)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,15
  halaman lainnya: ---
- Total Image: 1

Posko Brimob Ditembaki * Otsus Papua Belum Efektif

KOMPAS(Nasional) - Rabu, 26 Oct 2011 Halaman: **1,15** Penulis: **JOS; BIL; WHY; FER; ATO; ONG; EDN**
Ukuran: **6550** Infografis: **1** Pengindex: **pik.aan**



Posko Brimob Ditembaki

Otsus **Papua** Belum Efektif

JAYAPURA, KOMPAS — Sehari setelah Kepala Polsek Mulia Ajun Komisaris Dominggus Octavianus Awes dikeroyok dan ditembak hingga tewas, kekerasan di **Papua** terus meningkat. Kelompok sipil bersenjata menembaki posko Brimob di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (25/10). Pelakunya diperkirakan 200 orang, yang terbagi dua kelompok.

Insiden baku tembak itu terjadi dua kali. Pukul 06.00 sampai pukul 07.00 terjadi baku tembak antara anggota Brimob yang berpatroli dan sekelompok orang tak dikenal setelah jenazah Dominggus Awes diberangkatkan ke Jayapura.

Pukul 13.00 sampai pukul 13.30, sekelompok orang tak dikenal menembaki posko taktis Brimob, Puncak Jaya. "Namun, tidak ada korban tewas dalam insiden baku tembak di dua tempat tersebut," kata Kepala Divisi Humas Kepolisian Negara RI (Polri) Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Selasa.

Meskipun diserang, posko taktis Brimob itu tidak rusak karena tembakan berasal dari arah cukup jauh, yaitu dari perbukitan. Kelompok itu diperkirakan 200 orang yang dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama berjumlah sekitar 150 orang dengan senjata tradisional seperti kapak dan panah, sedangkan kelompok kedua sekitar 50 orang bersenjata api. Menurut Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, kelompok pertama berada sekitar 700 meter dari posko Brimob.

"Mereka menari-nari untuk memancing aparat mendekat," kata Lukas Enembe. Kelompok

kedua bertiarap di sepanjang sungai, yang berjarak sekitar 500 meter dari pos tersebut. Menurut Lukas Enembe, kontak senjata aparat gabungan TNI dan Polri dengan kelompok bersenjata itu terjadi sejak pagi hari. Ia menduga kelompok itu hendak merampas senjata milik aparat keamanan.

"Motif mereka ingin mencari senjata api," kata Anton secara terpisah. "Juni lalu, anggota kami diambil juga senjatanya," ujarnya. Setelah dua insiden penembakan itu, aparat Brimob melakukan pengejaran, tetapi para pelaku melarikan diri.

Lukas Enembe mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan kelompok bersenjata itu untuk menghentikan aksi tersebut. Ia juga meminta bantuan pemuka agama untuk bernegosiasi dengan kelompok itu agar mau menarik diri. Lukas Enembe berupaya menahan amuk para penyerang agar tidak membakar kantor-kantor pemerintah. Sebuah kantor dinas, yaitu Kantor Dinas Ketahanan Pangan, diinformasikan dibakar sekitar pukul 16.00. Namun, ujar Lukas Enembe, situasi kota tampak seperti biasa, mungkin masyarakat terbiasa dengan situasi itu.

Lukas Enembe mengatakan, kelompok penyerang itu bukan di bawah kendali Gholiat Tabuni, pemimpin Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi **Papua** Merdeka (TPN/OPM) wilayah Puncak Jaya. "Saya sudah berkomunikasi dengannya. Ia mengatakan tidak bertanggung jawab atas penyerangan itu," katanya.

Lukas Enembe menyebutkan, di Puncak Jaya ada tiga kelompok bersenjata. Kelompok pertama dipimpin Gholiat Tabuni, kelompok kedua dipimpin Mathias Wenda, dan kelompok lainnya berafiliasi dengan TPN/OPM di **Papua** Niugini. Meskipun punya tujuan sama, mereka tidak di bawah satu komando. Ia menduga penyerangan kemarin dilakukan kelompok ketiga.

Ia berharap pemerintah memberikan dukungan untuk mengatasi hal itu. Selasa malam, Polri mengirim pasukan tambahan dari Brimob, Kelapa Dua, Depok, sebanyak 170 personel ke **Papua**. Menurut Anton, Polri menetapkan Siaga I di wilayah Polres Jayawijaya.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda **Papua** Komisaris Besar Wachyono, penembak Dominggus diduga berasal dari kelompok yang sama dengan pelaku penembakan Briptu M Yazin, Juni lalu.

Menanggapi situasi di **Papua**, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di Istana Negara, Jakarta, mengatakan, "Tindak kekerasan di **Papua**, bagaimanapun, ada dan nyata. Maka, jika TNI/Polri mengejar para pelaku tindak kejahatan itu, jangan lagi dikaitkan dengan HAM (hak asasi manusia). Dalam konteks itu, aparat keamanan kita melakukan tindakan penegakan hukum."

Secara umum, kata Djoko Suyanto, pemerintah menempuh dua langkah sebagai bentuk penyelesaian jangka pendek. Pertama, tentang gerakan separatis, penanganannya diserahkan kepada penegak hukum. Kedua, terkait penembakan di Timika dan Mulia, pemerintah telah mengejar para pelaku.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, sebuah tim melakukan langkah-langkah penyelidikan dan pengejaran. "Kita tunggu saja hasilnya," ucapnya.

Masalah mendasar

Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, menjelaskan, gejolak di **Papua** sesungguhnya sudah diprediksi, tetapi disayangkan pemerintah terkesan lambat dalam menangani. Tubagus mengingatkan ada empat permasalahan mendasar di **Papua**, yakni perbedaan persepsi masalah integrasi **Papua** dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, marjinalisasi penduduk asli **Papua**, pelanggaran HAM, dan masalah otonomi khusus (otsus) yang dinilai tidak berjalan.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengakui, pemerintah menyadari pelaksanaan otsus **Papua** dan **Papua** Barat belum efektif. Di sisi lain, ada kelompok bersenjata dalam skala kecil di **Papua** dan **Papua** Barat yang terus menyuarakan kemerdekaan. Dua hal itu diakui memicu gejolak keamanan.

Menurut Velix, pendekatan politik juga dilakukan terus dengan membangun komunikasi konstruktif dengan elemen masyarakat di **Papua**. Pemerintah berupaya menangani dengan pendekatan menyeluruh dari sisi politik, hukum, budaya, dan sosial ekonomi. Pendekatan ekonomi diwujudkan dalam bentuk konsistensi desentralisasi fiskal **Papua** dan **Papua** Barat. Pembiayaan pusat ke **Papua** dan **Papua** Barat dalam tujuh tahun terakhir meningkat lebih dari 100 persen. Jika pada 2004-2005 alokasi dana otsus, dana sektoral, dan dana alokasi umum ke daerah itu berkisar Rp 13 triliun, tahun ini alokasinya meningkat menjadi Rp 30 triliun.

Namun, diingatkan, pendekatan keamanan pemerintah pusat hanya membuat **Papua** berpotensi merdeka. "Kalau eskalasi kekerasan meningkat, pastilah akan makin menguatkan jaringan internasional mereka dalam rangka mendorong **Papua** merdeka. Yang harus dilakukan adalah pendekatan kesejahteraan," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida di Jakarta.

Anggota Tim Kajian **Papua** Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth, mengatakan, penyelesaian masalah **Papua** saat ini selalu dalam konteks menempatkan **Papua** sebagai potensi separatisme. "Membuat program pembangunan, tetapi pelabelan separatisme tidak hilang," ujarnya. (JOS/BIL/WHY/FER/ATO/ONG/EDN)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,15
  halaman lainnya: ---
- Total Image: 1

Masalah Papua: Presiden Akui Otonomi Khusus Kurang Efektif

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 10 Nov 2011 Halaman: **1,15** Penulis: **JOS; APA; ATO** Ukuran: **4513**
Foto: **1** VOD1 Pengindex: **pik.yrm**



MASALAH PAPUA

Presiden Akui Otonomi Khusus Kurang Efektif

Jakarta, Kompas — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pelaksanaan otonomi khusus bagi **Papua** dan **Papua** Barat selama ini berjalan kurang efektif. Oleh sebab itu, tugas pokok Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat sekarang adalah mendorong pelaksanaan otonomi khusus menjadi lebih efektif dan terutama memastikan dana pembangunan di **Papua** dan **Papua** Barat sungguh-sungguh tepat sasaran.

"Pastikan program dan anggaran yang ditetapkan dalam APBN dan APBD benar-benar dilaksanakan. Tidak kalah penting, wajib memberikan bantuan kepada pemerintah daerah **Papua** dan **Papua** Barat," ujar Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas yang membahas **Papua** di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (9/11).

Rapat ini juga diikuti Kepala Unit Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B) Bambang Dharmono.

Otonomi khusus bagi wilayah **Papua** berlaku sejak 10 tahun lalu setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi **Papua** dikeluarkan. Namun, ekspresi ketidakpuasan dan gangguan keamanan terus muncul sampai sekarang. Dana otonomi khusus begitu besar dan pemanfaatannya dikeluhkan oleh berbagai kalangan tidak menyentuh hingga lapisan masyarakat **Papua** paling bawah.

Menurut Yudhoyono, ada tiga pilar yang menjadi dasar mengatasi persoalan di **Papua**. Pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, otonomi khusus. Ketiga, percepatan pembangunan di **Papua** dan **Papua** Barat.

Ketiga pilar kebijakan tersebut telah dijabarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Namun, dari hasil evaluasi, pelaksanaannya dinilai kurang efektif. Atas dasar alasan ini, dibentuk UP4B yang memiliki tugas utama meningkatkan koordinasi atau sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pengantar rapat, Presiden juga memerintahkan kementerian-kementerian di bidang ekonomi memberikan prioritas pembangunan bagi **Papua** dan **Papua** Barat. Adapun untuk kementerian di bidang kesejahteraan rakyat, Presiden meminta mereka aktif menyelesaikan sengketa perburuhan yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Khusus untuk kementerian di bidang politik, hukum, dan keamanan, Presiden menginstruksikan mereka menegakkan hukum dan keamanan sebaik mungkin.

Datang ke **Papua**

Kemarin, Presiden juga mengatakan, jika perlu, aparat pemerintah pusat datang ke **Papua** untuk melihat situasi. "Lihat situasinya, pahami, dan cari solusi. Beda apabila Saudara menerima laporan dan membahasnya di Jakarta dengan datang ke sana dan berdiskusi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat dan agama untuk mencari solusi yang baik," kata Presiden.

Dalam jumpa pers seusai rapat kabinet, Bambang Dharmono menegaskan, pekerjaan yang akan segera dilakukan adalah melakukan komunikasi konstruksi berupa dialog.

"Kami akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang mereka butuhkan," ujarnya.

Duduk bersama

Dihubungi kemarin di Jayapura, Ketua Sinode Gereja Kingmi Pendeta Benny Giyai mengatakan, pemerintah dan orang asli **Papua** harus duduk bersama untuk membicarakan bersama apa yang diperlukan guna menjawab persoalan **Papua**. Benny menyesalkan, UP4B dibentuk tanpa melibatkan rakyat **Papua**.

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah **Papua** Se-Indonesia Markus Haluk menengarai, UP4B hanya bagian dari politik pencitraan pemerintah terkait persoalan **Papua**.

Koordinator Umum Komite Nasional **Papua** Barat Victor Kogoya mengatakan, UP4B tidak akan mampu menjawab apa pun.

Di Freeport

Dalam perkembangan di Timika, Kabupaten Mimika, **Papua**, dikabarkan, Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Mimika Komisaris Syamsu Ridwan menemui ratusan karyawan PT Freeport Indonesia yang berkumpul di Checkpoint 1, areal Freeport di Timika.

Salah seorang koordinator karyawan, Hengky Binur, mengatakan, karyawan akan tetap

menutup akses ke areal Freeport sampai tuntutan kenaikan upah dikabulkan oleh manajemen PT Freeport.

"Polisi juga harus memahami dasar kami tidak mengikuti tata tertib yang ada," ujarnya.

(JOS/APA/ATO)

Image :

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wakil Presiden Boediono, menggelar rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (9/11). Rapat tersebut membahas pembangunan dan permasalahan yang terjadi di Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat, sekaligus memastikan bahwa langkah dan solusi yang akan ditempuh tepat.

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Papua: Presiden Harus Percepat Dialog Papua-Jakarta

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 05 Nov 2011 Halaman: **1** Penulis: **FER; IAM; RWN; NTA; ODY; WHY**
Ukuran: **2548** Pengindex: **pik.pry**

PAPUA

Presiden Harus Percepat Dialog **Papua**-Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Cara yang diyakini paling efektif untuk menyelesaikan masalah di **Papua** adalah dengan menggelar dialog interaktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan di **Papua**. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harus mempercepat terwujudnya dialog tersebut.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (4/11). "Komnas HAM juga merekomendasikan dan mendesak Presiden mengevaluasi secara menyeluruh kinerja institusi dan aparat keamanan serta penempatan pasukan yang tersebar di wilayah **Papua** dan **Papua** Barat," kata Ridha. Komnas HAM menilai terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa Kongres Rakyat **Papua** III.

Menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, pemerintah harus membuat terobosan, dan jalan keluar yang terbaik adalah menggelar dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan di **Papua**. "Ketidakpastian masa depan **Papua** ini hanya bisa diatasi dengan langkah politik yang sungguh-sungguh oleh kepemimpinan nasional," katanya.

Terkait pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B), Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyatakan, Presiden harus segera melantik Kepala UP4B Bambang Dharmono agar lembaga ini segera bekerja.

Di Jayapura, **Papua**, Ketua II Dewan Adat **Papua** Sayid Fadhal Alhamid berharap dialog yang dilakukan harus jujur dan bermartabat. Ia menilai, komunikasi konstruktif yang dicetuskan pemerintah pusat tidak akan menyelesaikan persoalan di **Papua**.

"Syarat dialog yang jujur dan bermartabat di antaranya kedua belah pihak duduk dalam posisi setara, dilaksanakan di tempat yang netral, difasilitasi pihak ketiga yang netral, dan dilaksanakan tanpa syarat. Pemerintah harus menyelesaikan masalah mulai dari akar persoalan, yakni status politik **Papua**," ujarnya.

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar mengatakan,

pemerintah mengulirkan pendekatan baru yang lebih mengedepankan pelibatan elemen masyarakat dalam menyelesaikan masalah **Papua**. Fokus penanganan tidak hanya pada peningkatan sosial ekonomi, tetapi juga memajukan sosial politik dan budaya.

"Pendekatan sosial politik dan budaya antara lain dengan kebijakan perlakuan khusus (affirmative policy) yang jelas dan berpihak kepada rakyat **Papua**, memberikan perhatian dan penghormatan yang lebih pada sisi tradisionalnya," katanya.

(FER/IAM/RWN/NTA/ODY/WHY)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Presiden Harus Turun Tangan * Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Ada Ketidakadilan di Papua

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 11 Nov 2011 Halaman: **15** Penulis: **jos; apa; ong; iam; har; ina; bil; edn; fer; las;** Ukuran: **3123** Pengindex: **pik.lis**

Presiden Harus Turun Tangan

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Ada Ketidakadilan di **Papua**

Jakarta, Kompas — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan dan melakukan langkah nyata untuk segera menyelesaikan masalah di **Papua**. Jika tidak, masalah ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu dan merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Imbauan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Din Syamsuddin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj secara terpisah di Jakarta, Kamis (10/11). Keduanya menyimpulkan, akar persoalan di **Papua** adalah ketidakadilan, terutama dalam kesejahteraan ekonomi. Kekayaan alam di wilayah itu dikeruk dan hasilnya dinikmati perusahaan asing dan pemerintah pusat. Rakyat setempat justru miskin dan kurang berpendidikan.

Secara terpisah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini mengakui, ada ketidakadilan ekonomi di **Papua**. Dengan sumber daya alam yang dimiliki, semestinya **Papua** bisa lebih maju. Namun, faktanya, wilayah itu justru tertinggal, angka kemiskinan tinggi, dan angka melek huruf rendah.

Menurut Din, persoalan **Papua** sudah lama berlangsung tanpa penyelesaian jelas sehingga bertumpuk-tumpuk dan kian memanas. Pendekatan keamanan jelas tidak bisa menuntaskan persoalan. Jikalau tak segera diselesaikan, apalagi kemudian melibatkan kontak senjata, masalah ini bisa melebar dan membesar.

Pemerintah Indonesia jangan beretorika saja. Pemerintah melihat kondisi langsung, menggelar dialog dengan pemangku kepentingan, dan memperbaiki program pembangunan. Kontrak dengan perusahaan asing juga harus dinegosiasi ulang dengan memperbesar pemberian keuntungannya kepada rakyat **Papua**.

Said Aqil Siroj, Kamis, menerima kunjungan perwakilan dari Lembaga Musyawarah Masyarakat Amumei dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Komoro. Ia menegaskan, akar masalah **Papua** adalah ketidakadilan, terutama dalam ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia.

"Kami mendengar keluhan rakyat **Papua**. Masih ada kekerasan, penembakan, ketidakadilan, kezaliman, dan penindasan. Mereka miskin, padahal daerahnya kaya-raya," katanya.

Said Aqil berjanji menyampaikan keluhan itu kepada pemerintah. Ia mendesak pemerintah pusat turun ke lapangan dan melaksanakan janji pembangunan. "Pemerintah harus malu atas ketertinggalan di **Papua**," katanya.

Helmy mengungkapkan, saat ini adalah momentum untuk semua pihak menyadari persoalan dan mengevaluasi pembangunan di **Papua**, terutama soal ketimpangan. Pemerintah tak bisa berkeras kepala menutup mata adanya ketimpangan, yaitu ketidakadilan ekonomi.

Di Jayapura, Koordinator Jaringan Damai **Papua** Neles Tebay menyambut baik inisiatif Presiden Yudhoyono untuk membuka dialog dengan berbagai kelompok masyarakat **Papua**. Namun, tanpa dukungan dari semua pihak, dialog itu tak akan terjadi dan tak akan menghasilkan manfaat bagi rakyat **Papua**.

Di Jakarta, Kamis, sekitar 500 orang berunjuk rasa menuntut nasionalisasi Freeport dan moratorium pertambangan asing di Indonesia. Aksi itu sempat memanas, tetapi berakhir tertib.

(jos/apa/ong/iam/har/ina/bil/edn/fer/las)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Produksi Freeport Stop: PT Freeport Indonesia Minta Perundingan Dilanjutkan

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 22 Sep 2011 Halaman: **15** Penulis: **JOS** Ukuran: **3067** Pengindex: **pik.nnk**

Produksi Freeport Stop

PT Freeport Indonesia Minta Perundingan Dilanjutkan

Jayapura, Kompas — Pemogokan pekerja PT Freeport Indonesia sampai Rabu (21/9) telah memasuki hari ketujuh karena hingga saat ini belum ada kesepakatan baru antara pekerja dan manajemen perusahaan tersebut. Kedua pihak masih kukuh pada konsep masing-masing sehingga produksi PT Freeport Indonesia terhenti.

Juru bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia, Juli Parorongan, yang dihubungi dari Timika, **Papua**, mengatakan, pekerja masih menunggu sikap terbuka dari manajemen untuk menanggapi tawaran kalangan pekerja.

Juli menjelaskan, para pekerja tidak menuntut harga mati atas nilai upah pokok yang mereka ajukan.

Saat ini, tim SPSI PT Freeport Indonesia berada di Jakarta untuk mengikuti mediasi ketiga yang digelar oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut beberapa pekerja yang ditemui di kantor Sekretariat SPSI PT Freeport Indonesia, meskipun bekerja di tambang emas terbesar di dunia, tingkat kesejahteraan mereka tergolong minim. Banyak pekerja nonstaf belum memiliki rumah.

Sebagian besar dari mereka mengontrak atau menyewa kamar. Seorang pekerja yang telah bekerja selama 20 tahun di bagian tambang bawah tanah mengungkapkan, jika tidak nekat mengambil pinjaman perumahan di bank, dia tak dapat memiliki rumah.

"Orang menduga gaji kami besar dan hidup dalam kelimpahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Banyak yang harus mengambil lembur agar mendapatkan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi jika anak-anak sudah mulai kuliah," tutur Juli.

Dalam perundingan dengan manajemen yang kemudian mandek, perwakilan pekerja menuntut ada penyesuaian upah pokok mereka. Mereka mengajukan agar upah pekerja disesuaikan dengan kontribusi PT Freeport Indonesia kepada Freeport McMoran yang mencapai lebih dari 50 persen pada tahun 2010.

Pada periode 2009-2010, gaji mereka hanya naik 3 persen per tahun. Oleh karena itu, saat ini pekerja meminta manajemen mau lebih terbuka untuk bernegosiasi atas besaran kenaikan upah periode 2011-2013. Tawaran manajemen dengan menaikkan upah sebesar 22 persen untuk dua tahun, menurut Juli, tidak memadai, apalagi angka inflasi di Timika telah menembus angka 9 persen.

Freeport minta berunding

Dihubungi secara terpisah, juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, mengatakan, pihak manajemen menginginkan perundingan dan dialog dapat dilanjutkan kembali. Selain itu, mereka juga berharap pemogokan dihentikan. Saat ini, menurut Sirait, sebagian pekerja dari divisi penunjang tambang dan tambang telah aktif kembali bekerja.

Namun, beberapa pekerja yang ditemui di kantor SPSI PT Freeport Indonesia di Timika mengatakan, umumnya mereka bekerja sebatas di divisi untuk merawat peralatan. "Bagian produksi tak berjalan sama sekali," tutur seorang pekerja.

Hingga Rabu sore, pekerja dari sejumlah divisi hanya duduk-duduk dan mengobrol di halaman kantor SPSI dan di depan pintu gerbang Kuala Kencana. Beberapa dari mereka ahli pengeboran dan peledakan. (JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Otonomi Khusus : Rakyat Papua Ingin Didengar

KOMPAS(Nasional) - Kamis, 24 Nov 2011 Halaman: 4 Penulis: Edn; Fer Ukuran: 2366 Pengindex: pik.ris

OTONOMI KHUSUS

Rakyat Papua Ingin Didengar

JAKARTA, KOMPAS — **Rakyat Papua** ingin didengar aspirasinya. Selama ini ada masalah politik dan kemanusiaan yang tidak tersentuh otonomi khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan proses komunikasi yang terus-menerus disertai dengan kepercayaan.

Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum tokoh-tokoh masyarakat **Papua** dengan Komisi I DPR, Rabu (23/11). Thaha al-Hamid dari Presidium Dewan **Papua** menyatakan, persoalan dasar **Papua** adalah masalah sejarah politik. Ada soal pembunuhan orang-orang **Papua** yang seakan diizinkan oleh negara. "Ini semua tidak disentuh otonomi khusus," kata Thaha.

Penyelesaian atas hal-hal tersebut merupakan prakondisi dari dialog yang formal. Hal ini tentunya harus didukung penuh oleh semua instansi pemerintah. Thaha mengharapkan, ada kesatuan visi dan pelaksanaan dari pemerintah karena dialog juga tidak bisa dilakukan kalau polisi dan tentara masih melakukan kekerasan di **Papua**. "UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan Provinsi **Papua** Barat) ini penalti. Kalau gagal lagi gimana?" ujar Thaha.

Untuk penyelesaian yang paling bermartabat dan manusiawai, Pdt Socrates Sofyan Yoman menyatakan, dialog sebagai solusi. Ia sebagai orang **Papua** masih merasa tidak diperlakukan sebagai warga negara karena selalu harus berhadapan dengan kekerasan dan senjata ketika mereka mengekspresikan aspirasi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar para anggota DPR datang ke **Papua** dan masuk sampai ke desa-desa untuk berbicara dengan **rakyat Papua** apa yang sebenarnya mereka inginkan.

Sekretaris Umum Dewan Adat **Papua** Leonard Imbiri juga meminta agar pendekatan kekerasan dihentikan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman menyetujui permintaan perwakilan tokoh **Papua** bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun sendiri menemui dan berbicara dengan orang **Papua** dan terutama mendengarkan aspirasi mereka.

Sementara itu, setelah berdiskusi dengan berbagai kalangan untuk membahas masalah **Papua** di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mendesak pemerintah membenahi manajemen keamanan dengan mengevaluasi penempatan pasukan TNI dan Polri di **Papua**. Hal ini penting sebagai prakondisi untuk mendorong dialog **Papua**-Jakarta yang dilakukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan Provinsi **Papua** Barat. (EDN/FER)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

TNI: Reformasi Dibayangi Tindakan Kekerasan

KOMPAS(Nasional) - Senin, 03 Oct 2011 Halaman: **4** Penulis: **EDN** Ukuran: **3679** Pengindex: **pik.hti**

TNI

Reformasi Dibayangi Tindakan Kekerasan

Jakarta, Kompas — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan beberapa catatan terkait ulang tahun ke-66 Tentara Nasional Indonesia. Beberapa catatan yang membayangi reformasi TNI itu antara lain tindakan kekerasan, konflik lahan, dan tindakan politis.

Hal itu disampaikan Koordinator Kontras Haris Azhar, Minggu (2/10). Dari beberapa kasus, terlihat bahwa penyiksaan dan penganiayaan jadi salah satu pendekatan dominan. Haris menyoroti beberapa tindak kekerasan yang dilakukan aparat TNI, seperti peristiwa di **Papua** di mana terjadi praktik penyiksaan sekitar Maret 2011 yang berujung pada kematian Charles Mali.

Kekerasan juga terjadi dalam konflik lahan, seperti di Kebumen, Jawa Tengah, dan pengosongan rumah keluarga purnawirawan TNI. Kasus di Kebumen berpuncak pada 16 April 2011 saat terjadi insiden penembakan. "Ini menunjukkan TNI arogan menyikapi protes warga," katanya.

Kontras juga menyoroti tindakan TNI AD, terutama Kodam Siliwangi, berkaitan dengan masalah Ahmadiyah. Kodam Siliwangi menggelar operasi yang memanggil paksa, mendata, melarang peribadatan, hingga memaksa anggota Jemaah Ahmadiyah mengucapkan kalimat syahadat. Intensitas itu amat terlihat di sejumlah kota di Jawa Barat, seperti Subang, Sukabumi, Majalengka, dan Bogor.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyatakan, semua aparat TNI yang melakukan kekerasan sudah dikenai sanksi. Berkaitan dengan insiden di **Papua**, dalam tiga insiden terakhir yang sudah terbukti, semua sudah dikenakan sanksi. "Memang ada satu hingga dua anggota yang melakukan kekerasan, tetapi tak bisa digeneralisasikan dengan 40.000 anggota TNI," katanya.

Dari sisi hukum, Kontras menilai TNI cenderung menerapkan "hukum"-nya sendiri. Dalam kasus Kebumen, aparat lokal melakukan patroli keamanan pascabentrokan. Padahal,

mekanisme-mekanisme itu cenderung tertutup karena semua entitas peradilannya merupakan anggota militer. Dalam kasus penyiksaan, KUHP Militer dan Peradilan Militer tidak memiliki yurisdiksi delik "penyiksaan".

Namun, di sisi lain merespons hal itu, justru ada perkembangan menarik saat Panglima TNI mengeluarkan Peraturan Panglima Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (27 September 2010). "Kegagalan menghukum tindakan pelanggaran HAM akan memperburuk citra TNI," kata Haris.

Iskandar menyatakan, peradilan militer kini sudah terbuka. Semua orang bisa mengikuti persidangan. TNI tidak bisa mengintervensi. "Mahkamah Agung langsung kontrol," katanya.

Kontras juga menyoroti politisasi TNI. Dalam masa kepemimpinan Kepala Staf TNI AD Jenderal George Toisutta, selain peningkatan kekerasan, terutama dalam pengambilalihan rumah keluarga purnawiran, juga keterlibatan George dalam bursa ketua PSSI disertai insiden penggunaan kekerasan dan intimidasi.

Dipilihnya Jenderal Pramono E Wibowo sebagai KSAD juga dinilai sarat dengan muatan politik daripada profesional mengingat Pramono adalah adik ipar Presiden. "Jangan karena Pak Edhy itu adiknya Bu Ani langsung dikatakan TNI berpolitik," kata Iskandar.

Ia menyatakan, sesuai UU No 34/2004 tentang TNI, tidak ada prajurit aktif yang boleh berpolitik praktis. Terkait Pramono, sudah melalui berbagai jenjang seperti Pangdam, Pangkostrad yang menunjukkan kapabilitas. (EDN)

"Memang ada satu-dua anggota yang melakukan, kekerasan, tetapi tak bisa digeneralisasikan dengan 40.000 anggota TNI. Iskandar Sitompul

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Papua : Saat Menepati Janji-janji

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 04 Nov 2011 Halaman: 45 Penulis: Ninuk M Pambudy; B Josie S Hardianto; Suhartono Ukuran: 7732 Foto: 1 VOD1 Pengindex: pik.pry



PAPUA

Saat Menepati Janji-janji

Situasi yang memanas di **Papua** membuat Jakarta bersikap hati-hati. Para pejabat tinggi memilih memberi penjelasan normatif atau menghindar.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto tak mau ditemui dan hanya melambaikan tangan kepada wartawan saat dicegat di kantornya awal pekan ini. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun minta waktu untuk mempelajari persoalan sebelum menjawab pertanyaan.

Kehati-hatian itu tampak berhubungan dengan pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta, di Nusa Dua, Bali, Senin (24/10). Salah satu pembicaraan menyangkut **Papua**, selain rencana AS menghibahkan sejumlah pesawat tempur F-16 kepada Pemerintah Indonesia. Bulan ini juga rencananya Presiden AS Barack Obama akan berkunjung ke Bali untuk pertemuan dengan pemimpin ASEAN.

Senin itu juga Kapolsek Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Octavianus Awes tewas ditembak di Bandar Udara Mulia. Sebelumnya, terjadi penembakan dan aksi massa di PT Freeport Indonesia dan pembubaran Kongres Rakyat **Papua** III yang diikuti penahanan 200 peserta kongres. Sampai kini kegiatan di areal penambangan PT Freeport Indonesia belum pulih karena karyawan masih mogok, sementara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Mimika tengah berupaya ikut memiliki sebagian saham PT Freeport Indonesia.

Persoalan **Papua** memang kompleks. Kekerasan mewarnai wilayah itu berpuluh tahun melalui penetapan sebagai derah operasi militer. Pendekatan keamanan berubah menjadi

pendekatan kesejahteraan setelah reformasi dan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi **Papua**.

UU tersebut mengakui berbagai persoalan dan tuntutan masyarakat **Papua**, antara lain, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di **Papua** belum memenuhi rasa keadilan, belum memberi kesejahteraan rakyat, belum mendukung penegakan hukum, dan belum menghormati HAM masyarakat **Papua**.

Pengakuan lain, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam **Papua** belum digunakan optimal untuk meningkatkan hidup masyarakat asli dan mengabaikan hak dasar penduduk asli **Papua**.

Namun, 10 tahun setelah UU Otsus diberlakukan dan dana dikucurkan deras ke dua provinsi di sana, rasa keadilan, kenyamanan, dan keamanan belum dirasakan rakyat kebanyakan. Indeks Pembangunan Manusia di **Papua** adalah yang terendah di Indonesia.

Secara fisik, memang terjadi pembangunan. Data Badan Pusat Statistik **Papua** 2010 menyebutkan, ada 2.333 rumah sakit. Puskesmas bertambah dari 991 unit pada 2008 menjadi 1.026 unit pada 2009. Jumlah dokter dari 481 orang menjadi 574 orang, dan paramedis dari 5.021 orang menjadi 5.506 orang.

Data itu tak berarti banyak bila dicek di lapangan. Banyak puskesmas lebih sering ditinggal dokter dan puskesmas pembantu tak ada tenaga kesehatannya. Gedung sekolah berdiri, tetapi sulit mencari guru yang mau tinggal di pedalaman. Jumlah orang miskin bertambah, dari 761.000 jiwa lebih (2010) menjadi 944.000 orang per Maret 2011 meski persentasenya turun dari 36 persen menjadi 31 persen pada 2010 dari total penduduk 2.833.381 orang.

Kenyataan seperti itu membuat Yulian Psakor (32) kehilangan istrinya, Carolina Kuntui (30), karena komplikasi saat melahirkan. Keduanya tinggal di Kampung Kibay, Keerom, yang berbatasan dengan **Papua** Niugini. Sejak berdiri tahun 1980-an hingga kini, di Kibay tak ada puskesmas.

"Saya bosan meminta. Tiap kali ada pertemuan kepala kampung di kantor bupati, saya ulangi permintaan itu. Tetapi, sampai kini belum terwujud," kata Kepala Kampung Kibay, Franky Psakor.

Adil, aman, setara

Rasa belum sejahtera sementara sumber daya alam adalah salah satu yang terkaya di dunia bertemu dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tak segera diselesaikan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pun jadi tuntutan, diiringi kompensasi bagi mereka yang dirugikan karena pelanggaran HAM berat.

Direktur Eksekutif The Research Institute for Democracy & Peace Amiruddin al-Rahab, dalam diskusi di Litbang Kompas menyebutkan, persoalan **Papua** juga berakar dari masalah sejarah integrasi **Papua** dengan Indonesia, antara lain, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969

yang belum diterima bulat. Adapun bagi Pemerintah Indonesia Pepera sudah final.

Ketua Kaukus **Papua** di Parlemen Paskalis Kossay mengatakan, tuntutan pelurusan sejarah **Papua** oleh sebagian masyarakat **Papua** melalui referendum sebetulnya tidak akan muncul bila kesejahteraan merata dan penderitaan akibat pelanggaran HAM tidak ada lagi.

Penyelesaian **Papua** tidak bisa dilepaskan dari pendekatan budaya, yaitu memahami pandangan dunia mereka. Masyarakat **Papua** sangat terikat pada sukunya sehingga tidak ada satu kepemimpinan tunggal.

Meski begitu, antropolog Universitas Indonesia, Iwan Pirous dan Jibriel Avissena, dalam diskusi di Litbang Kompas serta Amiruddin mengatakan, masyarakat **Papua** disatukan oleh satu perasaan, yaitu ingin perubahan ke arah masyarakat yang adil, sejahtera, dan nyaman.

Bila ada keinginan merdeka, menurut Amiruddin yang ikut memberi masukan bagi perumusan kebijakan **Papua** bagi kantor Wakil Presiden, harus dilihat dari sudut pandang budaya **Papua**. Orang **Papua** meyakini datangnya juru selamat yang akan membawa rakyat **Papua** keluar dari kesengsaraan. Keyakinan itu mewujud dalam simbol bintang kejora.

Dialog dalam keragaman

Bahwa **Papua** berbeda dari Aceh dan Timor Leste yang memiliki pemimpin tunggal, juga disadari pemerintah. Juru runding pemerintah, Farid Husain, kepada Kompas, Senin lalu, mengatakan, ia ditugasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalin komunikasi dengan tokoh adat, agama, pemuda, organisasi dan gerakan, serta pemangku kepentingan lain.

"Sulitnya, mereka tidak punya pemimpin tunggal. Jadi, harus ditemui satu per satu," tutur Farid yang mengaku sudah menemui tokoh Organisasi **Papua** Merdeka (OPM) serta sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional. Bahkan, Kongres Rakyat **Papua** III pun tidak mewakili seluruh rakyat **Papua**. Menurut Farid, OPM tidak menyetujui kongres itu.

Dalam konstelasi politik-sosial-ekonomi tersebut, dialog menjadi pilihan paling menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan. Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B) yang diketuai Bambang Dharmono harus berdialog dengan semua pemangku kepentingan dan tak menyederhanakan persoalan dengan penyeragaman.

Bambang kepada Kompas, awal pekan ini, mengatakan, integrasi teritorial adalah kenyataan sejarah yang sudah selesai dengan persetujuan 80 negara anggota PBB tahun 1969. Meski ada yang abstain, tak ada yang menentang. "Namun, ada yang belum selesai, yaitu integrasi sosial masyarakat **Papua**. Bila tidak selesai, akan mengancam integrasi teritorial. UP4B bertugas melaksanakan integrasi sosial," kata Bambang.

Integrasi sosial itu, kata Bambang, bukan hanya melalui pendekatan ekonomi seperti di Timor Timur, melainkan melalui pendekatan sosial-budaya yang bisa mengembalikan kehormatan dan kebanggaan rakyat **Papua** dalam NKRI, mengembalikan kepercayaan masyarakat yang

hilang pada Pemerintah RI.

Bambang mencontohkan, hal-hal yang kasat mata, seperti petugas front office hotel berbintang di Jayapura hingga pengusaha batik **Papua** selayaknya adalah orang asli **Papua** agar masyarakat merasa berada di tanah sendiri. Dia juga menjanjikan langkah hukum untuk pelanggar HAM dan mengusahakan pembentukan KKR.

Janji sudah diucapkan berulang kali, yang ditunggu mewujudkan janji-janji tersebut. Jangan lagi mengandaikan situasi dapat terus dikendalikan dan kesabaran tak berbatas.

(Ninuk M Pambudy/B Josie S Hardianto/Suhartono)

Image :

Kembali ke atas

KOMPASNET

Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Satu Orang Lagi Tewas * Pekerja Freeport Minta Jaminan Keamanan Pemerintah

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 19 Nov 2011 Halaman: **15** Penulis: **JOS** Ukuran: **2542** Pengindex: **pik.nnk**

Satu Orang Lagi **Tewas**

Pekerja Freeport Minta Jaminan Keamanan Pemerintah

Jayapura, Kompas — Rentetan penembakan di areal operasi PT Freeport Indonesia makan korban lagi. Seorang anggota keamanan PT Freeport, Fery William Sanyakit (50), **tewas** ditembak **orang** tak dikenal, Jumat (18/11), saat melintas di Mil 51 (Kilometer 81,6) areal perusahaan tambang emas itu.

Fery adalah korban ke-12 jika dihitung sejak Juli 2009 ketika rentetan kasus penembakan terjadi di kawasan itu. "Saya sedih sekali, seolah pemerintah tak peduli lagi kepada kami. Teman kami kembali menjadi korban. Ini tidak bisa dibiarkan karena seolah-olah kami menunggu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya," kata Lita Karubaba, anggota staf PT Freeport.

Ia mengatakan, di dalam areal PT Freeport Indonesia dan sekitarnya ada banyak tentara dan polisi. "Tetapi mengapa tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Saya sedih, korban sudah 15-20 tahun bekerja, kontribusinya juga besar untuk Indonesia. Kami minta jaminan rasa aman bekerja. Kami ini manusia," ujar Lita menambahkan.

Rabu lalu, di tempat yang sama, seorang pengemudi truk peti kemas, Makasum, terluka karena kendaraan yang dikemudikannya ditembaki **orang** tidak dikenal. Oktober lalu, setidaknya enam **orang tewas** karena penembakan. Korban **tewas** tidak hanya karyawan PT Freeport Indonesia, tetapi juga karyawan kontraktor, serta penjaga kios di lokasi pendulangan.

Selain korban meninggal, sejak Juli 2009 juga ada 46 **orang** terluka karena tembakan. Anggota TNI dan polisi yang bertugas di wilayah itu juga menjadi korban. Namun, belum **satu** pelaku pun yang tertangkap.

Penembakan

Dalam penembakan Jumat siang, selain menewaskan Fery, tembakan **orang** tidak dikenal itu juga melukai tiga anggota Brimob Den B Timika. Menurut Wakil Kepala Polres Mimika

Komisaris M Indra Laksanta, penembakan terjadi sekitar pukul 12.15.

Saat itu, mobil patroli ringan Toyota LWB dengan nomor RP-17 yang mereka tumpangi melaju dari Mil 58 (Kilometer 92,8) menuju Mil 50 (Kilometer 80). Saat melintas di Mil 51, ada tembakan dari kiri depan. Tembakan itu mengenai kepala bagian kiri Fery. Serpihan peluru juga melukai Brigadir Kepala Jafar, Brigadir Rumere, dan Brigadir **Satu** Eli.

Ketiga anggota Brimob itu melepaskan tembakan balasan dan segera meminta bantuan. Fery dilarikan ke Mil 50 dan kemudian diterbangkan dengan helikopter ke Kuala Kencana.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono mengungkapkan, Fery sempat dirawat di klinik Kuala Kencana, tetapi tidak tertolong.

(JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 2

Satu Tewas di Freeport * Serikat Pekerja dan Freeport Beda Pendapat

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 11 Oct 2011 Halaman: **22** Penulis: **JOS; FER; EVY** Ukuran: **3514** Foto: **1** Infografis: **1** Dacode: DK http://kom.ps/6l3F VOD1 Pengindex: **pik.lis**



Satu Tewas di Freeport

Serikat Pekerja dan Freeport Beda Pendapat

Jayapura, Kompas — Hingga saat berita ini ditulis, jumlah korban tewas akibat bentrok antara polisi dan pekerja di Terminal Gorong-Gorong, Timika, sebanyak satu orang, yaitu Petrus Ayamiseba (36). Sementara itu, Briptu Jamil yang saat ini masih dirawat di RSUD Mimika dalam kondisi sangat kritis.

Senin (10/10) malam, Wakil Kepala Polres Mimika Komisaris Made Indra Laksanta mengatakan, menurut dokter, harapan hidup Briptu Jamil sangat tipis. "Namun, mereka terus berupaya agar dia dapat diselamatkan," kata Made Indra Laksanta.

Made Indra Laksanta mengatakan, tidak ada yang mengetahui bagaimana Briptu Jamil terluka. Berdasarkan informasi yang masuk, sekitar tiga jam setelah bentrok, ditemukan seseorang terluka parah terkapar di antara Mil 26-27. Masyarakat kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah dicek ternyata korban adalah Briptu Jamil. Saat itu ia tidak mengenakan seragam polisi karena Briptu Jamil, tutur Made Indra Laksanta, adalah anggota intel Brimob.

Sementara itu Petrus Ayamiseba adalah karyawan PT Pangan Sari—perusahaan privatisasi PT Freeport Indonesia—yang tewas tertembus peluru polisi. Semalam, jenazah Petrus disemayamkan di Gedung DPRD Mimika. Diperoleh informasi, dalam bentrokan itu setidaknya delapan pekerja terluka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ketut Untung Yoga Ana, di Jakarta, kemarin, menjelaskan, 3 kendaraan operasional PT Freeport Indonesia (FI) terbakar,

7 anggota Polri terkena lemparan pengunjuk rasa, dan 2 pengunjuk rasa mengalami luka tembak.

Menurut Ketut Untung Yoga, pengunjuk rasa di Terminal Gorong-Gorong di Timika, **Papua**, merusak dan membakar tiga kendaraan operasional PT FI.

SPSI dan FI beda pendapat

Juru Bicara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT FI Juli Parorongan mengatakan, peristiwa itu merupakan dampak dari akumulasi kekecewaan pekerja atas sikap manajemen PT FI yang dinilai arogan. Sejak 7.612 orang dari sekitar 11.000 karyawan PT FI mogok kerja pada 15 September 2011, PT FI tak hanya mengintimidasi dan merumahkan pekerja yang ikut mogok, tetapi juga merekrut dan mengontrak tenaga kerja baru. "Padahal, itu bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan," kata Juli.

Adapun Jubir PT FI Ramdani Sirait menyesalkan terjadinya bentrok itu. Para pekerja dianggap hendak mengganggu pekerja lain yang hendak pergi bekerja. Menurut Sirait, sebelum itu telah terjadi berbagai pelanggaran berupa pemblokiran jalan, intimidasi kepada sesama karyawan, dan penggunaan kendaraan perusahaan tanpa izin.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menyatakan, pihaknya sudah melaporkan bentrokan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saat ini, dari waktu ke waktu, Menko Polhukam dan jajarannya—karena itu termasuk wewenangnya karena menyangkut keamanan—telah mengambil langkah-langkah," kata Darwin. (JOS/FER/EVY)

Image :

ANTARA/SPEDY PAERENG

Sejumlah aparat Kepolisian Resor Mimika berusaha menghindari lemparan batu dari karyawan PT Freeport Indonesia yang berunjuk rasa di jalan akses menuju terminal bus milik perusahaan tambang emas tersebut, di Gorong-Gorong, Timika, **Papua**, Senin (10/10). Akibat bentrokan itu seorang karyawan tewas dan beberapa lainnya terluka, termasuk aparat keamanan.

Image :

Kembali ke atas

KOMPASNET

Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Pertambangan: Selesaikan Aksi Mogok Karyawan PT Freeport

KOMPAS(Nasional) - Senin, 03 Oct 2011 Halaman: **20** Penulis: **EVY** Ukuran: **2496** Pengindex: **pik.ftn**

PERTAMBANGAN

Selesaikan Aksi Mogok Karyawan PT Freeport

Timika, Kompas — Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia, hingga Minggu (2/10), telah menggelar aksi mogok kerja selama 17 hari sejak 15 September lalu. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika, **Papua**, berharap aksi mogok kerja segera diselesaikan melalui jalan perundingan karena menyebabkan kegelisahan baik di kalangan karyawan sendiri, keluarga, manajemen, pemerintah, maupun masyarakat.

Berbicara kepada Antara di Timika, Minggu (2/10), anggota Komisi A DPRD Mimika, Athanasius Allo Rafra, mengatakan sangat prihatin dengan berlarut-larutnya aksi mogok kerja karyawan PT Freeport.

Mantan penjabat Bupati Mimika periode 2007-2008 itu meminta manajemen PT Freeport dan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai wakil karyawan berpikir tulus dengan hati jernih untuk menyelesaikan kebuntuan proses perundingan demi menghasilkan perjanjian kerja bersama periode 2011-2013.

Menyikapi aksi tersebut, Wakil Presiden Eksekutif dan Chief Administrative Officer PT Freeport Indonesia Sinta Sirait di Jakarta menyatakan, pihaknya pada prinsipnya menyetujui anjuran mediator agar dapat segera tercapai kesepakatan. Namun, diakui, banyak pertimbangan yang masih harus dibahas lebih lanjut karena kenaikan 3 persen dari persentase kenaikan upah pokok akan berdampak luas terhadap biaya tenaga kerja dan tunjangan karyawan.

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, menjelaskan, dalam beberapa kali pertemuan dengan wakil Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia tidak tercapai kesepakatan mengenai paket kompensasi untuk peningkatan kesejahteraan yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama periode Oktober 2011-Oktober 2013.

"Karena belum ada kesepakatan, pemberian paket kompensasi peningkatan kesejahteraan pada Oktober ini bisa tertunda," kata Ramdhani.

Sebelumnya, angka kompensasi yang diajukan pekerja adalah 17,5 dollar AS (Rp 153.650) per jam untuk pekerja tingkat terendah dan 45 dollar AS (Rp 395.100) per jam untuk pekerja pada tingkat tiga.

Namun, manajemen menilai tuntutan itu tidak realistis karena angka itu setara dengan Rp 27 juta per bulan untuk pekerja dengan tingkat kompetensi terendah. Jika ditambah dengan upah lembur dan bonus berdasarkan harga komoditas, pekerja akan menerima pendapatan dua kali Rp 27 juta per bulan. Manajemen justru menawarkan konsep lain, yakni kenaikan sebesar 22 persen dibagi untuk dua tahun ditambah kompensasi lain. (EVY)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,15
  halaman lainnya: ---
- Total Image: 3

Situasi di Papua Memanas * Kapolsek Mulia Tewas Diserang dan Ditembak

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 25 Oct 2011 Halaman: **1,15** Penulis: **JOS; BIL; NTA; FER** Ukuran: **6125**
Foto: **1** Infografis: **2** http://kom.ps/90dT VOD1 Pengindex: **pik.ris**







Situasi di **Papua** Memanas

Kapolsek Mulia Tewas Diserang dan Ditembak

JAYAPURA, KOMPAS — Situasi politik dan ke- amanan di **Papua** memanas. Setelah penembakan dan aksi massa di PT Freeport Indonesia dan pem- bubaran Kongres Rakyat **Papua** III, Senin (24/10), Kapolsek Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes tewas diserang dan ditembak.

Peristiwa itu terjadi di areal Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, sekitar pukul 11.30. Dominggus tewas dengan dua luka tembak. "Tembakan mengenai hidung dan tembus sampai kepala bagian belakang," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Senin.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda **Papua** Komisaris Besar Wachyono, saat itu Dominggus tengah memantau kegiatan di Bandara Mulia. Kala itu Dominggus tidak ditemani oleh rekan atau anak buahnya. Posisi Dominggus berada di depan sebuah pesawat milik operator penerbangan perintis Mission Aviation Fellowship (MAF) yang parkir di seberang kantor bandara.

Tiba-tiba saja ia dihampiri dua orang yang langsung mengeroyoknya. Dominggus pun jatuh telentang, dan saat itu pelaku merampas senjatanya. Seorang pengeroyok mengarahkan senjata itu ke kepala Dominggus dan lalu menembakkannya dua kali. Dua pelaku itu kemudian melarikan diri ke arah perbukitan di sisi utara landasan.

Dominggus segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Puncak Jaya, tetapi nyawanya tidak tertolong. Polisi masih mengejar pelaku. Jenazah Dominggus direncanakan diterbangkan ke Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa pagi.

Dua pelaku penembakan tersebut, menurut Anton Bachrul Alam, diduga merupakan anggota kelompok separatis. Aparat kepolisian bekerja sama dengan aparat TNI memburu para pelaku ke hutan. "Polri telah meminta bantuan TNI untuk mengejar mereka," kata Anton.

Kedua pelaku kini menjadi target operasi. Polisi juga masih mendalami kasus itu dengan meminta keterangan para saksi yang melihat penembakan tersebut.

Penembakan itu mengingatkan kembali kasus serupa yang terjadi pada paruh akhir Juni lalu. Saat itu, lima orang tak dikenal mengeroyok Brigadir Satu M Yazin, anggota Kepolisian Pengawasan Pelabuhan dan Penyeberangan Udara Bandara Mulia. Pistol milik M Yazin dirampas. Salah satu perampas menembakkan pistol itu ke arah M Yazin. Meskipun terluka parah, M Yazin dapat diselamatkan.

Sebelumnya, akhir Mei lalu, anggota Komando Pasukan Khusus, Sersan Satu Kaman Nurjaman, ditembak seseorang ketika melintas di depan Pasar Distrik Ilu, Puncak Jaya.

Situasi **Papua** akhir-akhir ini makin memanas. Konflik, kerusuhan massa, kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, aksi-aksi penyerangan, dan sejumlah penembakan kerap terjadi. Bahkan, dalam satu bulan belakangan ini, kekerasan tersebut kian meningkat eskalasinya.

Tanggal 10 Oktober lalu terjadi bentrok antara polisi dan pekerja di kawasan PT Freeport Indonesia (PT FI) yang menewaskan satu orang, tiga mobil terbakar, dan sejumlah orang luka-luka. Empat hari kemudian, 14 Oktober lalu, terjadi penembakan di areal PT FI di Mil 37-40 (Kilometer 59,2-64), yang menewaskan tiga orang.

Tanggal 19 Oktober lalu, sekitar 200 peserta Kongres Rakyat **Papua** III ditangkap. Kongres yang telah berlangsung tiga hari di Lapangan Sepak Bola Zakheus, Abepura, itu juga dibubarkan karena dinilai makar.

Indikasi makar, ujar Kapolres Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan saat itu, adanya deklarasi Negara Federasi **Papua** Barat dan strukturnya. Dua hari kemudian, Jumat lalu, tiga orang tewas ditembak di Timika, Kabupaten Mimika, oleh kelompok orang tidak dikenal di lokasi pendulangan emas.

Datangi Komisi I DPR

Kemarin, warga dan karyawan PT FI yang tinggal di daerah Tembagapura, Kuala Kencana, dan Timika, mendatangi Komisi I DPR. "Sekarang ini sangat perlu pengembalian kondisi keamanan," kata Linda Siregar, wakil warga. Dalam pertemuan itu, Linda menuturkan kondisi Tembagapura dan Timika sejak 2009 yang selalu dihantui rasa cemas karena banyak ancaman kekerasan, bahkan pembunuhan. Pekerja PT FI bahkan diharuskan mengenakan jaket dan topi antipeluru.

Warga juga menuntut pengungkapan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi sejak 2009. "Suami saya dibunuh dengan cara tidak manusiawi, tapi sudah dua tahun pembunuhnya

belum terungkap juga," tutur Linda.

Agus Maufu, wakil warga lainnya, juga mengeluhkan lambannya aparat keamanan dalam mengusut kasus-kasus pembunuhan di **Papua**.

Karena itu, warga meminta DPR membantu memulihkan situasi keamanan di **Papua**. Pasalnya, warga juga ingin kembali hidup tenang dan bebas dari ancaman pembunuhan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang mengatakan, Komisi I akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk meminta penjelasan.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo, juga mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus-kasus penembakan, termasuk kasus penembakan Trimat lalu, yang juga menewaskan paman Roy Suryo, Aloysius Margana.

Seharusnya kasus-kasus penembakan itu, ujar anggota Komisi I dari Partai Kebangkitan Bangsa, Lily Wahid, bisa diungkap dengan cepat. Lily menduga, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan sehingga penanganan kasus penembakan tak pernah terselesaikan dengan baik.

Secara terpisah, anggota Tim Kajian **Papua** Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth, mengatakan, eskalasi kekerasan dalam beberapa hari terakhir secara umum menunjukkan siklus kekerasan di **Papua** belum terputus.

Elisabeth yang menjadi salah satu penyusun buku **Papua** Road Map mengatakan, "Harus ada strategi baru memutus kekerasan itu. Tidak lagi dengan pendekatan selama ini, seperti penempatan pasukan yang berlebihan."

(JOS/BIL/NTA/FER)

Grafik: **Papua** Memanas

Image :

ANTARA/MARCELINUS KELEN

Aparat gabungan TNI/Polri di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, **Papua**, Senin (24/10), mengejar kelompok pengacau keamanan yang menewaskan Kepala Kepolisian Sektor Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes di Bandara Mulia.

Image :

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

- Total Image: 1

Tak Ada Intervensi Asing * Selama 28 Bulan, Ada 26 Kali Penembakan di Kawasan Freeport

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 26 Nov 2011 Halaman: **4** Penulis: **NWO; EDN** Ukuran: **4620** Foto: **1**
Pengindex: **pik.aan**



Tak Ada Intervensi Asing

Selama 28 Bulan, Ada 26 Kali Penembakan di Kawasan Freeport

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Jumat (25/11), di kompleks parlemen, menyatakan tidak ada intervensi asing, seperti Amerika Serikat dan Australia, di **Papua**, termasuk soal Freeport.

Keyakinan itu muncul setelah mendengarkan isi pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Asia Timur di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Dalam pertemuan antara Yudhoyono dan Obama, menurut Djoko yang ikut dalam pertemuan tersebut, Obama tidak menyatakan satu kata pun tentang PT Freeport Indonesia. Menurut Julia Gillard, **Papua** merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah, lanjut Djoko, memiliki tiga kebijakan dasar dalam mengelola **Papua**. Kebijakan itu adalah **Papua** merupakan bagian dari NKRI, otonomi khusus yang dimulai tahun 2001, serta pendekatan yang dipakai adalah ekonomi dan kesejahteraan.

Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi **Papua** dan **Papua** Barat (UP4B) Bambang Dharmono menambahkan, otonomi khusus menjadi landasan percepatan pembangunan di **Papua**. Kesejahteraan juga tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga nonfisik, seperti rasa aman. "UP4B bertugas memastikan pelaksanaan program pembangunan di **Papua**," katanya.

Namun, Ali Kasela, anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, mengingatkan, UP4B jangan menambah birokrasi. Kesejahteraan masyarakat **Papua** juga tidak lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Jika 10 tahun lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) **Papua** di atas Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, sekarang berada di paling bawah.

"Saat saya kunjungan kerja ke PT Freeport, ternyata ada 70 anggota militer AS yang masih aktif bekerja di perusahaan itu," ucap Ali.

Langkah PT Freeport memberikan uang keamanan kepada TNI dan Polri juga menimbulkan kecemburuan warga **Papua**. "Polisi dan TNI yang sudah mendapat uang negara masih mendapat uang keamanan dari PT Freeport, sedangkan warga **Papua** malah tidak mendapat," ucap Ali.

26 kali penembakan

Secara terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, banyak penembakan terjadi di **Papua**, khususnya di PT Freeport Indonesia. Selama Juli 2009-November 2011 (28 bulan) terjadi 26 kali penembakan. Rinciannya, pada 2009 ada 12 kali, 2010 (1), 2011 (13). Akibat dari rentetan peristiwa itu, korban tewas tercatat 16 orang dan luka sedikitnya 48 orang, 30 di antaranya pegawai Freeport.

Koordinator Kontras Haris Azhar prihatin atas banyaknya penembakan di kawasan PT Freeport Indonesia itu. Sepanjang 2009-2011, banyak penembakan terjadi di antara Mil 35 dan 57. Rinciannya, di Mil 35-42 terdapat 11 kali penembakan, Mil 49-57 (10 kali), dan Mil 45 (3 kali), juga di Mil 61 (1 kali). Kondisi alam di kawasan itu berupa hutan. Jalan di lokasi itu hanya boleh dilintasi kendaraan PT Freeport Indonesia, khusus dari Mil 32. Di sepanjang lokasi tersebut juga terdapat beberapa pos jaga TNI/Polri, di antaranya di Mil 32, Mil 34, Mil 50, Mil 54, Mil 64, dan Mil 66.

Tahun 2011 penembakan meningkat tajam, khususnya setelah buruh PT Freeport Indonesia mogok kerja. Tercatat ada 11 kali penembakan. Terhitung sejak 10 Oktober 2011 itu, ada 9 orang tewas (7 karyawan PT Freeport Indonesia dan 2 penambang tradisional).

Namun, para pelaku penembakan tak ada yang berhasil ditangkap atau dilumpuhkan meski anggota TNI/Polri melakukan pengejaran. Alat bukti yang ditemukan antara lain beberapa selongsong peluru buatan PT Pindad.

Oleh karena itu, Freeport mempertanyakan keberadaan dan kinerja TNI/Polri yang ditempatkan di sekitar areal kerja PT Freeport Indonesia. Upaya hukum terhadap semua peristiwa itu juga dipertanyakan. "Menuduh dan menyebut OPM sebagai pelaku bukanlah solusi dan bukan bagian dari tindakan hukum," kata Haris. (NWO/EDN)

"Kesejahteraan juga tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga nonfisik, seperti rasa aman."

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf): 1,15
  halaman lainnya: ---
- Total Image: 2

SBY: Tak Ada Operasi Militer * Pemerintah Pusat Jangan Bosan Bangun Papua sampai Pelosok

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 28 Oct 2011 Halaman: **1,15** Penulis: **JOS; APA; ATO; bil; FER; ANO; HAR**
Ukuran: **7043** Foto: **1** Infografis: **1** Pengindex: **pik.pry**



SBY: Tak Ada Operasi Militer

Pemerintah Pusat Jangan Bosan Bangun **Papua** sampai Pelosok

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar hukum ditegakkan dalam menghadapi kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah di **Papua** akhir-akhir ini. Kebijakan pemerintah saat ini tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Tak ada lagi pendekatan keamanan yang mengandalkan operasi militer secara masif.

Presiden Yudhoyono saat menyampaikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (27/10), mengakui masih terjadi gerakan politik dan gangguan keamanan di **Papua** dan **Papua** Barat. Namun, hal itu bukan alasan bagi pemerintah untuk melakukan pendekatan keamanan. "Pendekatan keamanan sudah usai, tak ada lagi pelaksanaan operasi militer secara masif," katanya.

Kesatuan TNI yang ditempatkan di **Papua** dan **Papua** Barat, menurut Presiden, semata-mata untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Aparat kepolisian atau penegak hukum lainnya yang berada di kedua provinsi tersebut juga fokus pada upaya penegakan hukum.

Ia menuturkan, jika melakukan kesalahan, anggota TNI atau Polri pasti mendapatkan sanksi. Sebaliknya, apabila ada pihak lain yang memiliki pikiran berbeda secara politik dan keamanan, hukum juga harus ditegakkan.

"Apabila mereka melakukan kekerasan, seperti terjadi akhir- akhir ini, dengan korban anggota Polri/TNI, masyarakat, dan pekerja, hukum perlu ditegakkan dan keamanan dijaga," ujar

Presiden.

Sehari sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan, di **Papua** ada 14.000 prajurit Kodam XVII Cenderawasih. Jumlah itu tergolong kecil mengingat luas dan medan yang berat di **Papua**. "Kami tidak bisa menutup seluruh wilayah **Papua** dengan jumlah prajurit organik tersebut," kata Pramono.

Sementara itu, Ketua Tim Kajian **Papua** Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan Widjojo mengatakan, pemerintah harus menata kembali penyebaran (deployment) TNI di **Papua** yang dinilai terlalu banyak. Ia memperkirakan jumlahnya mencapai 16.000 personel. "Ini sangat eksesif dan pasti akan sulit mengontrolnya. Penataan kembali deployment ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadi kekerasan yang tidak terkontrol," tutur Muridan Widjojo.

Menurut dia, Presiden harus bisa mengambil langkah tegas terhadap kelompok yang bermain dan mengacaukan situasi keamanan di **Papua**. Tanpa bisa menindak kelompok-kelompok tersebut, siklus kekerasan di **Papua** tak akan terputus.

Dalam beberapa hari belakangan ini, berulang kali terjadi penyerangan dan penembakan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Sehari sebelum menembaki posko Brimob, penyerang menembak Kepala Kepolisian Sektor Mulia Ajun Komisaris Dominggus Awes hingga tewas.

Operasi pengejaran terhadap para pelaku itu ditangani empat perwira tinggi Polri, yaitu Kepala Kepolisian Daerah **Papua** Inspektur Jenderal BL Tobing, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Imam Sujarwo, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Bekto Suprapto, dan Ketua Tim Asisten Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpau.

Menyangkut sejumlah aksi penembakan, terutama di areal PT Freeport Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat **Papua** John Ibo tak yakin dilakukan kelompok separatis. "Kita tidak tahu siapa yang ada di balik-balik gunung melakukan penembakan. Kalau memang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, silakan meningkatkan bantuan Polri yang profesional. Namun, kalau sudah terkendali, ciptakan kondisi **Papua** yang normal," kata John Ibo.

Menurut dia, pemerintah pusat jangan bosan untuk terus-menerus membangun **Papua** meskipun di **Papua** adakalanya terjadi kekerasan. "Teruskan membangun sampai pelosok terpencil untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat **Papua** agar jurang kemiskinan di wilayah terbelakang **Papua** semakin kecil dan ruang gerak aksi-aksi perlawanan tidak ada lagi," tutur John Ibo.

Presiden Yudhoyono menegaskan, kebijakan pemerintah pusat terhadap **Papua** dan **Papua** Barat selama ini sudah tepat. "Kebijakan dasar untuk **Papua** adalah menjalankan otonomi khusus sebesar-besarnya demi kesejahteraan saudara-saudara kita di **Papua**. Dulu pendekatannya bersifat keamanan, lalu kita ubah menjadi pendekatan kesejahteraan," ujar Presiden. Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah membentuk Unit

Percepatan Pembangunan **Papua** dan **Papua** Barat.

Sebelum mengikuti sidang kabinet, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, posisi TNI adalah tetap membantu kepolisian. Pasukan TNI yang berada di **Papua** juga tetap pasukan setempat. "Kecuali di perbatasan. Pasukan perbatasan dikirim dari luar **Papua**," tuturnya. Keamanan di wilayah PT Freeport Indonesia, menurut Agus, juga dikendalikan oleh polisi.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Jakarta mengatakan, Polri akan berupaya mewujudkan keamanan di **Papua**. "Tentunya seoptimal mungkin, termasuk penambahan pasukan," katanya. Polri juga melakukan langkah-langkah antisipatif dan mengejar pelaku yang mengganggu keamanan di **Papua**, seperti aksi penembakan.

Bagong Suyanto, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, yang meneliti industrialisasi di **Papua** tahun 2005 dan tahun 2010, mengatakan, pendekatan keamanan di **Papua** memang harus dihentikan karena tidak efektif dan mendapatkan resistensi tinggi dari masyarakat.

Terkait pembubaran Kongres Rakyat **Papua** III di Abepura, pendekatan keamanan di **Papua** dinilai berlebihan. Tokoh masyarakat **Papua**, Pendeta Phil Erari, menyayangkan sikap aparat TNI/Polri. Rakyat yang tidak bersenjata dikejar dan dipukuli.

Seusai dibubarkan, ujar Phil Erari, peserta yang ditangkap dibawa ke Polda **Papua**. Selama semalam mereka diinapkan di lapangan tenis kantor itu. Meskipun pada hari berikutnya mereka dipulangkan, perlakuan tersebut dinilai tidak pantas. Banyak dari mereka yang memar dan luka-luka akibat dipukuli.

Untuk itu ia menyarankan agar Jakarta harus segera membuka dialog dengan **Papua**.

Pengamat politik CSIS, J Kristiadi, mengatakan, Undang-Undang Otonomi Khusus merupakan titik puncak proses dialog dengan masyarakat **Papua**. Namun, pelaksanaan UU itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kemarin, kondisi keamanan di Jayapura tampak kondusif. Di Abepura, aktivitas warga berjalan seperti biasa. Demikian juga kondisi di Mulia, Puncak Jaya.

(JOS/APA/ATO/bil/FER/ANO/HAR)

Grafik: "Meneropong" Kesejahteraan di Provinsi **Papua**

Image :

ANTARA/MARCELINUS KILEN

Situasi pasar kota Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, **Papua**, kembali ramai oleh aktivitas warga, Kamis (27/10), setelah beberapa hari sepi akibat adanya penyerangan kelompok sipil bersenjata. Selasa lalu terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Tak Terkait Separatisme * Pemogokan Pekerja Freeport demi Kesejahteraan

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 29 Oct 2011 Halaman: **15,23** Penulis: **Apa; Evy** Ukuran: **2658** Foto: **1**
Pengindex: **pik.susy**



Tak Terkait Separatisme

Pemogokan Pekerja Freeport demi Kesejahteraan

TIMIKA, KOMPAS — Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia menegaskan, aksi mogok selama sebulan terakhir murni demi menuntut perbaikan kesejahteraan. Aksi itu tak terkait dengan gerakan separatis di sejumlah daerah di **Papua** ataupun teror penembakan di daerah itu.

Hal itu ditegaskan Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa dalam pertemuan antara karyawan yang mogok kerja di checkpoint 28, areal PT Freeport, dan sejumlah perwira TNI di Kabupaten Mimika, **Papua**, Jumat (28/10).

Acara tersebut dihadiri Komandan Kodim 1710 Mimika Letnan Kolonel (Inf) Christian Tehuteru, Komandan Brigif 20 IJK Letnan Kolonel Imanuel Ginting, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mimika Letnan Kolonel Pundi, dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Mimika Letnan Kolonel Widyoko.

"Sejak awal mogok, kami selalu dikaitkan dengan gerakan separatis di **Papua**, tetapi sebenarnya tidak. Karyawan Freeport itu berasal dari Sabang sampai Merauke. Kami mogok kerja juga untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa," kata Virgo H Solossa.

Pulihkan keamanan

Di Jakarta, Jumat, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo menyatakan, pemerintah akan mengupayakan pemulihan situasi keamanan di lokasi PT

Freeport Indonesia agar dapat kembali berproduksi.

Menurut Widjajono, pihaknya baru menerima sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia, penduduk, dan keluarga korban yang tertembak yang mengeluhkan kondisi keamanan di daerah itu.

Atas dasar itu, pemerintah akan memfokuskan pada penanganan gangguan keamanan di daerah itu agar kondusif seperti dulu. "Masalah ini sudah dua tahun tidak selesai. Orang di sana ingin seperti dulu. Mintanya tidak macam-macam, kenaikan gaji yang wajar. Jangan sampai naik gaji, tetapi tidak aman," ujarnya.

Selanjutnya pemerintah akan berupaya memfasilitasi negosiasi antara karyawan PT Freeport Indonesia dan manajemen serta renegosiasi kontrak. Pemerintah akan melihat apakah tuntutan karyawan soal kenaikan gaji itu berlebihan atau tidak. Jika tuntutannya berlebihan, tentu negosiasi akan sulit mencapai kata sepakat di antara kedua pihak.

Terkait renegosiasi kontrak, lanjut Widjajono, topik utamanya adalah royalti. Manajemen PT Freeport Indonesia telah bersedia melaksanakan renegosiasi kontrak sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Selama ini PT Freeport Indonesia menyetor royalti kepada pemerintah hanya 1 persen, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 royalti ditetapkan 3-4 persen. (APA/EVY)

Image :

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Tidak Terkait Separatis

Karyawan PT Freeport Indonesia yang mogok kerja sejak tanggal 15 September lalu, bertemu dengan sejumlah perwira TNI di checkpoint 28, Timika, Kabupaten Mimika, **Papua**, Jumat (28/10). Karyawan menyatakan mogok kerja mereka murni demi menuntut perbaikan kesejahteraan, sama sekali tidak terkait dengan gerakan separatis dan teror penembakan di sejumlah wilayah **Papua**. Berita di halaman 15

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark tamujogja 10.152.1.99
Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan

Teror: Tiga Orang Tewas Ditembak di Timika

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 22 Oct 2011 Halaman: **1** Penulis: **JOS; NTA; BIL; FER; MDN; eta;** Ukuran: **2341** Pengindex: **pik.lis**

TEROR

Tiga Orang Tewas Ditembak di Timika

Jakarta, Kompas — **Tiga orang tewas** ditembak di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, oleh kelompok **orang** tidak dikenal. **Tiga orang** yang **tewas** adalah Aloysius Margono, sopir kendaraan, serta Yunus dan Eto, yang ditembak di bedeng tempat pendulangan emas.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Jumat (21/10). "Di Freeport, Timika, tadi pagi pukul 04.40, di Kilometer 38, terjadi penembakan terhadap Aloysius Margono, sopir kendaraan," kata Anton.

Setelah peristiwa itu, 15 menit kemudian, lanjut Anton, terjadi lagi penembakan di Kilometer 39. Yunus dan Eto ditembak hingga **tewas** di bedeng tempat pendulangan emas.

Dari keterangan saksi, ada 10 pelaku yang menghampiri kedua korban. Para pelaku membawa dua senjata laras panjang.

Dari selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara, lanjut Anton, diketahui pelurunya berkaliber 5,56 milimeter dan 7,62 mm. Berdasarkan kaliber 5,56 mm, diduga senjata yang digunakan adalah M-16 atau SS-1. Dari peluru berkaliber 7,62 mm, diduga senjata yang digunakan adalah AK-47.

Menurut informasi yang dihimpun Kompas di wilayah kejadian, **tiga orang** itu **tewas** ditembak di antara Mil 38 (Kilometer 60,8) sampai Mil 40 (Kilometer 64), areal PT Freeport Indonesia, Timika, Jumat sekitar pukul 05.30 WIT. Kejadian penembakan tersebut merupakan kejadian yang kesekian kali di kawasan PT Freeport Indonesia dalam dua tahun terakhir.

Aloysius Margono adalah karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia, salah satu kontraktor dari PT Freeport Indonesia, sementara Yunus adalah penjaga kios.

Aloysius Margono tertembak saat mengendarai mobil operasional bernomor lambung 01-4249 di Mil 40, sedangkan Yunus tertembak saat sedang berada di kiosnya di Mil 38.

Selain **tiga orang tewas**, seorang penjaga kios yang lain di Mil 38, Rahman, mengalami luka tembak dan dirawat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim di Jakarta, Jumat, mengungkapkan, institusinya akan menginvestigasi pembunuhan yang terjadi setelah Kongres Rakyat Papua III. Ifdhal mengatakan, Komnas HAM sementara mencatat ada enam **orang** yang terbunuh.

Jenazah Aloysius Margono dimakamkan di Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu pagi.

(JOS/NTA/BIL/FER/MDN/eta)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Tiga Tewas Ditembak * Lokasi Kejadian Selalu di Sekitar Mil 37

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 15 Oct 2011 Halaman: **15** Penulis: **JOS** Ukuran: **2469** Pengindex: **pik.yrm**

Tiga Tewas Ditembak

Lokasi Kejadian Selalu di Sekitar Mil 37

Jayapura, Kompas — Penembakan oleh orang tak dikenal, Jumat (14/10) siang, kembali terjadi di Mil 37 Tanggul Timur areal PT Freeport Indonesia, Timika, **Papua**.

Tiga karyawan subkontraktor PT Freeport Indonesia tewas di tempat. Selain itu, satu mobil dibakar, seorang karyawan masih belum ditemukan, dan dua petugas keamanan yang berusaha mengevakuasi korban kejadian pertama mengalami luka tembak di bagian kaki dan tangan.

Kepala Humas Polda **Papua** Komisaris Besar Wachyono, melalui pesan pendek (SMS) semalam, menjelaskan, penembakan yang disertai pembakaran mobil Mitsubishi L-300 itu juga mengakibatkan satu korban lain belum ditemukan.

Ketiga korban yang tewas tertembak serta satu orang yang hilang dan diduga diculik pelaku penyerangan, hingga berita ini diturunkan, belum bisa dipastikan dan diinformasikan.

Wachyono dan Wakil Kepala Polres Mimika Komisaris Made Indra Laksanta menambahkan, sekitar pukul 15.32, di lokasi Mil 37 Tanggul Timur, terjadi lagi penembakan saat mobil Ford Ranger bernomor lambung RP 11 yang ditumpangi Benny Thomas, Ronald, Pratu Tobias, dan Serda Eko menuju ke tempat kejadian terbakarnya L-300 untuk mengevakuasi korban penembakan dan pembakaran.

Benny dan Ronald adalah anggota keamananPT Freeport Indonesia. Pratu Tobias dan Serda Eko adalah anggota Batalyon Infanteri 754 yang diperbantukan untuk mengamankan kawasan.

Menurut Wachyono, keempat petugas itu meloloskan diri ke Kampung Nayaro meski dua di antaranya menderita luka tembak. "Tim dari Polres Mimika telah berada di lapangan untuk mengevakuasi tiga korban yang tewas dan menyelidiki kasus itu," katanya.

Tempat terjadinya penembakan yang melukai dua aparat keamanan, menurut informasi yang dihimpun, berada tidak jauh dari lokasi insiden 7 April 2011. Saat itu, Manajer Keamanan Dataran Rendah PT Freeport Indonesia Daniel Mansawan dan Komandan Keamanan Wilayah Dataran Rendah Hari Siregar tewas ditembak di Mil 37 tersebut.

Saat didatangi, mobil yang ditumpangi Daniel Mansawan dan Hari Siregar ditemukan terbalik dan terbakar. Tak jauh dari tempat kejadian, polisi menemukan selongsong peluru kaliber 5,56. Kedua korban ditemukan tewas.

Sehari sebelumnya, tepatnya Rabu, 6 April 2011, satu kendaraan yang ditumpangi Abdul Simanjuntak juga ditembaki saat melewati jalur sisi Tanggul Timur itu. Abdul selamat, tetapi hingga kini polisi belum dapat menemukan pelaku penembakan. (JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Home | Logout | Password | Wire Services | PIK-Litbang

- Kembali ke Form Pencarian
- Kembali ke Hasil Pencarian
- Cetak/ Simpan
- Full Page (pdf)

halaman lainnya: ---

Upaya Damai : Terpasung Stigma

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 04 Nov 2011 Halaman: **47** Penulis: **JOS** Ukuran: **3299** Pengindex: **pik.pry**

UPAYA DAMAI

Terpasung Stigma

Rabu (19/10) petang, saat satu-dua suara tembakan masih terdengar di sekitar kawasan Padang Bulan, Abepura, Jayapura, **Papua**, ratusan pemuda, pelajar, dan ibu-ibu duduk bersimpuh dalam barisan. Mereka dijajarkan dalam beberapa baris di jalan yang menghubungkan kompleks Korem 172/Praja Wira Yakthi dengan Lapangan Zakheus, tempat Kongres Rakyat **Papua** III digelar. Beberapa anggota TNI dan polisi menjaga mereka.

Sore, seusai Kongres Rakyat **Papua** (KRP) III, aparat gabungan membubarkan peserta yang tersisa. Rentetan tembakan membelah udara dan menakutkan massa yang lalu berhamburan. Sebagian besar tertangkap, sebagian lari ke perbukitan dan bersembunyi di hutan. Di antara yang ditangkap, tak sedikit yang luka terkena pukulan atau dipopor.

Menjelang malam, mereka dibawa ke kantor Polda **Papua**. Kepala Polres Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan mengatakan, mereka akan diperiksa satu per satu untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam KRP III.

Karena tak cukup tempat, mereka diinapkan di lapangan tenis. Sulit untuk lelap dalam situasi ketakutan dan dingin malam itu. Meskipun esoknya sebagian besar dipulangkan, menurut tokoh **Papua**, Pendeta Phil Erari, cara memperlakukan mereka, "Sungguh tidak pantas, tidak manusiawi."

Bagi Erari, perlakuan itu menegaskan, cara pemerintah menangani persoalan **Papua** berbeda dari wilayah lain Indonesia meskipun soalnya sama, yaitu seruan membentuk negara. Padahal, apa yang diserukan rakyat **Papua** adalah koreksi atas sikap pemerintah selama ini.

Pendekatan keamanan di **Papua** dinilai berlebihan. Bahkan, ada dugaan, pemerintah memiliki standar ganda. "Itu menyalahgunakan kekuasaan. Semestinya mereka yang dianggap bertanggung jawab dipanggil secara hukum," kata Erari.

Bagi warga **Papua**, kehadiran Pemerintah Indonesia lebih kerap dialami sebagai sejarah kekerasan. Berbagai operasi militer hingga ke pelosok kampung terkait dengan gerakan

Organisasi **Papua** Merdeka (OPM) digelar sejak wilayah itu diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Kampung Kibay, Kabupaten Keerom, Franky Psakor mengatakan, pada tahun 1970-1980-an, banyak warga melarikan diri ke hutan, bahkan menyeberang hingga kampung kerabat mereka di **Papua** Niugini.

Meskipun OPM dinilai tak lagi sekuat dulu, cap separatis telanjur dilekatkan pada **Papua**. Koordinator Jaringan Damai **Papua** Neles Tebay mengatakan, cap itu begitu kuat hingga tiap orang **Papua** akan dianggap separatis sampai ia membuktikan tidak. Tak mengherankan jika orang **Papua** tidak merasa damai meski tinggal di tanah leluhurnya sendiri.

Karena itu, saat perwakilan mereka hadir dalam Konferensi Perdamaian **Papua**, 5 Juli lalu, mereka merumuskan beberapa hal yang mengindikasikan **Papua** damai. Beberapa di antaranya adalah tidak mendirikan pos-pos militer perbatasan di kampung, mengurangi pasukan non-organik TNI dan polisi di **Papua**, serta meniadakan operasi intelijen yang intimidatif dan tidak memberikan rasa aman.

Dalam sebuah perjumpaan, Kepala Dekenat Keerom Pastor John Jonga membacakan doa yang dia catat dari seorang tua di Wamena. Begini penggalan doa itu, "Anda boleh ambil emas kami. Jika itu belum cukup, silakan ambil hutan kami, tetapi jangan ambil lagi nyawa kami...." (JOS)

Kembali ke atas

KOMPASNET Database Tark

tamujogja
10.152.1.99

Konflik di Papua: Upaya Pemerintah Tak Menjawab Kebutuhan

KOMPAS(Nasional) - Senin, 07 Nov 2011 Halaman: **1** Penulis: **Apa; Nwo; Fer; Why** Ukuran: **2630**
Pengindex: **pik.susy**

KONFLIK DI PAPUA

Upaya Pemerintah Tak Menjawab Kebutuhan

Jakarta, Kompas — Konflik yang berlarut-larut di **Papua** tidak disebabkan oleh perebutan uang atau kekuasaan. Akibatnya, upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikannya, seperti dengan pemberian dana otonomi khusus atau pemekaran wilayah, tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Penambahan pasukan keamanan juga menambah masalah baru.

Demikian benang merah yang didapatkan Kompas dari percakapan dengan Oktovianus Pogou, anggota Komite Nasional **Papua** Barat (KNPB), Koordinator Komunitas Masyarakat Adat **Papua** Antikorupsi Dorus Wakum, serta aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, secara terpisah, Sabtu dan Minggu (6/11), di Jakarta.

Orang **Papua**, menurut Pogou, membutuhkan keadilan dan perlakuan yang manusiawi.

Kekerasan oleh aparat, kata Pogou, seperti menimpa sembilan warga Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, dan tiga anggota KNPB Hubula atau Wamena. Selasa malam hingga Rabu pagi, mereka dipukul, ditikam, diseret, dan dicaci oleh oknum anggota TNI karena dituding sebagai kelompok separatis yang sedang berkumpul. "Mereka berkumpul membahas konferensi parlemen rakyat daerah, wilayah suku Hubula atau Wamena," ujarnya. Ia melaporkan masalah ini ke polisi. Polisi mengaku tidak dapat memproses karena tidak cukup bukti.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum tahu adanya kekerasan yang dilakukan prajurit TNI terhadap 12 warga Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Jayawijaya, 2 November lalu. "Sejauh ini belum ada laporan," katanya.

Dorus Wakum menambahkan, **Papua** seperti wilayah jajahan. Jadi, jika ada orang berkumpul, langsung diberi label separatis dan kemudian terjadi kekerasan oleh aparat.

Usman Hamid menuturkan, jalan terbaik menyelesaikan konflik di **Papua** adalah dengan

menghentikan kekerasan oleh negara di daerah itu dan menghukum semua orang yang terlibat.

Sementara itu, mobil operasional PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan mobil patroli, Sabtu, ditembaki orang tidak dikenal di areal PT Freeport Indonesia di Timika, Kabupaten Mimika, **Papua**. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Peristiwa penembakan di areal Freeport ini merupakan peristiwa kelima dalam tiga pekan terakhir.

Komandan Satuan Tugas Amole, satuan tugas pengamanan di areal Freeport dari TNI dan Polri, Ajun Komisaris Besar Alexander Louw mengatakan, pihaknya berupaya mencari pelaku penembakan tersebut. Upaya pencarian belum berhasil sehingga dilakukan kembali Minggu. (Apa/Nwo/Fer/Why)

Baca Juga soal **Papua**

Libatkan Masyarakat HAL 5

Kembali ke atas

Ribuan Pekerja Mogok, Freeport Lumpuh

Terkait dengan kesejahteraan karyawan.

SPEDY PAERENG (ANTARA)



Sejumlah polisi berjaga di terminal bus PT Freeport Indonesia di Gorong-gorong Timika, Papua, kemarin, guna mengamankan aksi mogok karyawan yang menuntut kenaikan upah.

JAYAPURA — Gejolak di perusahaan tambang PT Freeport Indonesia kembali terjadi. Kemarin ribuan karyawan perusahaan tambang emas itu mogok kerja. Mereka meninggalkan area tambang di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Akibatnya, aktivitas pertambangan di sana lumpuh. "Sejak pagi tadi mereka meninggalkan area tambang di Tembagapura menggunakan bus," kata juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wachyono, di Jayapura kemarin.

Menurut Wachyono, karyawan Freeport turun dari Tembagapura menuju Timika, tepatnya ke Check Point 32, sekitar Kuala Kencana, yang menjadi area manajemen Freeport. "Kabarnya ini dipicu soal tuntutan kesejahteraan," ujarnya.

Adapun juru bicara Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, Juli Parorrongan, membenarkan bahwa mogok kerja itu disebabkan oleh tuntutan kesejahteraan kepada manajemen. "Aksi mogok ini kembali kami gelar karena manajemen Freeport tak pernah mau mengakomodasi aspirasi karyawan soal tuntutan perbaikan upah. Padahal Freeport salah satu perusahaan tambang raksasa dunia," katanya kemarin.

Menurut Juli, selain menuntut perusahaan mengubah sistem pengupahan, karyawan menuntut perusahaan mengubah sistem tabungan rencana hari tua. "Sistem perkalian tabungan rencana hari tua yang berasal dari insentif gaji juga kami minta diubah. Kami berharap manajemen mengakomodasi tuntutan kami ini," ujarnya.

Karyawan menuntut perusahaan memberlakukan standar gaji karyawan sesuai dengan standar gaji Freeport-McMoRan sebesar US$ 30-an per jam kerja. Menurut Simson, salah satu karyawan di tambang bawah tanah, perusahaan hanya membayar upah karyawan *grade* A tertinggi US$ 3 per jam kerja. "Karyawan seperti saya hanya dapat 3 dolar per jam," kata Simson.

Menurut Juli, rencananya ada sekitar 11.025 karyawan PT Freeport Indonesia yang akan melakukan mogok kerja. "Aksi ini direncanakan selama sebulan, sejak hari ini hingga 15 Oktober 2011," katanya. Dikatakannya, aktivitas tambang sudah lumpuh total, karena hampir semua karyawan ikut mogok meninggalkan area pertambangan. "Yang tersisa hanya karyawan penjaga tambang."

Secara terpisah, Manajemen PT Freeport Indonesia melalui juru bicaranya, Ramdhani Sirait, menyayangkan aksi mogok tersebut. "Kami telah mengutarakan keinginan kami agar perundingan dapat dilanjutkan dan diselesaikan tepat pada waktunya," katanya.

Ramdhani juga membantah kabar terhentinya aktivitas perusahaan Freeport. "Belum bisa dikatakan lumpuh total, karena kami masih melakukan *assessment* dari dampak aksi ini," katanya saat dihubungi kemarin.

Menanggapi aksi mogok itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta PT Freeport Indonesia dan para karyawannya segera menyelesaikan masalah internal yang melanda perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia itu. Sebab, jika masalah internal tersebut berlarut-larutnya, akan berdampak pada penerimaan negara yang menurun. "Pekerja terganggu karena mereka tidak bekerja, Freeport tidak berproduksi," ujarnya sebelum rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Aksi pemogokan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada Juli lalu, ribuan pekerja Freeport juga mogok. ● CUNDING LEVI | TJAHJONO EP | ALWAN RIDHA RAMDANI

Dana Freeport Ancam Netralitas Aparat

Kepala Polri mengakui menerima dana, TNI membantah.

JAKARTA — Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo akhirnya membenarkan adanya uang pengaman dari PT Freeport Indonesia di Papua. Pemberian dana itu, menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, bisa berdampak pada netralitas aparat keamanan. "Soalnya, dana operasional lembaga negara telah diatur dalam APBN," ujarnya.

Jenderal Timur berkukuh bahwa menerima dana dari PT Freeport bukan hal haram. Alasannya, pengamanan di Papua itu sulit. Freeport, kata dia, termasuk obyek vital, jadi dibiayai oleh negara. Tapi, "Jika pihak yang diamankan itu memberi uang makan langsung kepada anggota, apalagi situasi yang sulit dalam tugas, saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya kepada *Tempo* di Jakarta kemarin.

Uang makan itu, kata Timur, diberikan langsung kepada anggota yang bertugas di Papua, tanpa perantaraan Markas Besar Polri. Soal besarannya, dia tak mau bicara.

Berbeda dengan Polri, TNI membantah tudingan menerima sumbangan Freeport. "Kalau TNI enggak. Saya enggak pernah terima," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono kemarin.

Soal duit keamanan ini tercatat dalam dokumen PT Freeport yang ada di situs mereka. Pada halaman 11 dokumen bertajuk "2010 Working Toward Sustainable Development Report" itu ada penjelasan bahwa polisi ditugasi melakukan pengamanan dan dibantu TNI bila dibutuhkan. PT Freeport menggelontorkan duit US$ 14 juta untuk infrastruktur pengamanan, makanan, tempat tinggal, bahan bakar, transportasi, perbaikan kendaraan, uang saku, dan program bantuan masyarakat.

Juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, menegaskan, dana itu tidak langsung dikucurkan kepada polisi, melainkan melalui perantaraan pemerintah. Lalu pemerintah yang menentukan alokasi dana, kepada Polri atau TNI.

Koordinator Kontras Haris Azhar menunjukkan bukti lain: adanya nota kesepahaman antara Presiden Direktur PT Freeport Armando Mahler, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Bekto Suprapto, dan Pangdam Trikora Mayor Jenderal TNI Hotma Marbun pada 10 Maret 2010. Dalam nota itu, kata Haris, disepakati adanya bantuan keamanan sekitar 800 personel di sekitar lahan eksplorasi tambang emas Freeport.

Ditanya soal netralitas itu, Jenderal Timur tak mau menjawab. Dia mengatakan, "Sekali lagi, itu adalah keadaan di lapangan yang sulit."

Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman berjanji akan memanggil Kepala Polri soal ini. "Biaya keamanan (seperti itu) yang membuat ekonomi tidak efisien."

● INDRA WIJAYA | MUNAWWAROH | RIKY F | DEDDY S

Pemerintah Didesak Perbaiki Papua

"Bukan hukum yang nomor satu, tapi keadilan yang nomor satu."

JAKARTA — Meningkatnya ketegangan politik di Papua dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah pusat memahami situasi yang berkembang di provinsi paling timur itu. Pensiunan jenderal tentara yang juga mantan Menteri Perdagangan, Luhut B. Pandjaitan, mengatakan, untuk mengembalikan keamanan di Papua, pemerintah pusat harus melakukan pendekatan antropologi. "Harus ada studi untuk memetakan Papua dan mengetahui keinginan mendasar masyarakat di sana," kata Luhut dalam diskusi kebangsaan di Hotel Millenium kemarin.

Menurut dia, selama ini munculnya tindakan anarkistis dan cenderung makar di Papua terjadi karena tidak adanya konsistensi program yang dijalankan pemerintah. Otonomi khusus yang diterapkan belum berhasil memberikan dampak signifikan bagi perbaikan di Papua. "Uang yang digelontorkan untuk Papua besar sekali. Namun, kalau tidak pas pengelolaannya, maka tidak akan berhasil," kata dia.

Selain itu, dia menyatakan pemerintah harus menjamin adanya keadilan hukum dalam menangani setiap kasus di Papua. Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan karena tantangan terberat adalah masalah keadilan. "Bukan hukum yang nomor satu, tapi keadilan yang nomor satu," kata Luhut.

Menurut Luhut, penyelesaian konflik di Papua tidak hanya bisa diserahkan begitu saja kepada pemerintah daerah, melainkan harus dikembalikan kepada pemerintah pusat. Semua hal bermuara pada ketegasan dan kepemimpinan para pemimpin bangsa. Salah satunya, menurut dia, pemerintah pusat harus konsisten mengontrol pelaksanaan otonomi khusus.

Dalam forum yang sama, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Agus Widjojo menyebutkan, untuk mengatasi masalah di Papua, pemerintah pusat harus memperbaiki pola komunikasi politik yang dibangun. "Harus mengerti bagaimana cara berpikir mereka, dan jangan memaksakan sikap kita," ujarnya.

Pemerintah, kata Agus, harus berani membuka komunikasi yang lebih terbuka dengan orang Papua mengenai berbagai persoalan. Komunikasi itu harus dilakukan dengan persamaan sikap untuk mewujudkan Papua yang lebih baik. Pada saat berkomunikasi, kata dia, jangan sampai pemerintah pusat alergi terhadap mereka dan, sebaliknya, orang Papua alergi terhadap agenda yang diusung pemerintah.

Hal yang perlu dikomunikasikan, menurut Agus, adalah tujuan utama dari pelaksanaan otonomi khusus. Pemerintah pusat dan masyarakat Papua harus terbuka untuk menyampaikan kekurangan masing-masing. "Dengan begitu, akan ada kesepahaman pendapat tentang apa yang ingin dicapai terhadap Papua," kata dia.

Di kantornya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menginstruksikan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat untuk melakukan komunikasi dengan para tokoh adat, agama, dan pemuka masyarakat Papua. Ia mengatakan sudah menerima laporan dari Gubernur dan Wali Kota tentang situasi kota setelah Kongres Rakyat Papua yang mengarah pada makar. "Jumlah yang macam-macam itu tidak banyak. Sebetulnya Papua itu sudah seperti daerah istimewa. Makanya, mendapat dana khusus," kata dia.

Pemerintah, kata Gamawan, menyerahkan pengusutan kasus kongres kepada kepolisian. Selain itu, forum komunikasi pimpinan daerah dioptimalkan. Ia juga mengatakan perlu ada percepatan pembangunan di Papua. Ini agar harga barang di kawasan paling timur Indonesia itu tidak mahal.

● IRA GUSLINA | ALWAN RIDHA RAMDANI | SUNUDYANTORO

Kepolisian Diminta Transparan Soal Dana Freeport

Bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

JAKARTA — Kepolisian diminta segera memberi penjelasan kepada publik ihwal dana keamanan US$ 14 juta atau Rp 140 miliar dari PT Freeport Indonesia. "Karena sudah terbuka (di hadapan publik), harus dipertanggungjawabkan secara terbuka," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung kemarin.

Menurut dia, praktek penerimaan dana dari perusahaan kepada aparat kepolisian bukanlah hal baru. Namun, pada era keterbukaan, semua dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan kepada publik. "Kalau mereka tak bisa mempertanggungjawabkan, akan merugikan kepolisian," ucapnya.

Bukan hanya itu, kata Pramono, ketidakmampuan menyampaikan secara transparan penggunaan dana bakal melukai perasaan masyarakat. "Khususnya masyarakat Papua."

Badan Pemeriksa Keuangan, kata dia, bisa mengaudit dana Freeport tersebut. Hasilnya bisa diberikan kepada Dewan. "Jika ada tindak pidana korupsi, temuan itu bisa diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo berjanji akan menyampaikan secara transparan penggunaan dana Freeport. "Kami siap terbuka kepada siapa saja," ujarnya di Palembang kemarin.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menyatakan, pihaknya hanya memeriksa keuangan pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD. Di luar keuangan pemerintah, Badan Pemeriksa tak bisa melakukan pemeriksaan. "Harus diteliti dulu apakah (dana Freeport) masuk itu atau tidak (keuangan pemerintah)."

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo. "Kami belum tahu, hibah atau kasih duit dalam rangka apa," ujarnya kemarin.

Sesuai dengan peraturan tentang hibah, kata dia, lembaga atau kementerian yang mendapat hibah harus melaporkan dan memasukkannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. "Kalau tidak ada laporan, kami tidak bisa menindaklanjuti," kata Herry.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah disebutkan, belanja hibah pengeluaran dan pengesahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI.

Beleid itu, kata Herry, juga mengatur hibah dari perusahaan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau dari negara lain. "Kalau dia (polisi) lapor, otomatis kami akan mendapat laporan, karena sistemnya otomatis melalui Kantor Pelayanan Pajak Negara."

Kasus dana dari Freeport ini direncanakan akan menjadi bahan rapat dengar pendapat Komisi Hukum dan Kepala Kepolisian. "Pasti kami akan menanyakan kepada Kapolri soal ini dalam rapat kerja masa sidang yang akan datang," ujar anggota Komisi Hukum, Eva Kusuma Sundari.

Menurut dia, kepolisian tak pernah melaporkan dana dari Freeport. "Tak pernah dilaporkan dan tak diketahui BPK, jadi bisa dikategorikan sebagai gratifikasi." Untuk itu, kata Eva, Komisi Hukum akan mendesak Badan Pemeriksa melakukan audit khusus. ● ALI NY | IRA GUSLINA | PARLIZA HENDRAWAN| ALWAN RIDHA | AKBAR TRI K | FIRMAN H

KPK Minta BPK Mengaudit Uang Pengaman Freeport

"Pengalaman seperti kasus cicak dan buaya tidak bagus."

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit kucuran duit keamanan dari PT Freeport Indonesia untuk kepolisian. Hasilnya lalu diserahkan ke lembaga antikorupsi tersebut.

"Kalau sudah ada audit, kami akan mencari juga informasi yang lain," kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di Jakarta kemarin.

Jasin mengatakan KPK akan berkoordinasi dengan Kepolisian RI mengusut kucuran duit itu. Ia tak ingin KPK berjalan sendiri karena bisa menimbulkan pertentangan dengan polisi. "Pengalaman seperti kasus cicak dan buaya tidak bagus," ujarnya. "Sebaiknya kami menangkap ikannya, bukan mengeruk airnya."

Jasin yakin kerja sama itu akan membuahkan hasil yang bagus. Sebab, pengusutan tentang anggaran tersebut akan bisa lebih mudah. "Tapi diaudit dulu supaya bisa mengetahui bagaimana menangani masalah ini," ujarnya.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo sependapat. Menurut dia, kucuran duit itu perlu diaudit. Polisi, kata Timur, akan mengklarifikasi dana dari Freeport tersebut kepada pihak mana pun yang membutuhkannya.

Jenderal Timur tak mau mengomentari kapan audit akan dilakukan. "Sekali lagi nanti ya, tunggu, harus dilihat secara utuh," ucapnya.

Soal duit keamanan ini tercatat dalam dokumen PT Freeport yang bisa diakses di situs resmi perusahaan itu. Pada halaman 11 dokumen bertajuk "2010 Working Toward Sustainable Development Report" terdapat penjelasan bahwa polisi ditugasi melakukan pengamanan dan dibantu TNI bila dibutuhkan.

Freeport menggelontorkan duit US$ 14 juta, yang mencakup infrastruktur, makanan, tempat tinggal, bahan bakar, transpor, perbaikan kendaraan, uang saku, dan program bantuan masyarakat pada 2010. Tapi Indonesia Corruption Watch mengatakan kucuran duit pengaman itu sudah berlangsung sejak 2001 dan nilainya sudah mencapai total US$ 79,1 juta.

Jenderal Timur menilai pemberian itu wajar di kawasan sulit seperti Papua. Pengamanan Freeport selaku obyek vital memang dibiayai oleh negara. Tapi, "Jika pihak yang diamankan itu memberi uang makan langsung kepada anggota, apalagi dalam situasi yang sulit dalam tugas, saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Tapi polisi, menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, sudah mengirim tim dari Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk memeriksa aliran duit itu. "Pada prinsipnya kami siap diaudit secara transparan, dan kalau ada penyimpangan, kami siap bertanggung jawab," ujarnya. ● TRI SUHARMAN | PRIHANDOKO | INDRA WIJAYA | DEDDY S

SETO WARDHANA (TEMPO)

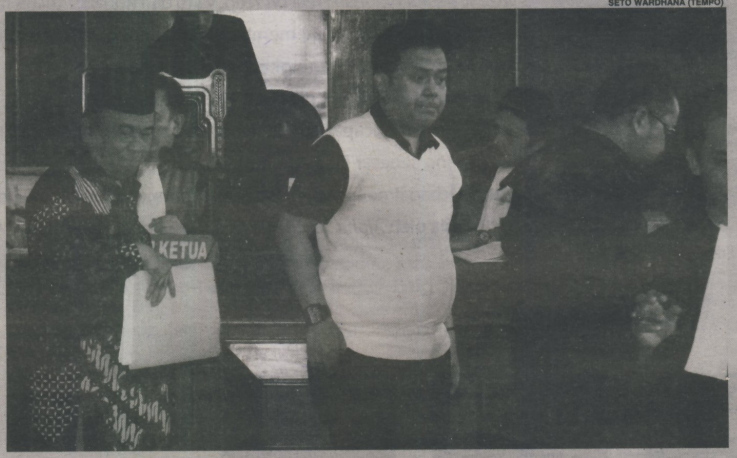

Saksi dari KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafidz Anshary (kiri) dan terdakwa kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi, Masyhuri Hasan, setelah menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Abdul Hafidz dan Komisioner KPU Endang Sulastri menjadi saksi dalam persidangan itu.

(AP PHOTO)



Sejumlah polisi berusaha menghindari lemparan batu dari karyawan PT Freeport Indonesia di jalan masuk di Timika, Papua, kemarin.

Bentrok di Freeport, Satu Orang Tewas Tertembak

Kerusuhan juga melukai dua jurnalis.

TIMIKA — Unjuk rasa pekerja PT Freeport Indonesia di Papua berujung amuk massa. Seorang pengunjuk rasa tewas tertembak dan puluhan lainnya, termasuk polisi, luka-luka. Bentrokan ini pecah di Terminal Gorong-gorong, Timika, kemarin.

Korban tewas bernama Petrus Ayamseba, 36 tahun, karyawan PT Pangansari, salah satu kontraktor katering karyawan PT Freeport. Petrus bersama ribuan karyawan Freeport, yang diikuti oleh istri dan anak-anak mereka, melakukan konvoi dengan jalan kaki. Rute aksi, dari Sekretariat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport di Jalan Perintis Kemerdekaan Timika Indah menuju Terminal Gorong-gorong.

Mereka menuntut manajemen Freeport menyetop operasi perusahaan itu sampai adanya penyelesaian kasus mogok kerja dan tuntutan kenaikan gaji karyawan. Penghentian ini merupakan salah satu rekomendasi surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua dalam pertemuan di Jayapura, Jumat lalu.

Setiba para pekerja di pintu masuk terminal, polisi menghalangi mereka. Massa terus merangsek dan mengamuk dengan melemparkan batu ke arah polisi. Pengunjuk rasa juga membakar empat mobil, termasuk tiga truk kontainer makanan milik Freeport.

Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Deny Edward Siregar juga menjadi sasaran amuk massa. Komandan Detasemen B Brimob Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Yustanto, serta Komandan Satgas Pengamanan PT Freeport kewalahan menghindari hujan batu. Saat itulah suara letusan senjata api terdengar.

Korban pun berjatuhan. Petrus dan korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Adapun enam polisi yang mengalami luka di bagian kepala dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

Selain melukai pekerja dan polisi, insiden ini memakan korban dua jurnalis. Mereka adalah Duma Tato Sanda, jurnalis *Cahaya Papua*, dan Syahrul dari *Radar Timika*. Mereka babak-belur dihajar karyawan Freeport saat melakukan liputan.

Dari pantauan *Tempo*, suasana Kota Timika sangat mencekam. Seusai bentrokan, massa berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timika tempat jenazah Petrus disemayamkan. Area di dekat Terminal Gorong-gorong dan Jalan Portsite Pelabuhan Freeport juga dipenuhi massa.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan jajarannya sedang mempelajari pemicu insiden tersebut. "Ini masih kami dalami, kasusnya seperti apa," katanya. Pemerintah dan aparat, kata dia, sudah berupaya agar karyawan dan manajemen Freeport menghindari konflik kekerasan. "Tapi hal itu tetap terjadi. Mudah-mudahan tidak berlanjut," kata dia.

● TJAHJONO EP | JERRY OMONA | NUR ROCHMI | RIKY FERDIANTO

Polisi Kirim Pasukan Tambahan ke Papua

Kemarin juga terjadi dua kali baku tembak di Puncak Jaya.

JAKARTA — Markas Besar Kepolisian RI akan mengirim 170 anggota Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa malam, menyusul meningkatnya kekerasan di daerah Papua. Mereka rencananya akan, "Mem-*back-up* polda setempat dan diperbantukan untuk pengamanan obyek-obyek vital," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di kantornya kemarin. Sebelumnya, 110 personel polisi dari Kalimantan Timur sudah dikirim ke provinsi paling timur di Republik itu.

Penambahan pasukan dilakukan setelah terjadi eskalasi kekerasan di daerah ini. Senin lalu, Kepala Kepolisian Sektor Mulia Domingus Oktavianus Awes tewas ditembak dua orang tak dikenal sekitar pukul 11.30 WIT di Lapangan Terbang Mulia, Puncak Jaya. Sebelumnya, delapan orang tewas di daerah ini. Tiga tertembak oleh orang tak dikenal di kawasan proyek konstruksi PT Freeport di Mile 38-40 Timika, Jumat pekan lalu. Selebihnya, tewas dalam insiden berdarah saat aparat keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua III.

"Semua dalam kegiatan siaga, terutama di Puncak Jaya," kata Timur.

Soal penembakan Awes, Kepolisian Daerah Papua terus memburu dua pelakunya. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono kemarin siang mengatakan, saat ditembak, Awes sedang memonitor bandara dengan berdiri di depan pesawat milik penerbangan misionaris MAF (Mission Aviation Fellowship). Saat itulah dua orang menyerangnya hingga terjatuh. Pelaku merampas dan menembaknya dua kali.

Wachyono mengatakan, ciri-ciri penembaknya berpakaian warna merah dengan tinggi sekitar 150 sentimeter. "Kurus dan tidak menggunakan sepatu. Satu lainnya berpakaian hitam dengan tinggi sekitar 160 cm, juga tidak menggunakan sepatu," kata Wachyono. "Kami terus mengejar. Pokoknya sampai dapat pelakunya." Anton Bachrul Alam menambahkan bahwa polisi sudah mengetahui lokasi persembunyian gerombolan pelaku, tapi belum berhasil melokalisasinya.

Soal Papua, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menampik kabar telah menerjunkan pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk membantu polisi memburu pelaku penembakan Awes. "Kondisinya (saat ini) adalah kondisi tertib sipil. Kepolisian ada di depan, kita (TNI) hanya membantu," kata Suhartono. Pernyataan senada dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. "Itu masih soal keamanan publik. Masih berupa ancaman mengenai keamanan publik yang terkait dengan Polri, bukan dengan kita (TNI)," kata Purnomo kemarin.

Setelah penembakan Awes, situasi Kota Puncak Jaya memang tampak tegang. Beberapa kali terdengar letusan senjata. Selain itu, ada insiden pembakaran Kantor Ketahanan Pangan yang terletak di Kampung Wondeng Gobak, Distrik Mulia, Puncak Jaya, kemarin.

Soal insiden terbaru itu, Anton Bachrul Alam menambahkan, kontak senjata terjadi setelah jenazah Awes diberangkatkan ke Jayapura. "Mereka menembak dari atas gunung, dan kami membalas," kata Anton. Tembak-menembak kedua terjadi di Pos Komando Taktis Brigade Mobil, tak jauh dari lokasi kejadian pertama. ● MAHARDIKA SATRIA HADI | JERRY OMONA | RINA WIDIASTUTI

Pembubaran Paksa Demo Freeport Bisa Picu Bentrokan Baru

JAYAPURA — Pembubaran paksa demonstrasi yang digelar karyawan PT Freeport Indonesia oleh kepolisian dikhawatirkan bakal memicu bentrokan baru. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Mimika, Papua, Karel Gwijangge, meminta kepolisian agar bisa menahan diri saat menghadapi para karyawan yang mogok.

"Kerugian pasti akan dialami kedua pihak, dan tidak membantu menyelesaikan masalah tuntutan kenaikan upah," ujar Karel kemarin.

Pihak kepolisian menilai aksi massa yang terkonsentrasi di *check point* 1 Mile 28, Mile 27, dan Gorong-gorong, Timika, sudah mengganggu ketertiban umum. Karena itu, pengunjuk rasa diultimatum untuk membubarkan diri oleh Kepala Kepolisian Mimika Ajun Komisaris Besar Deny Edward Siregar. "Polisi memberi waktu 1 x 24 jam. Apabila tidak diindahkan, akan diambil tindakan tegas sesuai dengan aturan," kata Deny kemarin.

Pembubaran paksa dilakukan karena situasi di lingkungan Freeport semakin tak kondusif. Selain itu, kata Deny, telah terjadi serangkaian tindakan anarkistis yang melanggar tata tertib mogok serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ancaman pembubaran paksa juga diungkapkan oleh juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wachyono. "Unjuk rasa bukan lagi di lokasi *check poin* 5 gerbang masuk Kuala Kencana seperti surat izin mereka," ujarnya, "tapi sudah masuk lebih ke dalam, yang mengganggu aktivitas pertambangan."

Namun ultimatum polisi tak digubris para pengunjuk rasa. "Kami tidak takut ultimatum itu. Harapan kami adalah ada pendekatan yang baik untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan," kata juru bicara Serikat Pekerja Freeport, Julius Parorongan.

Para karyawan tak berniat mengganggu atau menghambat pengguna jalan. Blokade di Mile 28 hanya sebagai ungkapan kekecewaan setelah tewasnya rekan mereka dalam bentrokan beberapa waktu lalu. "Saya belum tahu kondisi saat ini seperti apa, kami hanya menginginkan, bila polisi ingin membubarkan massa, harus dengan cara yang baik."

Sampai kemarin ratusan orang masih berkumpul di bundaran di dekat pintu masuk Bandara Moses Kilangin, Timika. Unjuk rasa para karyawan nonstaf itu menuntut kenaikan upah sebesar US$ 7,5 atau Rp 67 ribu per jam dan nonstaf level III sebesar US$ 33 atau Rp 297 ribu.

● ALI NY | JERRY OMONA | CUNDING LEVI

Komnas HAM: 96 Warga Dianiaya Pasca-Kongres Rakyat Papua

JAYAPURA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua merilis temuan telah terjadi penganiayaan terhadap 96 warga sipil pasca-Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, 19 Oktober lalu. Korban mendapat perlakuan kasar dan barang milik mereka dirampas.

"Ya, itu benar, dari 387 peserta kongres yang ditahan di Polda Papua waktu itu, sebanyak 96 di antaranya dianiaya aparat. Itu yang berhasil kita tanyai, di luar itu mungkin ada lagi," kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Julles Ongge, di Jayapura kemarin.

Julles mengatakan ratusan juta uang raib saat terjadi peristiwa penangkapan. Selain itu, diketahui 50 telepon seluler hilang, 7 sepeda motor rusak, 4 mobil ditahan polisi, dan sejumlah alat elektronik yang digunakan saat kongres disita. "Hasil temuan Komnas HAM Papua ini akan menjadi bahan untuk penyelidikan lanjutan dari Komnas HAM Pusat atau juga sebagai laporan menyeluruh atas insiden ini," ujarnya.

Pihaknya telah menyampaikan kepada Kepolisian Daerah Papua dan berharap barang milik korban dikembalikan. "Polisi bilang silakan diambil barang itu, tapi para korban ini masih takut," kata Julles.

Komnas HAM mendapati bahwa yang menembak mati enam korban seusai kongres adalah anggota TNI. "Itu laporan yang kami dapat, kami sudah sampaikan kepada Pangdam, tapi itu dibantah, katanya TNI hanya di Ring 2 dan tidak menembak. Tapi ini bertolak belakang dengan keterangan saksi, yang menyebut bahwa tentara menembak," dia memaparkan.

Korban meninggal versi Komnas HAM Papua itu di antaranya James Gobay, 25 tahun, Yosaphat Yogi (28), Daniel Kadepa (25), Maxsasa Yewi (35), Yakob Samonsabra (53), dan Pilatus Wetipo (40). Adapun korban luka di antaranya Ana Adi, 40 tahun, Miler Hubi (22), dan Matias Maidepa (25).

"Polisi tidak menembak ke sasaran, kami menembak ke udara, jadi tidak benar bila ada korban tewas," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Wachyono.

Kongres Papua III mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Kongres mengangkat Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, sebagai presiden, dan Edison Waromi perdana menteri. Forkorus dan Waromi saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan makar. ● JERRY OMONA

Amnesty International Minta Kasus Freeport Diusut

TIMIKA — Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia menyelidiki tindak kekerasan aparat dalam mengatasi unjuk rasa pekerja PT Freeport Indonesia di Papua, Senin lalu. Aksi demo telah menyebabkan seorang warga tewas tertembak dan lainnya terluka. Lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu menilai polisi Indonesia belum belajar meredam unjuk rasa tanpa menimbulkan korban meninggal.

Sam Zarifi, Direktur Amnesty International Asia-Pasifik, mengatakan tugas polisi seharusnya melindungi diri dan menegakkan hukum. "Tapi, yang terjadi, mereka menembaki para pemrotes hingga memancing kericuhan," ujar Sam melalui surat elektronik kepada wartawan kemarin.

Korban tewas bernama Petrus Ayamseba, 36 tahun, karyawan PT Pangansari, perusahaan penyedia makanan untuk karyawan PT Freeport. Petrus terkena peluru yang diduga berasal dari senjata api polisi. Insiden ini pecah ketika aksi menuntut peningkatan kesejahteraan pekerja berubah menjadi bentrokan dengan aparat di depan Terminal Gorong-gorong.

Kondisi Timika hingga kemarin masih mencekam. Ribuan orang berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timika, tempat jenazah Petrus disemayamkan. Karyawan Freeport mendesak ada pihak yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Petrus.

Salah satu pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Virgo Solossa, mengatakan tuntutan terhadap PT Freeport belum berhenti. "Kami terus menyoal jika manajemen Freeport tidak memperhatikan tuntutan karyawan," kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan PT Freeport tetap beroperasi dan melakukan kegiatan produksi seperti biasa. "Sampai hari ini (kemarin), produksinya masih di angka normal," kata Darwin.

Juru bicara Freeport, Ramdhani Sirait, memastikan kegiatan produksi tambang emas tidak terganggu meski terjadi demo karyawan yang berstatus kontrak. "Produksi berjalan seperti hari-hari sebelumnya," ujar dia.

Konselor Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, James A. Carouso, menilai konflik di Freeport tak berpengaruh terhadap kerja sama ekonomi kedua negara. "Itu biasa, ada perselisihan antara perusahaan dan pekerjanya," kata dia kepada *Tempo* di Yogyakarta kemarin. Dia berharap manajemen Freeport bisa segera menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

● CUNDING LEVI | TJAHJONO EP | GUSTIDHA BUDIARTIE

Puncak Jaya Masih Siaga I

JAKARTA — Polisi masih menetapkan status siaga I untuk Puncak Jaya, Papua, menyusul terjadinya sejumlah kasus kekerasan di daerah tersebut dalam beberapa pekan ini. "Di Puncak Jaya masih siaga I, sedangkan di wilayah lain agak diturunkan sedikit menjadi waspada I," kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam kepada wartawan di kantornya kemarin.

Menurut dia, kondisi di sana, terutama di sekitar Freeport, masih rawan. Anton juga menyebutkan insiden kemarin pagi, sekitar pukul 00.15 waktu setempat, di Mile 35, saat tiga orang tidak dikenal menyerang satuan pengamanan PT Freeport Indonesia dan pasukan Brigade Mobil sedang melakukan patroli rutin.

Kepala Satuan Reskrim Polres Mimika Ajun Komisaris Tony Sarjaka secara terpisah mengatakan satuan ini berangkat dari Mile 40 dan mendapat tembakan saat berada di Mile 35. "Mobil kedua yang jaraknya sekitar 50 meter sempat melakukan tembakan balasan. Kontak senjata dengan penyerang terjadi beberapa menit," kata Tony.

Polisi masih mengejar pelaku penyerangan. "Hanya ada satu mobil LWB Route Patrol Nomor 15 yang mengalami kerusakan di kaca, dan lubang tembakan di bagian depan mobil," kata Tony.

Menurut Anton, kelompok yang sering mengganggu keamanan itu terdiri atas 30-an orang yang tergabung dalam beberapa kelompok. "Mereka sudah diidentifikasi. Modusnya mencari senjata api," kata Anton. Ia meminta polisi yang sedang bertugas di Puncak Jaya untuk bepergian secara berkelompok. "Minimal lima orang," katanya.

Sebelum penyerangan ini, setidaknya terjadi dua kali insiden penembakan di sekitar daerah ini. Senin lalu, Kepala Kepolisian Sektor Mulia Domingus Oktavianus Awes tewas ditembak dua orang tak dikenal sekitar pukul 11.30 WIT di Lapangan Terbang Mulia, Puncak Jaya. Jumat pekan lalu, tiga orang tewas karena ditembak orang tak dikenal di kawasan proyek konstruksi PT Freeport di Mile 38-40 Timika.

Secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo memastikan akan memberi dukungan penuh jika diminta kepolisian. "Masalah Papua, pada dasarnya TNI AD berkomitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya di Jakarta, kemarin, setelah menandatangani kerja sama antar-kepala angkatan darat se-Asia Tenggara. ● RINA WIDIASTUTI | TJAHJONO EP | IRA GUSLINA

Freeport Tawarkan Kenaikan Upah 30 Persen

JAKARTA — PT Freeport Indonesia menaikkan tawaran kenaikan upah karyawan nonstaf sebesar 30 persen dari upah pokok. "Itu untuk karyawan nonstaf kompetensi tertinggi," kata Direktur Executive Vice President & Chief Administration Officer PT Freeport Indonesia, Sinta Sirait, kemarin.

Saat ini Freeport mempekerjakan karyawan nonstaf dalam tingkat kompetensi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama 2007. Tingkat kompetensi terbagi dari yang terbawah FI dan terus bertingkat hingga A5 yang paling tinggi.

Sinta menjelaskan, dengan tawaran ini, seorang pegawai kontrak tingkat FI atau lulusan sekolah menengah atas bakal mendapat penghasilan kotor Rp 11 juta per bulan. Penghasilan ini akan naik bertahap pada tahun depan menjadi Rp 12,7 juta.

Sedangkan untuk karyawan dengan kompetensi tertinggi atau A5 bakal mendapat gaji rata-rata Rp 17 juta per bulan. "Apabila dia menandatangani perjanjian tahun ini, gaji itu akan naik pada tahun depan menjadi Rp 19 juta," kata Sinta.

Freeport belum bersedia memenuhi tuntutan pekerja yang meminta kenaikan upah sebesar US$ 7,5 per jam. Alasannya, tuntutan itu sama saja dengan kenaikan sebesar 400 persen atau sekitar Rp 78 juta per bulan. "Sangat jauh dengan angka Rp 19 juta yang kami tawarkan." Freeport, kata Sinta, berharap serikat pekerja bersedia melakukan negosiasi atas tawaran ini.

Tuntutan kenaikan gaji karyawan nonstaf mendapat dukungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Freeport sebagai perusahaan tambang besar, kata dia, seharusnya mendengarkan permintaan karyawannya. Selain itu, permintaan kenaikan gaji adalah hal yang lumrah di dunia industri.

Rencana pembubaran paksa atas karyawan Freeport yang melakukan unjuk rasa di Mile 27-28, kemarin, batal dilakukan. Kepolisian Resor Mimika memilih dialog dan bekerja sama dengan para karyawan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. "Setelah mendengar keluhan rekan-rekan SPSI dan kondisi yang terjadi, kami sepakat untuk menghormati rangkaian perjuangan," ujar Wakil Kepala Polres Mimika Komisaris Mada Indra Laksanta kemarin.

Ketua Bidang Organisasi SPSI Freeport, Virgo Solossa, meminta kepolisian memberi ruang kepada pekerja menyelesaikan persoalan secara bermartabat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata, dana yang digelontorkan Freeport untuk keamanan sejak 2001 sekitar US$ 79,1 juta. "Data itu kami peroleh dari laporan keuangan Freeport," ujar Koordinator Monitoring Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas.

Seharusnya, kata dia, bantuan dana tidak diberikan dalam bentuk kerja sama antarlembaga. Selain itu, model penyaluran ini tidak memiliki dasar hukum dan rentan disalahgunakan.

● ALI NY | GUSTIDHA BUDIARTIE | RICKY FERDIANTO | TJAHJONO

Renegosiasi Kontrak Freeport Setelah Konflik Gaji Selesai

Kemajuan renegosiasi dievaluasi Desember.

JAKARTA — Pemerintah belum mengagendakan negosiasi ulang kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia. Negosiasi lanjutan baru akan dilakukan setelah suasana di Papua tenang dan konflik gaji karyawan tuntas.

"Nanti, setelah kondusif, baru kami gelar negosiasi," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik kemarin.

Mantan Menteri Pariwisata ini mengungkapkan, pemerintah masih berfokus pada penyelesaian tuntutan pekerja Freeport yang meminta peningkatan kesejahteraan dan kenaikan upah. "Kalau ini sudah ketemu titiknya, akan bergeser nanti ke masalah operasi."

Saat ini royalti yang disetor Freeport kepada negara sebesar 1 persen. Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000, royalti emas mestinya 3,75 persen, perak 3,25 persen, serta tembaga 4 persen.

Karena itu, pemerintah terus menekan Freeport agar mau membayar royalti 3,75 persen. Namun perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut menolak dengan alasan berpegang pada kontrak karya.

Selagi kedua pihak berdebat, ribuan pekerja Freeport di Timika, Papua, melakukan aksi mogok kerja sejak 15 September lalu. Aksi mogok terus berlanjut sampai sekarang dan menelan banyak korban jiwa.

Sebagian karyawan menuntut kenaikan gaji dari US$ 3 menjadi US$ 7,5 per jam. Jero menyatakan mendukung tuntutan para pekerja. Tapi, "Yang wajar juga, jangan terlalu tinggi, tidak mampu nantinya," ujarnya.

Dia juga menyarankan agar perusahaan mencocokkan pemberian gaji pekerja Freeport di Meksiko dengan di Papua. "Ya dicocokkan dululah, apa itu yang pantas untuk kami."

Pendahulu Jero, Darwin Saleh, mengatakan Kementerian Energi bakal mengevaluasi upaya renegosiasi kontrak migas dan pertambangan mineral pada Desember mendatang.

"Kementerian akan mengevaluasi hasil renegosiasi yang telah diupayakan sejak 2010," ujar Menteri Darwin.

Dia menegaskan, renegosiasi adalah amanat rakyat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara serta harus direalisasi oleh pemerintah.

Pada dasarnya pemerintah menghormati asas kesucian kontrak yang telah dijalin selama puluhan tahun dengan para investor dan kontraktor.

Namun pemerintah juga harus mengupayakan perbaikan posisi dan nilai tambah dari kontrak-kontrak yang ada. Salah satu perusahaan tambang yang masih dirayu agar bersedia mengikuti proses renegosiasi adalah Freeport, yang beroperasi sejak 1967.

Juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, menyatakan Freeport selalu terbuka berbicara dengan pemerintah. "Terkait dengan apa yang dinegosiasi ulang, sampai saat ini Freeport masih menunggu pemerintah," tutur dia.

Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia, Tony Wenas, mengusulkan agar royalti tambang rata-rata sebesar 2 persen dari harga jual. Angka tersebut dihitung berdasarkan referensi dari Bank Dunia serta perbandingan dengan royalti negara-negara penghasil mineral lainnya.

Dia mengimbuhkan, renegosiasi terakhir dilakukan pada 2010. Waktu itu pemerintah sudah berbicara dengan pengusaha. Hasilnya, sebagian poin renegosiasi berhasil disepakati.

"Renegosiasi tidak bisa dipaksakan, harus sepakat kedua belah pihak," ujar mantan Presiden Direktur PT Inco itu. ● RUSMAN PARAQBUEQ | GUSTIDHA | EFRI

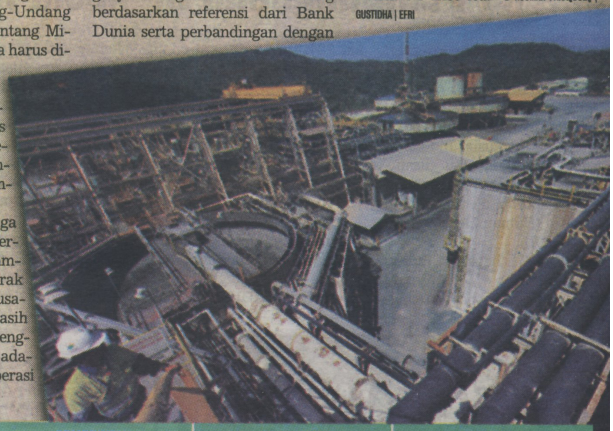

TOPIK	PEMERINTAH	PENGUSAHA	HASIL
Luas Wilayah Kerja	Luas wilayah tambang mineral maksimal 25 ribu hektare, dan batu bara 15 ribu hektare.	Lebih luas lagi.	Luas wilayah didasarkan pada hasil kajian rencana kerja jangka panjang badan usaha.
Perpanjangan Kontrak	Jangka waktu Izin Usaha Operasi Produksi untuk mineral diperpanjang menjadi 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing 10 tahun.	Izin usaha dan jangka waktu diberikan oleh pemerintah pusat, untuk menghindari tumpang tindih.	Izin diberikan oleh pemerintah pusat, berkoordinasi dengan daerah.
Penerimaan Negara	Royalti mineral naik mulai dari 3,75 persen.	Royalti berimbang dengan kewajiban lain.	Pemerintah tetap berpedoman pada PP No. 45 Tahun 2003.
Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian	Pengolahan dan pemurnian di dalam negeri maksimal 2014.	Sepakat, namun jangka waktu diperpanjang.	Pemerintah akan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian.
Kewajiban Divestasi	Divestasi bertahap sampai 51 persen.	Ada kontraktor yang meminta pemilikan nasional cukup 20 persen.	Pemerintah tetap pada posisinya.
Kewajiban Penggunaan Jasa Dalam Negeri	Pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal.	Sebagian besar perusahaan jasa nasional belum kompeten.	Pemerintah tetap pada posisinya.

Pemerintah Desak Freeport Renegosiasi Kontrak

JAKARTA — Pemerintah mengupayakan tambahan porsi divestasi bagi negara dalam renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. "Keinginannya seperti itu, kami menginginkan ada tambahan keuntungan bagi negara," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite kemarin.

Saat ini pemilikan saham nasional di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 9,36 persen. Sisanya, 90,64 persen, masih dikuasai Freeport McMoran Copper & Gold Inc, yang berinduk di Amerika Serikat.

Sesuai dengan Pasal 24 Kontrak Karya Freeport generasi kedua pada 1991, perusahaan tambang ini berkewajiban mendivestasikan pemilikannya dalam dua tahap. Tahap pertama, melepas saham ke pihak nasional sebanyak 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Tahap kedua, yang dimulai pada 2001, Freeport harus melepas saham ke pihak nasional sebanyak 2 persen per tahun sampai pemilikan nasional menjadi 51 persen.

Namun kewajiban pada tahap kedua gugur karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Karena itulah pemerintah berharap ada perundingan ulang soal kontrak karya.

Thamrin menjelaskan, peraturan ini diterbitkan bukan untuk mengganjal proses divestasi Freeport. "Itu (peraturan) diterbitkan secara umum, bukan untuk Freeport saja."

Pemerintah, kata dia, akan menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara untuk melakukan renegosiasi. "Jadi, kami terus berusaha agar Freeport mau renegosiasi kontrak."

Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Setiawan menyatakan, renegosiasi sah saja untuk dilakukan. Sebab, dalam kontrak karya terdapat artikel yang memaparkan kemungkinan diubahnya kontrak apabila salah satu pihak menginginkannya."Meskipun tidak dapat dipaksakan."

Sebelumnya, juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, menyatakan tidak ada yang salah dalam kontrak Freeport bersama pemerintah Indonesia. "Kami yakin bahwa kontrak kami cukup adil bagi setiap pihak," ujarnya. Freeport berkukuh akan tetap menghormati dan mematuhi segala ketentuan dari kontrak yang sudah diikat sejak 1991 itu. ● ALI NY | GUSTIDHA BUDIARTIE

KASUS FREEPORT

Walhi Minta Presiden Evaluasi Kepala Polri

Presiden meminta yang melanggar prosedur dikenai sanksi.

LUMAJANG — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi Kepala Kepolisian RI Jenderal Timor Pradopo terkait dengan kerusuhan Freeport, yang menewaskan seorang pekerja.

Manajer Penguatan Regional dan Kaderisasi Eksekutif Nasional Walhi Ahmad Samsul Hadi, saat berada di Lumajang kemarin, mengatakan selanjutnya evaluasi harus dilakukan terhadap seluruh jajaran Polri hingga di tingkat paling bawah. "Walhi mengecam keras tindakan polisi," katanya di sela sebuah seminar kemarin.

Karyawan Freeport pada Senin lalu menggelar unjuk rasa menuntut perbaikan kesejahteraan. Unjuk rasa ini berujung ricuh dan seorang karyawan bernama Petrus Ayemiseba tewas tertembus peluru tajam anggota kepolisian. Beberapa karyawan lainnya mengalami luka tembak.

Dari Jakarta, juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Presiden Yudhoyono telah menginstruksikan agar jajaran kepolisian memberi sanksi jika terjadi kekeliruan prosedur. "Segala prosedur yang salah dan keliru harus dikenakan sanksi," kata Julian lewat pesan pendek kemarin.

Secara terpisah, juru bicara Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Ketut Yoga Ana membenarkan adanya insiden penembakan polisi terhadap karyawan perusahaan tambang Freeport. Penembakan itu, kata dia, mengenai dua warga.

"Tapi sampai saat ini masih diaudit, apakah langkah-langkah pengamanan sudah sesuai prosedur," ujar Yoga Ana di kantornya kemarin.

Hingga kemarin, jenazah Petrus Ayemiseba masih disemayamkan di gedung DPRD Mimika, Papua. Menurut salah satu pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja-Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Virgo Solossa, jenazah masih akan tetap disemayamkan di sana hingga tuntutan dipenuhi. "Kami minta pemerintah, DPR, polisi, dan manajemen Freeport hadir melihat langsung korban," katanya kemarin.

Menurut Virgo, jika tuntutan pihaknya bersama para karyawan Freeport belum dipenuhi, mereka akan tetap mengadakan aksi mogok. "Kami masih akan memberikan *deadline* kepada manajemen Freeport hingga hari ini," ujarnya kemarin.

Sementara itu, mantan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu mengaku prihatin atas peristiwa berdarah itu. "Peristiwa ini sebaiknya diselesaikan secara dialogis melalui perundingan," katanya.

Adapun tokoh gereja di Papua meminta Presiden Yudhoyono bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa karyawan Freeport tersebut. "SBY harus bertanggung jawab. Masalah ini bukan konteks lokal, tapi persoalan global," kata Pastor Jhon Djonga.

● DAVID PRIYASIDHARTA | EKO ARI WIBOWO | MUHAMMAD TAUFIK | CUNDING LEVI | JERRY OMONA

JUPITER WEKU (ANTARA)



Hiu Paus

Penyelam merekam aktivitas whale shark (hiu paus) di Kwatisore, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Papua Barat, kemarin. Tim Monitoring and Research Program mengevaluasi dampak aktivitas nelayan memberi makan ikan tersebut.

Kongres Rakyat Papua III Digelar

JAYAPURA — Kongres Rakyat Papua III akan digelar pada 16-19 Oktober mendatang. "Pemerintah Indonesia diharapkan memberikan ruang demokrasi bagi orang Papua untuk perhelatan akbar ini," kata Selpius Bobii, Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III, dalam siaran persnya kemarin.

Selpius mengatakan mereka mengharap ruang demokrasi yang dibuka sama seperti saat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI. Kongres ini rencananya akan digelar di Auditorium Universitas Cenderawasih.

Selpius meminta aparat keamanan tak melakukan intervensi kepada panitia terkait dengan acara ini. "Sebab, kongres ini sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat sehingga tak ada alasan aparat keamanan menghalangi kegiatan ini," katanya.

Kongres ini, kata Selpius, akan dibuka oleh pejabat pemerintahan Indonesia. Dia meminta agar tak ada respons negatif atas Kongres Rakyat Papua ini. "Papua tak bisa lagi diselesaikan masalahnya dengan cara-cara lama, tapi harus diselesaikan dengan cara demokrasi dan bermartabat," ujarnya.

Namun acara ini justru mendapat tentangan dari Forum Komunikasi Putra-Putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat. "Kegiatan ini mencederai tatanan kehidupan suku-suku di Papua," kata ketua forum Izaak Samuel Karubaba kemarin.

Menurut Izaak, kongres ini hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan merugikan rakyat Papua. "Kami juga minta agar kongres ini dibubarkan oleh aparat keamanan," ujarnya. Izaak mempertanyakan siapa penyelenggara kongres ini dan mengapa hanya mengakomodasi kelompok tertentu.

Untuk itu, kata Izaak, seluruh lapisan masyarakat diharapkan tetap menjaga lingkungan kekerabatan dan menjaga keharmonisan di antara sesama suku asli Papua. "Jangan terprovokasi oleh informasi yang sengaja diembuskan dengan janji yang tak bertanggung jawab," katanya.

Selain itu, menurut Izaak, pihaknya mengajak masyarakat di seluruh tanah Papua memberikan kepercayaan kepada pemerintah, TNI, serta Kepolisian RI untuk bertindak tepat dan cepat guna mengatasi serta mengantisipasi setiap pergerakan yang mengacaukan stabilitas dan keutuhan negara Indonesia di tanah Papua. "Sebab, secara *de jure* dan *de facto*, Papua bagian Indonesia. Untuk itu, seluruh generasi muda adat Papua segera menyatukan barisan dan mengawal pembangunan nasional," katanya.

● CUNDING LEVI

Amerika Dukung Solusi Adil di Freeport

JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat mengakui ada sengketa perburuhan dan diskusi mendalam yang tengah berlangsung antara PT Freeport Indonesia dan sejumlah kelompok buruh. Hanya, Amerika Serikat tidak dapat memainkan peran di sana.

"Namun, menurut kami, penting ada solusi yang adil dan proses yang lebih maju. Kami mendukung upaya itu," kata Wakil Menteri Luar Negeri untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, meluruskan berita di *Koran Tempo*, Selasa lalu.

Campbell mengatakan pihaknya mengakui bahwa di Papua ada tantangan yang substansial yang berkaitan dengan perhatian pemerintah tentang pembangunan. Amerika Serikat bersedia memberi dukungan sebagai upaya membangun Papua bersama pemerintah Indonesia guna memastikan pelaksanaan proses rekonsiliasi nasional yang sedang berjalan.

Sebelumnya, harian ini memberitakan tentang Amerika Serikat yang menyesalkan PT Freeport Indonesia tak cukup berperan baik dalam menyelesaikan sengketa perburuhan dengan masyarakat Papua. ● MARIA RITA

Freeport Mengaku Sukarela Kucurkan Uang Keamanan

JAKARTA — Perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia menyatakan tak ada patokan besaran dana untuk aparat kepolisian yang menjaga wilayah tambang di Papua.

"Itu sukarela. Kami kaji tiap tahun melihat kewajarannya," kata Manajer Senior Bidang Hukum PT Freeport, Clementino Lamury, dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, Freeport menggelontorkan US$ 14 juta pada 2010 untuk anggaran keamanan, tapi hanya 20 persen yang berupa uang. Sisanya dalam bentuk sarana pendukung bagi aparat keamanan. Dana diserahkan ke kepolisian daerah setempat.

Lamury menjelaskan, tak ada perjanjian khusus Freeport dengan Kepolisian RI soal dana itu. Namun pemberian dana tersebut memiliki dasar hukum, seperti Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1672K-070-MEM-2007 mengenai perlindungan obyek vital nasional. "Lahan tambang Freeport masuk kategori tersebut."

Pemberian uang itu menuai kritik karena anggota Kepolisian RI menerima uang di luar anggaran negara, padahal status tambang Freeport sebagai obyek vital nasional ditentukan oleh negara. Sejumlah lembaga antikorupsi dan pengawas kepolisian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan gratifikasi ini.

Juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, menilai pemberian uang kepada petugas keamanan di lapangan biasa dilakukan oleh Freeport di negara-negara lainnya. Ia menyatakan tak tahu sejak kapan Freeport biasa memberikan uang keamanan, mengingat perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu telah beroperasi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu.

Seorang mahasiswa asal Papua di Jakarta, Siprianus Bunai, berharap masyarakat membedakan antara konflik di Freeport dan aspirasi kemerdekaan Papua. "Konflik Freeport itu urusan pekerja dengan Freeport," katanya dalam diskusi tentang disintegrasi di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, masih terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Papua, baik oleh pembuat kebijakan maupun masyarakat. "Saya pernah naik angkot, dan penumpang lain takut melihat wajah saya," ucap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya ini. Ia juga mengaku pernah dipukuli sekelompok orang di Jakarta Timur lantaran dituduh sebagai preman.

Diskusi itu menghadirkan pembicara penyanyi kelahiran Papua, Edo Kondologit; Direktur Setara Institute Hendardi; dan bekas anggota DPR, Ferry Mursyidan Baldan. Ferry menimpali, satu-satunya solusi untuk Papua adalah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

● GUSTIDHA BUDIARTIE | ISHOMUDDIN

Freeport Tolak Kenaikan Upah 25 Persen

JAKARTA — PT Freeport Indonesia menolak kenaikan upah yang diusulkan Kementerian Tenaga Kerja sebesar 25 persen. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, mengatakan angka tersebut di atas batas yang diajukan perusahaan tambang ini, yaitu 22 persen.

Meski selisihnya hanya 3 persen, menurut Ramdhani, jumlah tersebut tetap signifikan. "Kita bicara tentang kenaikan upah 9.000 orang pegawai," katanya ketika dihubungi kemarin.

Freeport menghitung, dengan kenaikan 22 persen seperti yang ditawarkan perusahaan, dalam setahun para pegawai akan membawa pulang sebanyak Rp 285-310 juta, sudah termasuk bonus dan berbagai tunjangan. Upah tersebut dinilai layak oleh Freeport karena telah dihitung berdasarkan standar biaya hidup di Papua.

Ribuan pegawai Freeport menuntut kenaikan upah setara dengan pekerja perusahaan ini di luar negeri sebesar US$ 17,5 per jam. Sebelum tuntutan dipenuhi, mereka mogok menggarap lahan tambang milik perusahaan Amerika Serikat itu. Selama ini rata-rata pegawai nonstaf mendapat upah Rp 3,3 juta per bulan, belum termasuk bonus, lembur, dan tunjangan lainnya.

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia Tony Wenas, tuntutan kenaikan upah yang diajukan pegawai Freeport sebesar US$ 17,5 per jam tidak realistis. "Kompensasi itu tidak sesuai dengan standar di Indonesia dan pertambangan," katanya kemarin.

Jika tuntutan dikabulkan, ia khawatir hal itu akan menular ke pekerja tambang di perusahaan lain. Kenaikan upah juga mendongkrak biaya operasional, yang akan berpengaruh terhadap kontribusi perusahaan kepada pendapatan negara.

Tony juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan tuntutan upah di Freeport. Selain menurunkan pendapatan negara, mogok kerja akan berpengaruh terhadap dana pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi masyarakat di sekitar pertambangan. "Ini akan menjadi kontraproduktif bagi usaha keras pemerintah dalam mengundang investor di sektor pertambangan," ujarnya.

Data Freeport McMoran menyebutkan, pada semester pertama tahun ini Freeport telah menyetor US$ 1,4 miliar atau Rp 11,7 triliun ke pendapatan negara. Total kewajiban keuangan yang sudah dibayar sejak 1991 adalah US$ 12,8 miliar.

Jumlah karyawan PT Freeport Indonesia pada 2010 adalah 22 ribu orang, termasuk karyawan kontrak 9.000 orang. Sebanyak 30 persen di antaranya adalah penduduk asli Papua, dan kurang dari 2 persen adalah tenaga asing.

Menurut Freeport, mogok kerja yang dilakukan karyawan berpotensi menghilangkan penerimaan negara US$ 8 juta per hari. Sedangkan kehilangan pendapatan para pegawai yang mogok adalah Rp 577 ribu per hari. ● GUSTIDHA BUDIARTIE

Freeport Sulit Penuhi Kontrak Jual-Beli

JAKARTA — PT Freeport Indonesia kini tidak dapat melaksanakan transaksi jual-beli konsentrat logam mereka sesuai dengan kontrak yang telah dijalin. Perusahaan tambang tersebut berada dalam kondisi kahar akibat aksi mogok yang dilancarkan para karyawannya.

"Kami terpaksa menyatakan *force majeure* terhadap perjanjian-perjanjian penjualan konsentrat," ujar juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, kemarin. Dia menjelaskan, aksi mogok kerja oleh serikat pekerja telah berdampak pada produksi dan pengapalan konsentrat.

Sebelumnya, Freeport bahkan sempat menghentikan kegiatan produksi akibat aksi mogok dan penutupan akses. Produksi dihentikan karena pipa yang berfungsi menyalurkan konsentrat sudah tidak dapat beroperasi karena disabotase. Pipa sepanjang 114 kilometer yang terletak dari Mile 74 tersebut biasanya mengalirkan konsentrat tembaga dan emas ke pelabuhan

Biasanya Freeport memproduksi 220-230 ribu ton bijih per hari yang berasal dari tambang terbuka di Grasberg dan bawah tanah, *deep ore zone*. Berdasarkan data, setiap ton bijih mengandung delapan kilogram tembaga dan 0,91 gram emas.

Data terakhir menyebutkan sekitar 103,189 ton konsentrat yang dapat dikapalkan. Produksi tambang bawah tanah per hari hanya sebesar 49.513 bijih. Sementara itu, pabrik pengolahan telah mengolah 186.610 ton bijih.

Freeport menghitung, penghentian produksi dapat berakibat signifikan pada pendapatan negara. Negara setidaknya diperkirakan merugi sebanyak US$ 8 juta, yang diperoleh dari dividen, royalti, dan pajak. Negara juga berpotensi kehilangan dana kemitraan sebesar 1 persen, yaitu US$ 200 ribu. Tiap karyawan yang melakukan aksi mogok juga diperhitungkan kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 577 ribu per hari. ● GUSTIDHA BUDIARTIE

Polisi Siap Diperiksa KPK Soal Duit Freeport

"DPR harus menanyakan pemberian uang ini."

JAKARTA — Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo menyatakan siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan sehubungan dengan bantuan uang PT Freeport Indonesia kepada polisi. Ia mengatakan polisi memang sebaiknya tidak menerima langsung dari Freeport, tapi dari anggaran negara. "Jadi KPK atau BPK, silakan melakukan audit eksternal," katanya di Jakarta kemarin.

Namun, menurut Timur, jika ternyata tetap menerima uang pengamanan langsung dari Freeport, ia menjamin akan memberikan laporan penggunaan uang itu secara baik. "Akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. Timur enggan menyatakan uang yang selama ini diterima polisi sebagai gratifikasi.

Sebelumnya, Timur mengakui instansinya menerima dana dari Freeport. Dana itu, kata dia, langsung diterima petugas di lapangan. Polisi menerima dana dari Freeport karena situasi dan medan yang sulit. Pemberian dana oleh swasta ini menuai kritik dari banyak pihak. Polisi harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana ini. Dana ini juga dianggap gratifikasi kepada penegak hukum. Pemberian dana dikhawatirkan mempengaruhi obyektivitas Polri menyikapi konflik buruh Freeport dengan perusahaan.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim menyatakan dana pengamanan PT Freeport Indonesia seharusnya diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Uang yang diberikan Freeport secara langsung ke polisi dan tentara ia nilai tidak sah. "Freeport mendapat perlakuan istimewa karena merupakan obyek vital," kata Ifdhal di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Sebagai obyek vital negara, menurut Ifdhal, sudah seharusnya polisi dan tentara memberikan perlindungan. "Tapi dana pengamanan diambil dari APBN," ucapnya. Komisi Nasional berharap polisi bisa menjelaskan soal penggunaan pemberian Freeport ini. "Komisi III DPR harus menanyakan pemberian dana ini kepada Polri," katanya.

Pendapat berbeda disampaikan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Julles Ongge. Menurut dia, uang per bulan Rp 1.250.000 per orang yang diterima anggota kepolisian di wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika adalah wajar dan tak perlu diperdebatkan. "Itu wajar saja. Mereka kan kerja," ujarnya kemarin. Ia menambahkan, biasanya yang membela kepentingan perusahaan adalah pejabat polisi yang dapat "amplop" dalam jumlah besar. Mereka yang di lapangan, kata dia, dapat Rp 1 juta per bulan bukan apa-apa. Apalagi hidup di Timika mahal. "Satu juta sebulan tidak cukup," ujar Julles.

Selain itu, puluhan anggota TNI yang bertugas mengamankan area Freeport diberi jatah khusus. "Ya, memang ada, tapi itu dalam bentuk makanan, bukan uang," kata Panglima Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triasunu.

Jumlah anggota TNI yang bertugas 96 prajurit, sedangkan polisi 635 orang. Tiap bulan seorang polisi menerima dana dari Freeport sebesar Rp 1.250.000. Indonesia Corruption Watch menyatakan US$ 79,1 juta diberikan Freeport sejak 2001 kepada aparat. Pada 2010, sumbangan yang diberikan US$ 14 juta. ● INDRA WIJAYA | I WAYAN AGUS | JERRY OMONA | SUNUDYANTORO

TJAHJONO EP ERANIUS (TEMPO)

Polri Diminta Bertanggung Jawab atas Dana Freeport

"Kalau personal, tentu gratifikasi."

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kepolisian RI mempertanggungjawabkan pemberian uang keamanan dari PT Freeport Indonesia di Papua sebesar US$ 14 juta pada 2010. Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman mengatakan pemberian uang itu harus dipastikan masuk ke institusi atau personal.

"Kalau institusional, berarti kan ada dalam pembukuan. Kalau personal, tentu gratifikasi," kata Benny di gedung DPR kemarin. DPR, menurut dia, akan memanggil Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo terkait dengan pemberian uang tersebut pada Desember mendatang.

Politikus Partai Demokrat itu menilai PT Freeport harus ikut menjelaskan status pemberian uang tersebut. Soalnya, manajemen Freeport pernah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan pasukan pengamanan dari kepolisian lagi.

Juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, mengatakan pemberian uang keamanan diatur dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Freeport dan pemerintah. "Pemerintah yang memutuskan mau menyerahkan kepada pihak militer yang mana," ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut Ramdani, kerja sama tersebut telah berlangsung lama dan dengan besaran angka yang berbeda-beda serta dilaporkan dalam laporan keuangan saban tahun. Selain itu, aliran dana tidak hanya berbentuk tunai. "Ada juga dalam bentuk pembangunan pos keamanan."

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemberian uang keamanan itu bisa diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Koordinator Kontras Haris Azhar menilai lembaga negara yang menerima dana di luar anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Haris menjelaskan, Freeport semestinya tidak perlu mengeluarkan dana tambahan karena mereka telah membayar pajak. Kalaupun ada, bantuan dana keamanan itu seharusnya disetor dulu kepada negara melalui Menteri Keuangan.

Di samping itu, Haris khawatir alokasi dana tersebut berpotensi menimbulkan masalah dari sisi ekonomi, khususnya berkaitan dengan tuntutan buruh atas perbaikan kesejahteraan. "Bayangkan, mereka mau membayar polisi ratusan miliar, tapi menolak menaikkan upah buruh yang hanya US$ 7,5 (per jam)," katanya.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo kemarin mengatakan uang pengaman dari PT Freeport adalah wajar mengingat sulitnya pengamanan di kawasan tersebut. Akuntabilitas dana dari perusahaan yang diamankan, kata dia, sepanjang alasannya situasi yang sulit dalam tugas, bisa dipertanggungjawabkan. ● MAHARDIKA SATRIA HADI | RIKY FERDIANTO | PRIHANDOKO | INDRA WIJAYA | DEDDY S

BARA DI PAPUA

Konflik meletup di Papua sejak September lalu. Berawal ketika karyawan Freeport menuntut kenaikan gaji, unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan berdarah hingga menyebabkan sejumlah nyawa melayang.

15 SEPTEMBER 2011
Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja menuntut kenaikan gaji.

10 OKTOBER 2011
Seorang pekerja tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam unjuk rasa di Terminal Gorong-gorong, Timika.

14 OKTOBER 2011
Penembakan terjadi lagi di area PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Tiga orang tewas dan empat lainnya luka.

15 OKTOBER 2011
Seorang pekerja bernama Leo Wandegou tewas.

20 OKTOBER 2011
Empat orang tewas di perbukitan belakang Korem 172 PWY, Padang Bulan, Abepura, Jayapura. Mereka adalah Daniel Kadepa, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, Jayapura, dan Max Sasa Yewi. Dua lainnya adalah Yacob Samonsabra dan Aza Yeuw.

21 OKTOBER 2011
Dua tewas di Mile 40. Korban bernama Aloysius Margana, karyawan HDM Levee Maintenance PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan seorang pendulang emas.

23 OKTOBER 2011
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membahas konflik di Papua bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta di Bali.

24 OKTOBER 2011
Kepala Polsek Puncak Jaya Ajun Komisaris D. Awes tewas dikeroyok dua orang dan ditembak di sekitar area Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua.

25 OKTOBER 2011
Baku tembak terjadi lagi setelah jenazah Kepala Polsek Puncak Jaya diberangkatkan ke Jayapura. Papua berstatus siaga.

26 OKTOBER 2011
Mobil patroli milik Freeport ditembaki di sekitar Mile 35. Mobil berisi anggota Brimob dan satuan keamanan Freeport.

28 OKTOBER 2011
Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengakui menerima dana dari Freeport. Anggota Komisi I DPR, Lily Wahid, menyatakan Freeport mengalokasikan dana US$ 14 juta untuk mengamankan aset-aset di Timika.

SUMBER: KORAN TEMPO | EVAN (PDAT) | PRIHANDOKO | DEWI RINA

Pekerja Freeport Enggan Berdialog Lagi

TIMIKA — Perundingan maraton selama seminggu lebih antara perwakilan pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia gagal menemukan titik temu. Juru bicara pekerja Freeport Indonesia, Virgo Solossa, mengatakan pihaknya menutup semua upaya dialog dengan manajemen.

Menurut Virgo, manajemen Freeport enggan memenuhi tuntutan pekerja dan *ngotot* menawarkan kenaikan 30 persen. Pekerja bertahan pada tuntutan kenaikan upah kerja US$ 7,5 per jam untuk level pekerja paling rendah. Angka ini lima kali lebih tinggi daripada US$ 1,5-3,0 yang diterima.

"Kami masih bertahan pada tuntutan kami," kata Virgo, yang juga Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia, kemarin.

Di hadapan 5.000-an pekerja yang masih menguasai pos keamanan Mile 28, dekat Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika, Virgo menyatakan, terhitung sejak kemarin, SPSI PT Freeport Indonesia menutup semua ruang dialog dengan manajemen Freeport. Rencananya, Senin mendatang, sembilan perwakilan pekerja akan berangkat ke Jakarta bertemu dengan para pemegang saham PT Freeport melalui juru bicaranya, Ramdani Sirait, mengatakan pihaknya menawarkan kepada para pekerja non-staf kenaikan upah 25 persen dari gaji pokok sebelumnya. "Ada juga beberapa kompensasi lainnya yang diberikan," ujarnya kepada *Tempo* melalui telepon kemarin.

Ramdani mengatakan nilai upah pokok pekerja non-staf Freeport saat ini adalah 170 persen dari upah minimum regional untuk industri tambang dan minyak di wilayah Papua. Freeport memiliki 9.000 pekerja non-staf dengan gaji bervariasi. "Sekarang terserah mereka (pekerja) apa

Hingga kemarin petang, akses jalan perusahaan di Mile 27 dan Mile 28 poros Jalan Pelabuhan Amamapare-Tembagapura masih lumpuh. Ribuan pekerja masih menguasai satu-satu akses perusahaan ini.

Akibat aksi ini, suplai bahan makanan dan bahan bakar minyak ke Tembagapura terhenti. Dari Tembagapura, sumber *Tempo* mengatakan pekerja warga negara asing di Freeport mulai resah akibat mulai menipisnya persediaan bahan makanan. "Bahan makanan yang tersedia hanya cukup untuk satu minggu," kata Ramdani.

TNI dan Polisi Diduga Langgar HAM di Papua

"Itu bukan tindakan pengamanan."

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menduga ada pelanggaran HAM dalam bentrokan berdarah seusai Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Jayapura, pada 17 Oktober lalu. "Ada kejanggalan penyerangan oleh TNI dan Polri. Menurut kami, itu bukan pengamanan," kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh di Jakarta kemarin.

Ridha mengatakan mereka sudah mengumpulkan keterangan dari korban, saksi, enam orang yang ditahan dengan dugaan makar, serta Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Pangdam di Papua. "Kami menemukan dugaan pelanggaran HAM," ujarnya.

Menurut Ridha, dari keterangan saksi dan korban, aparat TNI dan polisi melakukan kekerasan dua jam setelah kongres ditutup. Selain itu, Komnas HAM mendapat informasi tentang sejumlah orang yang dikumpulkan di lapangan dengan dada telanjang, lalu dipecut aparat.

Temuan itu, kata Ridha, akan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta instansi terkait. "Kami akan jelaskan siapa saja yang menjadi korban, dugaan pelanggarannya apa saja, siapa yang harus bertanggung jawab," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan keberadaan TNI di Papua atas permintaan Kepolisian RI. "Silakan Komnas HAM berkata begitu," kata Iskandar. "Ini tertib sipil, bukan tertib militer, silakan tanya polisi."

Tapi juru bicara Markas Besar Polri tak bisa dihubungi. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar tak menjawab panggilan telepon dan tak membalas pesan pendek.

Kemarin di sekitar PT Freeport Indonesia, di Timika, Papua, suasana masih mencekam. Sebuah tembakan dilepaskan kelompok bersenjata ke arah pasukan polisi dari Satuan Tugas Obvitna yang sedang berpatroli di Mile 36 pada pukul 08.30 WIT.

"Waktu Satgas melintas di Mile 36, ada suara tembakan sekali dari dalam hutan," kata Kepala Satuan Intelijen Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Tony Sarjaka di Timika kemarin. "Pasukan lalu membalas."

Sementara itu, di Kota Kuala Kencana pengamanan makin ditingkatkan. Pagi hingga sore hari tank-tank Scorpio dan Barracuda dari kepolisian berpatroli di dalam kota. Anggota Securicor dan pasukan TNI Batalion 754 Eme Neme Kangasi menjaga pintu masuk ke kota itu.

Di pos keamanan Mile 28, ratusan pekerja masih memblokade akses dari bandar udara ke area tambang. Situasi serupa terjadi di akses perusahaan di Mile 27. ● TJAHJONO EP (TIMIKA) | RINA W | RIRIN A | MARTHA T | DEDDY S

Pemerintah Mengevaluasi Uang Keamanan dari Freeport

JAKARTA — Pemerintah akan mengevaluasi pemberian uang keamanan dari PT Freeport Indonesia kepada kepolisian. Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan masalah itu akan menjadi bahan untuk menata kembali hubungan kerja antara Freeport dan aparat keamanan.

Hubungan kedua pihak, kata Velix, harus dilihat dalam kerangka Freeport sebagai obyek vital negara. Karena itu, pengamanan Freeport sebagai obyek vital harus dilakukan oleh kepolisian. Untuk sementara, kata dia, ihwal pemberian uang keamanan itu harus diklarifikasi sendiri oleh pihak kepolisian dan PT Freeport.

Sekretaris Negara era Presiden Abdurrahman Wahid, Bondan Gunawan, mengatakan pemberian uang dari PT Freeport justru akan membuat aparat berpihak kepada pihak asing. "Efeknya kemudian kita menjadi centeng negara asing," ujarnya di Jakarta kemarin.

Bondan menilai uang itu sebaiknya diberikan ke pemerintah pusat atau daerah. Penggunaan dana itu juga harus melalui mekanisme pengarahan yang jelas. "Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan, akan liar, (pertanggungjawaban) juga tidak jelas," tuturnya.

Pemberian duit keamanan itu tercantum dalam dokumen PT Freeport yang bisa diakses di situs resmi perusahaan tersebut. Pada halaman 11 dokumen bertajuk "2010 Working Toward Sustainable Development Report" itu ada penjelasan bahwa polisi ditugasi melakukan pengamanan dan dibantu TNI bila dibutuhkan.

PT Freeport menggelontorkan duit US$ 14 juta untuk infrastruktur pengamanan, makanan, tempat tinggal, bahan bakar, transportasi, perbaikan kendaraan, uang saku, dan program bantuan masyarakat. Juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, menegaskan, dana itu tidak langsung dikucurkan kepada polisi, melainkan melalui perantaraan pemerintah. Lalu pemerintah yang menentukan alokasi dana, kepada Kepolisian RI atau TNI.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo membenarkan adanya uang keamanan itu. Dia berkukuh bahwa dana tersebut bukan hal haram. Alasannya, pengamanan di Papua itu sulit. Berbeda dengan Polri, TNI membantah tudingan menerima sumbangan Freeport. ● RIRIN AGUSTIA | DEDDY S

Polisi Kesulitan Tangkap Pelaku di Hutan Papua

JAKARTA — Kepolisian RI menyatakan kesulitan menangkap pelaku penembakan di kawasan tambang PT Freeport Indonesia di Papua karena pelaku berlari dan bersembunyi di hutan.

"Kami masih memburu pelaku penembakan itu. Setiap habis menyerang mobil patroli, mereka langsung berlari," kata juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, ketika dihubungi kemarin.

Namun, menurut mantan Kepala Detasemen Khusus 88/Antiteror Mabes Polri ini, kondisi di Papua kemarin aman. "Tidak ada kerusuhan. Aman." Penjagaan di sejumlah titik rawan, termasuk di sekitar tambang Freeport, berlangsung lancar. Beberapa kelompok pasukan berjaga seperti biasa.

Petugas keamanan yang berjaga di area PT Freeport, Mimika, tepatnya di Mile 42, sekitar pukul 17.30 WIT pada Sabtu lalu kembali diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Akibatnya, pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia, Raymond, menderita luka tembak di lengannya.

Namun Indonesia Police Watch (IPW) mengaku mendapat kabar bahwa polisi sejak Jumat siang pekan lalu memprovokasi buruh lokal PT Freeport di tanggul Mile 27. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, petugas Brigade Mobil Polri menembak di muka umum tanpa alasan yang jelas. Esoknya, sekitar pukul 12.00, Brimob kembali merapat ke tempat yang sama untuk membongkar tenda para buruh lokal. "Para buruh menilai itu usaha memancing amuk massa," ujarnya pada Sabtu lalu.

Konflik polisi dengan buruh lokal PT Freeport telah menyebabkan buruh bernama Petrus Ayamiseba meninggal terkena tembakan dalam bentrokan di Jalan Gorong-gorong, Timika. Kala itu para buruh menggelar unjuk rasa meminta kenaikan upah kepada PT Freeport.

● RINA W | TJAHJONO EP | FRANSISCO R

Sumber Dana Polri Hanya dari Negara

"Kalau (uang itu) untuk motivasi tugas polisi, kenapa tidak?"

JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai tidak ada alasan bagi Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia menerima duit selain dari anggaran negara. Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, sumber keuangan mereka sudah diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Dikhawatirkan polisi secara psikologis lebih memihak kepada yang membayar dibandingkan ke rakyat," ujar Haris kemarin. Aturan yang secara tidak langsung melarang aparat menerima duit selain dari negara, kata dia, tercantum pada Bab IV Pasal 23 Undang-Undang Kepolisian RI serta Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang TNI.

Haris menegaskan, kucuran dana US$ 14 juta atau sekitar Rp 120 miliar dari PT Freeport Indonesia ke polisi di Papua tidak dapat dibenarkan apa pun alasannya. Konsekuensi dari uang itu, kata dia, sudah tampak di lapangan. Polisi cenderung berdiri dan berhadapan dengan rakyat, yang beperkara melawan Freeport.

Juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, mengatakan dana US$ 14 juta untuk empat bulan. Dana itu dikeluarkan pihak Freeport berkaitan dengan pengiriman pasukan tambahan untuk meredam konflik beberapa waktu lalu.

Namun, kata Saud, uang dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tidak digelontorkan melalui Mabes Polri, melainkan langsung kepada personel polisi yang bertugas. Alasan pemberian uang, "Biaya hidup di Papua mahal. Kalau (uang itu) untuk meningkatkan motivasi tugas polisi, kenapa tidak?" ujar Saud kemarin.

Berdasarkan surat Kepolisian Daerah Papua kepada Kontras, tertera jumlah anggota pasukan polisi dan TNI yang bertugas di kawasan Freeport sebanyak 635 personel. Mereka saban bulan mendapat tambahan uang Rp 1.250.000 per orang. Jika dijumlahkan, totalnya tidak sampai Rp 1 miliar setiap bulan.

Penjelasan Saud berbeda dengan keterangan juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, pada Sabtu lalu. Menurut dia, dana tidak langsung diberikan kepada polisi, melainkan melalui perantaraan pemerintah. Lalu pemerintah yang menentukan alokasi dana kepada TNI atau Polri.

Adapun Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hery Purnomo tak tahu-menahu soal setoran uang Freeport itu. "Saya tidak punya informasi soal itu," ujarnya kemarin.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum mau menanggapi kejadian ini. Aziz Syamsudin, Wakil Ketua Komisi Hukum, mengatakan pihaknya baru akan bersikap setelah mendengarkan keterangan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. "Kami mendengarkan terlebih dulu pemberian itu untuk apa," ujarnya. Komisi Hukum mengagendakan pertemuan dengan Kepala Polri seusai masa reses berakhir.

● ISMA S | RINA W | RUSMAN P | FEBRIANA F | FRANSISCO R | SUKMA

Kapolri: Penanganan Papua Sesuai Prosedur

JAKARTA — Kepolisian berkeras tak ada pelanggaran dalam penanganan Kongres Rakyat Papua III, yang menimbulkan korban tewas dan luka-luka. Menurut Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo, penanganan oleh aparat di lapangan sesuai dengan prosedur.

"Itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum juga," kata Timur setelah menerima tim Formed Police Unit III yang baru pulang dari Sudan di Markas Besar Polri, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, semua tindakan kepolisian pada 19 Oktober lalu di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Papua, itu adalah langkah-langkah hukum sesuai dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku, yakni tindakan makar.

Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Sutarman pun mengungkapkan, tindakan yang dilakukan polisi di Papua sesuai dengan prosedur menghadapi orang yang mendirikan negara di dalam negara. Tujuan tindakan itu, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sutarman menjelaskan, setiap pihak dapat mengungkapkan temuannya mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada Polri. Temuan-temuan itu akan disampaikan kepada Kepolisian Daerah Papua untuk diteliti. Ia berjanji institusinya akan transparan dalam menanganinya.

Komisi Nasional HAM telah mengumumkan hasil investigasinya bahwa terjadi pelanggaran hak asasi oleh aparat kepolisian. Berdasarkan keterangan para saksi, dua jam setelah kongres berakhir terdengar rentetan tembakan yang membuat peserta kocar-kacir. Tiga orang tewas akibat insiden itu.

Sebelumnya, di kongres itu digelar proklamasi Negara Federasi Papua Barat, disertai pengumuman Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, sebagai presiden.

Namun Komnas HAM tetap berpendapat kepolisian melanggar prosedur tetap pengamanan dalam kasus Abepura. "Ada penjelasan mengenai kesalahan penanganan, nanti akan kami serahkan," ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim kemarin.

Menurut Komnas HAM Papua, kongres itu mendapat izin dari pemerintah.

Tapi, juru bicara Mabes Polri, Brigadir Jenderal M. Taufik, mengatakan kongres itu tak mengantongi izin polisi.

● FRANSISCO R | EDI FAISOL | JERRY O| FEBRIYAN | JOBPIE S

Polisi Tertembak di Area Freeport

TIMIKA — Penyerangan terhadap aparat kembali terjadi di Papua kemarin. Sekelompok orang bersenjata menyerang rombongan polisi dan petugas pengamanan di area PT Freeport Indonesia, Timika.

Anggota Satuan Pelopor Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Satu Marselinus, menjadi korban dalam insiden tersebut. Terluka pada bagian pelipis, Marselinus langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Tembagapura.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Mimika Komisaris Mada Indra Laksanta mengatakan penembakan terjadi sekitar pukul 11.22 waktu Pa[illegible] polisi sedang melintas di Mile 43-45. Kawasan ini terletak antara Tembagapura dan area pertambangan Freeport.

Peristiwa kemarin merupakan serangan kesekian kalinya terhadap aparat di Papua. Pada 24 Oktober lalu, Kepala Kepolisian Sektor Mulia Ajun Komisaris Domingus Oktavianus Weas tewas ditembak di lapangan terbang Mulia, Puncak Jaya.

Menurut Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Bigman Lumban Tobing, sewaktu menyerang, kelompok bersenjata memakai taktik menembak secara membabi-buta. Setelah menembak, [illegible]

Hingga kemarin sore, polisi terus memburu kelompok penyerang. Namun gerak polisi terhambat kondisi alam dan cuaca di Timika. "Hutannya masih lebat. Tebingnya curam. Kami kesulitan," kata Bigman.

Cuaca di sekitar Timika juga tidak bersahabat bagi aparat asal Jakarta. "Sejak pukul 15.00, cuaca sudah sangat dingin dan berkabut tebal," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution.

Polisi berkali-kali gagal mengejar kelompok penyerang yang menghilang di hutan. "Fisik mereka juga kuat dan terbiasa dengan alam Papua," ujar Saud.

Menurut Bigman, polisi memerlukan helikopter untuk memburu kelompok penembak misterius itu. "Kami berupaya meminjam heli perusahaan, tapi tidak diizinkan," kata dia.

Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan aparat kesulitan mengejar kelompok penyerang karena gerombolan mereka bukan kelompok tunggal. "Jumlahnya tidak satu dua orang, atau bukan orang-orang itu saja." Untuk mengatasi kelompok semacam itu, kata Julian, "Memang harus ada penanganan khusus."

● TJAHJONO EP | CUNDING LEVI | MUNAWWAROH | FRANSISCO ROSARIANS

Buruh Freeport Tak Takut Ultimatum Polisi

TIMIKA — Ketua Bidang Organisasi Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, Virgo Solossa, mengatakan para pekerja akan tetap mogok serta menduduki Mile 27 dan Mile 28. Mereka tak peduli ultimatum kepolisian agar pekerja membuka blokade jalan. "Beri kami waktu satu minggu dan jangan desak kami," kata Virgo kepada *Tempo* tadi malam.

Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Deny Edward Siregar kemarin menerbitkan surat peringatan agar pekerja membuka blokade jalan. Deny menyebutkan sejumlah pelanggaran buruh Freeport dalam aksi mogok sejak 10 Oktober lalu. Pekerja sengaja memindahkan aksi mogok dari Check Point (CP) Utara Lima, Kuala Kencana, ke tiga lokasi, yaitu Gorong-gorong, Mile 27 area PT Freeport, dan CP-1 Mile 28 area PT Freeport.

Mogok kerja yang berujung pada unjuk rasa itu dinilai melanggar kesepakatan waktu mogok. Apalagi pekerja melanjutkan aksinya dengan memblokade jalan menuju PT Freeport. Akibatnya, kawasan vital Freeport terganggu, termasuk karyawan yang hendak bekerja terhalangi oleh aksi.

Dampak lain aksi pekerja yang menuntut kenaikan upah ini adalah suplai bahan makanan, bahan bakar minyak, dan semua kebutuhan perusahaan terganggu. Hampir seminggu kegiatan pertambangan lumpuh. "Polisi memberi waktu 1 x 24 jam. Apabila tidak diindahkan, kepolisian akan bertindak tegas," kata Deny dalam surat ultimatumnya.

Kondisi Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, kemarin dilaporkan mulai normal. Aktivitas penduduk, warung, dan pasar sudah kembali menggeliat. "Menuju normal seperti biasa," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Wachyono.

Meski demikian, Bandar Udara Mulia belum beroperasi. Bandara ditutup sejak Senin pekan lalu pasca-penyerangan dan penembakan oleh orang tak dikenal terhadap Kepala Kepolisian Sektor Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Octavianus Awes. Hari berikutnya, kelompok sipil bersenjata menembaki posko Brigade Mobil di Mulia.

● TJAHJONO EP | RINA WIDIASTUTI

Amnesty: Tindaklanjuti Temuan Komnas di Papua

Temuan Komnas HAM telah dilaporkan kepada Presiden.

JAYAPURA — Amnesty International meminta pemerintah Indonesia segera bertindak atas temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Indonesia di Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Kota Jayapura, Papua, pada 19 Oktober lalu.

Dalam siaran persnya, Amnesty International mengatakan tim investigasi Komnas HAM telah menemukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan pasukan keamanan Indonesia, termasuk memulai tembakan kepada peserta KRP III.

"Komnas HAM sendiri telah meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelidiki pelanggaran HAM ini," kata Josef Roy Benedict, anggota Amnesty International untuk Kampanye Indonesia dan Timor Leste, melalui surat elektroniknya kemarin.

Menurut Josef, temuan Komnas HAM ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden pada 7 November lalu, hanya kantor Kepresidenan Indonesia menolak temuan itu dengan alasan polisi masih menangani kasus tersebut.

"Pihak berwenang Indonesia harus melakukan investigasi independen, menyeluruh, dan efektif atas temuan ini," kata Josef. Jika menemukan pasukan keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, kata dia, pemerintah harus bertanggung jawab.

Apalagi sebelumnya, kata dia, Komnas HAM menemukan tiga orang tewas akibat luka tembak di tubuh mereka. Hanya, Komnas HAM tak dapat mengkonfirmasi apakah mereka dibunuh oleh polisi atau militer.

"Komnas HAM juga telah meminta penyidik forensik memeriksa peluru yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Selain tiga korban tewas itu, Komnas HAM menemukan ada 96 peserta kongres yang diintimidasi, ditendang, atau dipukuli oleh polisi," kata Josef.

Sementara itu, Markas Besar Kepolisian RI menambah anggota tim penyidik yang bertugas melakukan investigasi kasus penembakan di kawasan penambangan PT Freeport Indonesia, Timika, Papua. Penambahan personel penyidik ini karena intensitas penembakan terus terjadi.

"Tadi malam ada satu tim penyidik dari Direktorat I Bareskrim yang berangkat ke Papua untuk membantu investigasi kasus penembakan. Ada sekitar empat orang," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution kemarin.

Saud mengatakan pihaknya belum bisa membeberkan keterkaitan di antara beberapa peristiwa di Papua akhir-akhir ini, mulai kisruh Kongres Rakyat Papua III hingga kasus penembakan di area Freeport. "Masih kami kembangkan dari semua lini. Tunggu sampai tim selesai melakukan investigasi." ● CUNDING LEVI | ISHOMUDDIN

Presiden Kerahkan Menteri ke Papua

Negosiasi kontrak Freeport harus dipimpin Presiden.

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan para pembantunya turun langsung ke Papua untuk menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi di sana. "Saya meminta kepada menteri koordinator, menteri terkait, dan Kepala UP4B berkonsultasi dengan pemerintah Papua dan masyarakat," ujarnya di Istana Negara kemarin.

Tak hanya itu, para menteri diminta memahami masalah dan mencari solusi. Sebab, penyelesaian dengan mendatangi Papua sangat berbeda dibandingkan dengan hanya menerima laporan di Jakarta. "Di sana bisa membahas langsung dengan tokoh agama dan adat."

Masalah di Papua tidak hanya menyangkut politik dan keamanan, tapi juga perburuhan. Seperti diketahui, sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia sampai kini masih mogok kerja dan memblokade pintu masuk area tambang. Mereka menuntut kenaikan upah. Negosiasi yang dilakukan belum membuahkan kesepakatan.

Menurut Yudhoyono, penyelesaian masalah Papua menyangkut tiga pilar. Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam arti tegaknya kedaulatan negara di wilayah itu; kedua, otonomi khusus; dan ketiga, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat tidak seperti biasanya.

Untuk menjalankan tiga pilar tersebut, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Unit ini untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang baik di tingkat pusat dan daerah.

Presiden meminta agar hukum ditegakkan secara tegas, adil, dan proporsional. Khusus aspek ekonomi, pemerintah memberi prioritas pembangunan di kedua provinsi itu. Sedangkan untuk aspek kesejahteraan rakyat, Presiden menginstruksikan agar sengketa perburuhan Freeport segera diselesaikan. Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi dan mediasi untuk menemukan solusi.

Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia, Herman Afif Kusumo, meminta Presiden turun langsung meminta negosiasi ulang kontrak karya PT Freeport Indonesia. "Dibantu Menteri Jero Wacik," ujarnya.

Sebab, perusahaan tambang itu menjalin kontrak menggunakan sistem usaha dengan pemerintah.

Ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah Amerika Serikat bisa mengaudit dana keamanan Freeport. Berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) atau Undang-Undang Praktek Korupsi di luar negeri, pemberian dana keamanan dapat saja dikategorikan sebagai praktek korupsi. "Sanksinya mungkin saja berupa denda kepada Freeport McMoran."

Tapi otoritas di negara itu tidak berwenang memberikan sanksi kepada Kepolisian RI. Hal ini karena undang-undang tersebut tidak berlaku bagi negara lain.

Untuk itu, Hikmahanto menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dana keamanan Freeport. "Sebab jika di Amerika nantinya dinyatakan itu praktek korupsi, sedangkan Indonesia menyatakan melanggar aturan, hal ini tentu jadi perhatian."

● ALI NY | MUNAWWAROH | GUSTIDHA BUDIARTIE | RUSMAN PARAQBUEQ

Separatis Papua Diajak Berdialog

JAKARTA—Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Letnan Jenderal (Purnawirawan) Bambang Darmono, menyatakan siap berdialog dengan berbagai kelompok di Papua, termasuk dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Kepada siapa pun kami harus berdialog, misalnya dengan teman-teman OPM, mengapa tidak," ujarnya setelah rapat di Istana Negara kemarin.

Menurut Bambang, unitnya akan melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah daerah, para tokoh, dan masyarakat untuk membangun Papua dan Papua Barat bersama-sama. "Kami harus duduk bareng, bicara. Yang jelas pendekatannya kesejahteraan."

Untuk menjalankan tugas, unitnya mencanangkan visi khusus: "Mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang bermartabat dan bangga menjadi bagian integral bangsa Indonesia." Dia yakin, melalui visi ini kepercayaan masyarakat Papua dapat dikembalikan.

Perihal percepatan pembangunan di Papua, pemerintah akan mempercepat pengembangan akses informasi di wilayah itu. "Papua menjadi prioritas kami untuk telekomunikasi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Basuki Jusuf Iskandar .

Saat ini PT Telkom Tbk sudah menyatakan kesediaannya mengembangkan akses telekomunikasi di Papua. Sebelumnya, pemerintah berharap konsorsium Palapa Ring mengembangkan jaringan sampai ke wilayah Indonesia timur. Namun konsorsium menolaknya.

Pengembangan telekomunikasi di Papua akan disesuaikan dengan Rencana Besar Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Melalui program ini pemerintah akan menggelontorkan sejumlah dana ke operator yang bersedia masuk ke sana sebagai stimulus. ● ALI NY | MUNAWWAROH | YOHANES SEO

Amerika Serikat Cermati Masalah HAM di Papua

Percepat pembangunan dan kesejahteraan.

HAWAII — Masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua mendapat sorotan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton kemarin di Hawaii menyuarakan alarm soal kondisi hak-hak asasi manusia di sana. Ia menyerukan dilakukannya dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat di kawasan tersebut.

Hillary menyatakan Amerika prihatin terhadap insiden kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. "Ada kebutuhan untuk melanjutkan dialog dan reformasi politik dalam rangka memenuhi kebutuhan sah rakyat Papua, dan kami akan meningkatkan lagi secara langsung serta mendorong jenis pendekatan itu," Hillary menanggapi pertanyaan mahasiswa setelah berpidato di East-West Center di Hawaii, seperti dikutip kanal *MSN*.

Pada bagian lain, Hillary menggambarkan Indonesia dan India sebagai dua negara paling dinamis dan kekuatan demokratik yang signifikan di dunia. Dia bersama Presiden Barack Obama pekan depan akan ke Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur.

Kekerasan di Papua pecah ketika sejumlah penduduk di sana menggelar Kongres Rakyat Papua II di Abepura, Jayapura. Diduga ada penyerbuan aparat keamanan hingga mengakibatkan korban meninggal.

Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah tidak meremehkan persoalan kekerasan di Papua. Pemerintah harus lebih proaktif mencari solusi segala permasalahan di sana. "Pemerintah pusat segera membangun dialog dengan tokoh-tokoh Papua," ujar Tjahjo di gedung DPR kemarin.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, sudah bukan saatnya lagi pemerintah mengandalkan operasi intelijen dan keamanan yang melebihi porsi. Cara itu justru memicu munculnya masalah di Papua. "Karena apa pun masalah kesejahteraan yang harus diutamakan."

Pemerintah, seperti disebutkan Wakil Presiden Boediono, menepis sinyalemen itu. Di masa mendatang, melalui konsep dari Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), solusi pemerintah tak hanya melalui pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan atau puskesmas.

"Yang kita inginkan supaya lebih membumi kesejahteraan dalam arti lebih luas. Tentu pelayanan yang memberikan kemudahan secara fisik, tapi juga untuk mendapatkan rasa kesejahteraan itu melalui keamanan, keadilan. Semua harus masuk dalam lingkup makna dari upaya kesejahteraan," ucap Boediono dalam konferensi pers di kantornya kemarin.

Menurut Boediono, UP4B dibentuk untuk menyempurnakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk melalui kebijakan otonomi khusus. Pemerintah telah mengevaluasi bahwa ada beberapa aspek yang kurang, yaitu koordinasi. Karena itu, koordinasi akan ditingkatkan. ● MUNAWWAROH | MAHARDIKA SATRIA HADI | DWI A

Warga Jayapura Berdemo Tuntut Referendum

JAYAPURA — Ribuan orang berunjuk rasa di Jayapura, Papua, menuntut referendum kemarin. Mereka berjalan dari Abepura menuju Taman Imbi di Jayapura, yang berjarak sekitar 10 kilometer. "Perjuangan tak pernah mati. Hanya satu kata, terus lawan," kata Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kemarin siang.

Warga membawa puluhan poster, spanduk bertulisan referendum, bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga pamflet bergambar Bintang Kejora. Aksi tersebut dikawal anggota kepolisian bersenjata lengkap. "Kita berharap tidak anarkis," kata Kepala Kepolisian Sektor Abepura Komisaris Arie Sirait.

Akibat unjuk rasa itu, lalu lintas dari Jayapura ke Sentani macet total. Puluhan toko dan kios tutup. Pengunjuk rasa juga meneriakkan yel-yel "Papua", disambut kata "merdeka". "Kami ajak semua bergabung. Kita minta referendum, bukan dialog," kata Koordinator Umum KNPB wilayah Jayapura, Victor Kogoya.

Setiba di Jayapura sekitar pukul 15.30 WIT, pendemo langsung mengelilingi Taman Imbi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua. Selain menuntut referendum, mereka meminta PT Freeport Indonesia ditutup dan menuntut audit menyeluruh atas kejahatan hak asasi dan lingkungan di Papua.

Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Alfred Papare mengatakan unjuk rasa menuntut referendum itu tidak masuk kategori makar. "Kalau makar, pastilah kita tindak," ujarnya tadi malam.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto juga menganggap demo itu hal biasa. "Yang enggak boleh kan bakar-bakar toko, anarkis, merusak, terus memproklamirkan kemerdekaan dan memisahkan diri."

Sebelumnya, pada pertengahan Oktober 2011, ratusan orang juga berdemo di depan kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura, menuntut merdeka. Demo menentang pemerintah dan meminta referendum secara besar-besaran juga terjadi pada Juni 2010.

Forum Akademisi untuk Papua Damai meminta pemerintah segera melakukan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Dialog dilakukan secara terbuka dengan mekanisme yang dapat diterima pemerintah dan masyarakat Papua. "Pemerintah harus menunjukkan "*willingness*" menyelesaikan kasus Papua dengan segera memulai mekanisme dialog," kata ketua forum itu, Otto Syamsuddin Ishak, kepada pers kemarin. ● JERRY OMONA | ENI SAENI | IRA GUSLINA

30 Polisi Papua Diperiksa

JAYAPURA — Kepolisian Daerah Papua memeriksa lebih dari 30 anggotanya pasca-kericuhan di Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berlangsung di Lapangan Zakheus Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, 19 Oktober silam.

Juru bicara Polda Papua, Komisaris Besar Wachyono, mengatakan Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan juga turut diperiksa bersama Kepala Bagian Operasi Komisaris Junoto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Ajun Komisaris Ridho Purba, dan Kepala Polsek Kota Abepura Komisaris Arie S Sirait.

"Sudah kami lakukan pemeriksaan internal itu," ujarnya. Dia mengatakan, yang jelas, selama berjaga di KRP III, polisi hanya dibekali peluru karet dan peluru hampa. "Bisa dibuktikan dengan pengeluaran peluru karet dari gudang Polda Papua," katanya kepada wartawan kemarin.

Menurut Wachyono, dari pemeriksaan internal itu belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. "Ke-30 orang itu masih dimintai keterangan sebagai saksi. Kami juga masih menunggu hasil uji balistik dan labfor yang akan didatangkan dari Jakarta," katanya.

Sementara itu, tiga berkas kasus makar dalam Kongres Rakyat Papua itu sudah diserahkan oleh polisi kepada Kejaksaan Tinggi Papua. Menurut Wachyono, ada lima tersangka makar dan satu tersangka pembawa senjata tajam. Wachyono juga mengakui bahwa enam tersangka tersebut tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. "Itu hak dari para tersangka," ujarnya.

Di tempat terpisah, tim pengacara enam tersangka mengungkapkan bahwa kliennya siap disidangkan. "Mereka siap untuk diproses hukum, dengan segala konsekuensinya. Menurut mereka, mereka tidak salah dalam hal apa pun termasuk dengan tuduhan makar," kata Olga Hamadi, yang juga Koordinator Kontras Papua, setelah mengunjungi para tersangka di Mapolda Papua kemarin.

● CUNDING LEVI



Massa dari Solidaritas Anak Bangsa untuk Kemanusiaan menggelar unjuk rasa damai di Bundaran UGM, Yogyakarta, Senin malam lalu. Massa yang berasal dari berbagai kelompok mahasiswa daerah ini menuntut pemerintah menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi di Papua dan menuntut pemerintah menutup PT Freeport.

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Diintimidasi

"Saya ditanya seorang anggota jemaat, 'Kamu orang Papua yang memilih merdeka, ya?'"

YOGYAKARTA — Intimidasi terhadap mahasiswa asal Papua terus berlanjut setelah muncul pesan pendek (SMS) bernada yang sama. Akibatnya, sejumlah mahasiswa Papua meminta perlindungan dengan mendatangi Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin. "Kami datang kepada Sultan untuk memastikan keamanan mahasiswa Papua di DIY," kata perwakilan Lembaga Intelektual Tanah Papua, Gerard Bidana, kemarin.

Ada empat mahasiswa Papua di Yogyakarta diintimidasi secara verbal. Tiga di antaranya terjadi di Kota Yogyakarta dan satu di Gunungkidul. Sagrim Hamah, mahasiswa Papua, mengaku diintimidasi saat sedang mengikuti kebaktian di Gereja Emil di Bumijo, Ahad pagi pekan lalu. "Saya ditanya seorang anggota jemaat, 'Kamu orang Papua yang memilih merdeka, ya?'" ujar Sagrim. Dia mengaku tak mengenal anggota jemaat itu. "Saya hanya bilang, manusia diciptakan Tuhan bukan untuk dijajah. Kemerdekaan itu diberikan Tuhan."

Intimidasi juga dialami Markus Colossa di warung di Jalan Parangtritis. Menurut Sagrim, Markus didatangi orang tak dikenal yang menanyakan apakah ia orang Papua yang ingin merdeka. "Kalau ingin merdeka, kamu bisa diperlakukan tidak seperti manusia, tapi disayat seperti binatang," kata Sagrim, menirukan cerita Markus. Di Wonosari, Gunungkidul, seorang mahasiswi Papua yang kuliah di akademi perawat juga diintimidasi. Dia diminta seseorang menunjukkan letak asrama mahasiswi Papua dan ditanya soal identitasnya.

Di Yogya, ada sekitar 7.500 mahasiswa asal Papua. Mereka sedang menempuh pendidikan S-1, S-2, dan S-3. Menurut Gerard Bidana, sebagian kecil mahasiswa sudah pulang ke Papua. "Mereka resah dengan adanya isu penggeledahan asrama Papua yang dilakukan orang tak dikenal di beberapa daerah, seperti di Jakarta," katanya. Menurut Gerard, mereka tengah mengupayakan meminta perlindungan aparat keamanan. "Saya tetap bertahan di Yogyakarta untuk memperoleh kepastian jaminan keamanan itu."

Kehadiran sejumlah mahasiswa Papua di kompleks kantor Gubernur DIY itu didampingi Ketua Sekretaris Bersama Keistimewaan Widihasto Wasana Putra. Menurut Widihasto, kehadirannya sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi Papua. "Sekaligus bentuk bela rasa terhadap sesama warga NKRI," katanya.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sigit Sapto Raharjo, yang menemui mahasiswa asal Papua itu, akan mengkoordinasikan pengamanan dengan aparat keamanan pemerintah di kabupaten dan kota. "Mereka menyatakan orang yang mengintimidasi bukan orang Yogyakarta," kata Sigit.

Adapun Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengaku belum menerima laporan tentang permintaan perlindungan mahasiswa Papua itu. Tapi Sultan menegaskan bahwa ia akan memberi perlindungan. "Karena mahasiswa Papua itu masyarakat DIY, jadi wajib dan berhak dilindungi," katanya. Sultan mengimbau semua pihak agar tidak mengintimidasi. "Belum tentu mereka (mahasiswa Papua) tahu dan akan mendukung (kemerdekaan Papua)."

Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjamin keselamatan mahasiswa dan warga Papua yang tinggal di Yogyakarta. "Pemerintah berkewajiban menjamin dan memberikan rasa aman kepada warga negaranya," tulis pesan pendek Wali Kota Herry Zudianto kepada *Tempo* kemarin.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggelar aksi solidaritas terhadap warga Papua di Bundaran Universitas Gadjah Mada pada Senin malam lalu. Mereka menuntut pemerintah menghentikan pelanggaran hak asasi dan kekerasan di Papua. Mereka juga berencana menggelar pameran fotografi di kampus Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa di Timoho tentang Papua pada 19 November ini. ● PITO AGUSTIN RUDIANA | ANANG ZAKARIA | PRIBADI WICAKSONO

Pengiriman Pasukan ke Papua Dikritik

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, mengatakan pengiriman pasukan TNI dan aparat keamanan ke Papua menyalahi aturan.

Menurut dia, keputusan pengiriman pasukan ternyata dibuat oleh komando daerah militer atau kepolisian daerah di tingkat provinsi. "Seharusnya pengiriman pasukan mendapat persetujuan DPR," kata politikus PDI Perjuangan ini kemarin di gedung DPR, seusai rapat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta masyarakat adat Papua.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pengerahan pasukan harus merupakan hasil keputusan politik parlemen. Maka, Komisi Pertahanan berencana memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan Satrio Widjojo, pernah mempersoalkan kehadiran pasukan TNI dalam insiden di Abepura, Papua, 19 Oktober lalu. Menurut dia, Pasal 17 dan 18 Undang-Undang TNI menyatakan pengerahan aparat TNI harus mendapat perintah dari presiden dan disetujui DPR. "Presiden tak pernah menyuruh pengerahan pasukan," ujarnya, 4 November lalu.

Insiden itu menewaskan tiga peserta Kongres Rakyat Papua III. Pemerintah menyebut kongres itu tindakan makar. Panglima Daerah Militer XVII Cenderawasih, Mayor Jenderal Efri Triassunu, membantah TNI terlibat. Menurut dia, TNI tak berada di lokasi kejadian. "Kami berada di ring dua. Yang di lokasi kongres itu polisi," ujarnya, 5 November lalu. ● EDI FAISOL

INTIMIDASI MAHASISWA PAPUA

Sultan Minta Mahasiswa Papua Tak Pulang Kampung

Mahasiswa Papua mendirikan pos pengaduan intimidasi.

YOGYAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X meminta mahasiswa asal Papua di Yogyakarta tidak pulang ke Papua, meski sejumlah intimidasi mereka alami. "Adik-adik ini masih muda. Kalau pulang, malah kena *drop out*," katanya. Bagi Sultan, intimidasi tersebut adalah bagian dari tantangan hidup. "Saya juga biasa diteror lewat SMS (*short message service*)," ujarnya kepada sekitar 20 mahasiswa asal Papua yang menemuinya di kantor Gubernur, Kepatihan, kemarin.

Beberapa mahasiswa yang datang mengenakan hiasan kepala khas Papua, yakni bulu burung cenderawasih. Mereka meminta kejelasan tentang perlindungan yang akan diberikan Sultan sehubungan dengan intimidasi yang mereka alami. "Kalau tidak, banyak di antara kami yang akan melakukan eksodus (pulang ke Papua) karena merasa tak aman di Yogyakarta," ujar Koordinator Mahasiswa Papua di Yogyakarta, Sagrim Hamah, setelah bertemu dengan Sultan kemarin.

Sultan kembali menegaskan, mahasiswa Papua yang kuliah di Yogyakarta adalah masyarakat Yogyakarta juga. Maka mereka berhak mendapat perlindungan, dan pemerintah daerah wajib memberi perlindungan.

Permintaan perlindungan tidak hanya disampaikan kepada mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta. Tapi semua mahasiswa se-Jawa-Bali pun diharapkan mendapatkan perlindungan dari tiap pemerintah daerah. "Sudah 20 persen mahasiswa Papua di Jawa-Bali yang pulang," kata Sagrim, mahasiswa teknik arsitektur Universitas Widya Mataram.

Menurut Sagrim, intimidasi yang mereka alami berupa kiriman pesan pendek lewat telepon seluler dan secara verbal. Sudah ada empat mahasiswa Papua di Yogyakarta yang diintimidasi, yakni tiga di Kota Yogyakarta dan seorang di Gunungkidul. "Ketidaknyamanan ini kami terima pasca-Kongres Papua III di Jayapura lalu," kata Sagrim, yang sedang menunggu diwisuda.

Langkah lain yang akan dilakukan mahasiswa Papua adalah membentuk pos pengaduan yang akan menerima pengaduan dari mahasiswa Papua yang diintimidasi. "Nanti kami yang akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa Papua dan pemerintah provinsi kalau terjadi sesuatu," kata Kepala Badan Kesatuan, Kebangsaan, dan Perlindungan Masyarakat DIY Murprih Antoro.

Sekitar 10 petugas intel dari kepolisian dan TNI tampak di bangsal Kepatihan saat pertemuan tertutup mahasiswa Papua dengan Sultan berlangsung. Sekitar 20 polisi juga berjaga di kompleks Kepatihan.

Sementara itu, Wakil Rektor III Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta Jozef Hehanusa menjelaskan, dari sekitar 7.300 mahasiswa Papua di Yogyakarta, sebagian besar mahasiswa asal Papua kuliah di perguruan tinggi swasta, seperti di Universitas Widya Mataram, yang merupakan milik Keraton Yogyakarta, dan UKDW. Di universitas ini, ada 100 mahasiswa asal Papua. Jozef menyatakan tak bisa berbuat banyak soal intimidasi itu. "Perlu ada dukungan dari pemerintah daerah," katanya.

● PITO AGUSTIN RUDIANA

Penembakan Terus Terjadi di Papua

Komnas HAM menyebutkan ada penembakan dengan delapan korban tewas.

TIMIKA — Kelompok bersenjata terus menebar teror di Papua. Kemarin dikabarkan terjadi penembakan di Mile 51 Mimika. Wakil Kepala Kepolisian Resor Mimika Komisaris Mada Indra Laksanta mengatakan penembakan terjadi sekitar pukul 12.24 waktu Papua. "Korban penembakan adalah karyawan KPI (PT Kuala Pelabuhan Indonesia) atas nama Makkasaung, pengemudi trailer bernomor lambung 02-663," katanya.

Menurut Mada, Makkasaung menderita luka di leher kanan akibat serpihan kaca. Penembakan dilakukan gerombolan bersenjata ketika mobil trailer yang dikemudikan Makkasaung hendak menuju Tembagapura. "Sampai di Mile 51 ditembaki," ujarnya. Selain itu, kata Mada, mobil patroli Route Patrol 29 yang dikemudikan oleh Meidy Pungus, yang kebetulan lewat, ditembaki.

Menurut sumber *Tempo*, karyawan PT KPI, ketika penembakan terjadi, sejumlah pekerja sedang mengerjakan pipa solar di Mile 50. "Begitu mendengar tembakan, kami berlarian menyelamatkan diri," katanya.

Penembakan warga sipil juga dikabarkan terjadi di lokasi tambang emas tradisional di Degeuwo, Kabupaten Paniai. Menurut Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua Matius Murib, penembakan itu menyebabkan delapan warga sipil tewas. "Benar, mereka tertembak dan meninggal. Sampai hari ini belum diketahui motif penembakan atau skenario bagaimana mereka tewas," katanya kemarin.

Mereka yang terkena timah panas di antaranya Matias Tenouye, 30 tahun, dengan peluru menembus paha kanan. Simon Adii, 35 tahun, tertembak di bagian rusuk; Petrus Gobay (40) tertembak di dada; Yoel Ogetay (30) tertembak di kepala; Benyamin Gobay (25) tertembak di dada; Marius Maday (35) tertembak di dada; Matias Anoka (40) tertembak di dada; dan Yus Pigome (50) tertembak di dada.

Insiden tersebut terjadi pada Ahad lalu, sekitar pukul 10.00 WIT. "Kami masih mendalami alasan penembakan dan kejadian sebenarnya. Beberapa orang sudah memberi keterangan, tapi skenarionya masih simpang-siur," ujar Matius.

Yang pasti, kata dia, warga sipil tersebut ditembak ketika sedang mendulang emas di Kali Degeuwo. Setelah kejadian itu, puluhan warga mengungsi. "Ada yang mengalami trauma dan mengungsi," ucap Matius.

Saat dimintai konfirmasi, juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wachyono, mengatakan kabar itu bohong. "Saya sudah perintahkan anggota di lapangan mengecek delapan jenazah di semua rumah sakit dan puskesmas yang berada di sekitar Paniai, yakni di Waghete-Dogiyai, Nabire, dan juga Paniai. Tak ditemukan satu pun jenazah korban penembakan itu," katanya kepada wartawan kemarin.

Kronologi kejadian di lapangan, menurut Wachyono, pada Sabtu lalu, sekitar pukul 07.30, telah terjadi kontak senjata antara polisi dan kelompok bersenjata di penambangan emas Tayaga, Baya Biru, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai. "Kelompok itu dipimpin oleh Salmon Yogi. Kontak senjata terjadi karena kelompok sipil bersenjata hendak menyerang area pendulangan dan polisi hanya berupaya menghalau," dia menguraikan. Dari kontak senjata itu, satu tewas dan hanyut di Sungai Degeuwo. Jenazahnya belum ditemukan.

● TJAHYONO | JERRY OMONA | CUNDING LEVI

KILAS

KWI Desak Pemerintah Kurangi TNI-Polisi di Papua

YOGYAKARTA — Sidang tahunan Konferensi Waligereja Indonesia memberikan pernyataan keras tentang kondisi keamanan di Papua. Mereka meminta pemerintah menghentikan kekerasan di Papua dan lebih mengutamakan dialog dengan masyarakat Papua.

Pertemuan para pemimpin tertinggi agama Katolik di daerah ini juga menyerukan agar pemerintah mengurangi anggota pasukan keamanan TNI dan polisi dari Papua. "Pasukan terlalu banyak sehingga sikap dan perilaku mereka lebih sering meresahkan masyarakat," kata Ketua Komisi Hubungan Antar-Agama KWI Antonius Benny Susetyo, Pr, di Yogyakarta kemarin.

● BERNADA RURIT

Pasca-Penembakan, Warga Takut

JAYAPURA — Warga Tagapige, Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua, masih merasa ketakutan untuk keluar dari rumah setelah kasus penembakan terhadap warga sipil. "Warga takut dituduh OPM," kata Elias Petege, Ketua Solidaritas Rakyat Papua Anti-Militerisme, kemarin.

Menurut Elias, penembakan yang menewaskan Matias Tenouye, 32 tahun, yang terjadi Minggu lalu, diduga dilakukan oleh aparat. Elias juga membantah informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, yang menyebutkan korban tewas delapan orang.

Elias memaparkan penembakan itu berawal ketika Matias, yang saat itu bersama tujuh warga Kampung Tagapige lainnya, dicurigai sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Personel Brigade Mobil di Bayabiru segera memperketat penjagaan di Jembatan Gantung, Kali Degeuwo, setelah mendapat laporan dari pengusaha emas berinisial B. Matias langsung diberondong tembakan hingga tewas dan terbawa arus kali. Sampai saat ini jenazahnya belum ditemukan. "Kami meminta kepolisian bertanggung jawab. Kami juga mendesak aparat segera ditarik dari Degeuwo, dan pemerintah segera menutup tambang emas tradisional agar tidak lagi menimbulkan korban," ujar Elias.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Wachyono membantah tuduhan Elias. Benar terjadi penembakan, tapi sasarannya kelompok bersenjata, dan seorang tewas. "Jadi bukan menembak warga sipil, tapi pelaku penyerangan," ujarnya. ● JERRY OMONA

IKLAN

KONTRAK KARYA FREEPORT BUKAN LEX SPECIALIS

Perusahaan tambang asal Amerika itu bersedia berunding dengan pemerintah.

JAKARTA — Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berpendapat renegosiasi kontrak karya bukanlah sebuah pilihan bagi perusahaan tambang, melainkan keharusan.

Selama ini Freeport dan perusahaan tambang asing selalu berlindung di balik asas *lex specialis*. Artinya, kontrak yang telah diikat tidak dapat diubah sekalipun ada pembaruan peraturan perundang-undangan.

"Doktrin itu tidak dapat diberlakukan pada kontrak karya," kata Hikmahanto dalam diskusi mengenai kontrak karya Freeport di gedung Dewan Perwakilan Daerah kemarin.

Menurut dia, doktrin hukum *lex specialis* (berlaku khusus) hanya berlaku pada produk hukum yang sama dan mengatur hal yang sama.

Sedangkan bagi kontrak bisnis, apabila berhadapan dengan undang-undang, maka undang-undanglah yang harus dimenangkan. Prinsipnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Kontrak karya, meski ditandatangani oleh pemerintah, seharusnya batal apabila bertentangan dengan undang-undang," kata Hikmahanto.

Lagi pula, posisi pemerintah saat menjalin kontrak dengan Freeport adalah sebagai subyek hukum perdata, bukan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan.

Walhasil, sebagai subyek hukum perdata, pemerintah berhak melawan atau mengubah isi kontrak karya. "Jangan sampai undang-undang dan konstitusi kita dikalahkan oleh kontrak."

Hal lainnya, renegosiasi kontrak karya Freeport diperlukan mengingat kondisi negara sekarang jauh berbeda dengan kondisi awal kontrak dibuat pada 1967.

Penggiat Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara, mendesak pemerintah mengamendemen Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan Modal Asing. Tujuannya, mewajibkan Freeport melepas saham kepada pihak nasional.

"Dengan begitu, pemerintah bisa membeli saham Freeport secara bertahap hingga 51 persen," kata Marwan dalam seminar yang sama.

Menanggapi proses renegosiasi yang telah berlangsung sejak 2010, juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, berkali-kali mengatakan perusahaan tambang emas itu bersedia merundingkan ulang kontrak karya.

Sayangnya, dia tidak bisa memastikan apakah perusahaan akan memenuhi ketentuan kenaikan royalti emas dari 1 persen menjadi 3,75 persen dari harga jual. ● GUSTIDHA BUDIARTIE | MUHAMMAD TAUFIK | EFRI

Status Renegosiasi

✓ SETUJU
PT Koba Tin
PT Karimun Granite
PT Gorontalo Sejahtera
PT Agincourt Resources
PT Iriana Mutiara Mining
PT Tambang Mas Sable
PT Avocet Bolaan Mongondow
PT Tambang Mas Sangihe
PT Ensbury Kalteng Mining
PT Kumamba Mining
PT Gorontalo Minerals

✓ SETUJU SEBAGIAN
PT Internasional Nickel Indonesia
PT Indo Muro Kencana
PT Newmont Nusa Tenggara
PT Kasongan Bumi Kencana
PT Natarang Mining
PT Mearest Soputan Mining
PT Paragon Perdana MIning
PT Nusa Halmahera Minerals
PT Kalimantan Surya Kencana
PT Citra Palu Minerals
PT Tambang Tondano Nusajaya
PT Woyla Aceh Mineral
PT Iriana Mutiara Idenburg
PT Dairi Prima Mineral
PT Gag Nikel

✖ TIDAK SETUJU
PT Freeport Indonesia Co
PT Irja Eastern Minerals Co
PT Nabire Bakti Mining
PT Pasifik Masao



Enam Topik Renegosiasi Kontrak

1. LUAS WILAYAH KERJA
Pemerintah: Luas wilayah tambang mineral maksimal 25.000 hektare, dan batu bara 15.000 hektare.
Pengusaha: Lebih luas lagi.
Hasil Renegosiasi: Luas wilayah didasarkan pada hasil kajian rencana kerja jangka panjang badan usaha.

2. PERPANJANGAN KONTRAK
Pemerintah: Jangka waktu Izin Usaha Operasi Produksi mineral diperpanjang menjadi 20 tahun, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.
Pengusaha: Izin usaha dan jangka waktu diberikan oleh pemerintah pusat, untuk menghindari tumpang-tindih.
Hasil Renegosiasi: Izin diberikan oleh pemerintah pusat, berkoordinasi dengan daerah.

3. PENERIMAAN NEGARA
Pemerintah: Royalti mineral naik mulai dari 3,75 persen.
Pengusaha: Royalti berimbang dengan kewajiban lain.
Hasil Renegosiasi: Pemerintah tetap berpedoman pada PP No. 45 Tahun 2003.

4. KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
Pemerintah: Pengolahan dan pemurnian di dalam negeri maksimal 2014.
Pengusaha: Sepakat, namun jangka waktu diperpanjang.
Hasil Renegosiasi: Pemerintah akan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian.

5. KEWAJIBAN DIVESTASI
Pemerintah: Divestasi bertahap sampai 51 persen.
Pengusaha: Ada kontraktor yang meminta kepemilikan nasional cukup 20 persen.
Hasil Renegosiasi: Pemerintah tetap pada posisinya.

6. KEWAJIBAN PENGGUNAAN JASA DALAM NEGERI
Pemerintah: Pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal.
Pengusaha: Sebagian besar perusahaan jasa nasional belum kompeten.
Hasil Renegosiasi: Pemerintah tetap pada posisinya.

Pekerja Freeport Tewas, Tiga Polisi Terluka

TIMIKA — Suasana mencekam terus melanda kawasan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, akibat penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata. Seorang karyawan Freeport yang tengah berpatroli tewas tertembak kemarin.

Ferry Wiliam Sanyakit, anggota satuan pengamanan PT Freeport, diserang kelompok sipil bersenjata sekitar pukul 12.51 WIT. Ferry, yang mengemudikan mobil patroli, bersama tiga anggota Brigade Mobil Detasemen B Mimika dari Mile 50 hendak menuju Mile 32.

"Tapi di Mile 51 ditembaki oleh kelompok bersenjata dari arah kiri jalan. Setelah berhasil dievakuasi ke Klinik Kuala Kencana, korban akhirnya meninggal," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Mimika Komisaris Mada Indra Laksanta kemarin.

Dari hasil otopsi, tim dokter tidak dapat menemukan proyektil peluru yang merobek tengkorak korban. Salah satu dokter yang melakukan otopsi, Putu Ayu Indrasari, mengatakan serpihan peluru terlalu banyak dan kecil-kecil. "Banyak sekali dan ukurannya 1 sentimeter hingga 7 milimeter, sehingga sulit diangkat," kata Putu Ayu.

Rencananya hari ini jenazah Ferry akan disemayamkan di Kota Kuala Kencana sebelum diterbangkan ke Jayapura. Meninggalnya Ferry menambah jumlah korban tewas menjadi sembilan orang dari belasan kali penembakan dalam sebulan terakhir.

Tiga anggota Brimob yang berpatroli bersama Ferry mengalami luka-luka. Brigadir Kepala Jafar menderita luka serpihan peluru di lengan kanan, Brigadir Rumere menderita luka serpihan peluru di bagian mulut kanan, sementara Brigadir Satu Eli menderita luka di bagian hidung.

Evakuasi terhadap Ferry sempat tertahan beberapa waktu akibat kelompok bersenjata yang berada di dalam hutan terus melancarkan tembakan. Kelompok penyerang sempat mendapat perlawanan sengit dari ketiga anggota Brimob yang terluka.

Dua panser dari Detasemen Kavaleri dan sejumlah pasukan dikerahkan menuju lokasi penembakan di Mile 52. Penjagaan di gerbang Kota Kuala Kencana, Mile 32, pun diperketat. ● TJAHJONO EP

FIRMAN HIDAYAT (TEMPO)



Pembantaian Orang Utan

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur Tandya Tjahyana menunjukkan foto-foto dokumentasi pembantaian orang utan sebagai barang bukti penyidikan di kantor BKSDA Kalimantan Timur.

PERTEMUAN DENGAN OBAMA

SBY JAMIN AKUNTABILITAS SOAL PAPUA

Jangan sampai dunia tidak tahu adanya kelompok bersenjata di Papua.

NUSA DUA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dalam pertemuan itu tidak disinggung secara spesifik soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Namun Obama sempat menyampaikan harapan akan adanya akuntabilitas dalam penanganan persoalan tersebut.

Kepada Obama, Presiden Yudhoyono menegaskan menjamin akuntabilitas penanganan kasus Papua. "Saya jawab, hukum pasti akan ditegakkan. Kalau ada tentara atau polisi yang melanggar hukum dan HAM, pasti akan dibawa ke pengadilan," ujar Presiden dalam jumpa pers terakhir Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Nusa Dua, Bali, kemarin. "Jangan sampai ada yang kebal hukum."

Yudhoyono menjelaskan kepada Obama, sebagaimana tentara di negara-negara lain, Tentara Nasional Indonesia juga menghadapi situasi adanya kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka. Ketika kelompok tersebut menyerang tentara, polisi, dan pekerja, dia mengatakan, tentu saja ada upaya membela serta melindungi diri. "Mereka melaksanakan tugas, bukan melanggar HAM," ujarnya.

Meski demikian, Yudhoyono menegaskan, dalam kondisi seperti itu pun, jika memang eksesif dan melewati batas hak asasi, tetap akan dilakukan investigasi. "Terpenting, kami terbuka kepada masyarakat dunia," katanya. Presiden melanjutkan, jangan sampai masyarakat dunia tidak mengetahui adanya kelompok bersenjata di Papua, sehingga seolah-olah setiap perilaku dan tindakan TNI ditujukan kepada masyarakat sipil.

Dalam pertemuan itu, Yudhoyono menyatakan kepada Obama bahwa masalah integritas teritorial Indonesia merupakan masalah yang final dan tidak dapat diganggu gugat. "Hal ini juga telah kita sampaikan kepada Australia dalam kerangka kerja sama kedua negara," kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan Presiden Obama menghormati setiap kebijakan Presiden Yudhoyono untuk penyelesaian segala persoalan di Papua.

Faizasyah, yang hadir dalam pertemuan bilateral antara Obama dan Yudhoyono, mengungkapkan, Obama sangat menyimak penjelasan yang disampaikan Presiden Yudhoyono. Dia menambahkan, dalam kesempatan itu, Obama menegaskan kembali dukungan negaranya atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Amerika percaya penuh Indonesia tahu bagaimana jika ada tindakan aparat yang tidak sejalan dengan norma HAM," ujarnya. ● ROFIQI HASAN | ANTARA | SUKMA

Korban Penembakan Dimakamkan di Abepura

JAYAPURA — Korban penembakan oleh orang tak dikenal pada Jumat lalu di area Freeport, Timika, Papua, Ferry William Sainyakit, dimakamkan di Pemakaman Umum Kristen Tanah Hitam, Abepura, kemarin sore. "Iya, dimakamkan tadi," kata John Sainyakit, ayah korban, kemarin.

Jenazah William diterbangkan dari Timika pada Sabtu lalu dan disemayamkan di rumah duka di Jalan Bunda, Kotaraja, Jayapura. Jasad Senior Security PT Freeport itu disambut isak tangis keluarga yang menjemput. "Kami merasa kehilangan," ujar John.

William tewas terkena timah panas di wajah saat melintasi Mile 52, Jumat lalu. Saat kejadian, ia tengah mengemudikan mobil patroli yang membawa tiga penumpang anggota Brigade Mobil Detasemen B Mimika. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kuala Kencana, tapi nyawanya tak tertolong.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Wachyono mengatakan pihaknya masih terus mengejar pelaku penembakan. "Tapi soal siapa pelakunya atau apakah pelakunya orang yang sama, ya, tidak tahu. Bisa saja orang yang sama," kata dia. Soal senjata yang digunakan, Wachyono juga tidak mengetahuinya. "Saya belum tahu, ini kan masih dikejar."

Perburuan aparat terbentur oleh medan yang sulit. Wilayah Timika dikelilingi hutan lebat, yang menyebabkan pelaku dengan mudah melarikan diri. "Itulah mengapa sampai sekarang belum ditangkap. Kami masih terus melakukan penyelidikan," katanya.

Sebelumnya, Rabu pekan lalu, sebuah mobil patroli Freeport jenis LWB dengan nomor lambung RP-29 yang dikemudikan petugas keamanan Freeport, Medi Pungas, ditembaki saat berpatroli di kawasan Mile 51. Pelaku juga menyerang mobil truk kontainer dengan nomor lambung 02-663, yang dikemudikan Makasaum.

Tewasnya William menambah daftar panjang jumlah korban meninggal akibat diserang kelompok bersenjata. Setidaknya terjadi tujuh insiden penembakan di area pertambangan PT Freeport selama dua bulan terakhir. Penembakan pertama terjadi di Mile 35, 36, 37, 40, 42, dan Mile 51. Lokasi penembakan berdekatan dan berada di ruas jalan yang sama. ● JERRY OMONA

OPM Berjanji Tak Akan Kibarkan Bintang Kejora

Jurnalis merencanakan pertemuan tentara OPM dengan pemerintah.

JAYAPURA — Organisasi Papua Merdeka berjanji tak akan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember mendatang. "Iya, tidak akan. Itu sudah keputusan dari markas besar OPM. Kalau ada yang mengibarkan, itu di luar tanggung jawab kami, dan polisi bisa menangkap mereka," kata Lamber Pekikir, Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional OPM, kemarin.

Ia mengatakan, instruksi pelarangan pengibaran Bintang Kejora diambil setelah berbagai insiden yang menewaskan warga sipil di Papua. Pengibaran terakhir terjadi ketika pembukaan Kongres Papua III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, 19 Oktober 2011. Kongres tersebut dibubarkan paksa oleh kepolisian, dan tiga warga tewas dalam peristiwa itu.

OPM tetap berada pada jalurnya, yakni menunggu peninjauan ulang Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Papua. "Kami hanya menginginkan agar Resolusi 2504 diubah oleh PBB. Kalau itu sudah dilakukan, mau bikin kongres merdeka pun terserah," katanya.

Menghadapi 1 Desember mendatang, polisi mewaspadai lima daerah di Papua yang dinilai rawan, yakni Kabupaten Mimika, Manokwari, Jayapura, Puncak Jaya, dan Kota Jayapura. "Kami berharap tidak ada aksi pengibaran untuk mengantisipasi 1 Desember," kata juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wahyono, baru-baru ini.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, bekerja sama dengan Komunitas Jurnalis Papua, berencana mempertemukan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dengan pihak pemerintah Indonesia dalam pra-dialog tingkat Provinsi Papua. "Ini untuk mencari solusi berbagai persoalan di Papua," kata Ketua AJI Kota Jayapura Victor Mambor kemarin.

Menurut Victor, pihaknya meminta jaminan keamanan bagi mereka yang selama ini dianggap telah berseberangan dengan pemerintah Indonesia, seperti TPN-OPM, jika mereka dihadirkan dalam pra-dialog ini.

Dr John Manangsang, salah satu tokoh masyarakat dan juga politikus di Papua yang berencana mendatangkan kelompok TPN-OPM dalam pra-dialog tingkat provinsi itu, juga meminta jaminan keamanan bagi mereka yang diundang. "Jika betul mendapat jaminan keamanan, jelas mereka datang," kata Manangsang saat jumpa pers, Ahad malam lalu.

Dandim 1701/JPR, Letkol Inf. Rano Tilaar, mengungkapkan pada prinsipnya pihak TNI bersama kepolisian akan menjamin keselamatan pihak TPN-OPM yang akan datang pada pra-dialog tingkat Provinsi Papua itu.

"Kami bersama kepolisian siap menjamin keselamatan mereka. Apalagi melihat suatu keinginan mencari jalan keluar persoalan Papua melalui pra-dialog. Maka, menurut saya, semua pihak pasti akan mendukung. Sehingga apa yang diinginkan, agar Papua jadi tanah damai, bisa terwujud," katanya, Ahad malam lalu.

● JERRY OMONA | CUNDING LEVI

KILAS

Mantan Kapolresta Dikenai Sanksi

JAYAPURA — Mantan Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan dikenai sanksi hukuman teguran tertulis oleh Hakim Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Papua terkait kerusuhan saat Kongres Rakyat Papua III beberapa waktu lalu. "Hukuman teguran tertulis bagi seorang Pamen merupakan hukuman paling berat," kata Komisaris Besar Deddy Woeryantoro, yang memimpin sidang kemarin.

Menurut hakim, Imam melanggar disiplin karena tidak memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat. Dalam pembelaannya, Imam mengatakan anggotanya memang mengeluarkan tembakan saat pengamanan kongres tersebut, tapi tembakan ke atas." ● CUNDING LEVI

Widjadjono Partowidagdo
WAKIL MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL:

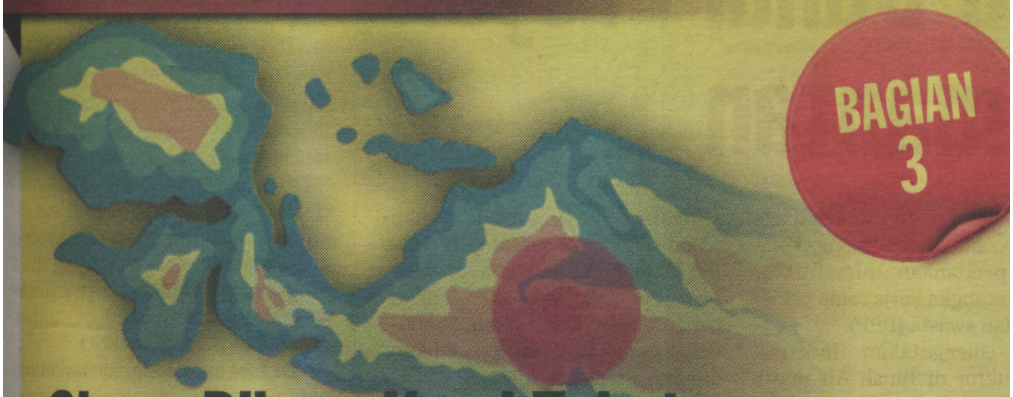

BAGIAN 3

Siapa Bilang Kami Takut

Alotnya negosiasi ulang kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia tak membuat pemerintah menyerah. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan pemerintah tetap berkukuh pada bagi hasil seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang royalti perusahaan pertambangan.

Kepada Gustidha Budiartie, Widjajono menuturkan seputar negosiasi kontrak karya dan upah buruh.



Apa pentingnya renegosiasi kontrak karya Freeport?

Kontrak itu ditandatangani zaman dulu. Kami melihat keuntungan masih lebih banyak dinikmati Freeport. Karena kontrak tak bisa diputus, kami upayakan renegosiasi. Kami meminta kepentingan nasional lebih diutamakan.

Apa saja yang diinginkan pemerintah dalam renegosiasi?

Kami menginginkan bagian pemerintah lebih pada kontrak mendatang. Selain itu, ada beberapa hal yang kami minta diperbaiki, seperti luas wilayah, pengolahan, pengoptimalan tenaga kerja dalam negeri, serta divestasi.

Wilayah mereka sangat luas. Ada lahan yang belum digarap. Jadi, kalau tidak sanggup, kami minta mereka bisa membagi lahan untuk diolah bersama perusahaan dalam negeri.

Apakah pemerintah akan mengalah jika Freeport menolak menaikkan royalti?

Tidak, ini (renegosiasi kontrak) adalah perintah undang-undang. Royalti 3,75 persen untuk emas (seperti yang diminta pemerintah) tidak besar. Kami juga meminta Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan audit di perusahaan tambang karena transparansi itu penting.

Ada kesan pemerintah takut sehingga negosiasi buntu?

Siapa yang bilang kami takut, yang *ngomong* sama Freeport dulu siapa? Kami lihat saja berapa keuntungan mereka. Pendapatan negara dari Freeport sekitar Rp 18 triliun per tahun. Bohong kalau rakyat Papua tidak mendapat apa-apa.

Apa saja yang diinginkan pemerintah dalam negosiasi ulang?

Kami ajak Freeport bukabukaan. Pokoknya, sesuai dengan undang-undang saja. Kami juga meminta agar Pajak meningkatkan auditnya di perusahaan tambang.

Bagaimana perkembangan negosiasi upah buruh Freeport?

Serikat Pekerja sudah menurunkan tawarannya menjadi US$ 4 per jam dari US$ 7,5 per jam. Sementara itu, Freeport dari US$ 2,1 per jam juga mau dinaikkan menjadi US$ 3,09. Tinggal dicari titik tengahnya saja. Sekitar 3,35 atau 3,5 saya rasa sudah aman, semua pihak sudah tenang. ●

Sinta Sirait
DIREKTUR EKSEKUTIF PT FREEPORT INDONESIA:

Kami Ingin Perundingan Dilanjutkan

Dalam dua bulan terakhir, kasus Freeport membetot perhatian publik. Ribuan buruh mogok kerja sehingga membuat pertambangan emas milik perusahaan Amerika Serikat itu lumpuh. Bukan hanya soal buruh, Freeport juga dihadapkan pada rencana renegosiasi kontrak karya pertambangan.

Dalam jawaban tertulisnya kepada *Tempo* beberapa waktu lalu, manajemen Freeport mengaku telah memberi berbagai kontribusi terhadap perekonomian di Papua. "Kami berinvestasi di bidang infrastruktur di Papua, seperti pembangkit listrik, bandar udara, dan pelabuhan," kata juru bicara Freeport, Ramdani Sirait.

Freeport, kata Ramdani, membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan lainnya. Investasi yang dikucurkan mencapai US$ 7,2 miliar lebih. Angka itu termasuk investasi yang disalurkan pada 2010 sebesar US$ 137 juta. Sebanyak US$ 64 juta di antaranya untuk mengembangkan komunitas lokal melalui dana kemitraan.

Ditemui di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Nusa Dua, Bali, Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Sinta Sirait bersedia menjawab beberapa pertanyaan R.R. Ariyani dari *Tempo*.

Bagaimana kelanjutan negosiasi upah buruh?

Kami ingin proses perundingan dilanjutkan. Kementerian Energi dan Kementerian Tenaga Kerja sudah membantu sejak dulu. Kami masih menunggu hasil kedua tim. Proses negosiasi di Timika juga masih berjalan.

Situasi terakhir, upah yang kami bayarkan untuk kompetensi terendah sampai tertinggi berkisar Rp 12,7-19 juta. Ini adalah pendapatan bersih, termasuk tunjangannya, tapi belum memperhitungkan *benefit-benefit* lain per tahun.

Apakah masih ada kemungkinan menaikkan tawaran seperti yang diminta pekerja?

Kami melihat tidak hanya upah pokok, tapi juga konsep tentang upah. Ada ruang-ruang dari level terendah sampai tertinggi untuk berunding. Jadi bukan hanya batas bawah. Sebetulnya perundingan masih berjalan, sehingga saya tidak bisa berbicara terlalu mendetail.

Bagaimana dengan renegosiasi kontrak karya?

Secara umum, kami siap duduk bersama dengan pemerintah membahas renegosiasi kontrak karya.

(Dalam jawaban tertulis, manajemen Freeport menyatakan telah membayar US$ 2 miliar, yang terdiri atas pajak, royalti, dan dividen pada sembilan bulan pertama 2011. Sejak 1992, jumlah royalti yang dibayarkan mencapai US$ 13,4 miliar.) ●



SUBEKTI (TEMPO)

Ribuan Mahasiswa Papua Pulang Kampung

Dibelikan tiket oleh orang tua mereka yang khawatir.

YOGYAKARTA — Hingga kemarin sudah ribuan mahasiswa asal Papua yang meninggalkan Yogyakarta. Dari sekitar 7.300 mahasiswa yang tercatat berada di Yogyakarta, yang masih bertahan cuma sekitar 2.000 orang. Mereka meninggalkan Yogyakarta setelah beredar informasi bahwa akan ada pengibaran bendera Bintang Kejora di seluruh pelosok tanah Papua pada 1 Desember.

"Mereka pergi setelah selesai ujian di kampus," kata koordinator mahasiswa Papua di Yogyakarta, Sagrim Hamah, kepada *Tempo* kemarin. Tapi, menurut dia, setelah Natal, sebagian besar mahasiswa itu berencana kembali ke Yogyakarta. Sagrim sendiri berencana pulang pada pekan depan.

Kepulangan ribuan mahasiswa tersebut sangat terasa di asrama Papua Kamasan, Jalan Kusumanegara. Asrama yang bisa memuat sekitar 400 orang itu kemarin tampak sepi. Hanya sekitar 70 mahasiswa yang tersisa di sana.

Sebenarnya saat mahasiswa Papua beraudensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pada 16 November lalu, Sultan memberi jaminan keamanan untuk mereka. "Karena mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta adalah warga Yogyakarta yang wajib dilindungi," kata Sultan kala itu.

Tapi, menurut Sagrim, sebagian besar mahasiswa tetap pulang karena sudah dibelikan tiket oleh orang tua mereka yang khawatir.

Sementara itu, di posko pengaduan untuk mahasiswa yang mendapatkan intimidasi terkait dengan situasi politik yang terjadi di Papua saat ini sudah ada 11 laporan. Kebanyakan dalam bentuk verbal berupa ejekan, seperti, "*Lucu-lucue, ireng-ireng pengin* merdeka. Mau makan apa?" Tapi ada juga yang mengancam, seperti yang terjadi di kawasan jalan layang Janti, ketika seorang mahasiswa Papua tengah menunggu taksi, tiba-tiba diteriaki orang tak dikenal: "Kamu Papua, ya? Awas *lho*, macam-macam kutembak satu-satu."

Kemarin Majelis Rakyat Papua (MRP) berkunjung ke kediaman adik Sultan, Gusti Bendara Pangeran Haryo Joyokusumo. Sebenarnya mereka ingin bertemu dengan Sultan, tapi Sultan tengah berada di Jakarta menghadiri pernikahan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Vitalis, Ketua MRP, mengimbau mahasiswa Papua agar tidak meninggalkan Yogyakarta. Dia mengatakan kabar tentang pengibaran bendera Papua itu hanya isu dari orang tak bertanggung jawab. "Kalau mahasiswa Papua diintimidasi, temukan orang itu dan laporkan MRP. Nanti kami tindaklanjuti," kata dia saat ditemui di Gadri Resto, dekat Keraton Yogyakarta.

Tapi Sagrim, yang diberi tahu soal pernyataan Vitalis, menyayangkan mengapa hal itu tidak disampaikan langsung kepada mahasiswa. Menurut dia, pejabat Papua yang datang ke Yogyakarta tak pernah bertemu dengan mereka. "Kami pun tak pernah ditanya, ada masalah apa," ujarnya.

● PITO AGUSTIN RUDIANA

RESOLUSI TOKOH MASYARAKAT

Stop Kekerasan di Papua

Dialog merupakan jalan terbaik dalam mengatasi konflik.

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan organisasi sipil mendesak penghentian kekerasan di Papua. Seruan ini terangkum dalam resolusi yang dicetuskan di kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

"Ada enam poin resolusi ini yang akan kami sampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Masalah kekerasan di Papua mendesak diselesaikan, salah satunya melalui dialog," kata Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM.

Enam resolusi itu, pertama, membenahi manajemen keamanan dengan mengevaluasi aparat yang bertugas. Kedua, membenahi manajemen ketertiban umum dalam penegakan hukum, bukan melibatkan pasukan Brigade Mobil (Brimob) atau Detasemen Khusus 88 Antiteror. Ketiga, menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat Papua.

Keempat, penegakan hukum secara adil dan terusmenerus, terutama peristiwa yang menimbulkan korban jiwa. Kelima, pemerintah segera membangun dialog yang bermartabat. Dan keenam, realisasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mengutamakan penduduk di pedalaman Papua.

Salah satu kekerasan yang menimbulkan korban jiwa adalah ketika pembubaran Kongres Rakyat Papua di Abepura, Jayapura, beberapa waktu lalu. Beberapa korban tewas mengalami luka tembak.

Mereka yang ikut mencetuskan resolusi di antaranya anggota Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Farid Husein; peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan Satrio Widjojo; anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR, T.B. Hasanuddin; Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti; Romo Benny Soesatyo; serta Pendeta Gomar Gultom.

Menurut Kepala Pemerintahan Adat Papua Sayid Fadhal al-Hamid, rakyat Papua memerlukan ruang konsolidasi sebagai jalan menuju dialog dengan pemerintah. Langkah ini penting untuk menghindari sikap saling mencela dan mencurigai antara rakyat dan pejabat pemerintah. "Ruang konsolidasi ini sebagai materi kebijakan politik ke depan," kata Sayid dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemerintahan DPR kemarin.

Dia menyayangkan adanya kekerasan yang diduga dilakukan aparat militer akhir-akhir ini. Sayid mengaku peran aparat keamanan terkadang tak manusiawi terhadap warga Papua. Dia mencontohkan saat penangkapan terhadap sekitar 300 orang yang terlibat dalam sebuah pertemuan. Mereka digiring ke kantor polisi sambil diludahi dan dicaci-maki.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Hayono Isman mendukung penghentian aksi militer yang berbuntut kekerasan di Papua. Ia berpendapat dialog merupakan jalan terbaik dalam mengatasi konflik di Bumi Cenderawasih. "Saya sepakat memilih jalan damai tanpa kekerasan," ujar Hayono Isman.

● ISHOMUDDIN | EDI FAISOL

Pemerintah Bantah Ada 70 Tentara Amerika di Freeport

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantah adanya penempatan 70 tentara Amerika di PT Freeport Indonesia, Papua. Dia menjelaskan, dari klarifikasi yang dilakukan, pasukan yang berjaga di PT Freeport adalah beberapa konsultan keamanan yang diambil dari perusahaan pengamanan. "Tidak benar ada penempatan 70 tentara Amerika di Freeport," kata Djoko, dua hari yang lalu.

Keberadaan pasukan yang diduga dari Amerika itu muncul dalam rapat Tim Pengawas Papua yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Jumat lalu. Anggota Komisi Pertahanan DPR dari Partai Hanura, Ali Kastela, menyatakan, saat kunjungan kerja ke Papua ditemukan sekitar 70 militer Amerika yang masih aktif bekerja di kawasan PT Freeport. Dia menduga hal itu mungkin saja karena adanya pangkalan militer Amerika tidak jauh dari Papua, yaitu di Darwin, Australia.

Apalagi saat ini PT Freeport menjadi sorotan dengan banyaknya konflik dan persoalan keamanan di kawasan perusahaan tambang itu. Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia masih berjaga di kawasan tersebut terkait dengan adanya demo yang dilakukan para buruh. Selain itu, banyaknya penembakan gelap oleh kelompok sipil bersenjata menjadi masalah yang kerap terjadi dan belum teratasi.

Djoko menegaskan, konsultan keamanan yang diambil dari perusahaan pengamanan juga banyak digunakan di negara lain. Selain itu, dia melanjutkan, beberapa pensiunan militer bekerja di kawasan Freeport. Para pensiunan itu direkrut melalui rekrutmen sebagaimana warga sipil yang lain. "Proses perekrutan seperti ini juga berlaku dan diterapkan di seluruh cabang PT Freeport atau perusahaan-perusahaan pertambangan di negara lain," ujarnya. ● FRANSISCO ROSARIANS

Sanksi untuk Polisi dalam Kasus Papua Dikritik

Gereja mendorong dialog Papua-Jakarta.

JAKARTA — Peneliti senior ICTJ, lembaga riset internasional urusan keadilan transisional, Usman Hamid, mengkritik sanksi terhadap delapan polisi yang terbukti melanggar kode etik dalam pembubaran Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober lalu di Abepura.

Menurut Usman, sanksi untuk mereka terlampau ringan, padahal tindakan para polisi itu mengakibatkan tiga orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Mereka cuma dikenai sanksi teguran tertulis. "Sanksi surat tertulis itu jauh dari keperluan," ujarnya dalam konferensi pers tentang penanganan konflik di Papua, di kantor Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta, kemarin. Hadir pula perwakilan Persatuan Gereja-gereja Papua (PGGP) serta Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua.

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ini pun menilai kepolisian tak transparan dalam menjatuhkan sanksi. Berdasarkan Peraturan Kepala Polri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI, seharusnya penjatuhan hukuman dilakukan secara terbuka. "Setidaknya melibatkan Kementerian Hukum dan HAM."

Rusman menjelaskan, dalam sidang disiplin di kantor Kepolisian Resor Jayapura pada 22 November lalu, tujuh perwira pertama polisi dijatuhi hukuman enam bulan teguran tertulis. Mereka adalah Kepala Bagian Operasi Komisaris Junoto, Kepala Polsek Jayapura Utara Ajun Komisaris K.R. Sawaki, Wakil Kepala Polsek Jayapura Utara Inspektur Satu I Simanjuntak, Kepala Polsek Abepura Komisaris Arie Sirait, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Ajun Komisaris Ridho Purba, Kepala Satuan Intel Ajun Komisaris Laurens, dan Kepala Satuan Sabhara Ajun Komisaris Frans.

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Usman Nasution, mengatakan sanksi terhadap 17 polisi yang bertugas di lapangan Zakeus, Padang Bulan, itu sudah sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Sanksinya berupa teguran tertulis, kurungan 14 hari, hingga penggeseran jabatan. "Menurut kami, nilai sanksinya sudah seimbang," katanya kemarin. "Kami tak bisa bisa selalu mengikuti maunya orang. Pemberian sanksi ada aturannya."

Ia menjelaskan, 17 polisi itu terbukti melanggar kode etik dalam sidang pada 22 dan 23 November lalu. Saud berpendapat, kalau ada yang tak puas dengan sanksi itu dipersilakan melapor ke Komisi Kepolisian Nasional atau Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

Adapun dalam keterangan pers di gedung PGI, Persatuan Gereja-gereja Papua serta Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua mendukung rencana pemerintah melaksanakan dialog Papua-Jakarta. Tapi mereka meminta agar dialog dilaksanakan secara terbuka dan transparan. "Sehingga tak perlu ada ketakutan dari masyarakat," ujar anggota PGGP, Wellem Maury. Upaya dialog juga harus menyertakan masyarakat asli Papua dan organisasi masyarakat Papua. "Wakil gereja harus ikut, tidak bisa tidak, karena hubungannya sangat erat dengan masyarakat."

● IRA GUSLIA | RINA W | ISMA S | JOBPIE S.

Aktivis Mahasiswa Papua Diduga Tewas Diracun

JAKARTA — Seorang mahasiswa asal Papua, Carly Wilson Takimai, 23 tahun, meninggal diduga secara tak wajar pada Senin malam lalu, sekitar pukul 22.00 WIB, di Rumah Sakit Tebet, Jakarta.

Oktovianus Togau, rekan almarhum, mengatakan temannya itu adalah pentolan mahasiswa yang mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena kontrakan mereka digerebek oleh anggota TNI dan Polri. "Kami menduga dia tewas diracun," katanya ketika dihubungi kemarin siang. "Kami belum tahu apa yang dia makan dan makan di mana."

Ia menjelaskan, pada Senin pagi lalu Carly bercengkerama seperti biasa dengan teman-teman satu kontrakan di kawasan Tebet. Kontrakan inilah yang pada 11 November lalu digeledah oleh aparat karena diduga terkait dengan perayaan 50 tahun Organisasi Papua Merdeka. "Ia sendirian di kontrakan sampai siang." Ketika kembali ke kontrakan, teman-temannya mendapati Carly meracau seperti kesurupan. "Ngomongnya sembarangan"

Dua jam kemudian, Carly dilarikan ke Rumah Sakit Tebet, kemudian mulai membaik kondisinya sampai sore sehingga dibawa pulang. Menjelang malam, ia sakit lagi, malah lebih parah. Sembari meracau, mulutnya mengeluarkan busa. Carly dibawa lagi ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

Kepolisian membantah Carly diracun. "Dia sakit perut," kata Kepala Kepolisian Sektor Tebet Komisaris Suyatno. Menurut dia, hanya dokter yang boleh menyimpulkan penyebab kematian seseorang. Ia juga menolak tuduhan bahwa kepolisian menghalangi otopsi jenazah Carly. Suyatno menjelaskan, otopsi tak dilakukan karena tak diizinkan oleh keluarga almarhum. Seorang teman Carly menerima informasi penolakan otopsi dari keluarganya di Papua. Tapi tak diketahui alasan penolakan itu. Surat pernyataan penolakan otopsi kini di tangan pengelola Rumah Sakit Tebet. "Kerabatnya yang menandatangani," ucap Suyatno.

Sebelumnya, Oktovianus menuding polisi menghalangi otopsi. "Polisi mengusulkan agar jenazah Carly tak diotopsi," katanya. Ia juga menduga polisi menekan rumah sakit agar permintaan otopsi dari rekan-rekan Carly tak diladeni. Akhirnya, rekan-rekannya membawa jenazah Carly ke Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat, untuk diotopsi. "Kami menunggu otopsi di Carolus," ujarnya.

● MUSTAFA SILALAHI

MENJELANG HUT PAPUA

OPM Berjanji Tak Bahayakan Warga Sipil

JAYAPURA — Menjelang peringatan ulang tahun Papua Barat pada 1 Desember, Organisasi Papua Merdeka (OPM) berjanji tak akan melakukan kegiatan yang membahayakan warga sipil. "Tidak ada pengibaran dan penembakan. Kita memperingati ini hanya dengan doa. Kalau kemudian ada tindakan berlebihan, itu di luar tanggung jawab kami," kata Lambertus Pekikir, Koordinator Tentara Pembebasan Nasional OPM, kemarin.

Ia mengatakan Papua Merdeka adalah perjuangan damai dan tanpa kekerasan. OPM, kata dia, tetap mengikuti putusan markas besar pertahanan dan menunggu hingga saatnya pembahasan kembali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atas nasib Papua. "Sudah ada mekanisme internasional untuk Papua," kata Pekikir.

Soal peristiwa penembakan di area PT Freeport Indonesia dan Puncak Jaya belakangan ini, dia mengaku, tak tahu-menahu. Pekikir juga membantah tudingan kelompoknya telah menyebarkan pesan pendek berisi teror dan pernyataan merdeka yang tengah beredar di masyarakat. "Itu bukan dari kami, siapa pun yang menyebarkan itu hanya bertujuan politis, bisa juga untuk cari keuntungan di situ," katanya. Dalam pesan itu dikabarkan akan ada pertumpahan darah menjelang perayaan ulang tahun Papua.

Adapun untuk pengamanan menjelang 1 Desember, Kepolisian Resor Kota Jayapura menyiagakan personelnya untuk mengantisipasi gerakan dalam kota. "Razia senjata tajam dan lainnya sudah kami laksanakan sejak awal November. Kami tetap mengantisipasi jangan sampai timbul gerakan di luar itu," kata Kepala Polres Jayapura Kota Ajun Komisaris Besar Alfred Papare.

Soal pesan pendek teror, Alfred mengatakan pihaknya telah memeriksa beberapa tokoh Papua. "Tapi, dari pengakuan mereka, bukan mereka yang melakukan. Kami masih menyelidiki pelakunya. Bila didapat, tentu akan diproses hukum," ujarnya. Ia menambahkan, pengamanan di Jayapura sebagai wilayah rawan di-*back up* oleh Kepolisian Daerah Papua. ● JERRY OMONA

Diintimidasi, Aktivis Solidaritas Papua Lapor ke LBH

YOGYAKARTA — Para aktivis Solidaritas Anak Bangsa untuk Kemanusiaan mengeluhkan intimidasi terhadap mahasiswa Papua dan anggota Sabuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemarin mereka datang ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta untuk mengadu. Sabuk merupakan aliansi organisasi mahasiswa dari berbagai daerah di Yogyakarta.

Misalnya, mereka melaporkan bahwa seorang aktivis Sabuk beberapa kali dihubungi orang tak dikenal pada pertengahan November lalu. Dia kemudian menerima surat kaleng yang menanyakan agenda kegiatan Sabuk. Dalam surat itu disebutkan akan ada *sweeping* terhadap mahasiswa Papua dan aktivis Sabuk pada peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember mendatang.

"Institusi pemberi surat tak jelas," ujar salah seorang aktivis Sabuk, Roni Simatupang. Dia menunjukkan penggalan surat itu yang direkam di telepon selulernya. Malah, menurut dia, banyak aktivis Sabuk kini merasa diikuti orang tak dikenal.

Martinus, aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, mengatakan intimidasi seperti ini sebenarnya sudah sangat biasa bagi mereka. Persoalannya, politik di Papua sebulan belakangan tengah bergolak hebat. Karena itulah mereka panik. "Tujuh Puluh persen dari 7.000-an mahasiswa Papua di DIY sudah pulang. Terakhir ada enam rombongan kapal ke Papua," kata dia.

Namun Martinus mengatakan dia dan teman-temannya tetap berencana mengadakan kegiatan di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kusumanegara pada 31 Desember nanti. Tema kegiatannya "Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua".

Direktur LBH Yogyakarta Irsyad Thamrin berjanji akan melaporkan kasus intimidasi itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Di DIY, aktivis antikorupsi dan aktivis petani Kulon Progo juga menerima intimidasi serupa. Ini bisa jadi penguat untuk menolak RUU Intelijen yang akan disahkan," ujarnya.

Seacara terpisah, Wakil Ketua I Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, Fajarini, mengatakan, pertengahan November lalu, perwakilan mahasiswa asal Papua yang kuliah di sana melakukan audiensi dengan pihak Rektorat Akademi Pembangunan Masyarakat Desa. Mereka minta izin untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama beberapa minggu. "Mereka pulang. Was - was dengan keamanannya di kos dan asrama," ujarnya. ● ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Ulang Tahun Papua Diwarnai Insiden Penembakan

Massa mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan aparat.

TIMIKA — Peringatan hari ulang tahun Papua, 1 Desember kemarin, diwarnai aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa distrik di Papua dan insiden penembakan. Seorang polisi terluka saat mengecek kondisi Kampung Berang Distrik Nimbrokang, Papua, yang diduga sebagai tempat terjadinya aksi pengibaran Bintang Kejora.

Di Lapangan Timika Indah, aksi pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan oleh sekitar 500 warga di hadapan ratusan tentara dan polisi. Drama pengibaran bendera ini diawali dengan tarian adat berupa tarian melingkar dan berputar di atas tanah berpasir.

Begitu bendera itu berkibar, Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Denny Edward Siregar, yang menunggang kendaraan lapis baja, Barracuda, di lokasi kejadian, langsung mendekati tiang bendera itu, tapi warga berusaha menahannya.

Pasukan TNI pun turun mendekati kerumunan orang. Saat itulah tiba-tiba terdengar rentetan tembakan ke udara. Massa pun berlarian, sebagian memungut batu, lalu melempari aparat keamanan. Selama hampir 30 menit situasi tidak terkendali. Aparat menangkap dua warga setempat.

"Saya sudah berusaha menahan mereka (para aktivis Papua) untuk tidak mengibarkan, tapi tidak berhasil," kata Fr Saul, rohaniwan dari Keuskupan Timika.

Sementara itu, di Perumnas III Abepura, bendera Bintang Kejora sempat mengudara sekitar dua jam, sebelum akhirnya diturunkan polisi.

Menurut juru bicara Kepolisian RI Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, aksi pengibaran Bintang Kejora dilakukan di beberapa distrik. Di antaranya, di Dusun Wandegobak, Distrik Mulia, Puncak Jaya, dan di ujung Bandara Wamena, Kampung Walangi, Distrik Wamena. "Pelakunya masih kami lacak," ucapnya.

Selain mengibarkan bendera, ribuan warga memperingati hari ulang tahun Papua di makam Theys Eluay di Sentani, Kabupaten Jayapura. Di makam tokoh pergerakan Papua yang tewas pada 2000 itu, warga menari-nari dan berdoa, lalu membubarkan diri dengan tertib.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, dalam pengamanan peringatan hari ulang tahun Papua itu, seorang petugas terluka saat mengecek informasi adanya pengibaran bendera di Kampung Berang, Distrik Nimbrokang, kemarin dinihari.

Menurut Timur, polisi mengirim dua petugas, tapi di tengah jalan mereka dihadang oleh sekitar 15 orang bersenjata panah. Satu orang selamat, tapi satu anggota lainnya (Brigadir Dua Ridwan Napitupulu) terpanah pahanya. Dia masih dirawat di rumah sakit di Jayapura. "Kini situasi Papua sudah terkendali," ujar Timur.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Joko Suyanto, meminta masyarakat Indonesia, khususnya Papua, tidak mudah terprovokasi oleh berbagai situasi yang terjadi di Papua, termasuk kabar adanya *sweeping* terhadap warga dan mahasiswa Papua oleh aparat TNI dan kepolisian. ● TJAHJONO EP | JERRY OMONA | FRANSISCO ROSARIANS |HERU TRIYONO | KARTIKA CANDRA | ENI SAENI

Anggota Brimob Ditembak di Papua

HUSYEN ABDILLAH (ANTARA)



Petugas gabungan TNI/Polri membubarkan warga yang mengikuti peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka di Lapangan Timika Indah, Mimika, Papua, Kamis lalu.

Penganiayaan juga menimpa anggota Brimob lainnya.

JAYAPURA — Seorang anggota Satuan Gegana Brigade Mobil Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Dua Iwan Frans, tertembak di Papua, Kamis lalu. Iwan diduga ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Dia menderita luka tembak pada tangan kirinya dan hingga kemarin masih dirawat di rumah sakit. Juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wachyono, saat dimintai konfirmasi menyatakan belum mendapat informasi mengenai penembakan tersebut.

"Nanti, kalau sudah ada detailnya, akan saya sampaikan," kata Wachyono di Jayapura kemarin. Dari informasi yang dihimpun *Tempo*, peristiwa ini berawal dari informasi adanya pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember lalu di Kampung Wandegobak dan Kampung Towage Distrik Mulia, Puncak Jaya. Bendera tersebut diduga dikibarkan oleh kelompok Pilia dan Yambi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Papua.

Bendera berukuran kecil itu dipasang di sebuah tiang kayu. Setelah terlihat melalui teropong dari kejauhan, satu regu anggota Brimob Mabes Polri bergerak menuju lokasi dengan maksud menurunkan bendera. Setiba di ketinggian di depan gereja Wandegobak, Brimob langsung diserbu. Baku tembak terjadi beberapa menit dengan kelompok tak dikenal, yang sudah lebih dulu berjaga. Saat saling serang itulah Iwan Frans tertembak di bagian tangan. Iwan kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia dan kemarin baru bisa dievakuasi ke RS Bhayangkara di Jayapura.

Selain pengibaran di Puncak Jaya, pembentangan bendera Bintang Kejora terjadi di Manokwari, Papua Barat, kemarin. Ketika aksi massa riuh terjadi di Lapangan Borarsi, Manokwari, tiba-tiba seorang pengunjuk rasa membentangkan bendera. Beberapa menit kemudian, bendera langsung disimpan kembali.

Dua bendera Bintang Kejora juga dikibarkan pejuang Papua di belakang perumahan padat penduduk, di wilayah perbukitan Perumnas III atau Buper Waena, Abepura, Jayapura, pada Kamis sore lalu. Bendera berukuran kurang-lebih 1 x 2 meter itu dipasang pada dua buah kayu dengan panjang sekitar 5 meter dan 7 meter. "Itu tindakan orang iseng saja, saya kira upaya untuk memprovokasi," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Alfred Papare.

Serangan terhadap anggota Brimob juga terjadi pada Kamis lalu. Brigadir Dua Ridwan Napitupulu dianiaya sekelompok orang di Berap, Nimbrokang, Kabupaten Jayapura. Ridwan dianiaya setelah mendatangi tempat itu karena mendapat laporan adanya pengibaran bendera Bintang Kejora.

Polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penganiayaan tersebut. "Benar, ketiga tersangka, yakni TT, YT, dan JC, telah terbukti terlibat dalam penganiayaan Bripda Ridwan. Mereka masih diperiksa di Polres Jayapura," kata Wachyono kemarin.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan melawan dengan kekerasan aparat negara yang sedang melaksanakan tugas. Ketiganya diancam hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. "Penganiayaan itu terjadi kemarin, sekitar pukul 6. Penangkapan terhadap yang diduga pelaku tak jauh dari lokasi kejadian," ujar Wachyono. ● JERY OMONA

Peringatan 1 Desember Masih Wajar

JAKARTA — Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman menyatakan hasil evaluasi mengenai peringatan hari ulang tahun Papua, 1 Desember lalu, masih berjalan dalam batas-batas yang wajar. Meskipun begitu, ia mengakui ada dinamika yang terjadi di lapangan.

"Kalau ada sedikit-sedikit, itu semua bisa diselesaikan. Perkiraan semula bahwa Papua pada 1 Desember akan seperti yang mereka gambarkan sebelumnya itu tidak terjadi," katanya setelah mengikuti sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Adapun soal pengibaran bendera Bintang Kejora, Marciano mengatakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat di Papua. "Kegiatan pengibaran bendera seperti itu selalu terjadi pada 1 Desember, walaupun kita juga telah mengambil langkah proporsional untuk hal-hal seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, hingga kemarin polisi belum menetapkan tersangka pengibaran Bintang Kejora pada 1 Desember di Papua. Beberapa orang yang diperiksa masih menjadi saksi atas pengibaran bendera di Lapangan Timika Indah, Mimika, Papua, itu.

"Sementara menjadi saksi dan kita akan mengkonfirmasi lebih lanjut apakah jadi tersangka atau tidak," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta kemarin.

Saud menyatakan salah satu dari lima orang yang ditangkap dalam peristiwa itu kedapatan membawa senjata tajam. Saud memang tidak memaparkan lebih jauh perihal jenis senjata tajam tersebut. Tapi pihak kepolisian kemungkinan besar akan menetapkan orang ini sebagai tersangka.

● MUNAWWAROH | FRANSISCO ROSARIANS

Dua Lagi Anggota Brimob Tewas di Papua

JAYAPURA — Dua anggota Satuan Gegana Brigade Mobil Markas Kepolisian RI tewas dalam baku tembak yang kembali pecah di Mulia, Puncak Jaya, Papua, kemarin. Mereka adalah Brigadir Dua Feriyanto Kaluku dan Brigadir Dua Eko Afriansyah—keduanya menderita luka tembak di kepala. Korban lainnya, Brigadir Dua A.R. Syukur, anggota Brimob Detasemen C Sorong, mengalami luka tembak di paha. Dia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mulia.

Insiden penembakan terjadi pukul 15.30 Wita antara Brimob dan kelompok Organisasi Papua Merdeka di Kali Semen, Kampung Wandinggobak, Mulia, Puncak Jaya. Juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wachyono, mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut.

"Kami belum bisa menyimpulkan siapa pelakunya," kata Wachyono. Dia menjelaskan, penghadangan diikuti penembakan terjadi ketika satuan Brimob menjemput anggotanya yang sakit di Sorong, Brigadir Satu Syukur dan Inspektur Dua Febri, di Pos Polisi Tingginambut, Kali Semen.

Penembakan ini satu rangkaian dengan insiden penembakan yang terjadi pasca-peringatan hari kemerdekaan Papua Barat, Kamis, 1 Desember lalu. Insiden berawal dari informasi adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, sekitar pukul 06.30 WIT, di Kampung Wandegobak dan Kampung Towage, Distrik Mulia, Puncak Jaya. Saling serang antara kelompok sipil bersenjata dan anggota Brimob itu menewaskan Brigadir Dua Iwan Frans.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigadir Jenderal Paulus Waterpauw menyatakan belum ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan pengibaran bendera tersebut. "Kami masih memeriksa lima saksi. Tiga orang datang memenuhi panggilan polisi dan dua orang tidak hadir karena pergi ke Nabire," ujarnya. Namun, jika terbukti, tersangka akan dikenai pasal makar, penghasutan, dan perlawanan terhadap petugas.

Sementara itu, bentrokan lanjutan di antara dua kelompok, yang dipicu oleh proses pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Puncak, Papua, kembali pecah di Kali Jila, Distrik Gobe, sekitar pukul 06.00 WIT. "Ada tiga yang tewas dari pihak Simon Alom, dan saat ini jenazah sudah dibakar sesuai adat setempat," ujar Wachyono. Mereka adalah Endiles Waker, 26 tahun, Yelinus Murib (30), dan Edison Murib (40).

Bentrokan terjadi karena satu kubu meminta *caretaker* Bupati Decky Ambrauw segera diganti. Decky dinilai tak netral dalam proses pemilihan kepala daerah. "Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, dikirim personel polsek dan Brimob untuk olah tempat kejadian perkara. Massa yang bentrok sudah berhasil dibubarkan," katanya. Konflik ini dipicu proses pemilihan kepala daerah pada Juli lalu.

● JERRY OMONA | TJAHJONO EP | FRANSISCO ROSARIANS

Polisi Buru Kelompok Bersenjata di Puncak Jaya

Jenis dan ukuran peluru belum diketahui.

JAYAPURA — Setelah penembakan yang menewaskan dua anggota Brimob, Kepolisian Daerah Papua kemarin memburu kelompok sipil bersenjata yang diduga sebagai pelakunya. "Kemarin perburuan sedikit terhambat karena cuaca berkabut, tapi hari ini kembali dilaksanakan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Wachyono kemarin.

Ia mengatakan pengejaran dibantu aparat TNI yang bertugas di daerah rawan konflik tersebut. "Tapi tidak ada tim khusus yang diturunkan, hanya memaksimalkan yang ada saja, jumlah personel di sana kurang-lebih 30 orang ," ujarnya.

Ihwal dugaan pelaku, Wachyono menambahkan, polisi belum menemukan bukti siapa sesungguhnya di balik penyerangan. "Ya, gerombolan bersenjata mereka," katanya. "Soal jenis dan ukuran peluru yang bersarang di tubuh korban, itu saya tidak tahu."

Wachyono menjelaskan, kondisi alam di Puncak Jaya, yang berada di ketinggian serta dikelilingi perbukitan terjal, menjadi kendala dalam pengejaran terhadap kelompok tersebut. "Anggota kewalahan, sementara kelompok itu sangat menguasai medan," katanya.

Sabtu lalu, tiga anggota Brimob tertembak oleh kelompok sipil di wilayah Kali Semen, Kampung Wandigobak, Puncak Jaya. Bripda Feriyanto Kaluku dari organik Gegana Mabes Polri tewas tertembak di bagian kepala. Bripda Eko Afriansyah juga tertembak di kepala. Sedangkan Bripda. A.R. Syukur, dari organik Brimob Den-C Sorong, terluka di paha.

Penyerangan terjadi ketika pasukan Brimob hendak menjemput Brigadir Dua A.R. Syukur dan Inspektur Dua Febri yang sakit di Pos Polisi Tingginambut. "Penghadangan dilakukan kelompok bersenjata terhadap Brimob yang baru pulang menjemput dua anggota Brimob yang sakit di Pos Polisi Tingginambut. TKP di Kali Semen, Kampung Wandigobak," kata Wachyono.

Sementara itu, Markas Besar Kepolisian RI mengimbau masyarakat di Puncak Jaya, Papua, agar tidak terprovokasi oleh sejumlah peristiwa yang mengarah pada situasi yang tidak kondusif. Kepolisian menilai situasi ini disebabkan oleh konflik antarkubu yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah Puncak Jaya. Kondisi ini turut menjadi sebab beberapa peristiwa penyerangan terhadap Kepala Polsek Puncak Jaya, penyerangan terhadap Satuan Brimob, dan bentrokan masyarakat di Puncak Jaya.

"Kami berharap saudara-saudara di Puncak Jaya dapat menahan diri dan menciptakan situasi yang kondusif untuk pilkada ini," kata Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli saat ditemui di Jakarta kemarin.

Sebelumnya, terjadi bentrokan yang menyebabkan tiga orang tewas di antara dua kelompok atas proses pemilukada di Kali Jila, Distrik Gobe, Kabupaten Puncak, Papua, pada Sabtu lalu. Bentrokan terjadi karena ada satu kubu meminta agar *caretaker* Bupati Decky Ambrauw segera diganti. "Situasi ini kita lihat juga menimbulkan korban dari pihak masyarakat Puncak Jaya sendiri," kata Boy

Pilkada ini, menurut Boy, juga menjadi sebab dalam serangan terhadap aparat kepolisian di daerah Puncak Jaya. "Kami melihat beberapa peningkatan penyerangan terhadap anggota kita di Puncak Jaya terkait adanya kegiatan pemilukada," katanya. ● JERY OMONA| FRANSISCO ROSARIANS

Pemerintah Didesak Bebaskan Tahanan Papua

"Rasanya aneh, di tengah komitmen pemerintah menegakkan demokrasi, masih ada tahanan politik."



AMSTON PROBEL (TEMPO)

Warga Papua yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Papua beraudensi dengan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Judy Hariyanto (kedua kanan) di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, kemarin.

JAKARTA — Lembaga hak asasi manusia internasional, Amnesty International, mendesak pemerintah Indonesia memasukkan agenda hak asasi manusia dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Penasihat riset senior Amnesty International, Issabel Arradon, menyatakan pemerintah harus taat kepada Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia. "Pemerintah harus memastikan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak melebihi standar yang diatur konvensi," kata Issabel di Jakarta kemarin.

Amnesty International bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk membahas penegakan hak asasi manusia di Papua kemarin. Setidaknya ada tiga poin yang menjadi perhatian Amnesty ihwal upaya pemerintah mengatasi masalah Papua. Pertama, mendesak pemerintah segera membebaskan tahanan politik Papua dalam upaya memenuhi komitmen pemerintah terhadap hak sipil dalam berpolitik.

Kedua, mendesak pemerintah segera mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus dengan membentuk suatu pengadilan hak asasi manusia serta komisi kebenaran dan rekonsiliasi. "Amnesty juga mendesak pemerintah menjamin kebebasan akses para jurnalis dan aktivis lembaga internasional untuk melakukan kunjungan dan penelitian di Papua," kata Issabel.

Penasihat senior nasional International Center for Transitional Justice, Usman Hamid, mendukung upaya Amnesty mendesak pemerintah agar segera membebaskan tahanan politik Papua. Menurut Usman, pembebasan tahanan politik merupakan pintu masuk yang tepat bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen membangun dialog yang setara dengan masyarakat Papua. "Tanpa ada keputusan membebaskan tahanan politik, upaya membangun dialog tidak akan pernah tersampaikan," ujarnya.

Menurut catatan Amnesty International, sedikitnya terdapat 90 orang tahanan politik yang ditahan di penjara di Papua dan Maluku karena aktivitas pro-kemerdekaan secara damai. Misalnya, Filep Karma, seorang Papua yang menjadi tahanan politik karena opininya "*prisoner of conscience*". Saat ini Karma sedang menjalani hukuman 15 tahun di penjara Abepura, Papua. "Rasanya aneh, di tengah komitmen pemerintah menegakkan demokrasi, masih ada tahanan politik," kata Usman.

Selain itu, Usman menilai, upaya pemerintah menghalang-halangi jurnalis dan aktivis yang ingin melihat langsung keadaan di Papua justru akan mengundang kecurigaan banyak pihak ihwal kondisi di Papua. Pemerintah seharusnya bisa menjadi fasilitator terhadap organisasi asing, khususnya pelapor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ingin memantau Papua. "Justru dengan sikap proaktif, kecurigaan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Papua akan berkurang," katanya.

Pengamat politik dari FISIP UI, Iberamsyah, mengkritik pendekatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ke Papua. Pendekatan keamanan dan kekerasan selama ini hanya menghasilkan luka dan amarah bagi rakyat Papua. "Politik disintegrasi bangsa sangat serius dan jadi prioritas. Kalau tidak diatasi, nanti akan muncul tuntutan yang disambut negara lain," kata Iberamsyah dalam diskusi "Kekerasan di Papua, Jalur Cepat Pisah dari NKRI", di Rumah Perubahan, Jakarta, kemarin.

● IRA GUSLINA | RIRIN AGUSTIA | SUNUDYANTORO

IKLAN

Pemerintah Evaluasi Otonomi Khusus Papua

Program otonomi ternyata tak berjalan mulus.

PAPUA — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah akan mengevaluasi Otonomi Khusus Papua. Tim evaluasi melibatkan pejabat lintas kementerian, yang ditargetkan selesai akhir Desember nanti. "Awal Januari 2012 mendatang sudah keluar hasil evaluasinya," kata Gamawan di Papua kemarin.

Dia menjelaskan, evaluasi bakal menjadi masukan pemerintah untuk perbaikan proses percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. "Misalnya saja, apa masalahnya (sehingga) pembangunan di Papua tak berlari kencang. Padahal uang yang dialokasikan sudah banyak hingga Rp 6 triliun," kata Gamawan.

Dalam evaluasi, kata dia, kelak diketahui kekurangan pemerintah. "Mungkin yang dibutuhkan A, tapi dijawab B. Masalah seperti itulah yang dikoordinasikan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) dengan instansi di daerah," katanya.

Unit Percepatan, Gamawan menambahkan, tak menyalahi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Menurut dia, unit ini punya banyak fungsi. Sewaktu hendak diterapkan, pemerintah sudah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi. "Jadi, tak perlu dipersoalkan," katanya.

Seorang warga Papua menyatakan tak setuju tim Unit Percepatan datang ke Papua. "Rakyat sudah menolak Otonomi Khusus, muncul lagi UP4B. Ini hanya akan ada kekerasan di atas kekerasan," kata Saul Bomay, salah satu warga Papua, saat acara dialog di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, yang dihadiri Menteri Gamawan Fauzi.

Pejabat lain yang ikut dalam dialog adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, dan Bambang Darmono selaku Ketua Unit Percepatan. "Kami minta pemerintah Indonesia mempelajari sejarah bangsa Papua Barat. Masalah mendasarnya adalah status politik, bukan masalah kesejahteraan," ujar Saul.

Wakil Presiden Boediono menegaskan, pendekatan pemerintahan untuk pembangunan Papua tak bisa disamakan dengan proses yang pernah dilakukan di Aceh. Bambang Darmono dipilih sebagai Ketua Unit Percepatan karena pengalamannya pernah mengawal rehabilitasi Aceh.

"Aceh sangat berbeda dengan Papua dalam banyak aspek, saya tak ingin membandingkan keduanya," kata Boediono dalam acara dialog di Jakarta. "Secara sosial-politis, antara Aceh dan Papua juga berbeda," Wakil Presiden menambahkan.

Pemerintah pusat, menurut Boediono, telah menerapkan pendekatan melalui kebijakan otonomi khusus yang sejauh ini ternyata tak berjalan mulus. "Karena itulah kami memulainya dengan pendekatan baru dan akan lihat adakah peningkatan signifikan pembangunan di Papua," ujarnya.

Dengan pendekatan baru yang lebih mengarah pada kesejahteraan, keadilan, dan rasa aman, Boediono yakin upaya Unit Percepatan segera menunjukkan hasilnya. "Saya optimistis pembangunan untuk saudara-saudara di Papua akan lebih baik," ujarnya.

● MUNAWWAROH | CUNDING LEVI

Lagi, Warga Papua Demo Tuntut Referendum

JAYAPURA — Ratusan warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat kembali berunjuk rasa menuntut referendum di Abepura, Jayapura, Sabtu lalu. Unjuk rasa tersebut dikawal puluhan anggota kepolisian Jayapura. "Kami menuntut segera digelar referendum. Kalau Yudhoyono ingin berdialog dengan kami, ajakan itu tidak akan kami terima," kata Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat, kepada *Tempo*.

Mako meminta agar hak rakyat bangsa Papua dikembalikan. Jika selama ini terjadi kekerasan berlebihan terhadap orang Papua, sepatutnya itu diselesaikan lewat mekanisme internasional.

Koordinator Umum Organisasi Papua Merdeka Lambert Pekikir menegaskan, referendum menjadi mutlak digelar di Papua. Menurut dia, penyelesaian masalah Papua bukan lewat dialog. "Masalah Papua sudah menjadi persoalan internasional. Jalan keluarnya adalah lewat mekanisme internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak penengah," tutur Pekikir.

Unjuk rasa diwarnai simbol bendera Bintang Kejora, yang digambar pada sejumlah kertas kecil. Setelah berorasi di Abepura, pendemo menggunakan belasan truk menuju Jayapura menyampaikan aspirasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Sebelumnya permintaan referendum juga disuarakan ketika ribuan orang saat memperingati hari kemerdekaan negara Papua Barat, 1 Desember lalu, di lapangan makam Theys Eluay di Sentani.

● JERRY OMONA

Polisi Serbu OPM, Puluhan Orang Tertembak

Ratusan warga sipil mengungsi.

JAYAPURA — Kepolisian Resor Paniai, Papua, kemarin berhasil menduduki satu tempat yang diduga sebagai markas Organisasi Papua Merdeka di kabupaten Paniai, kawasan pegunungan Tengah, dekat Timika, setelah sempat terjadi kontak senjata sebelumnya.

Seorang anggota Brigade Mobil, Brigadir Kepala Supono, tertembak di bagian paha. "Dari pihak kita, satu tertembak di kaki kanan," kata Kepala Polres Paniai Ajun Komisaris Besar Janus Siregar kemarin.

Sementara itu, juru bicara TPN/OPM Divisi II Makodam Pemka IV Paniai, Leo Yeimo, mengatakan 20 orang tertembak dalam kontak senjata itu. "Belum tahu berapa yang meninggal dan berapa yang luka," tutur Leo Yeimo. Dari 20 orang itu, tidak semuanya OPM, beberapa di antaranya warga sipil.

Hingga tadi malam, kontak senjata masih berlangsung. "Pasukan Indonesia masuk dan membakar sekitar 50 rumah di markas kami di Eduda," Leo Yeimo menambahkan.

Namun belum bisa dikonfirmasi soal jumlah korban akibat kejadian itu. Janus, yang dihubungi kembali tadi malam, tidak mengangkat telepon. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar, yang dihubungi di Jakarta tadi malam, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam penyerbuan tersebut.

Kemarin siang Janus mengatakan penyerbuan dilakukan setelah polisi mendapat laporan adanya kelompok bersenjata yang beraksi di Paniai. "Kami langsung antisipasi. Ini murni penyerangan terhadap kelompok itu."

Menurut Janus, dalam penyergapan itu polisi tak berhasil menangkap seorang pun anggota organisasi pimpinan Tadius Yogi tersebut. "Kami masih melakukan pengejaran karena, saat kontak senjata berlangsung, mereka sambil mundur masuk hutan," ujarnya.

Dia mengatakan, dalam penyergapan itu polisi menemukan sejumlah senjata tajam, panah, dan amunisi serta dokumen OPM. "Kami menduga ratusan pucuk senjata api berhasil mereka bawa," kata Janus. "Kami akan sterilkan markas ini agar tidak digunakan lagi oleh mereka."

Bupati Kabupaten Paniai Naftali Yogi menduga OPM pimpinan Tadius Yogi itu memiliki ribuan anggota dan ratusan senjata api. "Di antara senjata itu, ada AK-47. Kami tidak mengetahui dari mana senjata dan amunisi tersebut hingga bisa berada di kelompok ini," kata Naftali kemarin.

Pemerintah Kabupaten Paniai mengatakan pihaknya belum mendapat data resmi berapa jumlah korban dalam baku tembak antara Brimob dan OPM. "Besok (hari ini) kami akan cek kepastiannya," ujar Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Paniai F.X. Mote tadi malam.

Menurut dia, lokasi kejadian kontak senjata tidak begitu jauh dengan ibu kota Kabupaten Paniai. Letupan senjata terdengar jelas. Begitu pula asap ketika rumah markas OPM dibakar, terlihat membubung ke udara.

Akibat penembakan itu, ratusan warga sipil mengungsi. "Ada sekitar lima ratusan yang mengungsi. Mereka dari wilayah Ekadide dengan beberapa kampung, di antaranya Kagouto, Obayo, Deiy, Badawo, dan Wamalik. Mereka mengungsi ke distrik Paniai Barat," kata Okto Pekey, warga Paniai. ● JERRY OMONA| TJAHYONO EP | CUNDING LEVI | ABDUL RAHMAN

Pekerja Bakal Tagih Janji-janji Freeport

JAKARTA — Para pekerja PT Freeport Indonesia akan terus menagih janji manajemen menaikkan upah dan fasilitas lainnya setelah kesepakatan ditandatangani. "Kami belum berhenti dan akan terus memantau komitmen perusahaan," ujar juru bicara Serikat Pekerja Freeport, Juli Parorongan, kemarin.

Rabu lalu, manajemen Freeport dan serikat pekerja telah menyepakati kenaikan pembayaran upah sebesar US$ 2,9 per jam. Kenaikan upah yang disepakati masih jauh dari tuntutan para pekerja sebesar US$ 7,4 per jam. Dengan kesepakatan ini, upah pekerja dasar naik sebesar 24 persen pada tahun pertama dan 13 persen pada tahun kedua. Freeport juga berjanji memberikan peningkatan manfaat, seperti peningkatan tunjangan perumahan, bantuan pendidikan, dan tabungan pensiun.

Pada saat pertemuan, seluruh manajemen Freeport hadir, mulai Presiden Direktur Freeport Indonesia Armando Mihler hingga Presiden dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson. Proses mediasi dihadiri perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pekerja melakukan mogok kerja sejak 15 September. Mereka menuntut kenaikan upah dan perbaikan tunjangan.

Kenaikan upah kali ini tak berbeda dengan upah yang diterima saat ini sebesar US$ 2,1 per jam, hanya naik US$ 0,8 per jam. Padahal, kata Juli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan kenaikan upah dapat mencapai angka US$ 3,09 per jam. "Tapi kenyataannya tidak sampai segitu, masih jauh dari harapan."

Alasan menerima kesepakatan tak lain demi kelangsungan hidup 8.000 pekerja beserta keluarganya. Selama tiga bulan melakukan aksi, mereka tidak mendapat penghasilan. "Kawan-kawan butuh hidup," kata Juli. "Demi kemanusiaan, kami sepakati tawaran manajemen."

Juli menyatakan, para pekerja mulai aktif bekerja pada 17 Desember. "Kami langsung melakukan mobilisasi pekerja untuk ke lokasi tambang."

Juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, menyatakan, selain menyepakati kenaikan upah, manajemen setuju membayar satu kali bonus penandatanganan. Selain itu, Freeport berjanji tidak akan memberi sanksi bagi pekerja yang mogok. Penghasilan yang tertahan tiga bulan akan diberikan dalam upah standar baru.

Atas janji manajemen tersebut, serikat pekerja akan terus menagihnya. Perbaikan kehidupan pegawai, kata Juli, akan terus diperjuangkan. "Kali ini kami memang kalah dalam nilai tuntutan. Tapi ini masih awal perjuangan." ● ALI NY | GUSTIDHA BUDIARTIE

Heli Freeport Ditembak, Satu Terluka

Pesawat perintis tergelincir dan menewaskan pilot.

TIMIKA — Sebuah helikopter Hevilift Mil Mi-8 yang mengangkut 26 karyawan PT Freeport Indonesia ditembak orang tak dikenal di kawasan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Timika Papua, kemarin. Satu penumpang menderita luka-luka terkena serpihan peluru.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.20 WIT. Helikopter bernomor registrasi BER86 MHL yang dioperasikan PT Nyaman Air itu baru saja mengudara sekitar dua menit dan berada di ketinggian 600 kaki di atas Kampung Banti.

Tiba-tiba sebuah tembakan peluru mengenai jendela belakang hingga menembus langit-langit kabin heli buatan Rusia itu. "Ada dua lubang di jendela paling belakang," kata Kepala Polisi Udara Bandar Udara Moses Kilangin, Timika, Ajun Komisaris Muhammad Mukasib.

Helikopter yang dioperasikan tiga awak asal Rusia, yakni pilot Igor Knyazen, kopilot Vladinir Tskin, serta teknisi Sergey Aleksandrivch, itu bisa didaratkan di Bandara Moses Kilangin. Tapi seorang penumpang perempuan asal Filipina, Maria Jane Mather, terluka akibat serpihan peluru. Ia lantas dilarikan ke klinik Kuala Kencana, Timika.

Polisi masih menyelidiki insiden itu. Petugas dari Laboratorium Forensik

Kepolisian Resor Mimika tengah meneliti badan helikopter yang diparkir di hanggar Freeport tersebut. Belum bisa dipastikan siapa pelaku ataupun motif penembakan ini.

Helikopter itu disewa Freeport untuk mengangkut karyawan setelah penembakan liar marak beberapa waktu terakhir. Kawasan Kampung Banti dikenal rawan konflik antarwarga dan ancaman keamanan lainnya.

Masih di Papua, pesawat jenis PAC 750 XL yang dioperasikan Associated Mission Aviation tergelincir dan jatuh 400 meter di sekitar Lapangan Terbang Abmisibil, Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Pilot, bernama Arnold Burung, 54 tahun, tewas, sedangkan empat penumpang, yakni Yakob Uropmabin, Timotius Uropmabin, Ramli, dan Rady, menderita luka bakar.

Kecelakaan ini terjadi pukul 07.40 WIT pada saat pesawat bernomor PK-RCD itu mendarat setiba dari Bandara Sentani, Jayapura. Menurut Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Wachyono, pesawat itu kehilangan keseimbangan saat rodanya menyentuh landasan. "Pesawat ini hilang kendali sejauh satu kilometer sebelum kemudian masuk jurang di sebelah kiri landasan," kata dia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bhakti Singoyuda Gumay mengatakan kecelakaan ini terjadi pertama kalinya di Lapangan Terbang Abmisibil. Lapangan terbang itu, menurut dia, agak sulit dilintasi karena berada di ketinggian 5.900 kaki. Namun ia belum bisa menyimpulkan penyebab insiden maut tersebut.

● TJAHJONO E.P. (TIMIKA)| JERRY OMONA (SENTANI) | SUTJI DECILYA | FERY FIRMANSYAH

KORAN TEMPO
www.tempointeraktif.com
www.korantempo.com

FOTO: TONY HARTAWAN (TEMPO), DIOLAH

DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI DI KONGRES PAPUA



ISTANA TOLAK TEMUAN KOMNAS HAM

Tim Puslabfor menyisir lokasi kejadian.

JAKARTA — Kubu Istana menolak hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyimpulkan ada pelanggaran hak asasi dalam penyerbuan aparat terhadap peserta Kongres Papua III di Padang Bulan, Abepura.

Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, meminta Komnas tidak mudah menyimpulkan adanya pelanggaran hak asasi. "Kasus ini masih ditangani polisi," ujar dia kemarin.

Julian menantang Komnas HAM memaparkan lebih terperinci temuan itu. Kalau perlu menunjuk langsung personel aparat yang melakukan pelanggaran. Dia meminta Komnas tidak mengambil kesimpulan sumir. "Kecuali ada bukti valid dan otentik serta bisa dipertanggungjawabkan."

Komnas menyimpulkan, aparat melakukan pelanggaran hak asasi dalam kejadian penyerbuan terhadap peserta di Abepura pada 19 Oktober lalu. Dalam keterangan pers Jumat lalu, Komnas mengungkapkan adanya penyiksaan dan penembakan dalam peristiwa itu. Tiga orang tewas, yakni Demianus Daniel Kadepa, 23 tahun, Yakobus Samonsbara (48), dan Max Asa Yeuw (33). Tubuh mereka ditemukan di luar arena kongres.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menilai perlu dilakukan penyelidikan apakah kejadian di Abepura itu tindakan berlebihan atau hanya pertahanan (defensif). "Harus dilihat secara proporsional."

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengingatkan isu keamanan Papua menjadi ajang kepentingan kelompok strategis internasional. "Parameternya (melihat temuan Komnas) harus jelas karena implikasinya pada opini internasional," ujar anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat itu. Dia menegaskan, aparat keamanan harus berani menentukan sikap, "Siapa kawan dan siapa lawan NKRI."

Anggota Komnas HAM, Ridha Saleh, menegaskan, kesimpulan yang mereka ambil tidak main-main. Kesimpulan itu didukung oleh fakta dengan mewawancarai sejumlah saksi dan memverifikasinya. Apalagi ada masyarakat sipil yang meninggal akibat tembakan dan sayatan benda tajam. Dia membantah anggapan bahwa Komnas menyeret masalah ini ke panggung internasional.

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, mengatakan polisi telah mengirim tim dari Pusat Laboratorium dan Forensik ke Papua untuk melakukan pengusutan di lapangan. "Sekarang masih dilakukan penyisiran."

● MUNAWWAROH | IRA G | RINA W | ISWA S | PRIYANDOKO | RIKY F | SUDRA

PORTAL

IMAM YUNNI (TEMPO)



Lumayan, bisa untuk latihan....

SUBEKTI (TEMPO)



Pengunjuk rasa dari Relawan Perjuangan Demokrasi melakukan aksi di depan gedung PT Freeport Indonesia, Jakarta, kemarin. Massa menuntut perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini hengkang dari Papua, Indonesia.

Kegiatan Produksi Freeport Menurun Drastis

Dana pengamanan diberikan sukarela.

JAKARTA — Kegiatan produksi bijih emas dan tembaga PT Freeport Indonesia merosot tajam pascapemogokan karyawan. "Sekarang hanya 5 persen dari normal," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite kemarin.

Pada kondisi normal, Freeport mampu memproduksi bijih sebanyak 230 ribu ton per hari. Saat ini mereka hanya mampu memproduksi sekitar 11.500 ton per hari.

Selain mengalami penurunan produksi, Freeport masih menghentikan kegiatan pengolahan tambang. Akibatnya, perusahaan tak bisa menghasilkan konsentrat. Penghentian kegiatan pengolahan dilakukan akibat sabotase pipa sepanjang 120 kilometer. "Mereka mengumumkan kondisi *force majeure*."

Di samping potensi kerugian negara, pihak yang merugi akibat berhentinya pengolahan dan minimnya produksi adalah para pembeli luar negeri. Selama ini sekitar 70 persen hasil produksi Freeport diekspor ke Jepang, Eropa, dan lainnya. "Sisanya 30 persen diolah PT Smelting Gresik untuk kebutuhan dalam negeri," kata Thamrin.

Executive Vice President Freeport Indonesia Sinta Sirait mengatakan, bila kegiatan produksi Freeport berhenti total, negara bakal kehilangan potensi penerimaan dari pajak, royalti, dan dividen sebesar US$ 8 juta per hari. Selain itu, potensi kehilangan lainnya berasal dari dana kemitraan satu persen sebesar US$ 200 ribu. Sedangkan Freeport kehilangan potensi pendapatan sekitar US$ 19 juta per hari. "(Angkanya) tergantung harga emas dan tembaga."

Perihal pemberian dana kepada aparat keamanan, Thamrin mengatakan pemerintah hanya mengatur soal perlindungan yang wajib diberikan kepada obyek vital nasional. Perusahaan tambang mendapat perlindungan karena berperan cukup signifikan bagi negara." Itu ada pertimbangan khusus, karena dinilai strategis."

Perusahaan tambang dikategorikan sebagai obyek vital nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Energi tahun 2007. Sesuai dengan peraturan itu, perusahaan tambang mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah

Namun dia tidak dapat memastikan apakah dalam aturan itu dicantumkan soal pemberian dana untuk aparat keamanan. "Mungkin dapat ditanya ke Kementerian Pertahanan, yang pasti obyek vital itu harus dilindungi," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Indonesia Mining Association Tony Wenas, pemberian dana keamanan adalah kebijakan masing-masing perusahaan. "Kami sebagai asosiasi tidak ikut campur."

Manajer Senior Hukum Freeport Clementino Lamury mengatakan pemerintah menjamin keamanan perusahaan. Namun soal pemberian dana diberikan secara sukarela kepada aparat. "Namanya tuan rumah, lalu ada tamu yang menjaga rumah kami, sudah selayaknyalah," ujarnya.

Freeport, kata dia, dapat mempertanggungjawabkan soal pemberian dana kepada aparat keamanan. Clementino mencontohkan, dana keamanan sebesar US$ 14 juta pada tahun lalu mayoritas diberikan dalam bentuk sarana. "Sekitar 80 persen. Sisanya baru diberikan dalam bentuk uang yang diserahkan kepada unit keamanan." ● ALI NY | GUSTIDHA BUDIARTIE

KORAN TEMPO
www.tempointeraktif.com
www.korantempo.com



IKLAN

KPK DIMINTA USUT DUIT FREEPORT KE POLRI



Mereka bisa dianggap centeng perusahaan.

JAKARTA — Sejumlah pegiat antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dana bantuan PT Freeport ke polisi. Indonesia Police Watch (IPW) menilai KPK perlu menelisik duit US$ 14 juta per empat bulan dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. "KPK harus turun tangan. Duit itu dikategorikan suap, gratifikasi, atau bukan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane saat dihubungi kemarin.

Berdasarkan dokumen yang tercantum di situs PT Freeport Indonesia disebutkan bahwa perusahaan telah menggelontorkan duit yang nilainya setara dengan Rp 120 miliar. Kegunaan uang itu untuk infrastruktur pengamanan, makanan, tempat tinggal, pembelian bahan bakar, transportasi, perbaikan kendaraan, uang saku, dan program bantuan masyarakat.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo membenarkan adanya aliran dana itu. "Semua operasi dibiayai negara. Tapi, jika misalnya pihak yang diamankan memberikan uang makan, ya, langsung kepada anggota," ujarnya pekan lalu.

Neta mengatakan dana itu tergolong suap atau gratifikasi. Petinggi kepolisian penerima dana bisa terkena aturan tindak pidana korupsi. Selain aparat pemerintah, kata dia, pejabat PT Freeport bisa dituduh menyuap. "Mereka juga harus dibawa ke pengadilan," kata dia.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai polisi mestinya menolak gratifikasi. "Polisi itu alat negara, bukan alat perusahaan," ujarnya. "Kalau sampai menerima, itu gratifikasi, yang harus dilaporkan ke KPK. Karena itu, KPK jangan diam saja."

Bambang menilai sikap "mendua" kepolisian tidak terlepas dari ketidaktegasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Dalam Undang-Undang Polri tidak ada pasal yang secara tegas menyebutkan sumber pendapatan kepolisian hanya dari negara. "Sumber dana polisi itu seharusnya hanya dari anggaran negara," ujarnya. Komisi Kepolisian Nasional menganggap keliru Polri menerima dana dari perusahaan. "Polisi bisa dianggap centeng perusahaan. Ini dilematis bagi polisi," kata anggota Komisi Kepolisian, Novel Ali.

Juru bicara PT Freeport, Ramdani Sirait, mengatakan dana itu diberikan melalui pemerintah. "Detailnya silakan baca di *website* kami," kata dia. Hingga berita ini ditulis, KPK belum bisa dimintai konfirmasi. Para pemimpin KPK tidak mengangkat telepon saat dihubungi. Pesan pendek yang dikirim juga belum dibalas. Demikian juga juru bicara KPK, Johan Budi S.P., tak bisa dihubungi. ● ISMA S | MAHARDIKA S. H | RINA W | FRANSISCO R | RUSMAN P | SUKMA

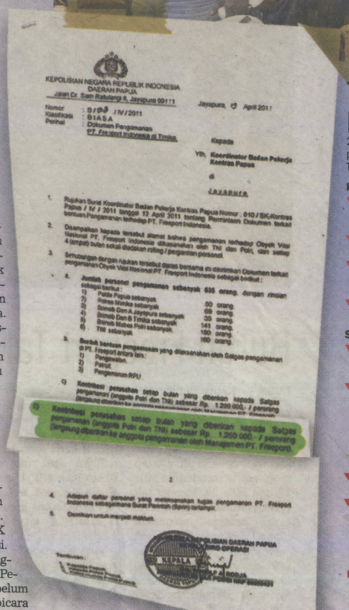

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA
Jalan Dr. Sam Ratulangi 5, Jayapura 99111

Jayapura, 13 April 2011

Nomor : B/[illegible] / IV / 2011
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Dokumen Pengamanan PT. Freeport Indonesia di Timika

Kepada
Yth. Koordinator Badan Pekerja Kontras Papua
di
JAYAPURA

1. Rujukan Surat Koordinator Badan Pekerja Kontras Papua Nomor : 010 / SK-Kontras Papua / IV / 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Permintaan Dokumen terkait bantuan Pengamanan terhadap PT. Freeport Indonesia.
2. Disampaikan kepada tersebut diatas bahwa pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional PT. Freeport Indonesia dilaksanakan oleh TNI dan Polri, dan setiap 4 (empat) bulan sekali diadakan rolling / pergantian personil.
3. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini disimkan Dokumen terkait pengamanan Obyek Vital Nasional PT. Freeport Indonesia sebagai berikut :
   a. Jumlah personil pengamanan sebanyak 635 orang, dengan rincian sebagai berikut :
      1) Polda Papua sebanyak : 50 orang
      2) Brimob Mimika sebanyak : 69 orang
      3) Brimob Den A Jayapura sebanyak : 35 orang
      4) Brimob Den B Timika sebanyak : 141 orang
      5) Brimob Kelas Polri sebanyak : 180 orang
      6) TNI sebanyak : 160 orang
   b. Bentuk bantuan pengamanan yang dilaksanakan oleh Satgas pengamanan PT. Freeport antara lain :
      1) Pengawalan,
      2) Patroli,
      3) Pengamanan Rapat.
   c. Kontribusi perusahan setiap bulan yang diberikan kepada Satgas pengamanan (anggota Polri dan TNI) sebesar Rp. 1.250.000,- / personil (langsung diberikan ke anggota pengamanan oleh Manajemen PT. Freeport).
4. Adapun daftar personil yang melaksanakan tugas pengamanan PT. Freeport Indonesia sebagaimana Surat Perintah dilampirkan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DAERAH POLISI PAPUA
[illegible]
KOMISARIS BESAR POLISI NRP [illegible]

Tembusan :
1. Kapolri di Jakarta
2. Kadiv Humas Polri di Jakarta
3. Kapolda Papua di Jayapura
4. Arsip

Buruh Freeport Abaikan Polisi
HALAMAN A2

Tak Ada Klausul Kucuran Dana

Pengamanan obyek vital oleh kepolisian dan militer memang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2004. Namun tidak ada klausul tentang pemberian uang dari pengelola obyek vital tersebut kepada Kepolisian RI maupun Tentara Nasional Indonesia. ● ISMA SAVITRI | PRIHANDOKO

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2004

- Obyek vital nasional adalah kawasan, bangunan, atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, serta sumber pendapatan negara strategis.
- Pengelola obyek vital nasional bertanggung jawab atas keamanan berdasarkan prinsip pengamanan internal.
- Polisi wajib memberi bantuan pengamanan berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman atau gangguan yang akan timbul.
- Dalam pengamanan, polisi boleh meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia.

SURAT POLDA PAPUA KEPADA KONTRAS

- Pengamanan obyek vital PT Freeport Indonesia dilakukan polisi dan TNI. Setiap empat bulan dilakukan pergantian aparat.
- Jumlah aparat 635 orang
  1. Polda Papua 50 orang
  2. Kepolisian Resor Mimika 69 orang
  3. Brigade Mobil Detasemen A Jayapura 35 orang
  4. Brimob Detasemen B Timika 141 orang
  5. Brimob Markas Besar Polri 180 orang
  6. TNI 160 orang
- Bentuk pengamanan berupa pengawalan, patroli, dan penjagaan lokasi.
- Kontribusi setiap bulan Rp 1.250.000 per orang diberikan langsung oleh manajemen Freeport.

"Pada 2010, PT Freeport Indonesia memberikan US$ 14 juta kepada Polri."
Juru bicara Freeport, **Ramdani Sirait,** Jumat lalu

"Yang penting akuntabilitasnya ada."
Kepala Kepolisian RI **Jenderal Timur Pradopo,** Jumat lalu

"Kesannya kurang baik, aparat menerima uang semacam itu."
Anggota Komisi Kepolisian Nasional, **Novel Ali,** kemarin

Jasa Tania
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk
Melayani Asuransi :
• Asuransi Kendaraan • Asuransi Property • Asuransi Pengangkutan
• Asuransi Kecelakaan Diri • Asuransi Konstruksi (CAR, EAR)
• Asuransi Kesehatan • Surety Bond
JT Care JT Oto Mobil JT GRIYA
SURETY BOND
Jenis Konstruksi & Non Konstruksi
Terjamin Keabsahannya dengan fasilitas
"VALIDASI ONLINE"
(021) 310 1850 (Hunting) www.jasatania.co.id
General Insurance & Surety Bond
IKLAN

RULLY KESUMA (TEMPO)

PENGANTAR: Damai tak kunjung datang di bumi Papua. Sejak September lalu, Papua diguncang unjuk rasa pekerja PT Freeport Indonesia. Tak sekadar menuntut kenaikan upah, aksi ini menyebabkan sejumlah nyawa melayang. *Tempo* menurunkan tiga tulisan sejak Senin mengenai sengkarut Freeport.

Membedah Isi Perut Grasberg

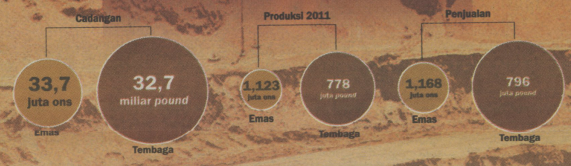

Bagian 2

MENANTI NEGOSIASI ROYALTI

> Pendapatan dari Freeport seperti buih di lautan.

JAKARTA — Wajah Viktor Beanal membeku. Dengan suara bergetar, ia meminta PT Freeport Indonesia menghentikan operasinya sementara waktu. "Kami ini pemilik ulayat. Atas nama pemilik ulayat, saya meminta operasi pertambangan Freeport dihentikan sementara," kata salah satu tokoh adat Amungme ini kepada *Tempo*.

Desakan itu disampaikan saat sejumlah buruh menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah, Oktober lalu. Upah yang dibayarkan Freeport dinilai tak sebanding dengan risiko para buruh.

Berbilang tahun Freeport mengeduk emas di pegunungan Erstberg dan Grasberg, Papua. Kontrak karya pertama antara pemerintah dan Freeport diteken pada saat Soeharto baru berkuasa pada 1967. Kontrak kembali diperpanjang pada 1991 hingga 30 tahun, plus masa opsi 2 kali 10 tahun. Operasi Freeport baru akan berakhir pada 2041. Perpanjangan kontrak kedua diteken pada masa pemerintahan Soeharto dengan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita.

Dalam perjanjian kontrak karya, Freeport sepakat membayar tiga jenis royalti, yaitu tembaga 3,5 persen, emas 1 persen, dan perak 1 persen. Namun jumlah royalti dinilai terlalu kecil. Pemerintah pun *ngotot* melakukan negosiasi ulang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, royalti emas adalah 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen.

Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Simon F. Sembiring mengatakan royalti yang disetor Freeport jauh lebih kecil dibanding yang berlaku di negara lain. Royalti emas, misalnya, negara lain mematok sekitar 5 persen dan tembaga 6 persen. "Bahkan setoran Freeport lebih kecil dibanding PT Aneka Tambang, yaitu 3,45 persen."

Menurut Simon, alotnya renegosiasi dengan Freeport karena perusahaan tambang asing itu selalu berlindung di balik asas *lex specialist*. Artinya, kontrak yang telah diikat tidak dapat diubah sekalipun ada pembaruan peraturan perundang-undangan.

Namun guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan doktrin *lex specialist* hanya berlaku untuk produk hukum yang sama dan mengatur hal yang sama. Menurut dia, undang-undang berlaku mutlak dibandingkan dengan kontrak karya, sehingga posisi undang-undang lebih kuat.

Simon menjelaskan, di kontrak karya yang diperpanjang pada 1991, tak ada satu pun pasal yang menyatakan bahwa kontrak tidak dapat diubah oleh para pihak. "Tidak ada pasal yang menyatakan tidak bisa renegosiasi, berarti tetap terbuka kemungkinan untuk duduk bersama," ujarnya.

Jika upaya renegosiasi *mentok*, Hikamhanto menyarankan pemerintah membawa sengketa itu ke sidang arbitrase. Posisi pemerintah dalam renegosiasi kontrak karya cukup kuat dan beralasan berdasarkan hukum internasional. Renegosiasi adalah mendudukkan para pihak bersama-sama dan menyepakati syarat-syarat serta ketentuan yang lebih adil. "Tidak bertentangan dengan prinsip menghormati kesucian kontrak atau *sanctity of contract*," ujarnya.

Selain menaikkan porsi royalti, penggiat kontrak asing dari Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara, meminta pemerintah mengamendemen Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Belied itu mengatur kepemilikan saham dalam perusahaan modal asing.

Menurut Marwan, amendemen ini bakal mewajibkan Freeport melakukan divestasi saham seperti yang dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). "Pemerintah bisa membeli saham Freeport secara bertahap hingga 51 persen."

Pemerintah, kata mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah ini, harus membatalkan Surat Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 415/A.6/1997. Surat itu berisi ketentuan yang membebaskan Freeport dari kewajiban divestasi.

Selama ini, Marwan melanjutkan, mayoritas saham berada di tangan Freeport sehingga pemerintah kesulitan melakukan kontrol. Akibatnya, selama 43 tahun Freeport tak pernah melaporkan keuntungan bersih yang diperolehnya.

Hingga kini Freeport McMoran tercatat menguasai 90,64 persen saham Freeport Indonesia dan sisanya, 9,36 persen, dikuasai PT Indocopper Investama.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport, pada semester pertama lalu, perusahaan menyetor kas pemerintah sebesar Rp 11,7 triliun. Namun jumlah itu dinilai tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. "Pendapatan dari Freeport seperti buih di lautan," kata Simon.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta agar negosiasi dengan Freeport dilakukan setelah unjuk rasa buruh mereda. "Kalau suasananya kondusif, kami akan negosiasi," ujarnya awal November lalu.

Adapun wakilnya, Widjadjono Partowidagdo, menyatakan, dalam renegosiasi, pemerintah tetap meminta royalti sebesar 3,75 persen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain royalti, Freeport menyetor pajak kepada pemerintah sebesar 35 persen. "Kalau digabungkan, jumlahnya menjadi 40 persen."

Tapi manajemen Freeport menanggapi dingin ajakan negosiasi kontrak yang diusung pemerintah itu. "Kami siap duduk bersama dengan pemerintah untuk membahas rencana itu," kata Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Sinta Sirait ketika ditemui di Bali pekan lalu.

● GUSTIDHA BUDIARTIE | THAHJONO EP | DEWI RINA

Produksi dan Penjualan 2006-2010

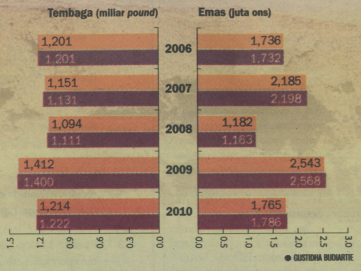

● GUSTIDHA BUDIARTIE

Peserta Kongres Papua Disiksa Dan Ditembak

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan aparat keamanan telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam kejadian penyerbuan terhadap peserta Kongres Papua III di Padang Bulan, Abepura, 19 Oktober lalu. Komnas juga menemukan adanya penyiksaan dan penembakan dalam peristiwa itu.

"Seharusnya tak ada penyerbuan kepada peserta kongres," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika memaparkan hasil investigasi Komnas di Jakarta kemarin.

Ifdhal mengatakan aparat menembakkan senjata ke udara untuk membubarkan peserta. Tapi, "Ada juga yang melepaskan tembakan secara horizontal," ujarnya.

Berdasarkan keterangan para saksi kepada Komnas, aparat bersenjata lengkap dari kesatuan Kepolisian RI dan TNI sudah bersiaga di luar arena kongres pada Rabu, 19 Oktober lalu, pukul 09.00 WIT. Lalu pada pukul 15.00, dua jam setelah kongres resmi berakhir, terdengar rentetan tembakan, yang membuat peserta yang masih berada di arena kongres berlari kocar-kacir.

Tiga orang tewas, yaitu Demianus Daniel Kadepa, 23 tahun, Yakobus Samonsbara (48), dan Max Asa Yeuw (33). Tubuh mereka ditemukan di luar arena kongres.

Demianus tewas akibat benturan keras di kepala. Sementara itu, Yakobus tewas dengan luka-luka di leher, kepala, dan mata tercungkil. Kesaksian keluarganya menyatakan kondisi jenazah terlalu parah sehingga terpaksa dimakamkan tanpa pakaian. Lalu Max tertembak dari arah pantat ke arah rusuk.

Serbuan itu juga melukai seorang ibu rumah tangga. Dia tertembak di paha dan sempat terjatuh ke parit.

Ifdhal mengatakan polisi juga menangkap 100 orang sebelum akhirnya menahan enam orang dengan tuduhan makar. Mereka yang ditangkap mengalami kekerasan fisik, "Yang merendahkan martabat manusia," katanya.

Menurut Ifdhal, kongres itu memiliki landasan karena meminta izin keramaian. Bahkan panitia mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi. Namun Presiden tak datang.

Masalahnya, setelah kongres selesai, ada pengumuman tentang Presiden dan perdana menteri. Pengumuman itulah, kata Ifdhal, yang menjadi alasan aparat membubarkan peserta. Tapi pembubaran itu dinilai tak sesuai dengan prosedur tetap.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Muhammad Taufik mengatakan, polisi akan menunggu laporan Komnas HAM dan belum bisa memberi jawaban. "Kami baru bisa menentukan langkah seperti apa yang akan kami ambil, setelah kami menerima dan menganalisis laporan itu," ujarnya.

Adapun Panglima Daerah Militer XVII Cenderawasih Mayor Jenderal Efri Triassunu membantah tudingan TNI terlibat dalam penyerbuan itu. "Kami berada di ring 2, mengamankan kantor-kantor pemerintahan, jaringan telekomunikasi, dan obyek vital lainnya," katanya kemarin. "Yang berada di lokasi kongres itu polisi."

● I WAYAN AGUS PURNOMO | FEBRIYAN | DEDDY S

Polisi Kirim Tim Pengawas Usut Duit Freeport

JAKARTA — Kepala Divisi Humas Kepolisian Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan polisi telah mengirim tim pengawas internal ke Papua untuk mengusut aliran duit dari PT Freeport Indonesia. Tim akan menelusuri uang yang diduga diterima oleh anggota kepolisian yang mengamankan area pertambangan Freeport di Papua. "Tim sudah berangkat," kata Saud di Jakarta kemarin.

Saud mengatakan tim ini berasal dari Inspektur Pengawasan Umum Polri. Saud tak mau menyebutkan ketua tim tersebut. Dia hanya mengatakan, polisi sedang menunggu hasil pemeriksaan tim yang berangkat ke Papua. "Pada prinsipnya kami siap diaudit transparan dan, kalau ada penyimpangan, kami siap bertanggung jawab," katanya.

Menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan adanya aliran duit pengamanan dari PT Freeport Indonesia selama 10 tahun, Saud menyatakan Polri tidak ingin berandai-andai dulu. "Soalnya, ini kan baru kata ICW. Pengawas internal kami baru bekerja," katanya.

Ketika ditanya bahwa PT Freeport sudah mengakui adanya aliran duit pengamanan, Saud masih enggan menjawab. "Ya, itu kan kata Freeport. Kan datanya belum ada," katanya.

Dia mengatakan polisi sebagai pejabat publik harus memperoleh data yang sebenarnya dengan jelas.

Ihwal kemungkinan memeriksa Kepala Kepolisian Daerah Papua yang pernah menjabat selama 10 tahun terakhir, Saud tetap enggan berkomentar. "Itu secara lengkap nanti setelah tim bekerja. Kan tim pengawas internal itu sudah komplet," katanya.

Dalam dokumen yang tercantum di situs PT Freeport Indonesia, disebutkan bahwa perusahaan telah menggelontorkan duit yang nilainya setara dengan Rp 120 miliar. Kegunaan uang itu untuk infrastruktur pengamanan, makanan, tempat tinggal, pembelian bahan bakar, transportasi, perbaikan kendaraan, uang saku, dan program bantuan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo membenarkan adanya aliran dana itu. "Semua operasi dibiayai negara. Tapi, jika misalnya pihak yang diamankan memberikan uang makan, ya, langsung kepada anggota. Apalagi dalam tugas dan situasi yang sulit," ujarnya pekan lalu. Juru bicara PT Freeport, Ramdani Sirait, mengatakan dana itu diberikan melalui pemerintah. "Detailnya, silakan baca di *website* kami," kata dia.

● INDRA WIJAYA

TJAHJONO EP ERANUS (TEMPO)

Pengantar: Damai tak kunjung datang di bumi Papua. Sejak September lalu, Papua diguncang unjuk rasa pekerja PT Freeport Indonesia. Tak sekadar menuntut kenaikan upah, aksi ini menyebabkan sejumlah nyawa melayang.

Melalui tulisan yang terdiri atas tiga bagian ini, *Koran Tempo* akan membedah sengkarut di tubuh Freeport.



TERSANDUNG UPAH BURUH

BAGIAN 1

Perundingan masih jauh dari kata sepakat.

JAKARTA — Keheningan pagi itu pecah oleh teriakan para pegawai PT Freeport Indonesia. Senin, 10 Oktober lalu, ribuan buruh bergerak menuju terminal bus pekerja Freeport di Gorong-gorong, Mile 26, Mimika, Tembagapura, Papua. Para pekerja menuntut kenaikan upah sebesar US$ 7,5 per jam bagi buruh golongan terendah.

Setelah sebulan berunjuk rasa, massa kembali meminta bertemu dengan para petinggi Freeport. Emosi mereka tersulut oleh iklan di sejumlah surat kabar yang mengumumkan manajemen PT Freeport mencari pegawai baru.

Itu memang bukan iklan biasa. Manajemen merekrut karyawan baru untuk menggantikan ribuan pegawai yang mogok kerja. Padahal Bupati Mimika, Klemen Tinal, telah meminta manajemen Freeport menyelesaikan konflik dengan pegawai sebelum menerima karyawan baru.

Situasi semakin tegang ketika salah satu petinggi Freeport menemui demonstran. Tiba-tiba bunyi tembakan menyalak. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa tak terhindarkan. Batu-batu beterbangan di udara, suasana pun memanas.

Sejak itu, bara terus menyala di Timika, Papua. Pangkal masalah berawal dari permintaan kenaikan upah oleh para pegawai. Ketua Serikat Pekerja PT Freeport, Sudiro, mengatakan kenaikan gaji pokok yang ditawarkan perusahaan tak sebanding dengan risiko pekerjaan. "Itu sebabnya, kami meminta perubahan upah. Dalam perjanjian kerja bersama 2007 sampai 2009, kenaikan upah 3 persen per tahun. Padahal inflasi hingga 7 persen," katanya kepada *Tempo*, pertengahan Oktober lalu.

Perusahaan juga menjanjikan bantuan perumahan hingga 40 persen. Namun bantuan itu tak kunjung datang.

Kisruh ini membuat produksi tambang Freeport menciut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, produksi tambang berkurang 5 persen. "Potensi kehilangan pendapatan sebesar US$ 8 juta per hari."

Negara diperkirakan bakal merugi US$ 8 juta per hari akibat potensi kehilangan dividen, royalti, dan pajak. Potensi lain yang menguap adalah dana kemitraan sebesar US$ 200 ribu. Pendapatan karyawan yang hilang akibat unjuk rasa mencapai Rp 577 ribu per hari. Kerugian juga dialami Freeport sekitar US$ 19 juta saban hari.

Tak mengherankan bila pemerintah mendorong agar negosiasi antara perusahaan dan karyawan segera mencapai kata sepakat. Jero menyatakan negosiasi hampir mencapai titik temu. Selisih besaran gaji pokok yang diminta kedua pihak makin kecil.

Gaji yang diminta karyawan, menurut Jero, adalah US$ 4 per jam. Sedangkan tawaran dari perusahaan naik dari semula US$ 2,1 menjadi US$ 3,09 per jam.

Namun Sekretaris Hubungan Industrial Serikat Pekerja Freeport, Tri Puspital, membantah. Serikat Pekerja berkukuh meminta kenaikan US$ 7,5 per jam dalam dua tahun mendatang. "Freeport juga belum menaikkan penawarannya menjadi US$ 3,09," katanya pekan lalu.

Berdasarkan hitungan Freeport, dengan upah US$ 7,5 per jam, seorang pegawai berpangkat terendah bisa menangguk penghasilan Rp 18-22,5 juta per bulan. Sedangkan dengan kenaikan gaji 30 persen seperti yang ditawarkan Freeport, karyawan membawa penghasilan sekitar Rp 11,7 juta per bulan.

Menurut Tri, kenaikan yang ditawarkan Freeport tidak berlaku bagi seluruh pekerja. Besarnya upah yang diterima saat ini adalah US$ 1 hingga US$ 2,5 per jam.

Juru bicara Freeport, Ramdani Sirait, mengatakan masalah gaji masih dinegosiasikan dengan pekerja. Selain itu, Freeport membawa kasus ini ke pengadilan hubungan industrial. "Perundingan masih berlangsung, sidang di pengadilan hubungan industrial juga masih berlangsung," katanya pekan lalu.

Sengketa upah rupanya masih jauh dari kata sepakat. Bentrokan terus terjadi. Jumat lalu, satu pekerja Freeport tewas setelah diserang kelompok bersenjata. ● DEWI RINA | TJAHJONO E.P | GUSTIDHA BUDIARTIE

Dua Tahun Kisruh

Penembakan di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia sudah berlangsung sejak 2009. Markas Besar Kepolisian RI mencatat jumlah korban terus bertambah.

Juru bicara Kepolisian RI, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, mengatakan pada 2009 terjadi sembilan kasus penembakan. Tiga orang tewas dan enam lainnya luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pada 2010, hanya ada satu kasus penembakan dengan tujuh korban luka-luka.

Tahun ini jumlahnya bertambah. Sejak Januari hingga 7 November lalu, ada sembilan kasus penembakan. Delapan korban tewas dan sembilan luka-luka. Jumat pekan lalu, penembakan kembali terjadi. Satu orang tewas.

Untuk mengamankan lokasi tambang, Freeport sudah menggelontorkan dana dalam jumlah besar. Indonesia Corruption Watch mendata dana yang mengucur ke Freeport sejak 2001 hingga saat ini berjumlah US$ 79,1 juta. ● ISHOMUDIN I JERRY OMONA

Bara Masih Menyala

Konflik meletup di Papua sejak September lalu. Sembilan nyawa melayang dan belasan lainnya luka-luka akibat bentrokan berdarah.

15 September
Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja menuntut kenaikan gaji.

10 Oktober
Seorang pekerja tewas dan puluhan lainnya terluka dalam unjuk rasa di Terminal Gorong-gorong, Timika. Akibatnya, sejumlah pekerja Freeport mengamuk.

14 Oktober
Penembakan terjadi lagi di area PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Tiga orang tewas dan empat lainnya terluka.

20 Oktober
Empat orang ditemukan tewas di perbukitan belakang Korem 172 PWY, Padang Bulan, Abepura, Jayapura. Mereka adalah Daniel Kadepa, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, Jayapura; dan Max Sasa Yewi. Dua lainnya adalah Yacob Samonsabra dan Aza Yeuw.

24 Oktober
Kepala Polsek Puncak Jaya AKP D. Awes tewas setelah ditembak orang tak dikenal di sekitar area Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua.

25 Oktober
Baku tembak terjadi lagi setelah jenazah Kapolsek Puncak Jaya diberangkatkan ke Jayapura. Papua berstatus siaga.

26 Oktober
Mobil patroli milik Freeport ditembaki di sekitar Mile 35. Mobil berisi anggota Brimob dan satuan keamanan Freeport.

9 November
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta sejumlah menteri terkait terjun langsung mengatasi konflik di Freeport.

6 November
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan kesepakatan antara manajemen Freeport dan karyawan tinggal selangkah lagi. Selisih upah yang diminta kedua pihak hanya berbeda tipis. Namun pernyataan itu dibantah serikat pekerja. Mereka menyatakan Freeport belum menaikkan penawaran upah dari US$ 2,1 menjadi US$ 3,09 per jam seperti yang diakui pemerintah.

● DEWI RINA | SUMBER: *KORAN TEMPO*